



PERATURAN DAERAH RPJMD
2010-2015
BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3, mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing.
- c. berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa dalam menentukan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat Kabupaten Bandung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM Daerah memuat visi, misi tujuan, strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum pembangunan daerah, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJM Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan RPJP Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Bandung.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan
13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
18. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2011 - 2015 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJM Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 - 2015.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Bandung mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya

Pasal 5

Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari :
BAB I : Pendahuluan

BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	: Analisis Isu Strategis
BAB V	: Penyajian Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
BAB VI	: Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VII	: Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	: Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	: Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJM Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian penting dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, dan program SKPD dalam menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPd.
- (4) RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (3) Merugikan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 , maka perubahan tersebut akan dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Beberapa hal yang belum di muat dalam Perda ini, akan dilaksanakan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2011

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2015

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar Kabupaten Bandung dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan global. RPJMD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

RPJMD sebagai satu bentuk perencanaan strategis disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010 – 2015 terdiri dari 5 Bab dan 12 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 :
Cukup jelas.

PASAL 2 :
Cukup jelas.

PASAL 3 :
Cukup jelas.

PASAL 4 :
RPJM Daerah Kabupaten Bandung mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung, dengan maksud agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup pembangunan nasional dan regional.

PASAL 5 :
Cukup jelas.

PASAL 6 :
Cukup jelas.

PASAL 7 :

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Bandung terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Bappeda Kabupaten Bandung mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bandung, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode berikutnya.

PASAL 8 :

Perubahan RPJMD dibuat apabila proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai hasil evaluasi dan pengendalian dan merugikan daerah serta terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional

PASAL 9 :

Cukup jelas

PASAL 10 (1) :

Pada bagian indikator kinerja program SKPD yang terdapat indikasi rencana program prioritas, beserta indikasi pendanaannya dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan yang terjadi pada tahun berkenaan.

PASAL 10 (2) :

Perubahan indikator kinerja program, beserta indikasi pendanaannya sesuai ayat (1) tidak merubah seluruh isi substansi lampiran Perda ini, tetapi akan mengubah pada bagian yang dianggap penting.

PASAL 11 :

Pada pelaksanaannya, apabila terjadi perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka perubahan tersebut dapat dicantumkan pada RKPDP sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

PASAL 12 :

Cukup jelas

PASAL 13 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11



DAFTAR ISI

BAB – I	
PENDAHULUAN	I – 1 s.d 6
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 1
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 4
1.4. Sistematika Penulisan	I – 4
1.5. Maksud dan Tujuan	I – 5
BAB – II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1 s.d 107
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II – 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II – 2
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II – 6
2.1.4. Aspek Demografis	II – 8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 11
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 11
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II – 18
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II – 23
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 24
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II – 24
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II – 76
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 91
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II – 91
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II – 93
2.4.3. Iklim Berinvestasi	II – 98
2.4.4. Sumber Daya Manusia	II – 106
BAB – III	
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III – 1 s.d 26
3.1. Kinerja Keuangan Daerah	III – 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III – 1
3.1.2. Neraca Daerah	III – 5
3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 12
3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran	III – 13
3.1.5. Analisis Pembiayaan	III – 14
3.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2006-2010	III – 17
3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III – 17
3.2.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III – 19
BAB – IV	
ANALISIS ISU STRATEGIS	IV - 1 s.d 31
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV – 1
4.1.1. Identifikasi Permasalahan	IV – 1
4.1.2. Identifikasi Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV – 8
4.2. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Lainnya	IV – 14
4.2.1. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi	IV – 14
4.2.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lain	IV – 15
4.3. Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah	IV – 17
4.4. Penelaahan RPJPD	IV – 22

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



BAB – V	
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V -1 s.d 10
5.1. Visi	V – 1
5.2. Misi	V – 3
5.3. Tujuan dan Sasaran	V – 8
BAB – VI	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI - 1 s.d 15
6.1. Analisis SWOT	VI – 1
6.2. Strategi	VI – 4
6.3. Arah Kebijakan	VI – 8
BAB – VII	
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII - 1 s.d 55
Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi	VII – 1
Misi 2 : Meningkatkan Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda	VII – 7
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Perdesaan	VII – 27
Misi 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	VII – 29
Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah	VII – 32
Misi 6 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing	VII – 40
Misi 7 : Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan	VII – 48
BAB – VIII	
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1 s.d 41
8.1. Prioritas Pembangunan RJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015	VIII – 1
8.2. Rencana Program Urusan SKPD 2010-2015	VIII – 2
8.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)Tahun 2010- 2015 Berdasarkan Misi	VIII – 3
BAB – IX	
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX - 1 s.d 43
BAB – X	
PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	X - 1 s.d 3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2009	II – 1
Tabel 2.2	Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung	II – 3
Tabel 2.3	Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung	II – 4
Tabel 2.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010	II – 8
Tabel 2.5	Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Bandung Tahun 2009	II – 11
Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung	II – 13
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung	II – 14
Tabel 2.8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bandung	II – 15
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan EKonomi Kabupaten Bandung per tahun 2007-2010	II – 16
Tabel 2.10	Pendapatan Perkapita Kabupaten Bandung per tahun 2007-2010	II – 16
Tabel 2.11	Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung per tahun 2007-2010	II – 16
Tabel 2.12	Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung (PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2010	II – 17
Tabel 2.13	Indikator Makro Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 17
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 s/d 2010 Kabupaten Bandung	II – 18
Tabel 2.15	Angka Melek Hurup tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bandung	II – 19
Tabel 2.16	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006 s.d Tahun 2010 Kabupaten Bandung	II – 20
Tabel 2.17	APM SD,SMP, SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 22
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 22
Tabel 2.19	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2010	II – 23
Tabel 2.20	Perkembangan Seni, budaya dan olah raga Tahun 2008 s.d 2009 Kabupaten Bandung	II – 23
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 24
Tabel 2.22	Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010	II – 25
Tabel 2.23	Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 26
Tabel 2.24	Rasio guru per kelas rata-rata terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 27
Tabel 2.25	Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 28
Tabel 2.26	Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 29
Tabel 2.27	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010	II – 30
Tabel 2.28	Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 31
Tabel 2.29	Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 31
Tabel 2.30	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 32
Tabel 2.31	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 33
Tabel 2.32	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 33

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



Tabel 2.33	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 34
Tabel 2.34	Jumlah Dokter di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 35
Tabel 2.35	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 35
Tabel 2.36	Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 36
Tabel 2.37	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2006 s.d. 2010	II – 37
Tabel 2.38	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung	II – 38
Tabel 2.39	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung	II – 39
Tabel 2.40	Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 40
Tabel 2.41	Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 41
Tabel 2.42	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 41
Tabel 2.43	Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung Per Satuan Penduduk Tahun 2006, 2009 - 2010	II – 42
Tabel 2.44	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 43
Tabel 2.45	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 44
Tabel 2.46	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 44
Tabel 2.47	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 45
Tabel 2.48	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 46
Tabel 2.49	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 46
Tabel 2.50	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2010	II – 47
Tabel 2.51	Presentase Penaatan Ketentuan Teknis dan Administrasi Usaha/Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup	II – 47
Tabel 2.52	Tabel Pengujian Air dan Udara	II – 48
Tabel 2.53	Prosentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT)	II – 49
Tabel 2.54	Tutupan vegetasi	II – 49
Tabel 2.55	Pendidikan Lingkungan Hidup tingkat dasar dan menengah di Kabupaten Bandung	II – 50
Tabel 2.56	Penerima Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2006-2010	II – 50
Tabel 2.57	Perolehan Nilai Program Adipura Tahun 2006-2010	II – 51
Tabel 2.58	Persentase Volume Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 52
Tabel 2.59	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 53
Tabel 2.60	Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009	II – 54
Tabel 2.61	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 55
Tabel 2.62	Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009	II – 56
Tabel 2.63	Rasio KDRT di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009	II – 56
Tabel 2.64	Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2009	II – 57
Tabel 2.65	Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 57

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



Tabel 2.66	Persentase Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tahun 2006 – 2010	II – 58
Tabel 2.67	Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Bandung Tahun 2009	II – 59
Tabel 2.68	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 60
Tabel 2.69	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bandung Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2006 s.d 2010	II – 60
Tabel 2.70	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010	II – 61
Tabel 2.71	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 62
Tabel 2.72	Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 62
Tabel 2.73	Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2010	II – 63
Tabel 2.74	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 64
Tabel 2.75	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2010	II – 64
Tabel 2.76	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 65
Tabel 2.77	Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 65
Tabel 2.78	Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 66
Tabel 2.79	Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 66
Tabel 2.80	Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 67
Tabel 2.81	Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2009	II – 68
Tabel 2.82	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 68
Tabel 2.83	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 69
Tabel 2.84	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 69
Tabel 2.85	Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 70
Tabel 2.86	Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 70
Tabel 2.87	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 71
Tabel 2.88	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 72
Tabel 2.89	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 72
Tabel 2.90	Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 73
Tabel 2.91	Pengelola Arsip Terpadu di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2009	II – 73
Tabel 2.92	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 74
Tabel 2.93	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 75
Tabel 2.94	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 75
Tabel 2.95	Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 76
Tabel 2.96	Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2010	II – 76
Tabel 2.97	Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 77
Tabel 2.98	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 79
Tabel 2.99	Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 80

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



Tabel 2.100	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 81
Tabel 2.101	Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 81
Tabel 2.102	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 82
Tabel 2.103	Jenis-jenis Potensi Energi Non Fosil Tahun 2006-2010	II – 83
Tabel 2.104	Rasio Elektrifikasi Tahun 2008-2010	II – 83
Tabel 2.105	Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2008 – 2010	II – 84
Tabel 2.106	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 84
Tabel 2.107	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 86
Tabel 2.108	Kontribusi Sektor Jasa-jasa (Termasuk Jasa Pariwisata) Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 -2010	II – 86
Tabel 2.109	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 – 2010	II – 87
Tabel 2.110	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 88
Tabel 2.111	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 88
Tabel 2.112	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 89
Tabel 2.113	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 90
Tabel 2.114	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 91
Tabel 2.115	Angka Konsumsi Rata-rata RT per Kapita Sebulan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2009 (Rupiah)	II – 92
Tabel 2.116	Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010 (dlm jutaan rupiah)	II – 93
Tabel 2.117	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 s.d. 2008 dan 2010	II – 94
Tabel 2.118	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Bandung Tahun 2009	II – 95
Tabel 2.119	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2009	II – 95
Tabel 2.120	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 96
Tabel 2.121	Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 97
Tabel 2.122	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2009	II – 97
Tabel 2.123	Angka kriminalitas di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 98
Tabel 2.124	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010	II – 99
Tabel 2.125	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2010	II – 100
Tabel 2.126	Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 100
Tabel 2.127	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 101
Tabel 2.128	Ketersediaan Perda di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	II – 101
Tabel 2.129	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kabupaten Bandung Tahun 2008 s.d. 2010	II – 106
Tabel 2.130	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010	II – 107
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Bandung	III – 4
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010	III – 7
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2006-2010 Kabupaten Bandung	III – 10
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bandung	III – 14
Tabel 3.5	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung	III – 15

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



Tabel 3.6	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung	III – 15
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bandung	III – 16
Tabel 3.8	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Bandung	III – 18
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015	III – 23
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015	III – 24
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	III – 25
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung	IV – 1
Tabel 4.2	Identifikasi RPJMD Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi	IV – 16
Tabel 4.3	Identifikasi Isu Strategis RPJMD	IV – 18
Tabel 4.4	Keterkaitan Hubungan Isu Strategis	IV – 22
Tabel 4.5	Hasil Telaahan RPJPD	IV – 24
Tabel 5.1	Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015	V – 1
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015	V – 8
Tabel 6.1	Identifikasi SWOT	VI – 1
Tabel 6.2	Perumusan Sasaran dan Strategi Pembangunan	VI – 10
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 1)	VII – 1
Tabel 7.2	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 2)	VII – 7
Tabel 7.3	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 3)	VII – 27
Tabel 7.4	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 4)	VII – 29
Tabel 7.5	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 5)	VII – 32
Tabel 7.6	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 6)	VII – 40
Tabel 7.7	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Misi 7)	VII – 48
Tabel 8.1	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, Berdasarkan Misi	VIII – 3
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011 – 2015	IX – 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Wilayah dengan Potensi Bencana di Kabupaten Bandung	II – 7
Gambar 2.2	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010	II – 10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur Di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010	II – 10
Gambar 2.4	Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010	II – 54



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat dan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, agar menyelaraskan pula pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Bandung dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan global. RPJMD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

RPJMD sebagai satu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan demikian RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang *good governance* dan *clean government*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 disusun berdasarkan capaian hasil pembangunan tahun 2006-2010 dan rencana capaian Program tahun 2011-2015. Keterkaitan hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Bandung dengan dokumen perencanaan lainnya, diamanatkan oleh Permendagri No 54 Tahun 2011, pasal 54 ayat 2 bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten / kota disusun dengan memuat tentang visi, misi dan program bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih; berpedoman kepada RPJPD kabupaten/kota dan, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

RPJMD Kabupaten Bandung sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan melalui peraturan presiden dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Jawa Barat serta rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dengan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan sesuai kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Sedangkan memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya dilakukan melalui penyesuaian pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain disekitarnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang penyusunan RPJM, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

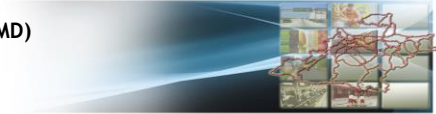
Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, baik melalui gambaran Kinerja Keuangan serta Kebijakan Pengelolaan Keuangan maupun Kerangka Pendanaan di masa lalu.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat deskripsi mengenai analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini menggambarkan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah di setiap Bidang Pembangunan daerah baik secara internal maupun eksternal. Analisis profil daerah diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan di setiap Bidang Pembangunan daerah sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Bidang Pembangunan daerah.



BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memberikan gambaran kejelasan arah, fokus, dan perspektif visi dan misi Pembangunan Daerah dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah. Disini dapat dilihat sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan sasaran yang akan dituju.

- Sistematis daftar isi dokumen rencana yang runtun mengikuti proses dan alur pemikiran strategis
- Rumusan visi Daerah yang SMART (*specific, measurable, achievable, reliable, timebound*)
- Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah
- Rumusan agenda program pembangunan yang jelas dan terarah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan, dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Di samping itu, disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab ini dijelaskan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN Kaidah PELAKSANAAN

Pada bab ini memuat tentang Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya diselenggarakan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional, arahan kebijakan provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang seterusnya menjadi pedoman di dalam penyusunan Renstra SKPD.

1.5. Maksud Dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan di atas, RPJMD ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun.

1.5.1. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 adalah:

1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha. Secara wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi
- e. Bagian Tengah : Kota Bandung dan Kota Cimahi

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi, secara geografis letaknya berada pada 6°49' – 7°18' Lintang Selatan dan diantara 107°14' – 107°56' Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah:

- a. Sebelah utara : Gunung Bukittunggul dengan tinggi 2.200m, Gunung Tangkuban parahu dengan tinggi 2.076 m (Wilayah Kabupaten Bandung Barat) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta.
- b. Sebelah selatan : Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

3. Klimatologi

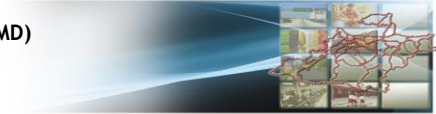
Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

4. Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, dan bangunan lainnya. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2009

No	Pemanfaatan Ruang	Luas Area	Persentase
1.	Tegal/Kebun	20.901 Ha	11,859%
2.	Ladang/Huma	12.650 Ha	7,178%
3.	Perkebunan PBS/PTP	27.350 Ha	15,519%
4.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	6.132 Ha	3,479%



No	Pemanfaatan Ruang	Luas Area	Persentase
5.	Tambak	- Ha	0%
6.	Kolam/Empang	980 Ha	0,556%
7.	Pengembalaan/Padang rumput	376 Ha	0,213%
8.	Sementara tidak diusahakan	8 Ha	0,005 %
9.	Pekarangan yang ditanami pertanian	6.381 Ha	3,621%
10.	Rumah/Bangunan/Halaman	18.090 Ha	10,264%
11.	Hutan Negara	37.733 Ha	21,410%
12.	Rawa-rawa	- Ha	0%
13.	Lainnya/jalan/sungai/tandus	9.426 Ha	5,348%
14.	Sawah	36.212 Ha	20,547%
J u m l a h		176.238,67 Ha	100%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (2009)

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Bandung memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Diantara komoditi-komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa komoditi yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi sampai ke tingkat propinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung. Khususnya komoditi unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditinya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Bandung, dan juga dapat dilihat dari cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi yang sama yang dihasilkan daerah lain.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung diantaranya dari sektor pertanian yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan wayang golek. Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat propinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional.

1. Pertanian

Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Sektor Pertanian sebagai salah satu *core business* dan *leading sector* di samping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi.

Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Bandung dan JABODETABEK dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk memosisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di wilayah tersebut.



Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura. Secara umum, Kabupaten Bandung sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran terbesar di Jawa Barat. Dari 79.065 hektar pertanaman sayuran di Jawa Barat pada tahun 2006, seluas 27.606 hektar di antaranya (atau 35%) adalah pertanaman sayuran di Kabupaten Bandung. Setelah pemekaran Kabupaten Bandung, maka budidaya hortikultura dipusatkan pengembangannya di kawasan Bandung Selatan dengan komoditas unggulan kentang, kubis, paprika, tomat, wortel, bawang merah dan cabe merah.

Kondisi budidaya Hortikultura di Kawasan Bandung Selatan walau pun telah mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi masih dirasakan belum optimal. Hal ini, dikarenakan penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh produk segar, sedangkan produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing.

2. Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan potensi perikanan, pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Ibum, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibum dan Kertasari. Sementara untuk perikanan, pengembangan dan intensifikasi difokuskan di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari, Cikancung, Ibum, Pacet, Paseh dan Cimaung.

Tabel 2.2

Kawasan/Sentra Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung

NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN		
		Kolam Air Tenang	Minapadi	Kolam Air Deras
1	Cileunyi	V	V	
2	Cimencyan			
3	Cilengkrang			
4	Bojongsoang	V	V	
5	Margahayu	V		
6	Margaasih			
7	Katapang	V	V	
8	Dayeuhkolot	V	V	
9	Banjaran		V	V
10	Pameungpeuk	V	V	
11	Pangalengan	V		
12	Arjasari	V	V	
13	Cimaung	V	V	V
14	Cicalengka	V		
15	Cikancung	V	V	
16	Rancaekek	V	V	
17	Ciparay	V	V	
18	Pacet	V	V	V
19	Kertasari			
20	Baleendah	V	V	
21	Majalaya	V	V	V



NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN		
		Kolam Air Tenang	Minapadi	Kolam Air Deras
22	Paseh	V	V	
23	Ibun	V	V	V
24	Soreang	V	V	V
25	Pasirjambu		V	
26	Ciwidey	V	V	
27	Rancabali	V		
28	Cangkuang	V	V	V
29	Nagreg	V	V	
30	Solokanjeruk	V	V	
31	Kutawaringin		V	

*) Keterangan : V = Potensi unggulan

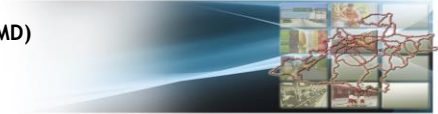
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010

Sementara untuk potensi peternakan, dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Kawasan/Sentra Unggulan Peternakan di Kabupaten Bandung

NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN				
		Sapi Perah	Sapi Potong	Domba	Ayam Ras Pedaging	Itik
1	Cileunyi		V	V	V	V
2	Cimendan		V	V	V	
3	Cilengkrang	V			V	
4	Bojongsoang				V	V
5	Margahayu					
6	Margaasih					
7	Katapang					
8	Dayeuhkolot					V
9	Banjaran			V	V	
10	Pameungpeuk			V	V	
11	Pangalengan	V		V	V	
12	Arjasari	V		V	V	V
13	Cimaung		V	V	V	V



NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN				
		Sapi Perah	Sapi Potong	Domba	Ayam Ras Pedaging	Itik
14	Cicalengka			V	V	V
15	Cikancung		V	V	V	V
16	Rancaekek			V	V	V
17	Ciparay			V	V	V
18	Pacet			V	V	V
19	Kertasari	V		V		
20	Baleendah			V	V	V
21	Majalaya			V	V	V
22	Paseh		V	V	V	V
23	Ibun			V	V	V
24	Soreang		V	V	V	V
25	Pasirjambu	V			V	V
26	Ciwidey	V			V	
27	Rancabali	V				
28	Cangkuang			V	V	
29	Nagreg			V	V	V
30	Solokanjeruk			V	V	V
31	Kutawaringin		V	V	V	

*) Keterangan : V = Potensi unggulan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010

3. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ



Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).

- Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).
- Kawasan Pariwisata Agro, meliputi :
 1. Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh;
 2. Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);
 3. Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;
 4. Agrowisata Herbal : Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu, Kecamatan Ciwidey.
- Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pangalengan).

4. Potensi Kawasan

Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang, kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah :

1. Kawasan Kota Baru Tegalluar;
2. Kawasan Industri Margaasih;
3. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat.

Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi.

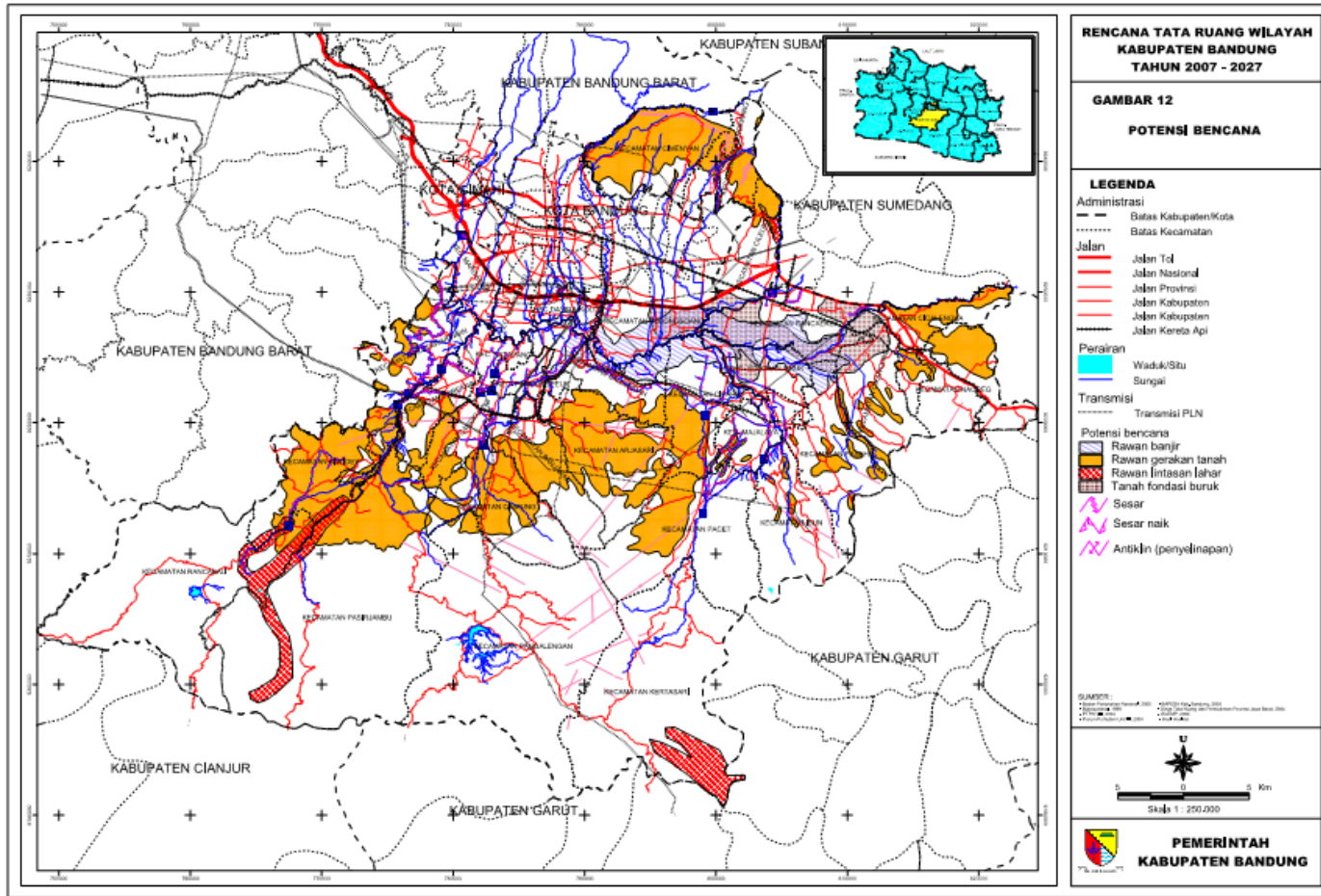
Kawasan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan kawasan industri non-politif. Sementara Pengembangan Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat diarahkan menjadi kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (*sport centre*) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Morfologi wilayahnya terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, bencana erosi dan lain sebagainya, yang bias di lihat dari gambar 2.1



Gambar 2.1 Wilayah dengan Potensi Bencana di Kabupaten Bandung



Sumber: PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007



Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian) menyebabkan sering terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi dan sedimentasi serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman juga menyebabkan terganggunya system jaringan irigasi dan drainase. Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung adalah timbulnya genangan dan kejadian banjir di beberapa titik terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot serta jalan terusan Kopo. Dibeberapa tempat terutama daerah perkotaan di Kabupaten Bandung, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. Sementara untuk penanganan limpasan air ke badan jalan, telah diupayakan pembangunan saluran drainase di 14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m, yang selanjutnya perlu perhatian terkait pemeliharaan saluran tersebut agar limpasan air ke badan jalan dapat diminimalkan.

Kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait dengan fungsi resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut diperparah dengan makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam menjaga lingkungan (terutama terkait dengan pengelolaan sampah).

2.1.4. Aspek Demografis

1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3,215,548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2010 di Kabupaten Bandung terdapat 104 penduduk laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah \pm 19 jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif.

Tabel 2.4
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
1	Ciwidey	37.149	35.877	73.026	4.846,92	21
2	Rancabali	24.129	23.571	47.700	14.837,00	4
3	Pasirjambu	40.863	39.095	79.958	23.957,64	4
4	Cimaung	37.029	35.981	73.010	5.500,02	9
5	Pengalengan	69.863	68.980	138.843	19.540,93	5
6	Kertasari	33.281	32.433	65.714	15.207,36	4
7	Pacet	52.276	48.840	101.116	9.193,96	15
8	Ibun	38.619	37.157	75.776	5.456,51	17
9	Paseh	61.278	58.292	119.570	5.102,90	26
10	Cikancung	42.132	40.090	82.222	4.013,63	22

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

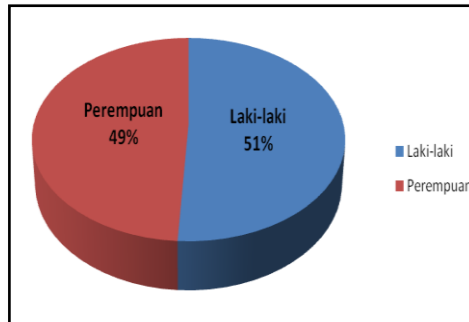


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
11	Cicalengka	55.336	53.775	109.111	3.599,23	30
12	Nagreg	24.406	23.459	47.865	4.930,29	12
13	Rancaekek	83.225	83.235	166.460	4.524,83	38
14	Majalaya	77.897	73.658	151.555	2.536,46	65
15	Solokanjeruk	39.364	38.193	77.557	2.400,66	33
16	Ciparay	77.123	73.888	151.011	4.617,57	31
17	Baleendah	114.472	109.852	224.324	4.155,54	66
18	Arjasari	46.290	44.743	91.033	6.497,79	18
19	Banjaran	58.390	56.085	114.475	4.291,79	37
20	Cangkuang	33.116	31.847	64.963	2.461,06	27
21	Pamengpeuk	35.439	34.127	69.566	1.462,32	50
22	Katapang	56.121	53.618	109.739	1.572,46	72
23	Soreang	53.427	50.961	104.388	2.550,68	43
24	Kutawaringin	46.056	43.488	89.544	4.730,26	20
25	Margaasih	68.799	65.611	134.410	1.834,49	82
26	Margahayu	60.830	59.545	120.375	1.054,33	129
27	Dayeuhkolot	57.982	55.352	113.334	1.102,91	105
28	Bojongsoang	53.308	50.668	103.976	2.781,22	40
29	Cileunyi	83.489	80.606	164.095	3.157,51	58
30	Cilengkrang	23.708	22.912	46.620	3.011,94	15
31	Cimencyan	53.226	50.986	104.212	5.308,33	26
TOTAL		1.638.623	1.576.925	3.215.548	176.238,67	19

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung 2010

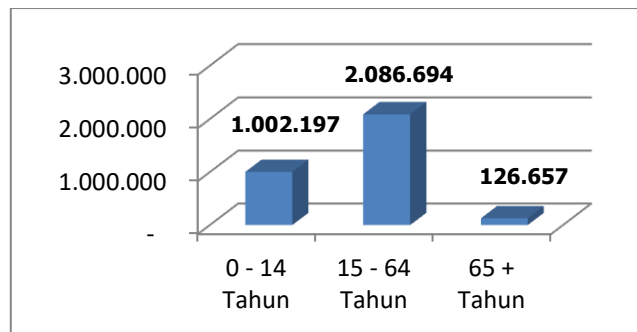


Gambar 2.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010



Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

Gambar 2.3
Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010



Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/ purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Tahun 2010 IPM Kabupaten Bandung mencapai 74,24; yaitu kontribusi dari indeks pendidikan 85,65; indeks kesehatan 74,00 dan indeks daya beli 63,07.

a. Pendidikan

Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM) adalah angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98,41 %, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 9,02 tahun.



Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi. Dari 2.607.246 penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 35,48 % hanya mempunyai ijazah SD/setara SD; 25,09 % mempunyai ijazah SLTP/setara SLTP; 19,96 % mempunyai ijazah SLTA/setara SLTA; 4,3 % mempunyai ijazah perguruan tinggi dan 15,17 % tidak/belum mempunyai ijazah.

Tabel 2.5
Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki) di Kabupaten Bandung Tahun 2009

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tdk/blm punya Ijazah	182.036	213.487	395.523	15,17
2	SD / setara SD	442.875	482.231	925.106	35,48
3	SLTP / setara SLTP	325.026	329.141	654.167	25,09
4	SLTA / setara SLTA	297.655	222.798	520.453	19,96
5	Perguruan tinggi	61.427	50.570	111.997	4,30
	Jumlah	1.309.019	1.298.227	2.607.246	100

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung, BPS 2009.

b. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator : angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH), angka kematian bayi (AKB), angka kematian kasar (AKK) dan status gizi. AHH merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia (IPM). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun, kematian anak di bawah 5 tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup.

AHH Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 69,40 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 69-70 tahun. Sedangkan AKB mencapai 34,75 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 34-35 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang mengidap infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman dan perawatan bayi yang kurang baik.

c. Daya Beli (purchasing power parity/PPP)

Indikator daya beli yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah konsumsi/pengeluaran riil perkapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah.

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun ini masih terhambat oleh lesunya sektor usaha sebagai dampak dari krisis global yang terjadi. Namun demikian kestabilan sektor moneter cukup membantu mempertahankan kemampuan daya beli yang berada pada kisaran sebesar Rp 572.910,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi.



a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Bandung 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46,09 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21,73 triliun. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disinyalir karena menurunnya tingkat produksi industri pengolahan terutama industri tekstil. Industri tekstil mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung, sehingga bergolaknya sektor ini cukup memberi pengaruh significant terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten Bandung.

Dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung (59,60 %). Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran; dan sektor pertanian; yaitu masing-masing berperan 16,91 % dan 7,5 %.



Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010
atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bandung

No	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian/Agriculture	1.338.248,71	7,59	1.371.807,74	7,34	1.424.992,98	7,24	1.502.003,39	7,32	1.602.050,01	7,37
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	234.570,64	1,33	245.205,27	1,31	255.888,73	1,30	269.782,12	1,31	282.922,47	1,30
3	Industry Pengolahan/Manufacturing Industry	10.838.753,39	61,44	11.478.643,51	61,44	12.110.396,65	61,56	12.519327,64	60,98	13.173.587,93	60,61
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply	323.121,39	1,83	344.912,14	1,85	361.439,39	1,84	376.034,30	1,83	396.026,30	1,82
5	Bangunan/Konstruksi/Construction	312.842,65	1,77	327.475,13	1,75	339.547,36	1,73	355.614,56	1,73	381.103,63	1,75
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restourant	2.625.092,43	14,88	2.819.715,80	15,09	2.994.763,36	15,22	3.211.263,99	15,64	3.474.795,78	15,99
7	Pengangkutan dan Komunikasi /Transport and Communication	717.582,16	4,07	765.192,41	4,10	795.218,84	4,04	843.661,61	4,11	892.448,05	4,11
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	393.169,22	2,23	419.515,28	2,25	436.277,89	2,22	451.138,21	2,20	474.864,56	2,18
9	Jasa-jasa/Services	856.789,53	4,86	911.462,79	4,88	955.207,67	4,86	1.000.817,32	4,87	1.056.862,46	4,86
	Total	17.640.170,12	100	18.683.930,07	100	19.673.732,87	100	20.529.643,24	100	21.734.661,19	100



Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010
atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bandung

No.	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian/Agriculture	2.228.624,62	7,57	2.465.321,20	7,40	2.753.632,27	7,19	3.013.007,10	7,36	3.471.661,92	7,53
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	368.568,14	1,25	419.179,42	1,26	468.303,79	1,22	526.035,13	1,28	580.783,81	1,26
3	Industry Pengolahan/Manufacturing Industry	17.876.119,11	60,74	20.154.147,70	60,49	23.275.745,49	60,79	24.565.562,89	60,00	27.471.535,02	59,60
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply	524.707,23	1,78	588.412,88	1,77	642.658,73	1,68	674.520,69	1,65	741.188,33	1,61
5	Bangunan/Konstruksi/Construction	506.056,81	1,72	571.271,13	1,71	648.394,06	1,69	696.720,83	1,70	764.990,68	1,66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Resto	4.432.799,58	15,06	5.112.043,54	15,34	6.005.197,92	15,68	6.780.385,10	16,56	7.796.200,55	16,91
7	Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Comm	1.360.838,71	4,62	1.566.528,90	4,70	1.766.609,79	4,61	1.795.161,77	4,38	1.933.148,22	4,19
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	634.303,86	2,16	721.566,11	2,17	792.877,54	2,07	820.502,95	2,00	898.354,49	1,95
9	Jasa-jasa/Services	1.499.027,98	5,09	1.721.159,87	5,17	1.936.315,52	5,06	2.069.321,52	5,05	2.434.375,72	5,28
	Total	29.431.046,04	100	3.319.630,75	100	38.289.735,11	100	40.266.697,29	100	46.092.238,74	100



Tabel 2.8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010
atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Bandung

No.	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	Pertanian/Agriculture	7,57	7,59	7,40	7,34	7,19	7,24	7,36	7,32	7,53	7,37
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,25	1,33	1,26	1,31	1,22	1,30	1,28	1,31	1,26	1,30
3	Industry Pengolahan/Manufacturing Industry	60,74	61,44	60,49	61,44	60,79	61,56	60,00	60,98	59,60	60,61
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply	1,78	1,83	1,77	1,85	1,68	1,84	1,65	1,83	1,61	1,82
5	Bangunan/Konstruksi/Construction	1,72	1,77	1,71	1,75	1,69	1,73	1,70	1,73	1,66	1,75
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restaurant	15,06	14,88	15,34	15,09	15,68	15,22	16,56	15,64	16,91	15,99
7	Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication	4,62	4,07	4,70	4,10	4,61	4,04	4,38	4,11	4,19	4,11
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	2,16	2,23	2,17	2,25	2,07	2,22	2,00	2,20	1,95	2,18
9	Jasa-jasa/Services	5,09	4,86	5,17	4,88	5,06	4,86	5,05	4,87	5,28	4,86
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE Kabupaten Bandung Tahun 2010 mencapai 5,88 %. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 8,21 %. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa yaitu masing-masing yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,66 %; 5,24 %; 5,32%; 7,17%; 5,26% serta 5,6 %.

Sektor ekonomi lainnya seperti : sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan di bawah 6%.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan EKonomi Kabupaten Bandung per tahun
2007-2010

Indikator	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,92%	5,30%	4,34%	5,88%

c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 11,16 % yaitu dari Rp 13.061.260,00 (Tahun 2009) menjadi Rp 14.519.530,00 (Tahun 2010), sedangkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 5,21 %, yaitu dari Rp 6.507.360,00 (Tahun 2009) menjadi Rp 6.846.640,00 (Tahun 2010). Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.15.198.351,99.

Tabel 2.10
Pendapatan Perkapita Kabupaten Bandung per tahun
2007-2010

Indikator	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	11.141.416,22	12.457.624,98	13.061.263,91	14.519.530

d. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi PDRB di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar yaitu 5,66 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3,15 %. Kenaikan tingkat inflasi terjadi hampir di seluruh sektor perekonomian. Kenaikan tingkat inflasi terbesar terjadi pada sektor pertanian sebesar 8,03%, untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,26%; sektor jasa-jasa 6,05%; dan untuk sektor lainnya masih dibawah 6%.

Tabel 2.11
Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung per tahun
2007-2010

Indikator	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Inflasi PDRB	6,89%	9,11%	3,15%	5,66%



Tabel 2.12
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung
(PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2010

No.	Sektor	PDRB (juta rupiah)		Kontribusi/ Peranan NTB (%)	LPE ADH Konstan (%)	Tingkat Inflasi (%)
		ADH Berlaku	ADH Konstan			
1.	Pertanian	3.471.661,92	1.602.050,01	7,53	6,66	8,03
2.	Pertambangan dan Penggalian	580.783,81	282.922,47	1,26	4,87	5,28
3.	Industri Pengolahan	27.471.535,02	13.173.587,93	59,60	5,24	5,59
4.	Listrik, Gas dan Air	741.188,33	396.026,30	1,61	5,32	4,34
5.	Bangunan	764.990,68	381.103,63	1,66	7,17	2,46
6.	Perdagangan, Hotel & restoran	7.796.200,55	3.474.795,78	16,91	8,21	6,26
7.	Angkutan dan Komunikasi	1.933.148,22	892.448,05	4,19	5,78	1,80
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	898.354,49	474.864,56	1,95	5,26	4,02
9.	Jasa-jasa	2.434.375,72	1.056.862,46	5,28	5,60	6,05
PDRB		46.092.238,74	21.734.661,19	100	5,88	5,66

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2010.

Secara umum indikator makro di Kabupaten Bandung 2006-2010 dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Indikator Makro Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No	Indikator	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.000	3.127.008	3.172.860	3.215.548
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,98%	3,15 %	2,93 %	1,47 %	1,35 %
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,92 %	5,30%	4,34%	5,88%
4	Inflasi PDRB	7,39%	6,89%	9,11%	3,15%	5,66%
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,44	41.201.900,67	46.092.238,7 2
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,54	20.527.539,56	21.734.661,1 9
7	Jumlah Keluarga Miskin		184.638	185.064	186.631	185.064
8	Laju Pertumbuhan Investasi			3,69%	4,73%	7,14 %
9	Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	10.134.620	11.141.416,22	12.457.624,98	13.061.263,91	14.519.530
10	IPM	70,11	71,88	72,5	73,39	74,24
11	Indeks Pendidikan	84,44	84,9	85,58	85,61	85,65
12	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	8,39	8,58	8,86	8,87	9,02
13	Angka Melek Huruf	98,70	98,75 %	98,84 %	98,87%	98,41 %



No	Indikator	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
14	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,96	67,33	68,42	68,94	69,40
15	Indeks AHH	69,97	71,50	72,36	73,23	74,00
16	Indeks Daya Beli	55,91	59,25	59,55	61,31	63,07
17	Daya Beli (ribuan rupiah)	541,930	556,39	557,68	565,32	572,91

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2006 – 2010 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang berangsur meningkat.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Angka Melek Huruf

Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran RLS dan AMH menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan RLS dan AMH. Peningkatan signifikan AMH dan RLS terjadi di daerah/wilayah yang berkarakter urban, sementara kondisi di wilayah rural, akibat berbagai sebab mengalami perlambatan.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), bahkan AMH tahun 2010 merupakan angka terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 s/d 2010
Kabupaten Bandung

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	3.545.469	2.220.802	2.173.926	2.243.466	2.178.158
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	3.100.533	3.170.135	2.199.414	2.269.104	2.213.351
3	Angka Melek Huruf	98,70	98,75	98,84	98,87	98,41

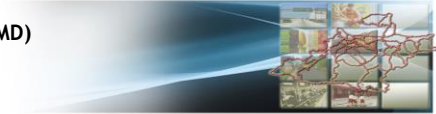
Sumber: Suseda BPS Kabupaten Bandung

Sementara gambaran angka melek huruf per kecamatan selama tahun 2009 -2010, dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.15
Angka Melek Hurup tahun 2009 - 2010
Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Angka Melek Hurup Tahun 2009	Angka Melek Hurup Tahun 2010
1	ARJASARI	96,44	96,51
2	BALEENDAH	99,52	98,93
3	BANJARAN	99,31	98,21
4	BOJONGSOANG	98,15	98,90
5	CANGKUANG	97,93	98,74
6	CICALENGA	98,98	98,92
7	CIKANCUNG	98,88	98,22
8	CILENGKRANG	97,74	97,54
9	CILEUNYI	99,43	99,16
10	CIMAUNG	99,44	96,55
11	CIMENYAN	99,27	98,22
12	CIPARAY	99,24	98,20
13	CIWIDEY	99,05	98,06
14	DAYEUHKOLOT	99,57	99,58
15	IBUN	98,40	96,82
16	KATAPANG	99,83	99,22
17	KERTASARI	97,07	97,17
18	KUTAWARINGIN	96,00	97,79
19	MAJALAYA	98,88	98,20
20	MARGAASIH	99,27	99,04
21	MARGAHAYU	99,66	99,77
22	NAGREG	98,76	98,19
23	PACET	99,13	97,08
24	PAMEUNGPEUK	98,27	99,08
25	PANGALENGAN	98,36	97,20



No	Kecamatan	Angka Melek Hurup Tahun 2009	Angka Melek Hurup Tahun 2010
26	PASEH	98,67	97,46
27	PASIRJAMBU	98,88	98,82
28	RANCABALI	98,91	97,87
29	RANCAEKEK	99,16	99,21
30	SOLOKANJERUK	99,07	98,63
31	SOREANG	99,39	99,28

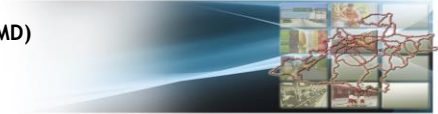
Sumber: Suseda BPS Kabupaten Bandung

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tingginya kontribusi indeks pendidikan dipengaruhi oleh dua komponen yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Hurup, setiap tahunnya ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa RLS pada tahun 2006 sebesar 8.39, tahun 2007 sebesar 8.58 atau naik 0.19 dari tahun sebelumnya, tahun 2008 sebesar 8.86 atau naik 0.28, tahun 2009 sebesar 8,87 atau naik 0.01 dan pada tahun 2010 sebesar 9.02 atau naik 0,15, demikian pula AMH pada tahun 2006 sebesar 98.68, tahun 2007 sebesar 98.71 atau ada kenaikan sebesar 0.03, tahun 2008 sebesar 98.84 atau ada kenaikan sebesar 0,13, pada tahun 2009 sebesar 98,87 atau ada kenaikan sebesar 0.03, dan untuk tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,46 dari tahun 2009. Berikut gambaran rata-rata lama sekolah dari tahun 2006 sampai dengan 2010 per Kecamatan di Kabupaten Bandung:

Tabel 2.16
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2006 s.d Tahun 2010
Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1	ARJASARI	9,43	9,47	9,51	9,52	8,04
2	BALEENDAH	9,14	9,21	9,28	9,29	9,65
3	BANJARAN	7,92	8,05	8,09	8,10	9,45
4	BOJONGSOANG	10,62	10,73	10,77	10,77	10,39
5	CANGKUANG	7,37	7,57	7,59	7,59	9,26
6	CICALENGKA	9,36	9,40	9,45	9,46	9,33
7	CIKANCUNG	7,87	7,90	7,93	7,93	7,98
8	CILENGKRANG	7,98	8,05	8,06	8,06	9,36
9	CILEUNYI	10,09	10,18	10,23	10,24	10,44
10	CIMAUNG	8,10	8,10	8,12	8,13	7,90
11	CIMENYAN	9,16	9,19	9,22	9,22	9,42



No	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
12	CIPARAY	9,15	9,20	9,27	9,28	9,01
13	CIWIDEY	7,42	7,97	8,00	8,00	7,73
14	DAYEUKHOKLOT	10,39	10,49	10,54	10,54	10,49
15	IBUN	8,45	8,50	8,53	8,54	7,48
16	KATAPANG	9,83	9,99	10,05	10,06	9,51
17	KERTASARI	6,66	6,74	6,76	6,76	6,87
18	KUTAWARINGIN		7,24	7,27	7,27	7,72
19	MAJALAYA	8,94	9,03	9,08	9,09	8,62
20	MARGAASIH	9,94	9,99	10,04	10,04	9,48
21	MARGAHAYU	10,98	11,03	11,08	11,09	11,11
22	NAGREG	8,91	8,94	8,96	8,97	8,21
23	PACET	8,51	8,62	8,67	8,67	7,50
24	PAMEUNGPEUK	9,51	9,56	9,58	9,59	9,65
25	PANGALENGAN	8,05	8,09	8,13	8,14	7,68
26	PASEH	7,83	7,96	8,00	8,00	7,76
27	PASIRJAMBU	7,49	7,64	7,66	7,67	7,89
28	RANCABALI	7,40	7,46	7,48	7,48	7,19
29	RANCAEKEK	10,11	10,16	10,23	10,24	10,09
30	SOLOKANJERUK	7,72	7,76	7,79	7,79	8,55
31	SOREANG	7,88	8,09	8,13	8,13	9,37

Sumber: IPM BPS Kabupaten Bandung

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bandung dari tiap jenjang pendidikan meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan terutama pada jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut terjadi, karena adanya krisis ekonomi yang berpengaruh pada tingginya angka drop out (DO). Kondisi tersebut didukung oleh kurang meratanya kesempatan penduduk di pedesaan dalam mengakses pendidikan. Hal ini kemungkinan karena gencarnya promosi program pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh bermacam-macam kucuran dana bantuan pendidikan mulai terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gambaran mengenai angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Bandung, tersajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.17
APM SD,SMP, SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

Tahun	Jenjang Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMA	PT
2006	8,80	97,45	69,38	22,02	5.24
2007	12,25	98,12	69,84	23,60	6.62
2008	11,11	98,20	70,35	24,66	1.49
2009	19,41	98,42	70,55	37,81	6.20
2010	21,10	98,64	73,83	39,36	10.44

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2006 – 2010

Selain APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukkan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kabupaten Bandung dari tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Berikut ini gambaran mengenai APK di Kabupaten Bandung:

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

TAHUN	Jenjang Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMA	PT
2006	13,99	110,14	89,12	30,91	7.78
2007	16,96	110.36	91,02	34,26	8.88
2008	14,67	103.25	91,45	36,03	13.59
2009	25,63	103.32	91,55	48,74	8.24
2010	25,26	104,31	101,22	54.04	13.57

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010/2011

d. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 53,44%. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender, TPAK perempuan hanya mencapai 35,72 % relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai 70,56 %. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.



Berkaitan hal di atas, kesempatan kerja mencapai 89,80 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,84 % yang pada umumnya didominasi oleh perempuan sebesar 19,12 %.

Tabel 2.19
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2010

No	Jenis Kelamin	Capaian (%)		
		TPAK	Kesempatan Kerja	Pengangguran
1	Laki-laki	70,56	94,16	5,84
2	Perempuan	35,72	80,88	19,12
	Jumlah	53,44	89,80	10,20

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, suseda 2010.

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor pertanian mencapai 21,87 %, pada sektor industri 29,87 %, perdagangan 18,75 %, jasa 12,49 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 17,02 %.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan aubade, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan Lomba Gerak Jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, Tes Kesegaran Jasmani bagi SMP dan SMA. Tahun 2006 - 2010 penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar SD, SMP, SMA/SMK yang terdiri dari beberapa cabang olahraga, penyelenggaraan pembinaan teknis personal, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana. kegiatan Porseni SD, SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani Guru olahraga, penyelenggaraan lari 10K, penyelenggaraan gerak jalan santai, penyelenggaraan TKJ Tahun 2006-2010, kegiatan POPDA SD, SMP, SMA / SMK penyelenggaraan lari 10 K, kegiatan jalan santai, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani SMP dan SMA.

Tabel 2.20
Perkembangan Seni, budaya dan olah raga Tahun 2008 s.d 2009
Kabupaten Bandung

No	Capaian Pembangunan	2008	2009
1	Jumlah grup Kesenian	608	803
2	Jumlah gedung Kesenian	-	-
3	Jumlah klub Olah raga per 10.000 penduduk	1,95	3,96
4	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	1,129	1,2

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu : Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, yaitu :

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	325.867 Orang	366.437 Orang	349.548 Orang	356.555 Orang	400.917 Orang
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	376.117 Orang	397.631 Orang	456.903 Orang	400.438 Orang	402.631 Orang
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	86,64%	92,16%	76,50%	89,04%	99,57%
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	144.052 Orang	100.917 Orang	105.494 Orang	106.608 Orang	154.751 Orang
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	172.239 Orang	181.304 Orang	198.798 Orang	206.499 Orang	190.535 Orang
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	83,63%	55,66%	53,07%	51,63%	81,22%



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 thn	53.288 Orang	40.418 Orang	46.102 Orang	46.621 Orang	71.186 Orang
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	166.169 Orang	171.24 Orang	187.292 Orang	178.17 Orang	171.552 Orang
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	32,07%	23,60%	24,62%	26,17%	41,50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun (2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010)

- **Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

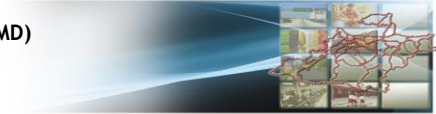
Selama kurun waktu 2006-2010 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pada tahun 2010, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 : 257,75. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 258 siswa.

Berbeda dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.22
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	1576	1562	1547	1553	1593
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	376.117	397.631	456.903	400.438	402.631
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	1 : 238,65	1 : 254,57	1 : 295,35	1 : 257,85	1:252,75
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah sekolah	342	349	401	411	473



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	172.239	181.304	198.798	206.499	190.535
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun	1 : 503,63	1 : 519,5	1 : 495,76	1 : 502,43	1:402,82
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah sekolah	207	219	238	250	253
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	166.169	171.240	187.292	178.170	171.552
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 - 18 Tahun	1 : 802,75	1 : 781,92	1 : 786,94	1 : 712,68	1:678,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

- **Rasio guru/murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Selama kurun waktu tahun 2006-2009 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bandung untuk seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK per 10.000 jumlah murid mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2007 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2007 rasio ketersediaan guru SD/MI mencapai 331,89 dan pada tahun 2006 mencapai 334,48. Demikian pula rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007, di mana pada tahun 2008 rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK mencapai 948,04 dan pada tahun 2007 mencapai 978,39.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.23
Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	12.669	13.893	15.159	15.936	14.363
1.2.	Jumlah Murid	378.765	418.597	403.247	410.245	419.990
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 29,89	1 : 30,13	1 : 26,6	1 : 25,74	1:29,24
2	SMP/MTs.					



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
2.1.	Jumlah Guru	8.858	8.667	9.794	10.003	9.694
2.2.	Jumlah Murid	183.265	147.277	143.328	143.411	192.851
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 20,69	1 : 17	1 : 14,63	1 : 14,34	1:19,89
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Guru	5.222	5.740	6.397	6.970	6.370
3.2	Jumlah Murid	74.953	58.668	67.476	69.799	123.027
3.3	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 14,35	1 : 10,22	1 : 10,55	1 : 10,12	1:19,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

- **Rasio guru/murid per kelas rata-rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2010, rasio guru/kelas SD/MA terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12 tahun di Kabupaten Bandung adalah 1 : 1,48 : 43,44. Interpretasi dari angka di atas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh 1,48 ≈ 1 orang guru, dimana kelas tersebut terdiri atas 43,44 ≈ 43 murid SD.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.24
Rasio guru per kelas rata-rata terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	12.669	13.893	15.159	15.936	14.363
1.2.	Jumlah Kelas	11.142	12.544	11.724	11.474	9668
1.3.	Rasio Guru/Kelas	1 : 1,14	1 : 1,11	1 : 1,29	1 : 1,39	1:1,48
1.4.	Jumlah Murid	378.765	418.597	403.247	410.245	419.990
1.5.	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 34	1 : 33	1 : 34	1 : 36	1 : 43
1.6.	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1 : 1,14 : 34	1:1,11:33,37	1:1,29:34,4	1:1,39:35,75	1:1,48:43,44



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	8.858	8.667	9.794	10.003	9.694
2.2	Jumlah Kelas	2.978	3.316	3.389	3.763	3.441
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 2,97	1 : 2,61	1 : 2,89	1 : 2,66	1:2,8
2.4	Jumlah Murid	183.265	147.277	143.328	143.411	192.851
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 62	1 : 44	1 : 42	1 : 38	1 : 56
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:2,97:61,54	1:2,61:44,41	1:2,89 :42,3	1:2,66:38,11	1:2,8:56
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Guru	5.222	5.740	6.397	6.970	6.370
3.2	Jumlah Kelas	1.111	1.647	1.837	2.093	1.883
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 4,70	1 : 3,49	1 : 3,48	1 : 3,33	1:3,38
3.4	Jumlah Murid	74.953	58.668	67.476	69.799	92.712
3.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 67	1 : 36	1 : 37	1 : 33	1 : 49
2.5	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:4,70:67,46	1:3,49:35,62	1:3,48:36,73	1:3,33:33,35	1:3,38:49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

- **Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik**

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2009, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI baru mencapai 55,28 %. Jumlah ini meningkat 6,4 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 48,88 %. Demikian pula ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MS/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008, yaitu masing-masing meningkat sebesar 1,28 % dan 1,89 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.25
Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	4.115	5.910	5.029	5.048	3.238*
1.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	9.661	8.376	10.288	9.132	4.633*



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.3.	Persentase	42,59	70,56	48,88	55,28	57,21
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	1.884	1.935	2.427	2.860	2.542*
2.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	2.686	2.851	3.429	3.969	2.423*
2.3.	Persentase	70,14	67,87	70,78	72,06	78,91
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah ruang kelas kondisi baik	1.130	1.462	1.254	1392	1.167*
3.2	Jumlah seluruh ruang kelas	1.476	1.731	1.740	1.882	1.380*
3.3	Persentase	76,56	84,46	72,07	73,96	76,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009).

*Pada tahun 2009 terjadi bencana gempa bumi sehingga jumlah ruang kelas berkurang baik dari segi jumlah sekolah maupun sekolah yang kondisi baik, dan dilaporkan di tahun 2010.

- **Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/TK**

Pendidikan anak usia dini (PAUD)/taman kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak.

Di Kabupaten Bandung pelaksanaan PAUD/TK baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah siswa TK/RA yang baru mencapai sebesar 25,26 % pada tahun 2010. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian PAUD di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.26
Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.1.	Jumlah Siswa TK/RA	19.801	20.678	29.525	29.525	29.525
1.2.	Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun	139.434	121.933	201.259	115.179	116.907
1.3.	Persentase	14,20	16,96	14,67	25,63	25,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Data Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

- **Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bandung cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MA dan SMP/MTs pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,03 dari tahun 2009. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2008 ke 2009, yaitu sebesar 0,11 %. Namun, angka putus sekolah pada tingkat



SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2008 ke 2009, yaitu sebesar 0,18 %. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswa di Kabupaten Bandung yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah.

Tabel 2.27
Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	307	214	588	163	285
1.2.	Jumlah seluruh Siswa	378.765	418.597	403.247	410.245	403.173
1.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,08	0,05	0,15	0,04	0,07
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	2.472	417	817	658	844
2.2.	Jumlah seluruh Siswa	183.265	147.277	143.328	143.411	143.328
2.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	1,35	0,28	0,57	0,46	0,59
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah	462	232	403	541	391
3.2	Jumlah seluruh Siswa	74.953	58.668	67.476	69.799	67.476
3.3	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,62	0,40	0,60	0,78	0,58

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010)

- **Angka Kelulusan Siswa**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua.

Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan pada tahun 2010, baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan, namun pada tahun 2010 jumlah ini menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/ guru terhadap jumlah murid/siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.28
Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	53.752	55.558	55.096	55.220	50.300
1.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas VI	58.415	64.195	57.743	57.241	55.220
1.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	92,02	86,55	95,42	96,47	91,09
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	30.887	35.747	37.490	42.550	30.049
2.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	35.942	35.621	43.328	44.357	42.550
2.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	85,94	100,35	86,53	95,93	70,62
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	14.832	16.152	16.495	17.271	15.091
3.2	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	16.678	16.803	19.544	20.068	17.271
3.3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	88,93	96,13	84,40	86,06	87,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

- **Angka Siswa Melanjutkan Sekolah**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa baik jenjang pendidikan SD/MI maupun jenjang pendidikan SMP/MTs. belum tentu selaras dengan jumlah siswa yang dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Melanjutkan sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi persoalan tersendiri bagi siswa yang tidak mampu. Kendati dinyatakan lulus, belum tentu mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari persentase siswa SMP/MTs. yang dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, di mana pada tahun 2010 baru mencapai 99,75 %. Angka tersebut meningkat 35,94 % bila dibandingkan dengan tahun 2009.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi siswa melanjutkan sekolah di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.29
Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	SD/MI :					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.1.	Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMP/MTs.	49.008	56.142	51.778	52.940	50.094
1.2.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	53.752	55.558	55.096	55.220	50,300
1.3.	Persentase	91,17	101,05	93,98	94,20	94,97
2.	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK/MA	21.979	35.642	25.919	27.152	25,736
2.2.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	30.887	35.747	37.490	42.550	44,247
2.3.	Persentase	71,16	99,71	69,14	63,81	99,75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Data Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).

- **Kualifikasi Guru Berpendidikan \geq S1**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, khususnya yang tercantum pada pasal 29 ayat 1-6, dinyatakan bahwa tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Oleh karena itu guru-guru yang masih belum berpendidikan S1 harus mengikuti program pendidikan kualifikasi ke S1 yang diselenggarakan oleh LPTK (UPI, STIKIP, atau FKIP) yang memiliki program studi terakreditasi pada BAN-PT. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, khususnya yang tercantum pada pasal 11, yang menyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Persentase jumlah tenaga pendidik/guru di Kabupaten Bandung untuk jenjang pendidikan SD/MI yang berpendidikan \geq S1 terlihat belum menggembirakan, di mana pada tahun 2010 jumlah guru yang berpendidikan \geq S1 baru mencapai 36,97%. Lain halnya dengan tenaga guru untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK yang masing-masing mencapai 76,56 % dan 83,17 % pada tahun 2010. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian kualifikasi guru berpendidikan \geq S1 per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.30
Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1
berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1	2.843	3.262	5.157	6.371	5.310
1.2.	Jumlah total guru	12.669	13.893	15.159	15.936	14,363
1.3.	Persentase	22,44	23,48	34,02	39,98	36,97
2.	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1	6.002	6.101	6.615	8.008	7,422
2.2.	Jumlah total guru	8.858	8.667	9.794	10.003	9.694
2.3.	Persentase	67,76	70,39	67,54	80,06	76,56
3.	SMA/MA :					
3.1.	Jumlah Guru Berpendidikan \geq S1	4.389	4.810	5.317	6.154	5.110
3.2.	Jumlah total guru	5.222	5.740	6.397	6.970	6.114
3.3.	Persentase	84,05	83,80	83,12	88,29	83,17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Data Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010).



2. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita**

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 3.991 buah dan jumlah Balita sebanyak 308.213 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 77. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Bandung melayani 77 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.31
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah posyandu	3.636	3.381	3.883	3.926	3.991
2.	Jumlah balita	281.853	290.160	280.874	284.112	308.213
3.	Rasio	1 : 77	1 : 86	1 : 72	1 : 72	1 : 77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010).

- **Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan Penduduk**

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2010 mencapai 1 : 7.067. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 7.067 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.32
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Puskesmas	61	61	61	61	61
2.	Jumlah Poliklinik	304	304	318	317	309



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
3.	Jumlah Pustu	70	72	71	69	85
	Jumlah 1 s/d 3	435	438	450	447	455
4.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 48.281	1 : 49.001	1 : 51.262	1 : 52.014	1 : 52.714
	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	1 : 9.688	1 : 9.993	1 : 9.833	1 : 10.009	1 : 10.407
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 42.074	1 : 42.196	1 : 44.042	1 : 45.983	1 : 37.830
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 6.771	1 : 6.936	1 : 6.949	1 : 7.098	1 : 7.067
5.	Jumlah Kecamatan	30	30	31	31	31
6.	Jumlah Desa/kelurahan	275	275	275	276	276
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

- **Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 6 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 3 unit, rumah sakit swasta sebanyak 2 unit dan rumah sakit AU sebanyak 1 unit Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 1 : 459.364. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Bandung melayani 459.364 penduduk. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.33
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	2	2	2	3	3
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	4	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	7	6	6
5.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
6.	Rasio	1 : 490.862	1 : 506.347	1 : 446.715	1 : 528.810	1 : 459.364

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

- **Rasio dokter per satuan penduduk**

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk.



Jumlah dokter di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 326 orang, adapun jumlah penduduk sebanyak 3.215.548 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,102. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,102. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 adalah 1 : 9.863. Ini artinya 1 dokter melayani 9.863 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.34
Jumlah Dokter di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Dokter	210	123	221	339	326
2.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,071	0,040	0,071	0,107	0,102
4.	Rasio dokter terhadap penduduk	1 : 14.025	1 : 24.700	1 : 14.149	1 : 9.359	1 : 9.863

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010).

- **Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan**

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi.

Jumlah ibu bersalin pada tahun 2010 mencapai 68.861 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 53.827 orang atau sekitar 82,10 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2008, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2007, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 94 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Bandung yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.35
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	43.510	44.682	47.798	52.619	53.287
2.	Jumlah Total Ibu Bersalin	59.718	47.533	62.843	65.230	68.681
3.	Persentase	72,86	94,00	76,06	80,67	82,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010).

- **Jumlah Balita Gizi Baik**

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.



Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Bandung. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk terus mengalami penurunan dari 0,87 % pada tahun 2006 menjadi 0,05 % pada tahun 2010. Sementara itu balita gizi baik mengalami penurunan, yaitu dari 82,57 % pada tahun 2006 menjadi 78,90% pada tahun 2010, penurunan tersebut dikarenakan kenaikan jumlah balita seluruhnya pada tahun 2010 menjadi 308.213

Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.36
Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	232.717	234.182	239.112	242.164	243.166
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	2.460	2.264	2.160	201	148
3.	Jumlah Balita seluruhnya	281.853	290.160	280.874	284.112	308.213
4.	Persentase :					
	- Gizi Baik	82,57	80,71	85,13	85,24	78,90
	- Gizi Buruk	0,87	0,78	0,77	0,07	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Data Profil Kesehatan Tahun 2006-2010).

3. Pekerjaan Umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* diberbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2006 proporsi jalan kondisi baik mencapai 37,48 % namun pada tahun 2010 kondisi tersebut menurun menjadi 30,78 %. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 13,14 % pada tahun 2006 menjadi 27,61 % pada 2010.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2006-2010.



Tabel 2.37
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	Panjang Jalan (km)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kondisi Baik	459,89	295,10	317,72	395,56	355,57
2.	Kondisi Sedang Rusak	359,65	438,42	316,22	207,49	235,19
3.	Kondisi Rusak	246,27	301,85	274,06	338,96	319,01
4.	Kondisi Rusak Berat	161,23	191,66	246,55	213,35	245,58
5.	Jalan secara keseluruhan	1.227,04	1.227,03	1.154,55	1.155,35	1.155,35
	Poporsi Kondisi Baik (%)	37,48	24,05	27,52	34,24	30,78
	Poporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	29,31	35,73	27,39	17,96	20,36
	Poporsi Kondisi Rusak (%)	20,07	24,60	23,74	29,34	27,61
	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	13,14	15,62	21,35	18,47	21,26

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Perubahan panjang jalan antara tahun 2007 ke tahun 2008, untuk tahun 2007 merupakan hasil pemekaran dengan kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, sedangkan data tahun 2008 merupakan hasil kajian dan memiliki selisih panjang jalan 72,48 Km.

Adapun jalan nasional di kabupaten Bandung sepanjang 30,36 Km dan jalan Provinsi di kabupaten Bandung sepanjang 160,04 Km serta Jalan Desa di kabupaten Bandung sepanjang 863,37 Km.

Kriteria kenaikan status jalan Desa menjadi jalan Kabupaten :

1. Jalan Desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan alternative untuk menuju pusat kegiatan local dengan ibukota kabupaten.
2. Jalan Desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan penghubung antar ibukota kecamatan.
3. Jalan Desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan untuk menuju pusat kegiatan local.
4. Lebar jalan Desa yang diusulkan tidak kurang dari 7,5 m.
5. Kecepatan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 Km/jam.

- **Rasio Jaringan Irigasi**

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang total jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.084,15 km (panjang saluran primer 77,76 km, panjang saluran sekunder 136,00 km dan panjang saluran tersier 870,39 km). Bangunan terdiri dari Bangunan Utama (Bangunan Bendung) sebanyak 443 buah dan Bangunan Air (Bangunan Sadap, Bagi Sadap dan Pelengkap) sebanyak 1.015 buah. Angka ini tidak meningkat bila dibandingkan tahun 2009 maupun 2008. Berikut adalah secara lengkap mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2007-2009.



Tabel 2.38
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	Kondisi eksisting saluran irigasi			
		Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total
1.	Jaringan Primer	47,281 km (60,8%)	15,55 km (20%)	14,931 km (19,2%)	77,764 km
2.	Jaringan Sekunder	81,60 km (60%)	34 km (25%)	20,4 km (15%)	136 km
3.	Jaringan Tersier	609,30 km (70 %)	87,10 km (10 %)	173,99 km (20 %)	870,39 km
4.	Bangunan Utama	141 bh (31,8 %)	178 bh (40,1%)	124 bh (28,1%)	443 bh
5.	Bangunan Air	431 bh (42,49%)	215 bh (21,2 %)	369 bh (36,3%)	1.015 bh

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Jaringan Drainase di Kabupaten Bandung terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum dari Hulu ke Hilir beserta anak-anak sungainya. Sungai Citarum merupakan sungai lintas Kabupaten/Kota, yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara di Laut Jawa. Untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum merupakan bagian dari wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Ciliwung-Cisadane-Citarum. Mengingat keberadaan Sungai Citarum yang sangat penting sbaga penyedia air baku ibukota, mempunyai dampak ekonomi serta secara regional menjadikannya sebagai wilayah sungai strategis nasional sehingga kewenangannya berada di pemerintah Pusat dan Provinsi.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dai hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat melupanya Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005 dan 2010. Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum.

Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Canguang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cilerunyi. Diharapkan pada tahun 2025, Lokasi-lokasi genangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Pada zona Citarum Hulu, permasalahan yang menakibatkan terjadinya luapan dan penurunan kualitas sungai diantaranya sebagai berikut; berkurangnya areal hutan lindung, berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik, lahan kritis, erosi, sedimentasi, adanya limbah peternakan, adanya budidaya pertanian tidak ramah lingkungan, adanya limbah (industri, domestik dan sampah), dan permasalahan tata ruang. Pada Zona Citarum Hilir permasalahan yang terjadi antara lain terjadinya degradasi prasarana pengendalian banjir, pencemaran, sedimentasi, permasalahan tata ruang (pemanfaatan bantaran sungai dan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya),

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Permasalahan Banjir di Cekungan Bandung dapat dilakukan secara Filosofis, Normatif, dan Sosial Budaya. Secara Filosofis, diantaranya dengan melakukan relokasi penduduk dari wilayah banjir Secara Normatif dengan melalui Metode Struktur yaitu melalui konstruksi teknik sipil (membuat waduk atau embung, membuat kolam retensi, membuat/memperbaiki tanggul penahan banjir, melakukan normalisasi sungai, membuat polder dan sumur-sumur resapan) Secara Normatif Menggunakan Metode Non



Struktur, yaitu melakukan manajemen daerah rawan banjir (Sistem peringatan dini, diseminasi peringatan ancaman dan sistem evakuasi banjir, pembuatan peta bahaya banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan banjir, asuransi bencana banjir) dan Manajemen Daerah Airan Sungai (penataan ruang, pengendalian erosi di hulu DAS, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian perijinan pemanfaatan lahan, pengendalian kualitas air sungai, kelembagaan/otorita DAS Citarum Hulu, pembuatan peta kawasan lindung, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk konservasi hulu DAS). Secara Sosial dan Budaya melalui alih mata pencaharian, perubahan perilaku permukiman sehat dan menghidupkan kembali kerajinan lokal yang positif.

Program Penanganan Banjir yang diharapkan dilakukan di Cekungan Bandung untuk 20 tahun kedepan adalah;

- Tanggap Darurat Daerah Banjir Dayeuhkolot, Baleendah dan Sekitarnya
- Perbaikan drainase di Cieunteung dan Andir
- Pembuatan Situ di Cieunteung serta relokasi penduduk
- Pemeliharaan berkala S. Citarum, S. Citepus, S. Cisangkuy dan S. Cikapundung
- Tersusunnya FS dan DED Pengelolaan Banjir Cekungan Bandung
- Pembuatan waduk-waduk kecil
- Penanggulangan Erosi dan Sedimentasi di hulu

4. Perumahan Rakyat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase luas permukiman yang tertata**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2010 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 11.649,05 ha atau mencapai 81,84% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2009	2010
1.	Luas area permukiman tertata (ha)	8.044,39	11.649,05
2.	Total Luas area permukiman (ha)	14.297,30	14.297,30
4.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	56,27	81,84

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010.

- **Rasio permukiman layak huni dan Rasio rumah layak huni**

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut.

Sampai tahun 2010, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mencapai 5.124,03 ha. Sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 831.988 buah dari 885.674 rumah tangga di Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.40
Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas permukiman layak huni (ha)	5.101,10	5.104,20	5.111,99	5.117,46	5.124,03
2.	Luas wilayah permukiman (ha)	14.200,22	14.200,22	14.200,22	14.297,30	14.297,30
3.	Persentase kawasan permukiman layak huni	35,90	35,94	35,99	35,79	35,84
4.	Jumlah rumah layak huni (unit)	575,096	575,096	575,446	576,940	577,680
5.	Jumlah rumah tangga (RT)	-	-	-	885.674	831.988
6.	Persentase rumah layak huni	-	-	-	79,80%	85%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung.

- **Persentase rumah tangga berakses air Bersih**

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertasih melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD.

Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pertasih belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung baru mencapai 9,96 % (316.310 jiwa) terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Bandung (3.174.499 jiwa), dan mencapai 13,69 % terhadap total jumlah penduduk daerah pelayanan (2.310.587 jiwa), dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air bersih sebanyak 207 desa dari 276 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil survey/identifikasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa cakupan penyediaan air bersih atas swadaya masyarakat lebih besar bila dibandingkan dengan cakupan penyediaan air bersih oleh Pemerintah, sehingga cakupan keseluruhan penyediaan air bersih di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2010 mencapai 94,03 %. Cakupan pelayanan ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2006, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007. Cakupan pelayanan air bersih tahun 2006 mencapai 85,14 %, tahun 2007 mencapai 95,44 % dan tahun 2008 mencapai 81,95 %.

Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.41
Jumlah Proporsi Rumah Tangga
yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	645.006	746.481	669.368	832.806	763.184
2.	Jumlah rumah tangga	757.594	782.127	816.832	885.674	831.988
3.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	85,14	95,44	81,95	94,03	91,73

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

- **Persentase rumah tinggal bersanitasi (Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bandung yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 95,98 % pada tahun 2006. Kondisi ini meningkat menjadi 98,47 % pada tahun 2009.

Berikut adalah gambaran kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.

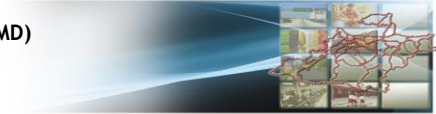
Tabel 2.42
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
(Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja	727.175	734.984	802.872	872.082	797.392
2.	Jumlah rumah tinggal	757.594	782.127	816.832	885.674	831.988
3.	Persentase	95,98	93,97	98,29	98,47	95,84

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

- **Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per Satuan Penduduk**

Areal pemakaman pada umumnya terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu 1) Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah; 2) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan; 3) Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.



Di Kabupaten Bandung terdapat 2 (dua) area pemakaman, yaitu TPU dan TPBU. Jumlah TPU pada tahun 2009 sebanyak 108 lokasi, dengan luas keseluruhan sebesar 269.574,00 m², mempunyai daya tampung sebanyak 47.175,45 unit pemakaman. Dengan demikian rasio TPU terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah 14,87 pada tahun 2009. Ini artinya untuk sebanyak 1.000 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung, baru tersedia tempat pemakaman untuk 14 - 15 jiwa penduduk. Bila dibandingkan dengan tahun 2006, rasio ini meningkat 2,11 yaitu dari 12,76 menjadi 14,86.

Berikut ini secara lengkap mengenai kondisi area pemakaman di Kabupaten Bandung tahun 2006, 2009 - 2010.

Tabel 2.43
Rasio Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bandung
Per Satuan Penduduk Tahun 2006, 2009 dan 2010

No	Uraian	2006			2009			2010		
		Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah (lokasi)	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	58	214.755,00	37.582,13	108	269.574,00	47.175,45	128	282.073	49.362,78
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	9	328.627,00	57.509,73	9	328.627,00	57.509,73	9	328.627,00	57.509,73
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	67	543.382,00	95.091,85	117	598.201,00	104.685,18	137	610.7	106.872,50
6.	Jumlah penduduk (jiwa)	2.945.174			3.172.860			3.215.548		
7.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	12,76			14,87			15,35		

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten**

Betapa sedih dan mengerikan pada saat api membinasakan dan melalap habis infrastruktur yang ada. Api akan terus merambat dan melalap habis semua infrastruktur yang terdapat di sekitarnya jika tidak segera ditangani, sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Untuk itu sangat diperlukan fasilitas penunjang pemadam kebakaran (berupa mobil pemadam kebakaran maupun sarana prasarana kelengkapannya).

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 7 (tujuh) unit dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan pendekatan jumlah Pos Damkar saat ini hanya berjumlah 3 pos. Jumlah ini tidak meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008). Adapun luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.172.860 jiwa. Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2009 sebanyak 172 kali. Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Bandung, yaitu 1 : 25.177.



Ini artinya bahwa satu mobil pemadam kebakaran harus melayani area Kabupaten Bandung seluas 25.177 ha.

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Permendagri no. 62 tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran.

Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Damkar saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung tahun 2006-2009 baru mencapai 30,06 % dengan tingkat waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 25 menit (standar yang ditetapkan dalam Permendagri No. 62 tahun 2008 adalah 15 menit). Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentase kondisi existing wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang terlayani.

Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstan apabila jumlah WMK atau Pos Damkar berjumlah tetap/tidak ada penambahan (*standard* presentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetapkan dalam Permendagri no. 62 tahun 2008 adalah mencapai 75 %).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.44
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Luas Wilayah Kab. Bandung (ha)	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)	276	184	173	172	168
5.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran thd Luas Wil Kab Bdg	1 : 25.177	1 : 25.177	1 : 25.177	1 : 25.177	1:25.177
6.	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Bandung	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

5. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan



perkotaan paling adalah sedikit 20 % (tiga puluh persen). Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 7,36 ha.

Tabel 2.45
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	3,9 ha	5,98 ha	6,28 ha	6,92 ha	7,36 ha
2.	Luas wilayah	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67
	Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah.	2,21	3,39	3,56	3,93	4,18

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung tahun 2010.

- **Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/ membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2010 jumlah bangunan di Kabupaten Bandung yang telah ber-IMB sebanyak 3.514 unit dari 1.148.437 unit bangunan. Jumlah bangunan ber-IMB ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Rasio bangunan ber-IMB tahun 2010 mencapai 0,3%. Ini artinya bahwa jumlah bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 yang telah memiliki IMB masih sangat rendah (baru mencapai 0,3 %) demikian pula dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

NO.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	893	2.097	2.483	3.028	3.514
2.	Jumlah Bangunan	1.142.971	1.143.333	1.144.537	1.144.923	1.148.437
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,08%	0,18%	0,22%	0,26%	0,3%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

6. Perencanaan Pembangunan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ketersediaan Dokumen Perencanaan**

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2006-2009, namun RPJPD sampai dengan tahun 2010 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Demikian pula dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD pada tahun 2006-2009 tidak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, akan tetapi ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010. Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010 :

Tabel 2.47
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1.	Dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		√		√		√		√		√	Belum ditetapkan dengan Perda
2.	Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	√		√		√		√			√	-
3.	Dokumen Renstra SKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah		√		√		√		√		√	Renstra-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008)
4.	Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	√		√		√		√			√	-
5.	Dokumen Renja SKPD yg telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah		√		√		√		√		√	Renja-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010.

7. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio izin trayek**

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 2.141 izin. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila



dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2010). Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Izin Trayek perkotaan	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
2.	Izin Trayek perdesaan	260	260	260	260	260
3.	Jumlah Izin Trayek	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
4.	Jumlah penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
5.	Rasio Izin Trayek	0,00082	0,00079	0,00077	0,00076	0,00075

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Jumlah uji kir angkutan umum**

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten umum baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2010 sebanyak 8.176 unit kendaraan dari 8.972 unit kendaraan (91,13 %). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.49
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Angkutan Umum	2006			2007			2008			2009			2010		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	14.199	12.395	87,29	14.195	11.356	80,00	9.645	7.281	75,49	4.330	3.489	80,58	8.972	8.176	91,13
2.	Mobil bus	875	570	65,14	876	569	64,95	659	514	78,00	203	176	86,70	452	441	97,57
3.	Mobil barang	875	430	49,14	864	432	50,00	480	375	78,13	267	259	97,00	25.264	23.974	94,89
4.	Kereta gandengan	-	-	-	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	16	0	-
5.	Kereta tempelan	-	-	-	2	0	0,00	2	0	0,00	2	2	100,00	52	52	100
	Jumlah	15.949	13.395	83,99	15.945	12.357	77,50	10.794	8.170	75,69	4.810	3.926	81,62	34.756	32.643	93,92

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas**

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaanyang terjadi. Pada tahun



2010, jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah 139. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pemasangan rambu lalu lintas pada tahun 2009, yaitu sebanyak 152 unit. Jumlah ini hanya 1,23 %-nya dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia di jalan-jalan Kabupaten Bandung. Demikian pula pada tahun 2008 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas hanya mencapai 3,52 % dari 12.400 rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	437	152	139

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Prosentase pnaatan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup**

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Dalam pengendalian pencemaran air, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengolah air limbah yang berfungsi baik sehingga air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang, dibuangnya air limbah melalui saluran khusus, dipasang alat ukur debit air limbah, dan diujinya kualitas air limbah setiap bulan; sementara ketentuan administrasi yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya izin pembuangan air limbah, dilakukannya pelaporan hasil pengujian kualitas air limbah dan pencatatan harian debit air limbah. Dalam pengendalian pencemaran udara, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengendalian pencemaran udara dan kelengkapannya yang berfungsi baik sehingga emisi cerobong memenuhi baku mutu sebelum dibuang, serta diujinya kualitas udara emisi dan ambien setiap 6 (enam) bulan; sementara ketentuan administrasi antara lain dilakukannya pelaporan hasil pengujian. Dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, ketentuan teknis antara lain: dimilikinya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang berizin dan dilakukannya pengelolaan limbah B3; sementara ketentuan administrasi antara lain: dimilikinya izin TPS Limbah B3, dilakukannya pelaporan pengelolaan limbah B3 termasuk neraca limbah B3 dan manifest.

Berikut adalah kondisi pnaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang tercatat pada BPLH pada tahun 2008-2010.

Tabel 2.51
Persentase Pnaatan Ketentuan Teknis dan Administrasi Usaha/Kegiatan di Bidang
Lingkungan Hidup

Uraian	2008	2009	2010
Pengendalian Pencemaran Air			
- Administrasi	17% dari 150	24% dari 150	45% dari 150
- Teknis			74% dari 150
Pengendalian			



Uraian	2008	2009	2010
Pencemaran Udara			
- Administrasi	42% dari 147	44% dari 167	48% dari 165
- Teknis	42% dari 147	44% dari 167	48% dari 165
Pengendalian Pencemaran Limbah B3			
- Administrasi	21% dari 155	26% dari 156	28% dari 156
- Teknis	34% dari 155	48% dari 156	54% dari 156

Keterangan: nilai persentase merupakan nilai yang dihitung apabila semua ketentuan administrasi dan teknis dipenuhi

- Kualitas air sungai dan kualitas udara ambien**

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh BPLH setiap tahun sejak tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi terhadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya.

Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.52
Pengujian Air dan Udara

Uraian	2008	2009	2010
Pengujian Kualitas Air Sungai			
Lokasi Pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	72 lokasi, 3x pengujian	75 lokasi, 3x pengujian
Status Mutu Air	97% cemar berat; 3% cemar sedang	96% cemar berat; 4% cemar sedang	99 % cemar berat; 1% cemar sedang
Skor Storet Terburuk	S. Cibaligo Hilir (-144), S. Cikijing Hilir (-133)	S. Cipadaulun Hilir (-124), S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-115)	S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-142), S. Cibaligo Hilir (-133)
Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk			
- BOD			
- COD	677 mg/L 1.444 mg/L	1.232 mg/L 1.549 mg/L	224 mg/L 492 mg/L
Pengujian Kualitas Udara Ambien			
Lokasi Pengujian	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik
Parameter Tidak Memenuhi Baku Mutu	- Kebisingan 75,6 dB - TSP (debu) 262 µg/m ³	- Kebisingan 81,5 Db - TSP (debu) 401 µg/m ³	- Kebisingan 79,04 dB - TSP (debu) 395, 882, 972, 1.739, dan 2.139, µg/m ³

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2010.

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu "cemar berat" dan hanya 1-4% berstatus "cemar sedang". Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah: *fecal coliform*, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr⁶⁺. Status "cemar berat" ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu *fecal coliform*, pada tahun 2010 antara lain S. Cirawa (45.900/0,1 L), S. Ciburial (50.000/0,1 L), S. Cikawao (87.000/0,1L), S. Cibangoak (155.000/0,1), S. Cirasea Hulu (60.000/0,1L), dan Cikacembang Hulu (10.000/0,1L). *Fecal coliform* pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan.



Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi). Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya.

a) Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.

Kerusakan hutan dan lahan telah memberikan dampak yang cukup luas, melalui kemerosotan keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan, penurunan kualitas tanah dan air hingga perubahan iklim ditingkat global yang saat ini kita hadapi. Tantangan bagi kita semua untuk mengendalikan kerusakan hutan dan lahan tersebut melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan factor produksi termasuk produksi biomasa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Di sisi lain kegiatan produksi biomasa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya, pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidupnya lainnya. Kerusakan tanah untuk produksi biomasa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi biomasa secara normal, Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota adalah Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.

Tabel 2.53
Prosentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan Tanah untuk
Produksi Biomassa (% PI-SKT)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
% Pencapaian SPM	0	0	60	80	100

b) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan merupakan akibat dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan yang tidak dilaksanakan secara konsisten.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan maka perlu dilakukan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten dalam peningkatan penataan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya tutupan vegetasi, meningkatnya konservasi energi, menurunnya laju kemerosotan keanekaragaman hayati.

c) Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan

Melihat persoalan lingkungan hidup yang terjadi dan kapasitas sumberdaya manusia yang memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup, maka program Pendidikan Lingkungan Hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu terus dikembangkan memberikan pemahaman, kesadaran, dan tuntunan kepada siswa dalam bersikap dan berprilaku peduli dan berbudaya lingkungan.



Dalam upaya mempercepat pengembangan PLH khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan PROGRAM ADIWIYATA, dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tabel 2.55
Pendidikan Lingkungan Hidup tingkat dasar dan menengah
di Kabupaten Bandung

Tingkat		Potensi Tahun 2006-2010
Dasar	SD	1406
	MI	40
	SMP	272
Menengah	SMA	110
	SMK	82

Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.56
Penerima Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
Tahun 2006-2010

No	Nama	Kategori	Tingkat	Tahun
1.	SMK Negeri 1 Katapang	Sekolah Berbudaya Lingkungan ke-3	Provinsi	2007
2.	SMP Negeri 2 Dayeuhkolot	Sekolah Peduli Lingkungan	Provinsi	2008
3.	SMK Negeri 2 Baleendah	Sekolah Peduli Lingkungan	Provinsi	2008
4.	SMP Negeri 2 Dayeuhkolot	Piagam Adiwiyata	Nasional	2009
5.	SMP Negeri 2 Dayeuhkolot	Piala Adiwiyata	Nasional	2010
6.	SD Negeri 1 Manggahang	Sekolah Berbudaya Lingkungan ke-1	Provinsi	2010

Sumber: BPLH 2010

d) Kondisi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif

(1) Pelaksanaan Produksi Bersih

Upaya pengelolaan dan peningkatan kinerja lingkungan yang dilaksanakan sebagian besar difokuskan pada pengolahan di ujung (*end of pipe*), namun dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan, Bapedal (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) pada Tahun 1993 memperkenalkan **Produksi Bersih** atau Produksi Ramah Lingkungan. Sejak saat itu produksi bersih terus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh sektor terkait di Indonesia.

Kegiatan yang berkaitan dengan produksi bersih di Kabupaten Bandung adalah :

- Tahun 2009 : sosialisasi produksi bersih, pelatihan 20 orang (SKPD dan pelaku usaha) dan implementasi pada 5 industri sebagai percontohan.
- Tahun 2010 : kegiatan in house training, implementasi produksi bersih, monitoring dan evaluasinya bagi 3 SKPD dan 7 pelaku usaha kegiatan industri. Penerapan produksi bersih pada 2 industri yang dibina menunjukkan adanya *triple win*, yaitu efisiensi biaya produksi, penghematan biaya pengelolaan



lingkungan dan mengurangi *Non Product Output (NPO)* atau keluaran yang bukan hasil produksi/limbah

(2) Kegiatan yang telah dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak tersebut perlu dianalisis sejak awal perencanaan sehingga langkah pengendalian dampak negative dan pengembangan dapat positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diantaranya Perda Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan), setiap pemrakarsa kegiatan diwajibkan untuk melakukan penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL/DPLH/SPPL.

Kegunaan dokumen tersebut bagi pemerintah adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegunaan bagi pemrakarsa kegiatan adalah memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan. serta sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan. Sedangkan bagi masyarakat adalah Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut.

Jumlah dokumen lingkungan yang sudah disetujui s.d Tahun 2010 adalah 376 buah (tidak termasuk dokumen SPPL). Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dokumen lingkungan oleh pemrakarsa kegiatan, sejak Tahun 2007 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan dokumen lingkungan dengan jumlah kegiatan yang dipantau disesuaikan dengan alokasi keuangan yang ada (rata-rata berkisar 50-75 kegiatan/tahun), dengan hasil hanya 10-20% dari pemrakarsa kegiatan yang dipantau telah melaksanakan pengelolaan dan pemantuan lingkungan dengan kategori sangat baik dan baik.

e) Pelaksanaan Program Adipura

Program Adipura merupakan salah satu alat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya bagi masyarakat perkotaan, dan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*Good Environmental Government*) dengan menciptakan kota yang bersih dan teduh (*Clean and Green City*). Pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Bandung di mulai sejak Tahun 2006, dengan lokasi Kota Soreang (terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Soreang, Kecamatan Katapang dan Kecamatan Kutawaringin). Dengan perolehan nilai sebagai berikut :

Tabel 2.57
Perolehan Nilai Program Adipura
Tahun 2006-2010

No.	Kategori	Tahun 2006 – 2007	Tahun 2007 – 2008	Tahun 2008 - 2009	Tahun 2009 - 2010
1.	P1 (penilaian ke-1)	-	62,99	67,87	71,16
2.	P2 (penilaian ke-2)	-	63,82	70,74	71.30
3.	PV (penilaian verifikasi)	-	-	70.79	70.54
4.	Nilai Non Fisik	-	73,32	76.74	75.42
5.	Nilai Adipura	52,99	64,40	71.19	71.88
6.	Peringkat Kota Sedang Se-Jawa Barat	Ke-7 dari 7 kota	Ke-7 dari 7 kota	Ke-3 dari 7 kota	Ke-5 dari 7 kota



No.	Kategori	Tahun 2006 – 2007	Tahun 2007 – 2008	Tahun 2008 - 2009	Tahun 2009 - 2010
7.	Peringkat Seluruh Kota Se-Jawa Barat	Ke-25 dari 25 kota	Ke-23 dari 25 kota	Ke-9 dari 21 kota	Ke-13 dari 21 kota
8.	Penghargaan	-	-	Best Effort City dari Gubernur Jawa Barat	Best Effort City dari Gubernur Jawa Barat

Peningkatan nilai tersebut dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya :

- Kegiatan penguatan kelembagaan : penetapan keputusan Bupati Bandung mengenai Tim Pengelola Titik Pantau serta Tim Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Adipura
- Penyelenggaraan koordinasi Program Adipura dengan seluruh pemangku kepentingan
- Perbaikan kondisi fisik dengan penanaman pohon peneduh dan pengadaan sarana pengelolaan sampah (mesin pencacah, komposter, tempat sampah terpilah), dengan dana dari APBD Kabupaten Bandung maupun partisipasi masyarakat.
- **Persentase penanganan sampah**

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Pada tahun 2009 Kabupaten Bandung hanya mempunyai 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan, yang terletak di Desa Babakan - Kecamatan Ciparay. Jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak lk 6.983 m³ per hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai lk 6.452 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 560 m³ per hari (8,02 %). Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 6.423 (81,98 %) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA.

Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Bandung secara lengkap dalam kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.58
Persentase Volume Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006 ^{*)}	2007 ^{*)}	2008	2009	2010
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m ³)	860	970,84	483	560	560
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	8.322	8.322	6.452	6.983	6.983
3.	Persentase	10,33	11,67	7,49	8,02	8,02

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Catatan : *) Tahun 2006 dan 2007 masih belum terbentuk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2009 sudah terpisah dengan Kabupaten Bandung Barat

- **Rasio tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) per satuan penduduk**

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 39 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 117 m³. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1.000



orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat ditampung pada 0,037 m³. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya rasio daya tampung TPSS terhadap jumlah penduduk mencapai 0,048 m³ pada tahun 2006, 0,046 m³ pada tahun 2007 dan 0,036 m³ pada tahun 2008.

Tabel 2.59
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah TPSS (unit) (*)	47	47	38	39	41
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	141	141	114	117	246
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0048	0,0046	0,0036	0,0037	-

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

*) Lokasi TPS ada di pasar dan pabrik

9. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kabupaten Bandung sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun inventarisasi pendataan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan kepada buku inventarisasi tahun 2006 – 2010 dan hasil laporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat terinventarisasi sebagai berikut:

- Jumlah data tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung seluas 4.201.239 M²
- Jumlah yang telah diajukan ke BPN pada tahun 2004 dan tahun 2005 seluas ± 308.279M².
- Jumlah data tanah yang sudah bersertifikat seluas ± 1.006.701 M².
- Jumlah yang telah diajukan ke BPN pada tahun 2010 seluas ± 103.030 M²

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

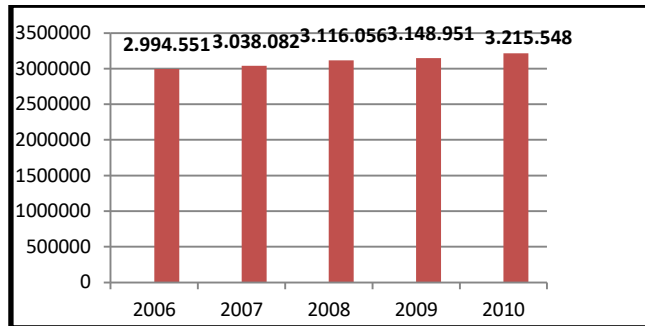
Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Total jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3.215.548, meningkat 2,07% dari jumlah penduduk tahun 2009, yaitu 3.148.951 jiwa. Jumlah tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu : meningkat 1,05 % bila dibandingkan tahun 2008, meningkat 2,5 % bila dibandingkan dengan tahun 2007, dan meningkat 1,4 % bila dibandingkan tahun 2006.



Berikut ini adalah grafik mengenai pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Gambar 2.4
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010)

- **Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

Banyaknya jumlah penduduk yang dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat menggambarkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Bandung. Hal ini berkaitan erat dengan capaian RLS sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung usia 10 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2009 seluruhnya berjumlah 2.607.246 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang tidak/belum mempunyai ijazah sebanyak 395.523 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 182.036 jiwa dan perempuan sebanyak 213.487 jiwa. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2007-2008. Demikian pula dengan jumlah penduduk yang tamat pendidikan SD/setara SD mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008, namun tidak demikian dengan penduduk yang tamat pendidikan SLTP/setara SLTP, SLTA/setara SLTA dan perguruan tinggi.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Bandung yang telah menamatkan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.60
Penduduk usia 10 Tahun ke Atas
berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
(Ijazah Tertinggi yang Dimiliki)
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009

No.	Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
1.	Laki-laki				
a.	Tdk/blm punya Ijazah	173.858	198.435	207.626	182.036
b.	SD / setara SD	419.176	448.774	443.675	442.875
c.	SLTP / setara SLTP	401.556	274.341	304.032	325.026
d.	SLTA / setara SLTA	254.640	244.854	269.321	297.655
e.	Perguruan tinggi	61.888	57.534	47.775	61.427
2.	Perempuan				
a.	Tdk/blm punya Ijazah	205.883	246.771	230.828	213.487

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009
b.	SD / setara SD	481.953	476.124	498.553	482.231
c.	SLTP / setara SLTP	289.016	272.796	306.129	329.141
d.	SLTA / setara SLTA	177.652	178.630	193.807	222.798
e.	Perguruan tinggi	36.529	44.790	37.209	50.570
Jumlah		2.502.151	2.443.050	2.538.955	2.607.246

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009)

- **Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil**

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Bila dilihat selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2006-2010), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah) selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.61
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Kepemilikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	KTP					
a.	Sudah Memiliki	125.955	1.524.005	1.872.488	2.161.004	2.269.054
b.	Belum Memiliki	1.353.158	1.212.942	823.454	707.178	742.536
2.	KK					
a.	Sudah Memiliki	81.199	189.260	405.105	532.085	558.689
b.	Belum Memiliki	676.575	606.496	411.727	353.589	371.268
3.	Akte Kelahiran					
a.	Sudah Memiliki	2.343.462	2.367.689	2.684.589	2.822.230	2.705.375
b.	Belum Memiliki	399.386	436.018	466.848	507.428	649.228
4.	Akte Nikah (Non Muslim)					
a.	Sudah Memiliki	4.150	4.550	4.930	5.330	5.597
b.	Belum Memiliki	1.600	1.200	820	420	441

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2010.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta**



Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bandung pada lembaga pemerintah hanya mencapai 1,84 % pada tahun 2010. Angka ini tetap bila dibandingkan dengan tahun 2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 tetapi meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Adapun jumlah pekerja perempuan pada lembaga swasta mencapai 98,16 % pada tahun 2010. Angka ini sama halnya dengan jumlah pekerja perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah, yaitu jumlah pekerja perempuan yang bekerja pada lembaga swasta pada tahun 2009, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008, tetapi menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bandung yang bekerja pada lembaga pemerintah dan swasta selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.62
Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	14.080	10.158	11.138	11.053
2.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Swasta	805.011	575.231	558.190	590.392
3.	Jumlah total pekerja perempuan	819.091	585.389	569.328	601.445
4.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,72	1,74	1,96	1,84
5.	Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	98,28	98,26	98,04	98,16

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010.

- **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 15 rumah tangga dari 885.674 rumah tangga. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 9 KDRT dari 816.831 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rasio KDRT mencapai 0,00169 pada tahun 2009 dan 0,00110 pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Rasio KDRT di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah KDRT	-	-	9	15
2.	Jumlah Rumah Tangga	757.594	782.127	816.832	885.674
3.	Rasio KDRT	-	-	0,00110	0,00169

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda tahun 2006-2009).



12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rata-rata jumlah anak per keluarga**

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah anak	2.212.780	2.012.492	2.069.296	2.149.953
2.	Jumlah keluarga	757.594	782.127	816.832	885.674
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3	2-3	2-3

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda tahun 2006-2009).

- **Rasio akseptor KB**

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Bandung cukup mengembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Bandung mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Bandung saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 455.807 peserta dari 627.110 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2006-2010 masing-masing adalah 75,36; 75,16; 75,80 dan 78,84. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Rasio akseptor KB di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah PUS	804.423	553.630	575.767	600.609	627.110
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	606.184	416.092	436.405	473.550	455.807
3.	Jumlah Tidak Ber-KB	198.239	137.538	149.362	127.059	171.303
4.	Rasio Akseptor KB	75,36	75,16	75,80	78,84	82,01

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda tahun 2006-2010).

13. Sosial

Pembangunan bidang social pada hakekatnya adalah pembangunan anusia yang focus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang social yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan social masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan social masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks



Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi social saat ini maka perkembangannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan social kontemporer

Berbagai masalah kesejahteraan social berkembang di masyarakat pada tahun 2010, beberapa hal yang cukup menonjol antara lain: Keluarga Fakir Miskin (183,369 KK), keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (29.950 kk), wanita rawan social ekonomi (25,093 jiwa), Lanjut usia terlantar (24,401 jiwa) dan anak terlantar (12,247 jiwa)

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan social di Kabupaten Bandung relative masih sangat besar. Adapaun persentase capaian kinerja dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.66
Persentase Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2006 – 2010

No	Jenis PMKS	Jumlah					Ket
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Anak Balita terlantar	2.465	2.465	2.350	7.745	7.785	
2.	Anak terlantar	5.618	5.168	5.520	12.215	12.247	
3.	Anak nakal	425	275	914	456	456	
4.	Anak jalanan	860	515	463	490	482	
5.	Wanita rawan social ekonomi	12.421	12.421	17.559	25.077	25.093	
6.	Korban tindak kekerasan	1.094	1.470	805	135	250	
7.	Lanjut usia terlantar	18.301	18.301	12.394	24.365	24.401	
8.	Penyandang cacat	13.302	10.19	7.169	7.832	7.832	
9.	Tuna Susila	176	95	91	114	109	
10.	Pengemis	213	186	395	296	294	
11.	Gelandangan	50	20	449	131	129	
12.	Berkas waega binaan lembaga kemasyarakatan	556	329	395	494	485	
13.	Korban penyalahgunaan Narkoba (NAPZA)	910	910	7.425	401	402	
14.	Keluarga fakir miskin	181.691	181.691	196.937	183.369	183.369	
15.	Keluarga tinggal di Rumah tidak layak huni	9.546	8.843	15.509	30.930	29.950	
16.	Keluarga bermasalah social psikologis	689	325	401	820	1.050	
17.	Komunitas adat terpencil	0	0	0	0	0	
18.	Korban bencana alam	3140	1.819	3.952	947	941	
19.	Korban bencana social	91	57	23	112	112	
20.	Pekerja imigran terlantar/bermasalah sosial	264	156	220	136	136	
21.	Penyandang HIV/AIDS	5	5	79	56	56	
22.	Keluarga rentan	1.763	1.763	2.649	8.676	8.690	
	Jumlah	253.580	247.383	275.742	304.797	312.054	
	Persentase capaian kinerja penanganan PMKS	0.315	0.562	0.289	0.3	0.22	



- **Rasio Tempat Ibadah**

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Jumlah mesjid di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 4.430 unit, adapun jumlah pemeluknya sebanyak 2.818.810 jiwa. Rasio mesjid terhadap jumlah pemeluknya adalah 1 : 636. Ini artinya bahwa 1 mesjid digunakan oleh lk. 636 jiwa pemeluknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Bandung
Tahun 2009

No.	Bangunan tempat ibadah	2009		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Mesjid	4.430	2.818.810	1 : 636
2.	Gereja	20	37.248	1 : 37.248
3.	Pura	1	2.472	1 : 2.472
4.	Vihara	1	1.483	1 : 1.483
5.	Kelenteng	-	-	-
6.	Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	4.452	2.860.013	-

Sumber : *Departemen Agama Kabupaten Bandung tahun 2010*

14. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio daya serap tenaga kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 552 PMA/PMDN berjumlah sebanyak 203.306 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009. Namun rasio penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah PMA/PMDN pada tahun 2010 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), di mana rasio penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006 mencapai 397 : 1, pada tahun 2007 mencapai 426 : 1 , pada tahun 2008 mencapai 383 : 1 dan pada tahun 2009 mencapai 381 :1. Hal ini berarti pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 397 orang per PMA/PMDN, pada tahun 2007 terserap sebanyak 426 orang per PMA/PMDN, tahun 2008 terserap 383 orang per PMA/PMDN, tahun 2009 terserap 381 per PMA/PMDN dan tahun 2010 terserap 368 per PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.68
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	227.015	200.187	201.525	201.646	203.306
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	572	469	525	528	552
3	Rasio daya serap tenaga kerja	397 : 1	426 : 1	383 : 1	381 : 1	368:1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Pada tahun 2008 TPAK laki-laki di Kabupaten Bandung mencapai 60,22 % dan perempuan mencapai 53,50 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2006. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 mencapai 16,72 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK dan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.69
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bandung
Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin
Tahun 2006 s.d 2010

No	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	ANGKATAN KERJA										
	Bekerja	847.699	787.206	598.180	575.231	576.933	558.190	632.627	692.303	632.124	691.753
	Pengangguran	202.778	193.107	143.124	137.244	120.430	112.032	123.920	85.616	99.869	92.904
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	1.050.477	980.313	741.304	712.475	697.363	670.222	756.547	777.919	731.993	784.657
	Rasio Bekerja	0,81 : 1	0,80 : 1	0,81 : 1	0,81 : 1	0,83 : 1	0,83 : 1	0,84 : 1	0,89 : 1	0,86 : 1	0,88 : 1
2	BUKAN ANGKATAN KERJA										
	Sekolah	207.071	166.537	112.712	108.287	101.722	97.964	201.217	177.960	267.771	236.823
	Mengurus RT	70.610	92.159	89.308	244.635	81.324	216.795	115.163	264.271	149.226	342.435

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	Lainnya	19.100	16.727	290.995	280.422	277.583	267.723	280.075	270.126	50.968	306.501
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	296.781	275.423	493.015	633.344	460.629	582.482	596.455	712.357	467.965	885.759
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	1.347.258	1.255.736	1.234.319	1.345.819	1.157.992	1.252.704	1.229.082	1.404.660	1.100.089	1.577.512
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	77,97	78,07	60,06	52,94	60,22	53,50	61,55	55,38	66,54	49,74
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	19,30	19,70	19,31	19,26	17,27	16,72	16,4	11,01	13,6	11,84

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.

- Kesempatan Kerja**

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja.

Kesempatan kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 menurut lapangan usaha mencapai 1.323.877 orang. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006. Kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan, restoran dan hotel.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010 menurut lapangan usaha.

Tabel 2.70

Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010

No.	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	731.205	278.455	267.455	425.031	425.541
2	Industri pengolahan	494.056	318.816	308.418	373.763	375.632
3	Bangunan	19.540	88.475	85.596	64.537	79.536
4	Perdagangan, Restoran dan Hotel	167.202	237.968	230.212	211.794	213.298
5	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	62.156	101.970	98.643	87.590	77.775
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	10.944	11.617	11.226	11.262	11.296



No.	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
7	Jasa Kemasyarakatan	161.913	133.065	128.734	141.237	134.259
8	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	19.242	5.045	4.861	9.716	6.540
Jumlah		1.666.258	1.175.411	1.135.145	1.324.930	1.323.877

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase**

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 782 koperasi. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008, jumlah koperasi ini meningkat sebesar 0,58 %, yaitu dari 49,59 % pada tahun 2008 menjadi 50,17 % pada tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah koperasi aktif	577	645	730	747	782
2	Jumlah koperasi	1.323	1.391	1.472	1.489	1524
3	Persentase koperasi aktif	46,61	46,36	49,59	50,17	51,31

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Jumlah UKM non BPR/LKM UKM**

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Pada tahun 2010, jumlah UKM di Kabupaten Bandung mencapai sebanyak 5.392 UKM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah seluruh UKM	3.921	4.287	4.482	5.414	5.614
2	Jumlah BPR	--	31	49	24	
3	Jumlah Koperasi	--	41	41	41	76

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2009)



- **Jumlah BPR/LKM**

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 s.d. 2010

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah BPR	31	49	-	-
2.	Jumlah LKM				
	- Koperasi	41	41	41	76
	- Non koperasi	-	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2009)

16. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.

Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung.

Upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung sampai saat ini baru mencapai 30 investor, yaitu terdiri dari 5 investor dalam negeri dan 25 investor asing. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 sebanyak 8 investor, tahun 2007 sebanyak 22 investor dan tahun 2008 sebanyak 17 investor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.74
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Jumlah Investor				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	PMDN	2	3	5	5	9
2.	PMA	6	19	12	25	19
3.	Total	8	22	17	30	28

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2006-2010.

- **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 11 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp 3.401.003.149. Jumlah realisasi ini lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui, yaitu 28 proyek sebesar Rp 1.882.376.683. Bila dibandingkan dengan investasi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah investasi pada tahun 2010 naik sebesar 73,92 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan menurun 70,94 % bila dibandingkan dengan tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 s.d. 2010

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2007	28	1.151.199.749,00	21	308.486.784,80
2008	34	877.033.716,00	16	343.628.770,00
2009	22	682.269.594,00	13	89.634.094,00
2010	28	1.882.376.683,7	11	3.401.003.149,2

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2007-2010.

17. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja "jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan".

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 37 set, adapun jumlah seni dan budaya yang telah diselenggarakan sebanyak 16 kali pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2007-2008 seni dan budaya diselenggarakan sebanyak 8 kali. Selanjutnya jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 198 unit, dari jumlah tersebut yang dilestarikan sebanyak 62 unit (31,31 %). Jumlah yang dilestarikan pada tahun 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.76
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (set)	37	37	37	37	37
2.	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya (kali)	8	8	8	16	16
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	62	62	62	62	62
	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	89	89	89	89	89
	Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	69,66	69,66	69,66	31,31	31,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga.

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

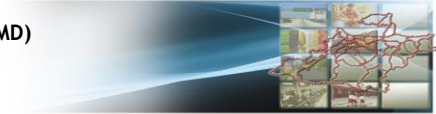
Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bandung sebanyak 68 buah, sedangkan pada tahun 2006-2009, jumlah organisasi ini masing-masing sebanyak 47 buah pada tahun 2006, 53 buah pada tahun 2007, 58 buah pada tahun 2008, 67 buah pada tahun 2009 dan 68 buah pada tahun 2010

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 45 buah, jumlah ini relatif naik bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga
di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	47	53	58	67	68
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	40	42	42	42	45

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, Tahun 2010.



19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk**

Polisi Pamong Praja merupakan aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2010 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung sebanyak 88 orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2009 sebesar 0,27. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 27 orang. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78
Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Pol PP	60	89	104	96	88
2.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,20	0,29	0,33	0,30	0,27

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 17,17. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tersedia jumlah Linmas sebanyak 5.520 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2006 rasio Linmas mencapai 40,39, pada tahun 2007 mencapai 31,05 dan pada tahun 2008 mencapai 25,07 dan 2009 22,80 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Linmas	11.896	9.434	7.838	7.235	5.520



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
2.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	40,39	31,05	25,07	22,80	17,17

Sumber : Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan**

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 4.476 buah, adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 276 desa/kel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebesar 1 : 16. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 16 buah. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007, yang masing-masing mencapai 1 : 21. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Pos Siskamling	5.767	5.772	4.587	4.476	4.476
2.	Jumlah Desa dan kelurahan	275	275	276	276	276
3.	Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan	1 : 21	1 : 21	1 : 16	1 : 16	1 : 16

Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 186.631 rumah tangga atau 21,07 % terhadap total jumlah rumah tangga. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2007-2008), di mana pada tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin mencapai 184.638 rumah tangga (23,60 %) dan pada tahun 2008 mencapai 186.631 rumah tangga (22,65 %).

Selanjutnya, presentase rumah tangga di atas garis kemiskinan pada tahun 2009 mencapai 78,93 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008, di mana pada tahun 2006 presentase rumah tangga di atas garis kemiskinan mencapai 76,39 % dan pada tahun 2008 mencapai 77,34 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan dan presentase penduduk miskin di atas garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2007-2009.



Tabel 2.81
Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 s.d. 2009

No.	Uraian	2007	2008	2009
1.	Jumlah RT Miskin	184.638	185.064	186.631
2.	Total RT	782.127	816.832	885.674
3.	Angka Kemiskinan	23,61	22,66	21,07
4.	Persentase RT di atas Garis Kemiskinan	76,39	77,34	78,93

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2007-2009.

- **Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA**

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	74	89	80	82	22
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	74	89	80	82	22
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	12	18	12	12	10
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	12	18	12	12	10
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Berkaitan hal tersebut di atas, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun ini telah disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian



terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Tabel 2.83
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat :					
	- Ada			√	√	√
	- Tidak Ada	√	√			

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2010.

21. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ketersediaan Pangan Utama**

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Bandung dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 513.856 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 3.215.548 jiwa penduduk sebanyak 308.688 ton (65,32 %). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2010 meningkat bila dibandingkan tahun 2006-2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.84
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	405.323	397.656	412.877	472.565	513.856
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama (ton)	428.026	295.575	295.575	308.688	312.841
4.	Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	105,60	74,33	71,59	65,32	60,88

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2010.

- **Regulasi Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang



Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu : UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Namun Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2009 belum mempunyai peraturan perundang-undangan/regulasi terkait dengan ketahanan pangan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	v	V	V	V	V
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	v	V	V	V	V

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2010.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Kelompok Binaan LPM**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bandung tahun 2009 sebanyak 282 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 276 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 2,83 kelompok atau 2-3 kelompok per LPM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.86
Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah LPM	440	275	276	276	276



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	440	275	276	276	276
3.	Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah PKK di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebanyak 55.633 anggota, dengan Jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 4.960 kelompok. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari : Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,089 kelompok per anggota PKK. Ini artinya bahwa setiap 100 PKK aktif di Kabupaten Bandung mempunyai 8,9 ≈ 9 kelompok binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah PKK	50.697	224.112	113.244	76.214	55.633
	Jumlah PKK Aktif	50.697	224.112	113.244	76.214	55.633
	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	4.069	4.328	4.550	4.933	4.960
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,08	0,019	0,04	0,065	0,089

Sumber : BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Jumlah LSM yang aktif**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.



Jumlah LSM di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 215 LSM, dari jumlah tersebut yang tidak aktif sebanyak 103 LSM, dengan demikian jumlah LSM aktif sebanyak 112 LSM. Jumlah LSM aktif ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah LSM terdaftar	112	113	121	165	215
2.	Jumlah LSM tidak aktif	67	71	76	88	112
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	45	42	45	77	103

Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

23. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ketersediaan Dokumen Statistik**

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.89
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√		√		√		√	
2.	IPM	√		√		√		√		√	
3.	Suseda	√		√		√		√		√	
4.	KBDA	√		√		√		√		√	
5.	Indeks Gini Ratio		√		√	√			√		√
6.	Input Output		√		√	√			√		√
7.	IKM		√		√	√			√		√



No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
8.	IHK		√		√		√		√		√

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010.

24. Kearsipan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Pengelolaan Arsip secara Baku**

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip, dari 79 SKPD di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2009, sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	69	69	69	69	69
2.	Jumlah SKPD	69	69	69	69	69
3.	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	100	100	100	100	100

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- **Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu**

Mengelola arsip memerlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 ebanyak 69 orang, dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 69 orang atau 100 %. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, 2007, dan 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Pengelola Arsip Terpadu di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Diperlukan	69	69	69	69	69
2.	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	69	69	30	30	69
3.	Persentase SDM Pengelola Arsip yang	100	100	37,97	75,95	100



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	telah Melakukan Pelatihan					

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2010.

25. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, *mobile*, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2009, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Bandung sebanyak 44 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 50 unit, jumlah titik hotspot sebanyak 9 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 5 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 6 unit. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008) jumlah sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang mengalami peningkatan hanya ketersediaan akses internet, di mana pada tahun 2006-2007 jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet sebanyak 37 SKPD, pada tahun 2008 sebanyak 34 SKPD dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 44 SKPD yang telah memiliki akses internet. Sarana/prasarana lainnya tidak mengalami peningkatan, bahkan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami penurunan, dari sebanyak 21 radio yang aktif pada tahun 2006-2007 menurun menjadi 6 radio yang aktif pada tahun 2008-2009.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.92
Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi)
Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Surat Kabar	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	37	37	34	44	100
2.	Jumlah sistem informasi yang ada	-	-	50	50	(belum disurvei resmi)
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda	-	-	9	9	(belum disurvei resmi)
4.	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	4	4	5	5	3
5.	Jumlah radio komunikasi yang aktif	21	21	6	6	26

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2010.



26. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Jumlah perpustakaan**

Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Selama kurun waktu tahun 2006-2010, Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik Pemda, namun jumlah perpustakaan bukan milik Pemda (perpustakaan desa) sebanyak 185 perpustakaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemda	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda (Desa)	-	-	138	138	185
3.	Total Perpustakaan (1+2)	-	-	139	139	186

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2010.

- **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun**

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

Jumlah pengunjung ke perpustakaan milik Pemda Kabupaten Bandung pada tahun 2010 dapat diketahui sebanyak 13.400 orang. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009, namun bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008 jumlah pengunjung ini mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	802	3.262	1.980	1.158	13.400
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	1.600	6.503	6.127	2.710	29.460
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	2.402	9.765	8.107	3.868	42.860

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2010.



- **Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan**

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Pada tahun 2010, jumlah buku yang tersedia di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Bandung sebanyak 29.460 buah dengan total judul buku sebanyak 13.400 jenis, dengan rata-rata jumlah buku per jenis (setiap judul) sebanyak 3 buah. Jumlah ketersediaan buku pada tahun 2010 ini lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2006, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95
Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan
pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Judul Buku	802	3.262	1.980	1.158	13.400
2.	Total Jumlah Buku	1.600	6.503	6.127	2.710	29.460
3.	Rata-rata Jumlah Judul Buku	2	2	3	3	3

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2010.

- **Jumlah Kendaraan Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan pustaka yang ada di Perpustakaan milik Pemda, saat ini Pemerintah Kabupaten telah menyediakan kendaraan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling, namun jumlahnya sejak tahun 2007-2010 baru sebanyak 4 unit. Selain itu telah tersedia pula kendaraan layanan internet dan motor pintar, masing-masing berjumlah 1 unit.

Dengan adanya kendaraan perpustakaan keliling, kendaraan layanan internet dan motor pintar diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses perpustakaan serta akan memberikan nilai tambah bukan saja sebagai peningkatan pengetahuan, namun akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian.

Tabel 2.96
Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 s.d. 2010

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah mobil unit perpustakaan keliling	3	3	3	4
2.	Jumlah mobil layanan internet	1	1	1	1



No.	Uraian	2007	2008	2009	2010
3.	Jumlah motor pintar	1	1	1	1

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2010.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu:

1. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan**

Produktivitas padi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 6,12 ton/ha. Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009), di mana pada tahun 2006 produktivitas padi mencapai 5,60 ton/ha, tahun 2007 mencapai 5,83 ton/ha, dan tahun 2008 mencapai 5,86 ton/ha.

Produktivitas sayuran pada tahun 2010 mencapai 141,06 kwt/ha, bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009 produktivitas ini meningkat, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006 produktivitas tersebut menurun, di mana pada tahun 2006 produktivitas sayuran mencapai 36,38 ton/ha.

Produktivitas buah-buahan pada tahun 2010 mencapai 0,85 kw/pohon, produktivitas ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada tahun 2006 produktivitas buah-buahan mencapai 0,44 kw/pohon dan pada tahun 2009 mencapai 0,59 kw/pohon.

Produktivitas tanaman hias pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 produktivitas tanaman hias mencapai 12,49 tangkai/m² sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing mencapai 2,71 tangkai/m² dan 5,68 tangkai/m².

Produktivitas perkebunan pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Pada tahun 2010 produktivitas perkebunan mencapai 1,16 ton/ha sedangkan tahun 2006-2009 masing-masing mencapai 6,42 ton/ha, 2,32 ton/ha, 2,16 ton/ha dan 1,16 ton/ha.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.97
Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan,
Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	70.827	70.522	74.676	75.772	84.232
	Luas Panen (ha)	72.338	68.176	70.453	78.522	84.020
	Produksi (ton)	405.323	397.657	412.877,00	472.564	513.856
	Produktivitas (ton/ha)	5,60	5,83	5,86	6,02	6,12
2.	Palawija					
	Luas Tanam (ha)	20.614	21.405	21.018	24.265	26.863

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	Luas Panen (ha)	18.942	15.544	15.781	20.615	26.826
	Produksi (ton)	346.189	317.945	325.713	429.737	569.233
	Produktivitas (ton/ha)	18,28	20,45	20,63	20,84	21,21
3.	Sayuran					
	Luas Tanam (ha)	26.087	41.089	25.139	22.007	20.155
	Luas Panen (ha)	28.964	39.328	31.096	34.619	20.746
	Produksi (ton)	949.171	911.926	559.753	696.840	464.872
	Produktivitas (ton/ha)	24,14	26,34	18,00	33,56	22,41
4.	Buah-buahan					
	Luas Tanam (pohon)	113.855	156.002	305.218	266.700	200.700
	Luas Panen (pohon yg menghasilkan)	500.702	486.680	540.071	447.699	623.406
	Produksi (kw)	219.566	232.304	304.705	266.532	532.874
	Produktivitas (kw/pohon)	0,44	0,47	0,56	0,59	0,85
5.	Tanaman Hias					
	Luas Tanam (M ²)	8.281	50.908	86.044	187.841	182.231
	Luas Panen (M ²)	22.753	20.700	115.682	115.544	44.597
	Produksi (tangkai)	157.745	137.763	488.425	426.962	400.259
	Produktivitas (tangkai/M ²)	19,05	2,71	5,68	4,06	12,49
6.	Perkebunan					
	Luas Tanam (ha)	3453	10.175	10.805	11.097	13.643
	Luas Panen (ha)	2.871	3.209	4.706	5.030	7.482
	Produksi (ton)	22.181	23.603	23.348	23.367	34.849
	Produktivitas (ton/ha)	6,42	2,32	2,16	2,11	1,16

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, tahun 2010.

- **Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**

Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 3.471.661.920.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 1.602.050.010.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Persentasentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar 7,532 % berdasarkan harga berlaku dan 7,371 % berdasarkan harga konstan. %tase kontribusi ini meningkat bila



dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 7,359 % berdasarkan harga berlaku dan 7,316 % berdasarkan harga konstan. Namun tidak demikian bila dibandingkan dengan tahun 2006. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2006. Di mana pada tahun 2006 %tase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai 7,572 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 7,586 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.98
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian :					
	- ADH Berlaku	2.228.624,63	2.465.321,20	2.728.755,88	3.013.007,10	3.471.661,92
	- ADH Konstan	1.338.248,71	1.371.807,73	1.426.244,50	1.502.003,49	1.602.050,01
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB :					
	- ADH Berlaku	7,572	7,399	7,128	7,359	7,532
	- ADH Konstan	7,586	7,342	7,249	7,316	7,371

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

- **Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu**

Pada tahun 2010 jumlah produksi daging mencapai 45.352.413 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 10,27 kg/kapita/th. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produksi daging mencapai 40.912.117 kg dan konsumsi daging 9,5 kg/kapita/th, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Konsumsi telur di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 2,33 kg/ kapita/th, dengan jumlah produksi sebanyak 8.398.280 kg. Jumlah konsumsi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), yaitu konsumsi telur pada tahun 2006 mencapai 1,66 kg/kapita/th, pada tahun 2007 mencapai 1,62 kg/kapita/th dan pada tahun 2008 mencapai 1,74 kg/kapita/th. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi pada setiap tahunnya (2006-2010).

Konsumsi susu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 8,84 kg/kapita/tahun, sementara konsumsi susu nasional adalah sebesar 6,10 kg/kapita/tahun, sehingga telah melebihi batas standar konsumsi susu nasional. Jumlah konsumsi tahun 2010 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2007 jumlah konsumsi susu mencapai 6,90 kg/kapita/th, pada tahun 2008 mencapai 8,38 kg/kapita/th sedangkan pada tahun 2006 mencapai 8,93 kg/kapita/th. Sama



halnya dengan jumlah konsumsi, jumlah produksi pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.99
Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	36.981.506	37.558.487	39.275.391	40.912.117	45.352.413
	Konsumsi (kg/kapita/th)	8,38	8,98	9,48	9,49	10,5
2.	Telur					
	Produksi (kg)	5.835.482	5.853.768	5.881.985	7.128.159	8.398.280
	Konsumsi (kg/kapita/th)	1,66	1,62	1,74	2,08	2,33
3.	Susu					
	Produksi (kg)	56.313.186	55.034.482	57.171.658	59.534.141	60.247.543
	Konsumsi (kg/kapita/th)	8,93	6,90	8,38	8,62	8,84

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

2. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi**

Tingkat penggundulan dan kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktek *illegal logging* dan *illegal trade*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan.

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GRHLK) merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya.

Luas penanaman kawasan hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 263,75 ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2008, luasan penanaman ini mengalami peningkatan, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luasan penanaman di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 seluas 3.356,01 ha, pada tahun 2007 seluas 2.028,70 ha dan pada tahun 2008 seluas 224,12 ha. Dari luasan tersebut telah seluruhnya dilakukan rehabilitasi.

Luas lahan kritis di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 mencapai 21.130,00 ha, pada tahun 2007 mencapai 15.330,60 ha dan pada tahun 2008 mencapai 9.056,19 ha. Terhadap lahan kritis tersebut, setiap tahunnya telah dilakukan upaya rehabilitasi, yaitu pada tahun 2006 dilakukan rehabilitasi sebesar 27,45 %, pada tahun 2007 sebesar 15,50 % dan pada tahun 2008 sebesar 48,79 %, tahun 2009 telah dilakukan upaya rehabilitasi seluas 15,91 %, namun demikian hasil perhitungan melalui citra satelit dari Balai Pengelolaan DAS luasan lahan kritis pada tahun 2010 mencapai 59.969,39 Ha, hal ini mengindikasikan laju kerusakan hutan lebih tinggi daripada laju penanaman kembali.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.



Tabel 2.100
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha)	LK	5.799,40	2.375,50	4.418,36	1.084,50	2.493,12
		HN BS	3.307,61	1.918,50	182,72	168,62	263,75
		HN BU	48,40	110,20	41,40	140,40	-
		HN BS + HN BU	3.356,01	2.028,70	224,12	309,02	263,75
	TOTAL		9.155,41	4.404,20	4.642,48	1.393,52	2.756,87
2.	Total luas hutan dan lahan kritis (ha)	LK	21.130,00	15.330,60	9.056,19	6.814,72	59.969,39
		HN BS	3.307,61	1.918,50	182,72	168,62	263,75
		HN BU	48,40	110,20	41,40	140,40	-
		HN BS + HN BU	3.356,01	2.028,70	224,12	309,02	263,75
	TOTAL		24.486,01	17.359,30	9.280,31	7.123,74	60.233,14
3.	Persentase Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	LK	27,45	15,50	48,79	15,91	8,8
		HN BS, HN BS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		LK, HN BS, HN BU	37,39	25,37	50,03	19,56	8,1

Sumber : BPDAS Citarum Tahun 2011.

Ket : LK=Lahan Kritis, HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan, HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara

- Persentase Kerusakan Kawasan Hutan**

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai 11,71 % dari 60.844,90 ha. Persentase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana pada tahun 2006 kerusakan kawasan hutan mencapai 38,06 % dari 64.340,39 ha, pada tahun 2007 mencapai 26,12 % dari 66.456,83 ha, dan pada tahun 2008 mencapai 15,82 % dari 58.645,83 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101
Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas Kawasan Hutan Yang Rusak	HN BS	3.307,61	1.918,50	182,72	168,62	263,75
		HN BU	48,40	110,20	41,40	140,40	-
	TOTAL		3.356,01	2.028,70	224,12	309,02	263,75

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Uraian	Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
2.	Total Luas Kawasan Hutan	HN BS	36.893,54	36.893,54	36.893,54	34.458,95	34.458,95
		HN BU	2.053,31	2.053,31	2.053,31	1.983,40	1.983,40
		HK	9.784,98	9.784,98	9.784,98	9.784,98	9.784,98
	TOTAL		48.731,83	48.731,83	48.731,83	46.227,33	46.227,33
3.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Rusak		38,06	26,12	15,82	11,71	-

Sumber : BPDAS Citarum Tahun 2011

Ket : HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan, HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara, HR = Hutan Rakyat, HK = Hutan Konservasi

- **Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB**

Sektor kehutanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 15.162.760.000,00 (0,033 %) dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 7.283.050.000,00 (0,034 %). Persentase kontribusi sektor kehutanan pada tahun 2009 tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Pada tahun 2006 persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mencapai 0,035 %. Pada tahun tahun 2007 mencapai 0,034 % berdasarkan harga berlaku dan mencapai 0,035 % berdasarkan harga konstan. pada tahun 2008 mencapai 0,033 % berdasarkan harga berlaku dan 0,035 % berdasarkan harga konstan selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai 0,034 %, dan berdasarkan harga konstan mencapai 0,034 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.102
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Kehutanan :					
	- ADH Berlaku	10.221,70	11.329,44	12.573,69	13.865,99	15.162,76
	- ADH Konstan	6.196,40	6.599,07	6.813,63	7.072,11	7.283,05
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.289.735,12	40.941.217,98	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.673.732,61	20.529.643,24	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB					
	- ADH Berlaku	0,035	0,034	0,033	0,034	0,033
	- ADH Konstan	0,035	0,035	0,035	0,034	0,034

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).



3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Energi

Beberapa potensi energi di Kabupaten Bandung yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- Energi panas bumi (geothermal)
- Energi Mikrohidro
- Energi Biogas
- Energi matahari (surya)
- Energi bahan bakar nabati (limbah organik)

Adapun perincian jenis-jenis energi non fosil tahun 2006-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.103
Jenis-jenis Potensi Energi Non Fosil Tahun 2006-2010

No	Jenis Energi	Potensi	Tahun				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Panas Bumi	1480 MW	427 MW	427 MW	427 MW	427 MW	427 MW
2	Mikrohidro	20 MW	0	0	0	0	0
3	Biogas (Biodigester)	10.000 unit	43 Unit	74 Unit	256 Unit	450 Unit	1041 Unit
4	Matahari	Tidak Terbatas	0	0	0	0	150 unit SHS
5	Bahan bakar nabati (Bioetanol)	500 liter/bulan	0	0	0	0	1 Unit (20 liter/bulan)

Adapun perincian rasio elektrifikasi tahun 2008-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.104
Rasio Elektrifikasi Tahun 2008-2010

No	Perincian	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Rumah Tangga	756,368	766,983	773,053
2	Pelanggan	409,122	426,137	446,486
3	RE (%) Dinamis	54.090	55.560	57.756
RE (%) Statis		59.030		

- **Sumberdaya Mineral Pertambangan**

Keberadaan sumberdaya mineral di Kabupaten Bandung adalah berupa andesit, tanah urug dan emas yang tersebar di kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk dan Banjaran dengan jumlah perusahaan yang melaksanakan produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 ha. Dari jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug, juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengeolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalan potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Luas penambangan tanpa izin di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 33,33 ha, dari luasan ini yang berhasil ditertibkan seluas 12,68 ha (38,03 %). Sehingga pada tahun 2010, luas



penambangan tanpa izin mencapai 20,755 ha. Dari luasan tersebut telah dilakukan penertiban seluas 16,755 ha (80,73 %). Langkah penanganan yang telah dilakukan adalah dengan pendekatan dan mendorong kepada para pengusaha yang belum berijin untuk mengikuti prosedur perijinan yang ditetapkan.

Tabel 2.105
Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (ha)	10	12,68	16,755
2.	Total luas penambangan tanpa izin (ha)	41,33	33,33	20,755
3.	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	24,20	38,03	80,73

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Tahun 2011.

- Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 580.783.810.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 282.922.470.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa %ase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 sebesar 1,260 % berdasarkan harga berlaku dan 1,302 % berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 1,28 %. Demikian pula berdasarkan harga konstan, persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2010 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Table 2.106
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian :					
	- ADH Berlaku	368.568,14	419.179,41	468.303,80	526.035,13	580.783,81
	- ADH Konstan	234.570,64	208.909,19	255.888,73	269.782,12	282.922,47
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian					



No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
	thd PDRB					
	- ADH Berlaku	1,252	1,258	1,223	1,285	1,260
	- ADH Konstan	1,330	1,118	1,301	1,314	1,302

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

- **Kegeologian**

Kondisi wilayah Kabupaten Bandung yang pegunungan, dataran tinggi maupun pedataran menjadi menimbulkan daerah ini mempunyai kerentanan potensi gerakan tanah/longsor terutama di lahan dengan kemiringan lereng yang curam. Ditambah dengan kondisi geologi yaitu litologi maupun struktur geologi yang beragam menambah potensi terjadinya bencana geologi berupa gerakan tanah/longsor maupun gempa.

Keterkaitan dengan potensi gerakan tanah di Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah/longsor. Tercatat terdapat 22 kecamatan yang terdapat potensi bencana geologi/gerakan tanah. Sampai dengan tahun 2011, telah dilaksanakan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah, yaitu Kecamatan Kertasari, Arjasari dan Rancabali. Hal ini menyebabkan masih adanya Kecamatan yang belum terpetakan lahan yang mempunyai potensi gerakan tanah/longsor.

Namun demikian, penanganan kejadian bencana gerakan tanah/longsor telah dilakukan dengan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang terkena gerakan tanah/longsor untuk menghindari kerugian jiwa maupun material. Penanganan gerakan tanah /longsor dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal (pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat) maupun instansi di Kabupaten Bandung.

- **Sumberdaya Air Tanah**

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cakungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan 'One basin one management'. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung Soreang adalah 368,5 juta m³/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m³. Dengan kebutuhan air yang banyak tersebut maka diperlukan suatu penanganan dan manajemen yang pengelolaan air tanah yang tepat agar di menjadi cepat habis. Langkah yang telah diambil dalam pengendalian jumlah air tanah adalah dengan melalui ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Diharapkan dengan adanya ijin dapat terkendainya pengambilan air tanah sesuai dengan kajian yang telah ditetapkan, sehingga upaya konservasi dan pemenuhan kebutuhan air terjalin seimbang.

Upaya konservasi juga dilakukan dengan mewajibkan seluruh pengambil air tanah untuk menyediakan sumur serapan dalam agar jumlah air yang diambil dapat terisi kembali oleh adanya sumur resapan dalam tersebut. Selain itu juga , upaya konservasi dilakukan dengan membagi zonasi kondisi air tanah yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan zonasi tersebut diharapkan dapat diketahui dan dijaga kondisi dimana pengambilan air tanah pada zona kritis dibatasi.

4. **Pariwisata**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Kunjungan Wisata**

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bandung sejak tahun 2009-2010 sebanyak 53 obyek. Jumlah kunjungan ke-53 obyek wisata tersebut sebanyak 4.607.330 orang pada tahun



2010. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2008), di mana pada tahun 2006 jumlah yang berkunjung ke-49 obyek sebanyak 2.463.366 orang, pada tahun 2007 sebanyak 3.340.875 orang, pada tahun 2008 sebanyak 4.306.602 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 5.458.218 orang yang berkunjung ke 53 obyek. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 50.273 orang pada tahun 2006, sebanyak 68.181 orang pada tahun 2007, sebanyak 87.890 orang pada tahun 2008, sebanyak 111.392 orang pada tahun 2009 dan sebanyak 123.869 orang pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	49	49	49	49	53
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	2.463.366	3.340.875	4.306.602	5.458.218	6.069.539
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	50.273	68.181	87.890	111.392	123.869

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

- **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa (termasuk jasa pariwisata) terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 2.434.375,72 (5,28 %) dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 1.056.862,46 (4,86 %). Bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009 persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku cenderung mengalami peningkatan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.108
Kontribusi Sektor Jasa-jasa (Termasuk Jasa Pariwisata)
Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 -2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Jasa-Jasa (Termasuk Jasa Pariwisata)					
	- ADH Berlaku	1.499.027,98	1.721.159,87	1.936.315,52	2.173.715,40	2.434.375,72
	- ADH Konstan	856.789,53	911.462,80	955.207,67	1.000.817,32	1.056.862,46
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19



No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB					
	- ADH Berlaku	5.09	5.17	5.06	5.28	5,28
	- ADH Konstan	4.86	4.88	4.86	4.87	4,86

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

5. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tercatat sebanyak 8.122 ton. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 mencapai 20,26 kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung, di mana pada tahun 2006 jumlah konsumsi ikan mencapai 15,67 kg/kapita/tahun, pada tahun 2007 mencapai 16,10 kg/kapita/tahun, tahun 2008 mencapai 17,23 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2009 mencapai 18,73 kg/kapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.109
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Produksi Ikan (ton)					
	- Target	7.661	7.335	7.331	7.696	8.108
	- Realisasi	6.653	7.099	7.336	7.719	8.122
2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	15,67	16,10	17,23	18,73	20,26
3.	Persentase Konsumsi Ikan terhadap Realisasi Produksi	15,72	15,75	14,68	13,74	15,78

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

- **Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB**

Sektor perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 92.464.590.000,00 (0,209%) dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 38.226.500.000,00 (0,175%). Bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009 persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mengalami penurunan. Berikut adalah data lengkap mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.110
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Perikanan :					
	- ADH Berlaku	64.870,69	73.860,48	80.476,17	85.747,04	92.464,59
	- ADH Konstan	32.459,58	33.834,19	34.838,21	36.003,62	38.226,50
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thd PDRB					
	- ADH Berlaku	0,220	0,222	0,210	0,209	0,220
	- ADH Konstan	0,184	0,181	0,177	0,175	0,184

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

6. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Ekspor Bersih Perdagangan**

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp 456.850.398,57. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 40,14 % yaitu dari Rp 678.528.610,67 pada tahun 2007 menjadi Rp 406.188.974,51 pada tahun 2009. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.111
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Nilai Ekspor	619.866.460,86	678.528.610,67	507.346.266,81	406.188.974,51	456.850.398,57
2.	Nilai Impor	-	-	-	-	
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	619.866.460,86	678.528.610,67	507.346.266,81	406.188.974,51	456.850.398,57

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010.



- **Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB**

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 7.796.200.550.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.474.795.780.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar 16,914% berdasarkan harga berlaku dan 15,987% berdasarkan harga konstan, prosentase kontribusi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), yaitu prosentase kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga berlaku mencapai 15,062%, pada tahun 2007 mencapai 15,342%, pada tahun 2008 mencapai 15,684% dan pada tahun 2009 mencapai 16,561%, prosentase kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga konstan mencapai 14,881%, pada tahun 2007 mencapai 15,092%, pada tahun 2008 mencapai 15,222% dan pada tahun 2009 mencapai 15,642%.

Berikut disajikan data secara lengkap mengenai kontribusi sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.112
Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)
terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) :					
	- ADH Berlaku	4.432.799,58	5.112.043,54	6.005.197,92	6.780.385,10	7.796.200,55
	- ADH Konstan	2.625.092,39	2.819.715,77	2.994.763,36	3.211.263,99	3.474.795,78
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) thd PDRB					
	- ADH Berlaku	15,062	15,342	15,684	16,561	16,914
	- ADH Konstan	14,881	15,092	15,222	15,642	15,987

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

7. Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- **Pertumbuhan Industri**

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari 701 industri menjadi 751 industri pada tahun



2010. Peningkatan ini terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 535 industri, dan pada tahun 2010 berjumlah 580 industri.

Apabila dilihat dari tabel pertumbuhan industri, mengalami kenaikan setiap tahunnya pada industri kecil dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dengan kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 144 industri kecil. Pada industri menengah juga mengalamikenaikan sebanyak 38 industri, sedangkan industri besar naik sebanyak 16 industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

Tabel Industri Aglomika

No	Tahun	Industri Agro			Industri Kimia			Industri Elektronik			Jml Indust. Besar	Jml Indust Menengah	Jml Indust kecil.
		Besar	Mengah	Kecil	Besar	Mengah	Kecil	Besar	Mengah	Kecil			
1	2006	16	13	51	4	19	67	2	7	28	22	36	146
2	2007	18	21	61	6	24	92	4	8	39	28	53	192
3	2008	18	21	65	6	30	99	4	8	41	28	59	205
4	2009	19	22	69	9	30	103	4	9	42	32	61	214
5	2010	19	22	69	10	30	106	5	9	43	34	61	218

Tabel Industri Aneka

No	Tahun	Industri tekstil dan produk tekstil			Industri kulit dan produk kulit			Industri kerajinan dan aneka			Jml Indust. Besar	Jml Indust Menengah	Jml Indust kecil.
		Besar	Mengah	Kecil	Besar	Mengah	Kecil	Besar	Mengah	Kecil			
1	2006	26	30	250	2	1	15	-	-	25	28	31	290
2	2007	27	32	260	2	1	16	-	1	26	29	34	302
3	2008	28	34	265	2	2	17	-	2	27	30	36	309
4	2009	29	36	275	2	3	17	-	3	29	31	42	321
5	2010	30	37	300	2	3	30	-	4	32	32	44	362

Tabel Total Pertumbuhan Industri

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Industri Besar	50	57	58	63	66
2	Industri Menengah	67	87	101	103	105
3	Industri Kecil	436	494	514	535	580
Jumlah total industri		553	638	673	701	751

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009.

- **Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB**

Sektor perindustrian di Kabupaten Bandung berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai 59,601 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 60,611 %. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009) persentase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2006-2009 berdasarkan harga berlaku masing-masing sebesar 60,739 %; 60,487 %; 60,788 % dan 59,601 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 61,444 %; 61,436 %; 61,556 % dan 60,002 %.



Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.114
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Perindustrian :					
	- ADH Berlaku	17.876.119,11	20.154.147,70	23.275.745,49	24.721.851,70	27.471.535,02
	- ADH Konstan	10.838.753,39	11.478.643,51	12.110.396,65	12.517.223,96	13.173.587,93
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	60,739	60,487	60,788	60,002	59,601
	- ADH Konstan	61,444	61,436	61,556	60,982	60,611

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

8. Transmigrasi

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan transmigrasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Transmigrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan transmigrasi bedol desa. Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2009 terdapat 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yang dijajaki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai daerah tujuan transmigrasi, yaitu: Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kurubaya

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah



berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/ angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan)), dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan/Angka Konsumsi Rata-rata RT per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pada tahun 2009 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp 334.757,00, terdiri dari : bahan pangan sebesar Rp 211.395,00 dan non pangan sebesar Rp 123.362,00. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007, di mana pada tahun 2006 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan baik pangan maupun non pangan sebesar Rp 217.616,00 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 333.830. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.115
Angka Konsumsi Rata-rata RT per Kapita Sebulan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2009 (Rupiah)

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Pengeluaran rata-rata RT per kapita sebulan (pangan)	124.562	157.610	211.395	211.395
2.	Pengeluaran rata-rata RT per kapita sebulan (non pangan)	93.054	176.220	123.362	123.362
3.	Jumlah pengeluaran RT per kapita sebulan (pangan+non pangan)	217.616	333.830	334.756	334.757

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

2. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Sektor/lapangan usaha di Kabupaten Bandung yang menunjang PDRB Kabupaten Bandung terdiri dari 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, yaitu : pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Dari ke-9 sektor/lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor/lapangan usaha industri pengolahan, disusul kemudian oleh sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Sektor/lapangan usaha yang kontribusinya paling kecil adalah sektor/lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Pada tahun 2010 kontribusi sektor/lapangan usaha industri pengolahan mencapai Rp 27.471.535,020.000,00 (59.601 %), angka ini menurun bila dibandingkan dengan kurun waktu tahun 2006-2009 dengan rata-rata mencapai 60 %. Berbeda dengan sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, sektor ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada tahun 2010 sektor/lapangan usaha ini berkontribusi sebesar Rp 7.796.200,550.000,00 (16.91 %) sedangkan pada kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata hanya mencapai 15 %.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (ADH berlaku) di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010



Tabel 2.116
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010
(dlm jutaan rupiah)

No.	Sektor/ Lapangan Usaha	2006		2007		2008		2009		2010	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	PDRB	29.431.046,06		33.319.630,76		38.282.169,45		41.201.900,67		46.092.238,72	
1.1	Pertanian	2.228.624,62	7,57	2.465.321,20	7,40	2.728.755,88	7,19	3.013.007,10	7,36	3.471.661,92	7,53
1.2	Pertambangan & Penggalian	368.568,14	1,25	419.179,42	1,26	468.303,80	1,22	526.035,13	1,28	580.783,81	1,26
1.3	Industri Pengolahan	17.876.119,11	60,74	20.154.147,70	60,49	23.275.745,49	60,79	24.721.851,70	60,00	27.471.535,02	59,60
1.4	Listrik,Gas & Air bersih	524.707,23	1,78	588.412,88	1,77	642.658,74	1,68	674.520,69	1,65	741.188,33	1,61
1.5	Konstruksi	506.056,81	1,72	571.271,13	1,71	648.394,06	1,69	696.720,83	1,70	764.990,68	1,66
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4.432.799,58	15,06	5.112.043,54	15,34	6.005.197,92	15,68	6.780.385,10	16,56	7.796.200,55	16,91
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	1.360.838,71	4,62	1.566.528,90	4,70	1.783.920,50	4,61	1.795.161,77	4,38	1.933.148,22	4,19
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	634.303,86	2,16	721.566,11	2,17	792.877,54	2,07	820.502,95	2,00	898.354,49	1,95
1.9	Jasa-jasa	1.499.027,98	5,09	1.721.159,87	5,17	1.936.315,52	5,06	2.173.715,40	5,05	2.434.375,72	5,28

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari : aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

1. Aksesibilitas daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/ prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 1 : 843, ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km, dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 843 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2007 dan 2008, yang mana pada tahun 2007 dan 2008, ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1 : 176 dan 1 : 182, yang berarti bahwa setiap panjang jalan



sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 176 kendaraan (Tahun 2007) dan sebanyak 182 kendaraan (Tahun 2008).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2010 lebih banyak atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008,. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 s.d. 2008 dan 2010

No.	Uraian	2007	2008	2010
1.	Panjang Jalan	1.227,03	1.154,55	1.155,36
2.	Jumlah Kendaraan :			
	- Roda 4	49.944,00	28.411,00	120.719,00
	- Roda 2	148.220,00	181.605,00	853.212,00
	Jumlah	198.164,00	210.016,00	973.931,00
3.	Rasio	1 : 176	1 : 182	1 : 843

*Sumber : Data Samsat Kabupaten Bandung Tahun 2010,
BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2007- 2008).*

2. Penataan wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Bandung diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2007-2027. Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu : kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi : kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam). Rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung seluas 46.171,71 ha sedangkan rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan budidaya seluas 130,066.96 ha.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

3. Fasilitas bank dan non bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi : bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2009, jumlah bank umum di Kabupaten Bandung seluruhnya berjumlah 89 unit, terdiri dari : 81 unit bank umum konvensional dan 8 unit bank umum syariah. Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) seluruhnya berjumlah 24 unit, ke-24 unit tersebut adalah BPR konvensional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.118
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Bandung
Tahun 2009

No.	Uraian	2009
1.	Bank Umum	89
1.1.	Konvensional	81
1.2.	Syariah	8
2.	BPR	24
2.1.	Konvensional	24
2.2.	Syariah	-
Jumlah		113

Sumber : Bagian Perekonomian – Setda Kabupaten Bandung pada Tahun 2010.

4. Ketersediaan air bersih

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan air bersih salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Air bersih (*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas : ledeng (perpipaan), sumur Lindung, sumur tidak Terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan, air kemasan, pompa dan sumber air lainnya.

Pada tahun 2009, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bandung sebanyak 832.806 rumah tangga atau mencapai 94,03 % dari total jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu terdiri dari : jumlah pengguna air bersih bersumber dari : ledeng sebanyak 62.032 rumah tangga, sumur lindung sebanyak 266.367 rumah tangga, sumur tidak terlindung sebanyak 23.653 rumah tangga, mata air terlindung sebanyak 145.031 rumah tangga, mata air tidak terlindung sebanyak 26.313 rumah tangga, sungai sebanyak 294 rumah tangga, air hujan sebanyak 1.227 rumah tangga, air kemasan sebanyak 164.183 rumah tangga, pompa sebanyak 195.193 rumah tangga dan air lainnya sebanyak 1.381 rumah tangga. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah pengguna air bersih pada tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2008, di mana persentase pengguna air bersih pada tahun 2006 mencapai 85,14 % dan pada tahun 2008 mencapai 81,95 %. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah pengguna air bersih pada tahun 2009 mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2007 jumlah pengguna air bersih mencapai 95,44 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.119
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 s.d. 2009

No.	Sumber Air Berih	2006	2007	2008	2009
1.	Ledeng (Perpipaan)	46.474	44.669	77.255	62.032
2.	Sumur Lindung	304.614	309.031	5.206	266.367



No.	Sumber Air Berih	2006	2007	2008	2009
3.	Sumur Tidak Terlindung	41.847	41.944	167.849	23.653
4.	Mata Air Terlindung	114.636	103.711	330.513	145.031
5.	Mata Air Tidak Terlindung	32.797	32.592	36.763	26.313
6.	Sungai	3.171	-	112.970	294
7.	Air Hujan	-	-	20.366	1.227
8.	Air Kemasan	34.868	59.030	16.317	164.183
9.	Pompa	179.397	188.097	35.465	195.193
10.	Air lainnya	-	3.054	14.128	1.381
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	645.006	746.481	669.368	832.806
12.	Jumlah Rumah Tangga	757.594	782.127	816.832	885.674
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	85,14	95,44	81,95	94,03

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

5. Fasilitas listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 535.975 rumah tangga atau mencapai 71.17 % dari jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu terdiri dari : rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 watt sebanyak 214.390 rumah tangga, dengan daya listrik 900 watt sebanyak 125.954 rumah tangga, dengan daya listrik 1.300 watt sebanyak 88.436 rumah tangga, dengan daya listrik 2.200 watt sebanyak 58.957 rumah tangga, dengan daya listrik > 2.200 watt sebanyak 48.238 rumah tangga. Persentase yang menggunakan listrik pada tahun 2009 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana pada tahun 2006 persentase pengguna listrik mencapai 70,72 %, pada tahun 2007 mencapai 70.87 % dan pada tahun 2008 mencapai 71.02 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.120
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	RT dengan daya 450 watt	155.185	159.264	163.648	170.454	178.594
2.	RT dengan daya 900 watt	91.171	93.567	96.143	100.142	178.594
3.	RT dengan daya 1.300 watt	60.014	65.696	67.505	70.312	73.670
4.	RT dengan daya 2.200 watt	42.676	43.798	45.003	46.875	49.113
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	34.917	35.834	36.821	38.352	40.184



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	387.963	398.159	409.119	426.136	446.484
7.	Jumlah Rumah Tangga	750.122	753.091	756.368	766.983	773.053
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (rasio elektifikasi) (6)/(7)	51.72%	52.87%	54.09%	55.56%	57.76%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung, Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2009).

6. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2006-2010 jumlah restoran dan rumah makan yang berhasil di data oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung belum banyak mengalami perubahan terutama pada tahun 2007-2009. Pada tahun 2006 jumlah restoran di Kabupaten Bandung sebanyak 6 restoran sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 378 rumah makan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 40 restoran dan 467 restoran pada tahun 2007-2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jenis Usaha Restoran	6	40	40	40	40
2.	Jenis Usaha Rumah Makan	378	467	467	467	467

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2010.

7. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel/penginapan.

Pada tahun 2009, jumlah penginapan di Kabupaten Bandung sebanyak 29 buah, terdiri dari : hotel bintang 3sebanyak 2 unit dan hotel non bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 27 unit. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2007-2008, namun tidak demikian dengan kondisi tahun 2006. Pada tahun 2006 total jumlah pengipanan di Kabpaten Bandung sebanyak 60 unit, terdiri dari : hotel bintang 4 sebanyak 1 unit, hotel bintang 3 sebanyak 3 unit dan hotel non bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 56 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.122
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
2.	Hotel Bintang 4	1	-	-	-	-
3.	Hotel Bintang 3	3	2	2	2	2
4.	Hotel Bintang 2	-	-	-	-	-
5.	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	56	27	27	27	27
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	60	29	29	29	29

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bandung.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, peneanaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

1. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah tindak kriminal di Kabupaten Bandung sebanyak 9 (sembilan) kasus, yaitu tindak kriminal pembunuhan, kasus pencurian, dan kasus penganiayaan. Dari data ini dapat diketahui bahwa angka kriminal di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,000288; ini artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) tindak kriminal. Kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123
Angka kriminalitas di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah kasus Narkoba	2	0 ^{*)}	0 ^{*)}	0 ^{*)}	0 ^{*)}
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	16	12	1	6	2
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0 ^{*)}	13	2	0 ^{*)}	0 ^{*)}
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	0	31	0 ^{*)}	0 ^{*)}	3
5.	Jumlah kasus Pencurian	6	67	2	0 ^{*)}	4
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	25	2	0 ^{*)}	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0 ^{*)}	0 ^{*)}	0 ^{*)}	0 ^{*)}	0 ^{*)}



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	24	148	7	6	9
9.	Jumlah Penduduk	2994551	3038082	3116056	3148951	3125548
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9) per 10.000 jumlah penduduk	0,000801456	0,004871	0,000225	0,000191	0,000288

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

*): Data tidak tersedia

2. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi "demo" merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Semakin sedikit jumlah demonstrasi, maka semakin tinggi tingkat kesepahaman dan semakin tinggi pula tingkat kestabilan kondisi keamanan suatu wilayah.

Pada tahun 2009 jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung sebanyak 40 kejadian, terdiri dari : demonstrasi bidang politik sebanyak 9 kejadian, bidang ekonomi sebanyak 13 kejadian dan kasus pemogokan kerja sebanyak 18 kejadian. Jumlah kejadian ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008, namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007, di mana pada tahun 2006 jumlah demonstrasi/unjuk rasa sebanyak 28 kejadian, tahun 2007 sebanyak 20 kejadian dan pada tahun 2008 sebanyak 45 kejadian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.124
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d. 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Bidang Politik	1	-	6	9	3
2.	Ekonomi	5	2	10	13	3
3.	Kasus pemogokan kerja	22	18	29	18	5
4.	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	28	20	45	40	11

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

3. Kemudahan perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Jenis perizinan yang ditangani Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 11 jenis perizinan, terdiri dari : izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP, IUI, TDI, IMB, HO, , IPT, izin reklame, IPLC dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta jumlah persyaratan dan biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.125
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung
Tahun 2010

No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	5	6	30.000
2.	SITU	5	6	400
3.	TDP	5	5	20.000
4.	IUI	14	10	75.000
5.	TDI	14	5	30.000
6.	IMB	60	12	8.000
7.	HO	14	11	250
8.	IPT	14	14	150
9.	Reklame	14	1	Biaya bervariasi
10.	IPLC	14	13	6.000.000
11.	Jasa Konstruksi	4	12	100.000

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2010.

4. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.126
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Pajak Daerah	57.334.770.199,51	54.391.453.802,20	51.654.333.709,60	47.951.110.528,00	59.385.578.062,00
	Pajak Hotel	1.630.296.849,96	2.013.001.546,90	521.130.207,60	481.269.352,00	1.122.094.256,00
	Pajak Restoran	2.935.352.381,30	2.807.585.410,90	2.022.405.964,86	2.486.992.882,00	3.541.972.662,00
	Pajak Hiburan	1.321.309.950,00	1.454.863.194,90	1.822.568.665,00	2.146.174.144,00	2.063.299.025,00
	Pajak Reklame	1.948.182.431,25	1.745.262.742,50	1.818.712.879,50	1.599.992.419,00	2.022.621.402,00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	Pajak Penerangan Jalan	48.500.375.392,00	45.447.027.174,00	45.332.157.472,64	41.035.282.809,00	50.234.236.814,00
	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	965.155.295,00	890.939.233,00	61.134.120,00	64.681.980,00	108.188.999,00
	Pajak Parkir	34.097.900,00	32.774.500,00	76.224.400,00	136.716.942,00	293.164.904,00
2.	Retribusi	40.907.499.229,32	44.750.349.784,97	36.067.479.245,10	40.870.885.107,00	60.370.841.839,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	30.401.111.973,00	33.210.256.240,00	29.122.980.499,00	32.380.883.654,00	50.640.948.750,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	2.270.582.638,00	2.324.125.975,00	1.609.269.878,00	1.840.236.134,00	2.451.180.000,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	8.235.804.618,32	9.215.967.569,97	5.335.228.868,10	6.649.765.319,00	8.022.691.887,00

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2011.

5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi : Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikut adalah gambaran ketersediaan perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.127
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Perda terkait perizinan	-	1	-	-	1
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	3	7	4	4	-
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	1	1	-

Sumber : Bagian Hukum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

Adapun gambaran ketersediaan Perda yang telah dihasilkan kurun waktu 2006 – 2010 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.128
Ketersediaan Perda di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
1.	01 / 2006	Perubahan atas Perda No 8 / 2004 ttg kedudukan Protokoler dan Keuangan	16 Feb 06	16 Feb 06	1

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
		Pimpinan Anggota DPRD Kab Bandung			
2.	02 / 2006	Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung	16 Feb 06	16 Feb 06	2
3.	03 / 06	Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kab Bandung	16 Feb 06	16 Feb 06	3
4.	04 / 06	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2006	8 Mar 06	8 Mar 06	4
5.	05 / 06	RPJMD			5
6.	06 / 06	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab Bandung th 2006 s/d 2016	10 Mei 06	10 Mei 06	6
7.	07 / 06	Badan Permusyawaratan Desa	10 Mei 06	10 Mei 06	7
8.	08 / 06	Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 Mei 06	10 Mei 06	8
9.	09 / 06	Pembentukan PT. Citra Marga Sarana (PERSERO) Kab. Bandung	10 Mei 06	10 Mei 06	9
10.	10 / 06	Perubahan Atas Peraturan Daerah No.7 Th 2002 ttg Pembentukan Perangkat Daerah Kab Bandung	10 Mei 06	10 Mei 06	10
11.	11 / 06	Perubahan Atas Perda No. 8/2002 ttg Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab Bandung	10 Mei 06	10 Mei 06	11
12.	12 / 06	Perubahan Atas Perda No. 9/2002 ttg Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung	10 Mei 06	10 Mei 06	12
13.	13 / 06	Perubahan Atas Perda No.10/2002 ttg Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung	10 Mei 06	10 Mei 06	13
14.	14 / 06	Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamongpraja	10 Mei 06	10 Mei 06	14
15.	15 / 06	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2005	18 Juli 06	18 Juli 06	15
16.	16 / 06	Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kab Bandung	15 nop 06	15 nop 06	16
17.	17 / 06	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006	29 nop 06	29 nop 06	17
18.	01 / 2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007	1 Mar 07	1 Mar 07	1
19.	02 / 2007	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	28 Mar 07	28 Mar 07	2
20.	03 / 07	Pengelolaan Barang Milik Daerah			3
21.	04 / 07	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.Bank Jabar, PD.Air Minum, PD. BPR dan Atau Lembaga Keuangan Lainnya			4
22.	05 / 07	Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah	28 Maret 07	28 Maret 07	5
23.	06 / 07	Perubahan Kedua Atas Perda No.8/2004 Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Bandung	28 Mar 07	28 Mar 07	6
24.	07 / 07	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006	22 Agust 07	22 Agust 07	7
25.	08 / 07	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kab Bandung			8
26.	09 / 07	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan	29 okt 07	29 okt 07	9
27.	10 / 07	Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang	29 okt 07	29 okt 07	10

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
		Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa di Lingkungan Pemkab Bandung			
28.	11 / 07	Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa	29 okt 07	29 okt 07	11
29.	12 / 07	Lembaga Kemasyarakatan	29 okt 07	29 okt 07	12
30.	13 / 07	Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa	29 okt 07	29 okt 07	13
31.	14 / 07	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	29 Okt 07	29 Okt 07	14
32.	15 / 07	Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan	29 Okt 07	29 Okt 07	15
33.	16 / 07	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007	20 nop 07	20 nop 07	16
34.	17 / 07	Urusan Pemerintahan Kab Bandung	12 Des 07	17 Des 07	17
35.	18 / 07	Pembentukan Kecamatan Kutawaringin	12 Des 07	9 Jan 08	18
36.	19 / 07	Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab Bandung			19
37.	20 / 07	Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab Bandung			20
38.	21 / 07	Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab Bandung			21
39.	22 / 07	Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kab Bandung			22
40.	23 / 07	Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan			23
41.	24 / 07	Penyertaan Modal Pemda Kepada PD Air Minum Tirtaraharja Kab Bandung			24
42.	25 / 07	Penyertaan Modal Pemda Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kab Bandung			25
43.	01 / 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008	31 Mar 08	31 Mar 08	1
44.	02 / 2008	Pembentukan Desa Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung	19 Agust 08	19 Agust 08	2
45.	03 / 08	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Bandung Th 2007 s/d 2027	19 Sept 08	19 Sept 08	3
46.	04 / 08	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2007	19 Agust 08	19 Agust 08	4
47.	05 / 08	Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung	22 Agust 08	22 Agust 08	5
48.	06 / 08	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab Bandung No 23 Th 2007 ttg Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan	7 Okt 08	7 Okt 08	6
49.	07 / 08	Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah	9 Okt 08	9 Okt 08	7
50.	08 / 08	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat	13 Okt 08	13 Okt 08	8
51.	09 / 08	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4 Nop 08	4 Nop 08	9
52.	10 / 08	Penanggulangan Kemiskinan di Kab Bandung	5 Nop 08	5 Nop 08	10
53.	01 / 2009	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan	19 maret 09	19 maret 09	1
54.	02 / 2009	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23 maret 09	23 maret 09	2

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
		Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung			
55.	03 / 09	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung	30 maret 09	30 maret 09	3
56.	04 / 09	Pembubaran Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung	02 april 09	02 april 09	4
57.	05 / 09	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	06 april 09	06 april 09	5
58.	06 / 09	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	17 april 09	17 april 09	6
59.	07 / 09	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	29 april 09	29 april 09	7
60.	08 / 09	Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung	04 mei 09	04 mei 09	8
61.	09 / 09	Izin Penyelenggaraan Reklame	04 mei 09	04 mei 09	9
62.	10 / 09	Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung	15 juli 09	15 juli 09	10
63.	11 / 09	Dokumen Pengelolaan Lingkungan	15 juli 09	15 juli 09	11
64.	12 / 09	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin	15 juli 09	15 juli 09	12
65.	13 / 09	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Bandung TA 2008	5 agust 09	5 agust 09	13
66.	14 / 09	Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung	20 agust 09	20 agust 09	14
67.	15 / 09	Rumah Susun (Rusun)	20 agust 09	20 agust 09	15
68.	16 / 09	Tata Bangunan	20 agust 09	20 agust 09	16
69.	17 / 09	Pajak Restoran	20 agust 09	20 agust 09	17
70.	18 / 09	Pajak Penerangan Jalan	20 agust 09	20 agust 09	18
71.	19 / 09	Pajak Reklame	20 agust 09	20 agust 09	19
72.	20 / 09	Pembangunan, Pengendalian Dan Pengelolaan Pasar	20 agust 09	20 agust 09	20
73.	21 / 09	Pengelolaan Sampah	20 agust 09	20 agust 09	21
74.	22 / 09	Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama Di Kabupaten Bandung	20 agust 09	20 agust 09	22
75.	23 / 09	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung	20 agust 09	20 agust 09	23
76.	24 / 09	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa	24 agust 09	24 agust 09	24
77.	25 / 09	Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung	24 agust 09	24 agust 09	25
78.	26 / 09	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kab Bandung	24 agust 09	24 agust 09	26
79.	01 / 2010	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kab Bandung	11 Feb 2010	11 Feb 2010	1
80.	02 / 2010	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kab Bandung	29 mar 2010	29 mar 2010	2

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015**



No	No/ Tahun	Tentang	Tgl ditetapkan	Tgl diundangkan	No. Seri
81.	03 / 2010	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kab Bandung	29 mar 2010	29 mar 2010	3
82.	04 / 2010	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kab Bandung	29 mar 2010	29 mar 2010	4
83.	05 / 2010	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bandung TA 2010	08 apr 2010	08 apr 2010	5
84.	06 / 2010	Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3 mei 2010	3 mei 2010	6
85.	07 / 2010	Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air	30 Juni 2010	30 Juni 2010	7
86.	08 / 2010	Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	6 Sept 2010	6 Sept 2010	8
87.	09 / 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol	6 Sept 2010	6 Sept 2010	9
88.	10 / 2010	Pencabutan Peraturan Daerah Kab Bandung No 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat	6 Sept 2010	6 Sept 2010	10
89.	11 / 2010	Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bandung	20 Sept 2010	20 Sept 2010	11
90.	12 / 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 20 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Dinas Daerah Kab Bandung	20 Sept 2010	20 Sept 2010	12
91.	13 / 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 9 tahun 2006 Tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (PERSERO) di Kab Bandung	29 Okt 2010	29 Okt 2010	13
92.	14 / 2010	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Citra Bangun Sarana Kab Bandung	29 Okt 2010	29 Okt 2010	14
93.	15 / 2010	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	18 Nop 2010	18 Nop 2010	15
94.	16 / 2010	Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kab Bandung.	18 Nop 2010	18 Nop 2010	16
95.	17 / 2010	Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kab Bandung.	18 Nop 2010	18 Nop 2010	17
96.	18 / 2010	Pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).	18 Nop 2010	18 Nop 2010	18
97.	19 / 2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2009.	26 Nop 2010	26 Nop 2010	19
98.	20 / 2010	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 Kab Bandung.	26 Nop 2010	26 Nop 2010	20

Sumber : Bagian Hukum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

6. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah desa/kelurahan swadaya, swakarya, dan swasembada di Kabupaten Bandung tahun 2008-2010.



Tabel 2.129
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
di Kabupaten Bandung
Tahun 2008 s.d. 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	97	97	97
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	104	104	104
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	75	75	75
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	276	276	276
5.	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	27,17	27,17	27,17

Sumber : *Bagian Pemerintahan Umum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.*

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.130
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 s.d 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Rasio ketergantungan	51.81	51.93	52,19	48,95	54.10

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung selama periode tahun 2006 -2010 meliputi:

- Penerimaan Pendapatan Daerah terbesar terjadi di tahun 2010 sebesar Rp 2.042.977.659.292, hal ini disebabkan adanya kontribusi dari pos Dana Alokasi Khusus (DAK), pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.
- Pengeluaran Belanja Daerah terbesar juga terjadi di tahun 2010 sebesar Rp 2.106.019.303.925,70; hal ini disebabkan adanya pengeluaran untuk pos Belanja Pegawai, dan pos Belanja Hibah yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.
- Penerimaan Pembiayaan terbesar juga terjadi di tahun 2010 sebesar Rp 340.911.271.658,76; hal ini disebabkan adanya penerimaan dari pos SILPA, dan pos Penyertaan Modal (Investasi) yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu
- Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi di tahun 2007 sebesar Rp 96.065.617.975, hal ini disebabkan adanya pengeluaran untuk pos Pembentukan Dana Cadangan, dan pos Penyertaan Modal (Investasi) yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 157 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung pasal 20 (1) terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah.

Hasil pajak daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol. C, dan Pajak Parkir.

b. Hasil Retribusi Daerah.

Hasil retribusi daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pelayanan Kesehatan, RSD Majalaya, RSD Soreang, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Penggantian Biaya Cetak KTP, Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil, Pelayanan Pemakaman, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Fatwa Pengarahan Rencana Pemanfaatan Lokasi, Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Pemanfaatan Hutan, Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, Perijinan Perdagangan, Jasa Usaha Terminal, Perijinan Industri, Jasa Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata, Jasa Usaha Penyedotan Kakus, Jasa Usaha RPH, Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR, Izin Pembuangan Limbah Cair, Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah,



Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, Perijinan Transportasi, Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan, Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.

c. **Bagian Laba Usaha Daerah.**

Hasil Bagian Laba Usaha Daerah di Kabupaten Bandung terdiri dari: PDAM, Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan, Bank Karya Produksi Desa.

d. **Lain-lain PAD yang Sah.**

Hasil Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Bandung terdiri dari: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Penerimaan Lainnya, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR).

2. Dana Perimbangan, Terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

1) **Bagi Hasil Pajak.**

Bagi hasil pajak di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh 21).

2) **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.**

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung terdiri dari: Iuran Provisi Sumber Daya Alam, Iuran Tetap/Landrent, Iuran Eksploitasi (Royalti), Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan, Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi, Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Dana Alokasi Khusus.

d. Dana Perimbangan dari Propinsi.

Dana Perimbangan dari Propinsi di Kabupaten Bandung terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Bantuan Keuangan dari Propinsi, Penerimaan Pemanfaatan Hutan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasar pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, selain unsur PAD yang telah disebut di atas, pasal 6(2) menjelaskan tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pendapatan Daerah tersebut setiap tahun harus dioptimalkan penerimaannya, khususnya PAD yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah pada periode tahun 2006 - 2010 yaitu:

- Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,22%. Penerimaan terbesar dari PAD terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan tahun lainnya pada periode ini. Namun Lain-lain PAD yang Sah, justru mengalami penurunan di tahun 2010.
- Pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 4,72%. Penerimaan terbesar dari Dana Perimbangan terjadi pada tahun 2007, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana Alokasi Umum; sedangkan penerimaan terbesar dari Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak terjadi pada tahun 2009; dan penerimaan terbesar dari Dana Alokasi Khusus terjadi pada tahun 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



- Pertumbuhan rata-rata Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 23,40%. Penerimaan terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; sedangkan penerimaan terbesar Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya terjadi pada tahun 2006.

Secara lengkap perincian mengenai alokasi penerimaan pendapatan periode tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010 Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.595.635.586.333,23	1.851.603.232.494,05	1.467.678.537.174,08	1.955.142.904.011,00	2.042.977.659.292,00	8,25%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	137.532.499.196,23	147.630.987.490,05	144.660.409.277,08	153.271.649.974,00	198.658.826.439,00	10,22%
1.1.1.	Pajak daerah	57.334.770.599,51	54.391.453.802,20	51.654.333.709,60	47.951.110.528,00	59.385.578.062,00	1,63%
1.1.2.	Retribusi daerah	40.907.499.229,32	44.750.349.784,97	36.067.479.245,10	41.592.879.257,00	60.254.329.366,00	12,54%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	19.173.811.516,00	24.386.963.267,00	35.674.088.462,00	43.280.145.688,00	52.790.345.015,00	29,19%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	20.116.417.851,40	24.102.220.635,88	21.264.507.860,38	20.447.514.501,00	26.228.573.996,00	8,12%
1.2.	Dana Perimbangan	1.294.064.416.457,00	1.519.650.675.014,00	1.132.888.252.124,00	1.444.122.553.979,00	1.436.030.033.073,00	4,72%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	93.714.268.191,00	153.249.020.498,00	112.566.362.458,00	123.122.062.283,00	150.591.707.804,00	17,17%
1.2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	10.885.148.266,00	5.001.554.516,00	7.767.820.666,00	210.157.050.696,00	80.252.415.269,00	636,23%
1.2.3.	Dana alokasi umum	1.168.636.000.000,00	1.351.912.000.000,00	1.001.542.069.000,00	1.080.215.507.000,00	1.086.282.210.000,00	-0,45%
1.2.4.	Dana alokasi khusus	20.829.000.000,00	9.488.100.000,00	11.012.000.000,00	30.627.934.000,00	118.903.700.000,00	106,99%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	164.038.670.680,00	184.321.569.990,00	190.129.875.773,00	357.748.700.058,00	408.288.799.780,00	23,40%
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat		3.000.000.000,00		44.266.548.000,00	-	0,00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)		109.693.954.850,00	108.748.711.214,00	112.040.363.851,00	118.058.122.758,00	26,32%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)		8.703.546.800,00	10.570.533.600,00	53.130.359.000,00	172.051.700.400,00	70,38%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	164.038.670.680,00	62.924.068.340,00	70.696.897.479,00	148.311.429.207,00	118.178.976.622,00	-10,16%
1.3.5	Pendapatan Lainnya			113.733.480,00			0,00%



Permasalahan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung yaitu:

- Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan.
Penatalaksanaan keuangan APBD berawal dari sumber daya pengelola keuangan. Selama periode tahun 2006-2010 SDM pengelola keuangan sering dilakukan upaya peningkatan kualitasnya baik pengetahuan dan keterampilan, namun upaya peningkatan tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh antara lain;
 1. Adanya mutasi pegawai pengelola keuangan dengan pegawai baru yang belum sama sekali mengenal tentang keuangan, artinya adanya kekurangan tepatan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.
 2. Program dan pelatihan keuangan diperlukan jangka panjang dan terstruktur, semisal setara diploma 1.
 3. Perekrutan tenaga keuangan dan akuntansi masih sangat minim, padahal setiap SKPD, unit SKPD, atau bagian SKPD memerlukan tenaga pengelolaan keuangan dan akuntansi.
- Tatakelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan yang meliputi;
 1. Kesalahan prosedural akuntansi untuk transaksi yang terjadi;
 2. Terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja sering terhambat, penatausahaan pada bagian keuangan tidak tepat waktu;
 3. Pengendalian keuangan belum terlaksana sepenuhnya, karena data keuangan belum dapat siap setiap saat dibutuhkan (*real time of data*), dalam arti angka-angka yang disajikan belum final.

Potensi dan tantangan perkembangan APBD Kabupaten Bandung di masa mendatang yaitu:

- Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, seperti Pajak BPHTB, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung, urusan wajib dan urusan pilihan dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bandung serta pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka



memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2006-2010 sebagai berikut:

- Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah mencapai 3,13%, kenaikan signifikan terjadi pada Aset Lancar sebesar 11,54%; Investasi Jangka Panjang sebesar 10,59%; Aset Tetap sebesar 1,99%; dan Dana Cadangan sebesar 16,91%; Aset Lainnya sebesar 403,24%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Bandung berada pada kondisi sehat.
- Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana mencapai 3,13%, penurunan terjadi pada Kewajiban sebesar -17,87%; Ekuitas Dana Lancar meningkat sebesar 12,84%; Ekuitas Dana Investasi meningkat sebesar 2,59%; dan Ekuitas Dana Cadangan meningkat sebesar 16,91%. Tingginya pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 beserta prosentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
							Pertumbuhan %
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	250.535.025.708,25	219.111.595.558,85	191.526.788.054,58	351.013.724.821,26	308.941.232.345,78	11,54%
1.1.1.	Kas	225.993.089.522,31	188.098.978.211,36	157.140.199.862,85	321.211.280.186,47	260.614.672.312,04	13,08%
1.1.2.	Piutang	16.166.791.559,13	21.450.900.260,33	17.134.943.777,50	14.249.762.254,85	17.746.616.652,77	5,07%
1.1.3.	Persediaan	8.375.144.626,81	9.561.717.087,16	17.251.644.414,23	15.552.682.379,94	30.579.943.380,97	45,34%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	159.709.750.865,42	229.237.750.865,42	220.533.035.650,03	226.106.783.791,08	248.166.160.285,74	10,59%
1.2.1.	Investasi Non Permanen	4.846.850.000,00	4.846.850.000,00	14.846.850.000,00	14.846.850.000,00	14.264.968.129	50,60%
1.2.2.	Investasi Permanen	154.862.900.865,42	224.390.900.865,42	205.686.185.650,03	211.259.933.791,08	233.901.192.157	12,50%
1.3.	ASET TETAP	2.966.151.768.252,36	3.342.890.079.282,36	3.538.063.595.810,36	3.782.314.440.699,00	3.120.351.244.770,00	1,99%
1.3.1.	Tanah	653.615.645.236,00	682.567.537.643,00	696.526.308.461,00	659.338.032.807,00	499.568.609.742,00	-5,77%
1.3.2.	Peralatan dan mesin	158.751.704.072,36	188.593.597.574,96	224.586.781.725,06	300.846.842.517,00	297.618.894.617,00	17,69%
1.3.3.	Gedung dan bangunan	952.449.543.818,00	1.061.862.648.812,00	1.194.201.548.511,90	1.283.048.154.007,00	1.009.635.580.606,00	2,52%
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.128.395.089.926,00	1.288.992.878.717,40	1.320.478.598.817,40	1.494.945.501.571,00	1.281.646.558.618,00	3,90%
1.3.5.	Aset tetap lainnya	65.708.039.130,00	78.107.445.465,00	79.832.943.225,00	19.394.569.088,00	17.202.642.479,00	-16,48%
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	7.231.746.070,00	42.765.971.070,00	22.437.415.070,00	24.741.340.709	14.678.958.708,0	103,36%
1.4.	DANA CADANGAN	-	26.537.617.975,00	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	16,91%
1.4.1.	Dana Cadangan	-	26.537.617.975,00	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	16,91%
1.5.	ASET LAINNYA	358.530.615,43	301.158.474,68	345.604.231,53	5.924.090.005,53	5.928.389.005,53	403,24%
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran	239.096.486,00	193.667.758,20	200.847.478,00	197.130.348,00	195.579.348,00	-4,48%
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	119.434.129,43	107.490.716,48	144.756.753,53	107.930.753,53	71.780.753,53	-8,57%
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.4.	Aset tak berwujud	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.5.	Aset Lain-lain	-	-	-	5.619.028.904,0	5.661.028.904,0	0,19%
JUMLAH ASET		3.376.755.075.441,46	3.818.078.202.156,31	3.999.651.280.517,86	4.424.543.566.369,23	3.720.071.553.459,41	3,13%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.	KEWAJIBAN	0,00	117.508.204,17	24.119.160.778,24	27.485.681.608,95	4.007.609.100,62	-17,87%
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	117.508.204,2	24.119.160.778,2	27.485.681.609,0	4.007.609.100,6	-17,87%
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	987.706.995,35	170.856.206,00	400.187.946,00	12,88%
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	117.371.995,28	591.139.367,00	4.782.331.496,06	3.607.288.454,62	171,11%
2.1.4.	Utang jangka pendek lainnya	-	136.208,89	22.540.314.415,89	22.532.493.906,89	132.700,00	-25,01%
3.	EKUITAS DANA	3.376.755.075.441,46	3.817.960.693.952,14	3.975.532.119.739,61	4.397.058.034.760,28	3.716.063.944.358,79	3,08%
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	250.535.025.708,25	218.994.087.354,68	167.407.627.276,34	323.528.043.212,31	304.933.623.245,16	12,84%
3.1.1.	SILPA	225.993.089.522,31	187.263.177.694,36	155.509.599.178,14	317.829.389.787,76	256.487.127.025,06	12,75%
3.1.2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	835.800.517,00	175.239.547,36	157.566.304,36	119.936.186,36	-28,25%
3.1.3.	Cadangan piutang	16.166.791.559,13	21.450.900.260,33	17.134.943.777,50	14.249.762.254,85	17.746.616.652,77	5,07%
3.1.4.	Cadangan persediaan	8.375.144.626,81	9.561.717.087,16	17.251.644.414,23	15.552.682.379,94	30.579.943.380,97	45,34%
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-117.508.204,17	-22.663.799.640,89	-24.261.357.514,60	-	1,76%
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	3.126.220.049.733,21	3.572.428.988.622,46	3.758.942.235.691,91	4.014.345.464.495,61	3.374.445.794.061,27	2,59%
3.2.1.	Diinvestasikan dalam investasi jangka	159.709.750.865,42	229.237.750.865,42	220.533.035.650,03	226.106.783.791,08	248.166.160.285,74	13,01%
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.966.151.768.252,36	3.342.890.079.282,36	3.538.063.595.810,35	3.782.314.440.699,00	3.120.351.244.770,00	1,99%
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	358.530.615,43	301.158.474,68	345.604.231,53	5.924.240.005,53	5.928.389.005,53	403,25%
3.2.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	-	26.537.617.975,00	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	16,91%
	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	26.537.617.975,00	49.182.256.771,36	59.184.527.052,36	36.684.527.052,36	16,91%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.376.755.075.441,46	3.818.078.202.156,31	3.999.651.280.517,85	4.424.543.716.369,23	3.720.071.553.459,41	3,13%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis asio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkn hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain dapat dibagi dua garis besar berdasar obyek laporan keuangan yang dijadikan analisis, yaitu :

1. Rasio atas Neraca;
2. Rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung periode tahun 2006-2010 dapat disampaikan sebagaimana yang tergambar dalam tabel 3.3 berikut ini :



Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2006-2010
Kabupaten Bandung

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
I	Rasio atas Neraca					
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>); { Aset Lancar/Kewajiban Lancar}	-	186.464,93	794,09	1.277,08	7.708,87
2.	Rasio cash (<i>cash ratio</i>); { Kas+Surat Berharga/Kewajiban Lancar}	-	160.073,06	651,52	1.168,65	6.503,00
3.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>); { Kas+Surat Berharga+ Piutang /Kewajiban Lancar}	-	178.327,87	722,56	1.220,49	6.945,82
II	Rasio atas LRA					
4.	Rasio Kemandirian; { PAD / Total Pendapatan}	8,62	7,97	9,86	7,84	9,72
5.	Rasio Efektivitas PAD; {Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD}	100,82	96,87	103,66	101,17	102,95
6.	Rasio Keserasian (Belanja Tdk Langsung terhadap Total APBD); {Belanja Tdk Langsung / Total APBD}	64,08	63,12	67,01	71,68	68,57
7.	Rasio Keserasian (Belanja Langsung terhadap Total APBD); {Belanja Langsung /Total APBD}	35,92	36,88	32,99	28,32	31,43



1. Rasio Lancar (*Current Ratio*);
Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio lancar kabupaten bandung periode tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan rasio yang positif (lancar), artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh aset lancar minimal Rp79.409,00 pada tahun 2008.
Pada tahun 2006 tidak ada kewajiban lancar, sehingga tidak diperoleh rasio lancar, artinya jumlah aset lancar pada tahun 2006 sejumlah Rp250.535.025.708,25 dalam keadaan bebas atau tidak dijamin untuk pembayaran kewajiban lancar.
2. Rasio Kas (*Cash Ratio*);
Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas dan surat berharga dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio kas kabupaten bandung periode tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas minimal Rp.65.152,00 pada tahun 2008.
Pada tahun 2006 tidak ada kewajiban lancar, sehingga tidak diperoleh rasio kas, artinya jumlah aset kas pada tahun 2006 sejumlah Rp.225.993.089.522,31 dalam keadaan bebas atau tidak dijamin untuk pembayaran kewajiban lancar.
3. Rasio Quick (*Quick Ratio*);
Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas, surat berharga dan piutang dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio *quick* kabupaten bandung periode tahun 2006 sampai 2010 menunjukkan rasio yang sangat sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas, surat berharga dan piutang minimal Rp72.256,00 pada tahun 2008.
Pada tahun 2006 tidak ada kewajiban lancar, sehingga tidak diperoleh rasio *quick*, artinya jumlah aset kas, surat berharga dan piutang pada tahun 2006 yang berjumlah Rp242.159.881.081,44 dalam keadaan bebas atau tidak dijamin untuk pembayaran kewajiban lancar.
4. Rasio Kemandirian;
Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah kabupaten bandung (otonomi fiskal) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan pemerintah kabupaten bandung terhadap bantuan pihak ekstern (pemerintah pusat dan provinsi).
Rasio kemandirian kabupaten selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata sebesar 8,80%. Rasio kemandirian tertinggi diperoleh pada tahun 2010, yaitu sebesar 9,72%, artinya bahwa dari total pendapatan daerah yang diperoleh kabupaten bandung tahun 2010 kontribusi PAD nya sebesar 9,72%.
5. Rasio Efektivitas PAD;
Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio efektivitas PAD kabupaten selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata sebesar 101,09%. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Sehingga selama periode tahun 2006 hingga 2010 pemerintah kabupaten telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai perolehan PAD. Rasio efektivitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2008, yaitu sebesar 103,66%.
6. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja APBD;
Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil.



Rasio keserasian belanja tidak langsung kabupaten bandung selama periode 2006 hingga 2010 rata-rata mencapai 66,89% dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu 63,12%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2009 yaitu sebesar 71,68%.

7. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBD;

Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi.

Rasio keserasian belanja langsung kabupaten bandung selama periode 2006 hingga 2010 rata-rata mencapai 33,11% dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 28,32%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2007 yaitu sebesar 36,88%.

3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada :

- Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan pos dana perimbangan dan pos bagi hasil pajak provinsi.

Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah.

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada objek dan subjeknya, serta penggalan potensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa kegiatan intensifikasi yang secara rutin dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2006-2010 antara lain melalui :

- a) Sosialisasi, pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- b) Pengumpulan pengolahan data base pajak dan retribusi;
- c) Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Bandung dengan instansi terkait dalam pengelolaan penerimaan BPHTB Penagihan langsung ke Objek PBB;
- d) Regulasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terutama yang berhubungan dengan perubahan tarif.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable).
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.
4. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private domain*), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.
5. Mengupayakan bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) agar lebih efektif dan efisien, serta mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.



6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
7. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sekolah.
8. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa.
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
13. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan.
 - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
 - d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bandung dalam kurun waktu Tahun 2006-2010 yaitu:

- Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.338.456.710.720 hal ini terjadi karena adanya lonjakan pertambahan jumlah pegawai (Pengangkatan PNS baru) yang merupakan dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 755.396.838.924 hal ini terjadi karena adanya penyertaan modal investasi daerah.
- Prosentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran terbesar justru terjadi pada tahun 2009 sebesar 2,54% dibandingkan tahun 2010 sebesar 1,77%

Secara lengkap analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bandung

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
			(Rp)	
			(a)	
1	Tahun anggaran 2006	915.353.176.144	513.151.169.900	1,78
2	Tahun anggaran 2007	1.136.150.517.921	663.825.202.539	1,71
3	Tahun anggaran 2008	991.815.774.429	488.286.455.783	2,03
4	Tahun anggaran 2009	1.279.421.739.311	504.664.906.369	2,54
5	Tahun anggaran 2010	1.338.456.710.720	755.396.838.924	1,77

3.1.5. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Bandung pada kurun waktu tahun 2006-2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 2.042.977.659.292,00
- Belanja daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 2.106.019.303.925,70
- Pengeluaran pembiayaan daerah terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp 96.065.617.975,00
- Hasil analisis antara realisasi pendapatan daerah terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah defisit riil terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp - 84.424.416.292,46.

Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung

NO	Uraian	(2006)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.595.635.586.333,23	1.851.603.232.494,05	1.467.564.803.694,08	1.955.142.904.011,00	2.042.977.659.292,00
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.428.504.346.044,00	1.799.975.720.460,00	1.480.102.230.212,00	1.784.808.639.830,38	2.106.019.303.925,70
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55.944.878.663,00	96.065.617.975,00	22.644.638.896,30	10.516.743.852,00	21.382.771.658,76
	Defisit riil	111.186.361.626,23	-44.438.105.941,95	-35.182.065.414,22	159.817.520.329,62	-84.424.416.292,46

Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil									
		(2006)		(2007)		(2008)		(2009)		(2010)	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	225.993.089.522,31	1,00	187.163.177.694,36	0,97	155.509.599.178,14	0,98	317.829.389.787,76	0,99	340.329.389.788	93,80
2.	Penyertaan Modal (Investasi)	-		-		1.028.000.000,00	0,01	-		22.500.000.000	6,20
3.	Pencairan Dana Cadangan	-		296.417.975,00	0,00			-		-	
4.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-		-		-		-		-	
5.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-		-		-		-	
6.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		-		-		-		-	
7.	Penerimaan Piutang Daerah	-		5.411.776.138,00	0,03	33.179.063,00	0,00	-		-	
8.	Penerimaan Bunga Dana Cadangan					2.253.574.355,00	0,01	2.502.270.281,00	0,01	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	225.993.089.522		192.871.371.807		158.824.352.596		320.331.660.069		362.829.389.788	



Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	114.806.727.896	100,00%	225.993.089.522	100,00%	187.263.177.694	100,00%	155.509.599.178	100,00%		
2.	Pelampauan penerimaan PAD	1.123.727.196	0,98%	(4.776.278.510)	-2,11%	5.111.624.984	2,73%	1.053.461.324	0,68%		
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	8.563.912.457	7,46%	21.728.186.787	9,61%	11.732.171.124	6,27%	153.141.822.950	98,48%		
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.207.708.443	4,54%	(11.999.997.699)	-5,31%	910.865.680	0,49%	7.839.969.493	5,04%		
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	(190.728.426.306)	-166,13%	(156.826.367.808)	-69,39%	(141.541.937.390)	-75,58%	(172.600.333.374)	-110,99%		
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
7.	Kegiatan lanjutan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		



3.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2006-2010

3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama

Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama pada periode tahun 2006 -2010 yaitu:

- Pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 13,13%. Pengeluaran terbesar dari Belanja Tidak Langsung terjadi pada tahun 2010, hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Belanja Pegawai, dan Hibah dibandingkan tahun lainnya pada periode ini. Namun demikian pengeluaran terbesar Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa justru terjadi pada tahun 2007. Sedangkan pengeluaran terbesar Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga justru terjadi pada tahun 2009.
- Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 12,60%. Pengeluaran terbesar dari Belanja Langsung terjadi pada tahun 2010 dibandingkan tahun lainnya pada periode ini.
- Pertumbuhan rata-rata Pengeluaran Pembiayaan sebesar -21,30%. Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2007, yang diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Secara lengkap perincian mengenai Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama periode tahun 2006-2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.8.
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2006 s/d Tahun 2010
Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	915.353.176.144,00	1.136.144.615.381,00	987.745.296.835,00	1.279.421.739.311,38	1.529.823.777.260,00	13,13%
2.1.1	Belanja Pegawai	771.425.190.644,00	909.917.639.657,00	816.189.249.767,00	960.281.724.576,00	1.204.567.047.876,00	11,61%
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00			0,00	0,00%
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00			0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Hibah	0,00	3.738.626.000,00	42.504.679.278,00	27.377.476.060,00	128.536.223.454,00	79,48%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	100.496.432.854,00	33.906.459.065,00	25.421.455.142,00	44.587.956.162,00	27,27%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	56.054.350.000,00	72.035.982.000,00	46.734.275.845,00	38.133.822.632,00	30.977.719.768,00	-12,85%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	85.686.810.500,00	47.277.497.070,00	47.738.142.880,00	111.572.884.512,00	104.904.830.000,00	6,05%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.186.825.000,00	2.678.437.800,00	672.490.000,00	116.634.376.389,38	16.250.000.000,00	12,70%
2.2	BELANJA LANGSUNG	513.151.169.900,00	663.831.105.078,60	492.356.933.377,00	504.664.906.369,00	814.303.254.411,76	12,60%
2.2.1	Belanja Pegawai	55.258.264.752,00	101.564.662.836,00	80.439.960.806,00	42.431.559.390,00		-19,76%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	290.980.445.911,00	191.372.402.217,60	231.436.761.163,00	313.307.976.912,00		-28,33%
2.2.3	Belanja Modal	166.912.459.237,00	370.894.040.025,00	180.480.211.408,00	148.925.370.067,00		-19,25%
2.3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.944.878.663,00	96.065.617.975,00	20.391.064.541,30	7.997.540.760,00	21.538.000.000,00	-21,30%
2.3.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	26.537.617.975,00	20.391.064.541,30	7.500.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	47.568.743.000,00	69.528.000.000,00	0,00	497.540.760,00	21.028.000.000,00	-23,93%
2.3.3	Pembayaran Pokok Utang	8.376.135.663,00	0,00	0,00		510.000.000,00	-88,52%
2.3.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
2.3.5	Pembentukan dana cadangan dari bunga dana cadangan			2.253.574.355,00	2.502.270.281,00	0,00	0,00%
2.3.6	Koreksi atas SiLPA				16.932.811,00		0,00%
	Jumlah (2.1+2.2+2.3)	1.484.449.224.707	1.896.041.338.434,6	1.500.493.294.753,3	1.792.084.186.440,38	2.365.665.031.671,76	



3.2.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2011-2015, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2). Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3). Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2011-2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

- 1). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a). Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b). Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis punggutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c). Penataan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d). Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e). Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil,
 - f). Meningkatkan Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD
 - g). Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - h). Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 2). Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).
Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
 - a). Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - b). Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meliputi: Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.



- **Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2005-2010 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2009 yang baru mencapai sebesar 73,39 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1). Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2). Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 3). Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 4). Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 5). Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- 6). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 7). Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
- 8). Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
- 9). Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
- 10). Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 11). Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan



- Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
- 12). Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years);
 - 13). Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a). Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk Tahun 2012-2015 belum termasuk *accres*);
 - b). Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c). Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d). Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e). Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - f). Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - g). Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - h). Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2011-2015 adalah :



- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

- **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2011-2015 adalah :

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- 3) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

- **Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra**

Arah kebijakan Tahun 2011-2015 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bandung. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

- 1) Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bandung;
- 2) Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
- 3) Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
- 4) Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- 5) Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- 6) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan, dan industri manufaktur;

Dengan mempertimbangkan trend pencapaian pendapatan daerah dan kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional Kabupaten Bandung serta kapasitas SKPD penghasil Kabupaten Bandung, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan di bawah 10%. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, upaya-upaya penggalian potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan asset Kabupaten Bandung masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal.



Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN	1,699,295,516,510.00	1,702,473,748,883.35	1,722,796,283,043.79	1,732,347,468,948.12	1,741,275,490,032.14
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	165,054,791,409.00	236,553,426,838.35	287,140,614,542.79	296,691,800,447.12	305,619,821,531.14
1.1.1.	Pajak daerah	57,575,700,000.00	105,813,342,679.19	151,961,755,178.26	156,996,982,904.78	161,226,549,311.03
1.1.2.	Retribusi daerah	44,248,091,409.00	29,958,312,159.16	31,717,661,630.93	33,436,940,970.67	35,265,155,488.89
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	47,000,000,000.00	45,250,000,000.00	45,750,000,000.00	46,250,000,000.00	46,700,000,000.00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	16,231,000,000.00	55,531,772,000.00	57,711,197,733.60	60,007,876,571.67	62,428,116,731.22
1.2.	Dana Perimbangan	1,402,282,349,678.00	1,336,417,562,045.00	1,306,152,908,501.00	1,306,152,908,501.00	1,306,152,908,501.00
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	136,285,911,820.00	94,911,024,792.00	64,646,371,248.00	64,646,371,248.00	64,646,371,248.00
1.2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	60,810,527,858.00	40,370,597,313.00	40,370,597,313.00	40,370,597,313.00	40,370,597,313.00
1.2.3.	Dana alokasi umum	1,086,282,210,000.00	1,201,135,939,940.00	1,201,135,939,940.00	1,201,135,939,940.00	1,201,135,939,940.00
1.2.4.	Dana alokasi khusus	118,903,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	131,958,375,423.00	129,502,760,000.00	129,502,760,000.00	129,502,760,000.00	129,502,760,000.00
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	111,301,340,958.00	129,502,760,000.00	129,502,760,000.00	129,502,760,000.00	129,502,760,000.00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)					
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	20,657,034,465.00				
1.3.5	Pendapatan Lainnya					

Keterangan : Proyeksi pendapatan tersebut belum termasuk DAK, Sertifikasi guru dan TPP, Bos dan bantuan gubernur



Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pendapatan	1,699,295,516,510	1,702,473,748,883	1,722,796,283,044	1,732,347,468,948	1,741,275,490,032
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					45,000,000,000
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total penerimaan	1,699,295,516,510	1,702,473,748,883	1,722,796,283,044	1,732,347,468,948	1,786,275,490,032
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,917,280,643,851	1,875,935,666,247	1,920,229,528,577	1,921,434,804,479	1,952,031,891,427
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	(217,985,127,341)	(173,461,917,363)	(197,433,245,534)	(189,087,335,531)	(165,756,401,395)



Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
Ila	Belanja Langsung	708,094,063,748	579,484,422,442	624,367,971,464	627,785,302,640	630,740,379,032
Ilb	Pembentukan dana cadangan		15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	
	Dikurangi:					
Ilc	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
Ild	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	15,000,000,000				
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (Ila+Ilb-Ilc-Ild)					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
IIIa	Belanja Tidak Langsung	1,194,186,580,103	1,281,451,243,805	1,280,861,557,114	1,278,649,501,838	1,321,291,512,395
	Dikurangi:					
IIIb	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama					
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa-IIIb)					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*					



BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan daerah di atas, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target rencana serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung periode Tahun 2005-2010 sebagai gambaran permasalahan yang akan diselesaikan pada periode berikutnya dalam RPJPD.

Berkaitan dengan belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pada periode 2011-2015 pada RPJPD pada dibawah ini.

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya angka kejahatan/ kriminalitas. - Berkurangnya kerusakan/huru-hara di lingkungan masyarakat. -Berkurangnya gangguan terhadap hak individu, kelompok masyarakat dan institusi. - Meningkatkan daya dukung, sarana dan kualitas pembinaan dan pelayanan aparat pelindung masyarakat (linmas). 	Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat. 2. Meningkatnya kerja sama dengan lembaga keamanan
2.	Terjalannya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mematuhi norma budaya dan kearifan lokal, yaitu silih asah, silih asih dan silih asuh. 	Mulai lurnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial.	Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, kepedulian dalam masyarakat serta budaya gotong royong di masyarakat.



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bandung. - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 		
3.	Terwujudnya Kepastian Hukum dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan produk-produk hukum yang dihasilkan. - Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjunjung tinggi peraturan/hukum yang berlaku - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum . -Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan berpolitik. 	Belum utuhnya pemahaman masyarakat tentang HAM, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi, toleransi, keterbukaan dan kekeluargaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendidikan politik dan HAM hingga tingkat Desa dan Kelurahan. 2. Meningkatnya kualitas kehidupan politik yang demokratis. 3. Meningkatnya kesadaran akan HAM
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima serta Mengikuti Dinamika Pelayanan Aparatur Pemerintahan yang Transparan.	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang mengedepankan minim struktur kaya fungsi - Terciptanya keseimbangan formasi antara jabatan struktural dan fungsional di setiap SOPD. - Terciptanya sistem karir yang berbasis pada kompetensi, kinerja, profesionalisme dan kehandalan. - Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah melalui penerapan sistem <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman). - Terwujudnya sistem kepegawaian yang mengarah pada profesionalitas pengelolaan pemerintahan - Meningkatnya akses masyarakat kepada dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sesuai penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas. 2. Belum efektif dan efisiennya sistem organisasi dan tata kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas. 2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam kinerja birokrasi yang ramping struktur.



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kabupaten Bandung.		
5.	Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas publik sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. -Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 	Belum terpenuhinya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Terciptanya sistem birokrasi yang efektif dan efisien.
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum - Meningkatnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi 	Rendahnya peran masyarakat dalam pesta demokrasi.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pesta demokrasi.
7.	Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. - Kualitas kawasan permukiman meningkat (ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan ketentuan/standar yang ada) - Berkurangnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang - Berkurangnya perubahan guna lahan terutama pada kawasan lindung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya data spasial yang lengkap untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan. 2. Belum tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi. 3. Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan data spasial untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan. 2. Meningkatnya jumlah dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi. 3. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.
8.	Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> -Berkurangnya tingkat pencemaran -Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah terpadu -Termanfaatkannya sampah/limbah sebagai sumber pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah industri lainnya. 2. masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah dan limbah. 2. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sampah/limbah menjadi sumber penghasilan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya luas lahan kritis. - Menurunnya tingkat bahaya erosi (TBE). - Menurunnya laju sedimentasi di daerah tangkapan air. - Meningkatnya kesuburan tanah. - Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih luasnya lahan kritis. 2. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana (banjir, gerakan tanah, letusan gunung api dan gempa. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis dan partisipasi aktif masyarakat terhadap penanganan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (banjir, gerakan tanah, letusan gunung api dan gempa)
10.	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (<i>Sustainable Resources Management</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penambangan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang. - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan. - Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya dukung lingkungan dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 2. Menguatnya sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik.
11.	Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pembinaan rohani bagi pemerintahan dan masyarakat. - Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. - Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai budaya Sunda. 2. Perlunya peningkatan jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas cagar budaya dan aset-aset kekayaan budaya 2. Meningkatnya promosi, inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya
12.	Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya wajar dikdas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya angka partipirasi murni (APM) pada setiap jenjang 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya APM pada setiap jenjang pendidikan. 2. Meningkatnya



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ul style="list-style-type: none"> -Berkurangnya masyarakat keluarga miskin yang tidak memperoleh hak pendidikan wajar dikdas 	pendidikan. 2. Belum optimalnya pendidikan anak usia dini. 3. Belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin 4. Masih lemahnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pendidikan.	kualitas pendidikan anak usia dini. 3. Meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan. 4. Meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pasar, berbasis potensi wilayah dan life skills yang memiliki daya saing internasional.
		<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah tertinggal 		
13.	Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka melek huruf. berkurang - Angka putus sekolah berkurang. - Kualitas dan kuantitas sarana pendidikan meningkat. - Kualitas dan kuantitas guru meningkat. 	1. Masih rendahnya mutu pendidikan masyarakat. 2. Masih rendahnya daya saing masyarakat di bidang pendidikan dan keahlian lainnya.	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. 2. Meningkatnya daya saing masyarakat Kabupaten Bandung terhadap masyarakat di luar Kabupaten Bandung.
14.	Meningkatnya pola hidup sehat dan Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kesakitan. - Menurunnya penyakit menular -Menurunnya AKI dan AKB - Meningkatnya pembinaan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat - Meningkatnya akses terhadap sarana kesehatan lingkungan 	1. Masih terbatasnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 2. Memadainya jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
15.	Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau secara geografis maupun biaya -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai peraturan yang berlaku 	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam kemajuan pendidikan, kesehatan dan olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan olahraga yang dapat menunjang pembangunan sumberdaya manusia yang baik.



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		-Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga yang terpadu		
16.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hierarki dan kebutuhan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana dan prasarana publik di setiap WP yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan penduduk. - Meningkatkan peran dan fungsi wilayah sesuai dengan arahan RTRW. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum terpadu dan terintegrasinya pengelolaan transportasi. 2. Belum tercapainya kondisi infrastruktur wilayah (transportasi, pengairan, air baku dan drainase) yang memadai 3. Belum tercapainya ketersediaan angkutan publik massal dan fasilitas pendukungnya (terminal dan halte) yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan transportasi yang terpadu dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi. 3. Meningkatkan ketersediaan angkutan publik massal dan fasilitas pendukung yang efisien dan ekonomis.
17.	Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan-kawasan strategis -Meningkatkan aksesibilitas terwujudnya kawasan pesisir 	Masih adanya daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi dan belum tersentuh pembangunan	Pemerataan pembangunan serta memaksimalkan potensi sumber daya alam daerah.
18.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.	Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
19.	Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis potensi lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri unggulan - Meningkatkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di industri lokal. - Meningkatkan jumlah lembaga ekonomi dan UMKM yang sehat. - Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan. - Pengembangan kemitraan usaha hulu hilir secara terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya manajemen dan kualitas produk UMKM. 2. Masih rendahnya penggunaan teknologi ramah lingkungan di UMKM. 3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan permodalan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk UMKM. 2. Terserapnya produk UMKM di pasar regional, nasional bahkan internasional. 3. Terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing serta mampu menggunakan teknologi ramah lingkungan
20.	Tercapainya produk pertanian yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya alih fungsi lahan pertanian. - Berkembangnya agribisnis pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian di tingkat petani - Belum optimalnya 	1. Terwujudnya kawasan agropolitan 'one village one product' berbasis potensi sumber daya



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		- Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.	sinergitas para pelaku usaha agribisnis dalam jaringan usaha bersama. - Belum teridentifikasinya produk-produk unggulan pertanian	alam dan sumber daya manusia lokal yang mandiri, berteknologi dan berdaya saing.
21.	Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	- Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pariwisata di Kabupaten Bandung. - Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata. - Meningkatnya keanekaragaman objek wisata. - Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Bandung - Meningkatnya pola kerja sama, kemitraan dan promosi wisata daerah. - Terciptanya wisata desa yang berbudaya sunda, religius dan berwawasan lingkungan -Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan daerah -Terwujudnya wisata pesisir	1. Belum optimalnya fasilitas pelayanan di sektor pariwisata 2. Belum optimalnya promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.	1. Meningkatnya fasilitas pelayanan di kawasan pariwisata. 2. Meningkatnya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
22.	Terlaksananya pembangunan Pusat - Pusat Perdagangan Produk Unggulan Lokal.	- Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang informal (PKL) - Meningkatnya Pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek wisata. - Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan. - Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan - Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan -Meningkatnya ketersediaan pasar tradisional yang ramah lingkungan	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pusat-pusat perdagangan.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pusat-pusat perdagangan yang berkualitas.



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
23.	Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi	- Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku UMKM.	1. Belum kondusifnya iklim investasi. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi.	1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi investor 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi.
		- Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu.		
		- Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti.		
		- Meningkatnya infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas.		
24.	Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional) yang mandiri dan maju	-Meningkatnya jumlah koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional	Masih lemahnya lembaga – lembaga ekonomi di masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi produktif yang dapat menunjang perekonomian rakyat.

Identifikasi permasalahan pembangunan yang diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap urusan yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya, ditujukan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan gambaran yang didapat dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah per-urusan, dapat digambarkan permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dengan penentuan strategi kebijakan pada tahap berikutnya. Capaian dan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 5,88 % dengan laju inflasi sebesar 5,66%. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 8,21 %. Sektor ekonomi lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor bangunan/ konstruksi; sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik gas dan air bersih; sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa; yaitu masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 7,17 %; 6,66%; 5,24%; 5,32%; 5,26 % serta 5,60%. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 5,21% yaitu dari Rp



6.507.360,00 tahun 2009 menjadi Rp 6.846.640,00 di tahun 2010. Berdasarkan PDRB perkapita (ADHK) menunjukkan pertumbuhan tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung, tetapi kenaikannya masih kecil dan belum bisa menunjukkan yang berarti.

Dalam hal ketertiban dan ketentraman, jumlah aparatur yang ada belum terdistribusi dengan baik dan kualifikasi untuk SDM penegak Perda masih dirasakan kurang, perlu dilakukan identifikasi ulang seluruh jenjang kepegawaian agar terjadi rasionalisasi untuk mencapai "minim struktur kaya fungsi". rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Di Kabupaten Bandung jumlah polisi pamong praja pada tahun 2010 sebanyak 88 orang atau mempunyai rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2010 sebesar 0,0027. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung baru bisa terlayani oleh polisi pamong praja sebanyak 27 orang.

Begitu pun dengan keberadaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jumlah aparatur yang ada belum terdistribusi dengan baik dan kualifikasi untuk SDM penegak Perda masih dirasakan kurang, perlu dilakukan identifikasi ulang seluruh jenjang kepegawaian agar terjadi rasionalisasi untuk mencapai minim struktur kaya fungsi. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,00172. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2010, bisa terlayani oleh jumlah Linmas sebanyak 17-18 orang.

Dalam hal pelayanan dan antisipasi bencana kebakaran, di Kabupaten Bandung rasio mobil pemadam terhadap luasan sebesar 1 : 25.177 ha, artinya satu unit mobil pemadam kebakaran harus bisa melayani area Kab. Bandung seluas 25.177 Ha.

Berdasarkan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS tahun 2009, diketahui ada sebanyak 186.631 RTM dari 885.674 total rumah tangga atau sebesar 21,07% RTM di Kabupaten Bandung.

Permasalahan:

- Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita serta rendahnya inflasi yang terjadi, belum berpengaruh besar terhadap pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung.
- Masih tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan (pertanian dan perkebunan)
- Belum memadainya jumlah layanan mobilitas pelayanan bencana kebakaran
- Masih rendahnya jumlah Polisi Pamong praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Masih rendahnya Jumlah Linmas untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis.

2. Urusan Pendidikan

Perbaikan dan peningkatan pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu upaya dalam pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan. Melalui indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana prasarana pendidikan dan lain-lain, dapat terlihat upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan pendidikan ini. Besarnya porsi anggaran yang disiapkan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, terutama perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar diharapkan dapat memperkuat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan:

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan.
- Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
- Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan.
- Rendahnya minat siswa SLTP untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SLTA).

3. Urusan Kesehatan

Intervensi program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif telah dan terus menerus dilakukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian pula sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, baik di rumah



sakit, puskesmas, pustu, poskesdes maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus diupayakan agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan perbaikan cakupan pelayanan untuk ibu dan anak terus dilakukan. Rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 84. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Bandung melayani 77 balita. Selain itu rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2010 mencapai 1 : 7.067. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 7.067 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2009 adalah 1 : 9.359. Ini artinya 1 dokter melayani 9.359 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan: Walaupun upaya yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif terus dilakukan dan ditingkatkan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi belum bisa mencapai hasil yang optimal jika belum didukung oleh jumlah dan persebaran tenaga medis/dokter yang belum merata. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2009 adalah 1 : 9.359. Ini artinya 1 dokter melayani 9.359 jiwa penduduk.

4. Urusan Pertanahan

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

Permasalahan : administrasi pertanahan di Kabupaten Bandung sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa belum adanya data yang dapat menggambarkan hal tersebut.

5. Urusan Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, adalah 1:0,87. Angka partisipasi angkatan kerja sebesar 1.516.650 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,873 serta rasio ketergantungan sebesar 54,10.

Permasalahan: Sebagian besar permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan, berkaitan dengan jenjang pendidikan serta *miss match* antara lulusan dan permintaan tenaga kerja. Secara umum, dapat tergambarkan permasalahannya sebagai berikut:

- Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan
- Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri
- Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja
- Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga daya saing tenaga kerja rendah

6. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”.

Permasalahan : administrasi data belum sesuai dengan yang diharapkan.

7. Urusan Pemuda dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bandung sebanyak 68 buah, sedangkan pada tahun 2006-2009, jumlah organisasi ini masing-masing sebanyak 47 buah pada tahun 2006, 53 buah pada tahun 2007 dan 58 buah pada tahun 2008, dan 67 pada tahun 2009.

Sementara banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 45 buah.



8. Urusan Pekerjaan Umum

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kemandirian dan kondisi jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, adalah 355,57 Km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, adalah sebesar 30,78%.

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.044,81 km. Angka ini tidak mengalami perubahan bila dibandingkan tahun 2009.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Sampai tahun 2010 luas permukiman yang tertata mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari 14.297,30 ha luas permukiman, Luas permukiman yang tertata mencapai 81,84 % (11.649,05 ha). Sementara rumah tinggal berakses sanitasi yang sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi melalui fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 98,47%.

Permasalahan: Perbaikan sarana dan prasarana dasar pemukiman selalu diupayakan melalui berbagai program agar terjadi akselerasi pencapaian MDG's. Permasalahan yang menjadi fokus perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan dan hal ini juga menjadi fokus Pemerintah Pusat, berkaitan dengan buruknya drainase jalan serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Masih tingginya kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Bandung (kondisi jalan rusak berat meningkat hingga 21,26 % pada tahun 2010) perlu mendapat perhatian sebagai pendukung jalur distribusi dan pemasaran.

9. Urusan Perumahan

Perumahan dan permukiman yang baik, harus memiliki infrastruktur dasar permukiman agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut, antara lain air bersih, sanitasi dan energi listrik. Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan : rumah tangga di Kabupaten Bandung yang telah memanfaatkan tenaga listrik sebanyak 446.484 (57,76%) sisanya sebanyak 42,24% belum bisa menikmati listrik dan sebagian besar berada di daerah perbatasan dan perkebunan.

10. Urusan Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bandung, sebesar 26,13% dari 30% yang dianjurkan/ditargetkan. Oleh karena itu, dapat tergambar bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung masih terbatas dan perlu untuk dikembangkan, karena fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro selain berfungsi sosial-ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark.

11. Urusan Perencanaan Pembangunan

Sinergitas dokumen perencanaan dengan realisasi pelaksanaan APBD belum optimal menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Sehingga target dan capaian tiap SKPD bisa menyebabkan tidak berkesinambungan.

12. Urusan Perhubungan

Pada tahun 2010 jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang sebanyak 139 unit. Jumlah ini hanya 1,12% dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia di jalan-jalan Kabupaten Bandung. Pada tahun 2009 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai 1 : 156 sehingga belum terpenuhi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya.



13. Urusan Lingkungan Hidup

Masih rendahnya daya tampung TPSS dan rendahnya kuantitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah tergambar dari masih rendahnya persentase penanganan sampah, yaitu hanya sebesar 8,02%. Hal tersebut didukung dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama swasta dalam pengelolaan sampah sehingga menyebabkan isu lingkungan, terutama lingkungan permukiman berkaitan dengan persampahan perlu penanganan serius, karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

14. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Total jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 meningkat 1,33 % bila dibandingkan tahun 2010 yaitu menjadi 3.215.548 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa. Dalam menilai tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan akte nikah, gambaran di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 75,34%, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 60,08% dan kepemilikan akte kelahiran sebesar 80,65 %. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bandung sudah cukup baik tingkat tertib administrasi kepemilikan KTP, KK dan Akte Kelahiran, meski demikian masih harus ditingkatkan.

15. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Bandung masih sangat kecil, yaitu sebesar 1,84%. Sementara di lembaga swasta partisipasi perempuan sebesar 98,16%. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung, terjadi pada 15 rumah tangga dari 885.674 rumah tangga atau memiliki rasio 0,00169.

16. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan Pemerintah adalah 2 (dua) orang anak. Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak.

17. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai lembaga ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan pergerakan roda ekonomi di wilayah. Peran koperasi sangat penting sebagai pendukung peningkatan potensi usaha lokal, penyedia informasi, lembaga distribusi dan pemasaran. Di Kabupaten Bandung, selain peran koperasi masih terbatas pada kesejahteraan anggotanya, jumlah koperasi yang tidak aktif pun sangat besar (51,31%). Koperasi yang aktif, sebagian besar berupa koperasi simpan pinjam.

18. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu sebanyak 28 investor, penurunan paling kuat terlihat dari investor asing yang turun menjadi 19 investor dari 25 investor di tahun 2009, namun realisasi nilai investasi yang ditanamkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 263,55% bila dibandingkan dengan tahun 2009.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini menitikberatkan pada kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma sehingga perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi dalam hal pembinaan.

20. Urusan Ketahanan Pangan

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 513.856 ton Gabah Kering Giling (GKG), dengan jumlah konsumsi oleh 3.215.548 jiwa penduduk sebanyak 312.841 ton (60,88 %). Jumlah ketersediaan bahan pangan tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi bahan pangan dan belum meratanya distribusi serta kemampuan dalam konsumsi bahan pangan di Kabupaten Bandung. Program dan kegiatan dalam urusan ini belum didukung dengan



regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tata laksana Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di daerah.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM sebanyak 1 kelompok dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,089 kelompok atau setiap anggota PKK di Kabupaten Bandung mempunyai kelompok binaan PKK hanya 0,089 kelompok. Jumlah LSM di Kabupaten Bandung yang terdaftar pada tahun 2010 sebanyak 215 LSM, dari jumlah tersebut yang tidak aktif sebanyak 112 LSM, dengan demikian jumlah LSM aktif sebanyak 103 LSM. Jumlah LSM aktif ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009).

Masih kecilnya rata-rata kelompok-kelompok binaan serta tren meningkatnya bentukan LSM perlu disikapi sebagai membaiknya kehidupan berorganisasi dan menyalurkan aspirasi di masyarakat yang perlu disertai dengan pembinaan dan pengarahan agar mendukung pembangunan secara umum.

22. Urusan Statistik

Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa dokumen yang masih belum tersedia perlu segera dilengkapi melalui koordinasi dan kerjasama antar SKPD sehingga dokumen pendukung pengambilan kebijakan bisa lengkap.

23. Urusan Kearsipan

Dari 79 SKPD di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2010, sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 79 orang, dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan baru sebanyak 60 orang atau sekitar 75,95%. Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam Pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi.

24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Keberadaan surat kabar dan media informasi lain sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara *up to date* terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Masih banyak penduduk yang belum teraliri listrik, terutama di daerah perbatasan dan perkebunan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam menunjang perluasan informasi dan peningkatan perekonomian.

25. Urusan Perpustakaan

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat serta menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Dua buah perpustakaan yang berada di Kabupaten Bandung, masih dirasa kurang. Oleh karena itu peningkatan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan bahan pustaka serta infrastruktur pendukungnya masih diperlukan.

26. Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian pada PDRB harga berlaku sebesar Rp 3.471.661.92 (7.53%) atau ketiga terbesar setelah industri pengolahan dari manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian, potensi dan kontribusi cukup besar belum ditandai dengan sinergitas para pelaku usaha hulu dan hilir melalui jaringan usaha bersama dalam pengembangannya agar bisnis yang modern berdaya saing dan berkelanjutan.

27. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2010 luas lahan kritis di Kabupaten Bandung mencapai 59.969,39 ha dan telah dilakukan rehabilitasi seluas 2.493,12 ha (8,8 %), mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya 6.814,72 Ha dan terehabilitasi seluas 1.084,5 ha (15,91%). Luasan rehabilitasi lahan dan hutan memerlukan penanganan serius berkaitan dengan topografi dan iklim Kabupaten Bandung, karena akan menyebabkan bencana, baik erosi atau pun banjir.



28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Luasan pertambangan tanpa ijin masih cukup besar, yaitu 20,755 Ha. Dengan luas penambangan yang ditertibkan sudah mencapai 80,73 % Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

29. Urusan Pariwisata

Cukup tingginya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bandung, yaitu 6.069.539 orang (rata-rata per objek wisata 123.869 orang) bisa diartikan tingginya potensi wisata di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur serta rencana induk pengembangan kepariwisataan harus segera diperbaiki.

30. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tercatat sebanyak 8.122 ton. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 mencapai 20,26 kg/ perkapita/tahun meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.

31. Urusan Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp 456.850.398,57. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008, namun mengalami kenaikan dari tahun 2009.

32. Urusan Perindustrian

Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari 751 industri pada tahun 2010 dari 701 industri pada tahun 2009.

33. Urusan Ketransmigrasian

Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Bandung.

4.2 Penelaahan RPJMN dan RPJMD Daerah Lainnya

4.2.1 Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Keterkaitan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJP Tahap II Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. **Reformasi birokrasi**, dimaksudkan untuk melakukan penatalaksanaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat, juga selaras dengan RPJMN yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola
2. **Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu Pengembangan wajar 12 tahun, pendidikan keterampilan/kejuruan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, juga selaras dengan RPJMN yaitu pendidikan.
3. **Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan**, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan jamkesmas, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, juga selaras dengan RPJMN yaitu Kesehatan



4. **Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial**, dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, juga selaras dengan RPJMN yaitu penanggulangan kemiskinan dan bidang kesejahteraan rakyat.
5. **Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah**, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJP Tahap II yaitu Pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih dan persampahan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN yaitu infrastruktur
6. **Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM**, dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan KUKM terhadap sumber daya (alam, modal, informasi dan pasar), juga selaras dengan RPJMN yaitu iklim investasi dan usaha juga bidang perekonomian
7. **Pengembangan produk unggulan**, dimaksudkan untuk mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor – sektor yang memanfaatkan potensi lokal (comparative advantage). Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga selaras dengan RPJMN yaitu ketahanan pangan
8. **Rehabilitasi kerusakan lingkungan**, Penataan Ruang dan Penanganan Bencana, dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan selaras dengan RPJMD Provinsi yaitu kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, juga selaras dengan RPJMN yaitu lingkungan hidup dan bencana
9. **Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan**, dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah desa dengan wilayah perkotaan. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJMD Provinsi yaitu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, juga selaras dengan RPJMN yaitu infrastruktur dan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.
10. **Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat**, dimaksudkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif pasca diselenggarakannya pemilukada. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam
11. **Pemantapan kemandirian pangan**, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan baik ketersediaan maupun kemudahan mendapatkannya. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan skala ekonomi produk unggulan, juga selaras dengan RPJMN yaitu ketahanan pangan

4.2.2 Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.



Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013, RPJMD Daerah Kabupaten Garut 2009-2014 dan Kabupaten Sukabumi 2010-2015

Penelaahan RPJMD daerah lain dimaksudkan agar tergambar kondisi dan permasalahan daerah, keterkaitan dan keselarasan antar kebijakan, terutama dengan daerah dalam satu provinsi. Dalam tabel 4.2 berikut ini dapat tergambar prioritas pembangunan dari tiap dokumen RPJMD

Tabel 4.2.
Identifikasi RPJMD
Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung 2010-2015	Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut 2009-2014	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2010-2015
1	Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat.	Reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tatanan Pemerintahan	Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
2	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan	Pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan
3	Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan		Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan
4	Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial		Pengendalian Penduduk, Pengangguran Kemiskinan, dan Pengangguran
5	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan dan Tata Ruang	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah
6		Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM		Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan Pembangunan Industri di Berbagai Sektor yang Memiliki Daya Saing dan Berwawasan Lingkungan
7		Pengembangan produk unggulan	Penguatan Struktur Perekonomian Daerah	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro
8	Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Rehabilitasi kerusakan lingkungan	Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tata Ruang dan Lingkungan



No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung 2010-2015	Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut 2009-2014	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2010-2015
9	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan		
10		Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Pembangunan Kehidupan Sosial, Politik dan Budaya yang Demokratis	Peningkatan Kualitas Perilaku dan Modal Sosial Masyarakat
11	Ketahanan pangan masyarakat	Pemantapan kemandirian pangan		Peningkatan Daya Beli dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
				Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintahan yang Bersih, Peduli, dan Profesional
				Penyiapan Infrastruktur dan Suprastruktur Pemekaran
				Pembangunan Etos Kerja dan Produktivitas

4.3 Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 yang didasari dari permasalahan periode tersebut, yaitu:

- 1) Resistensi nilai-nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi, munculnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dan citra budaya Sunda dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Kualitas pendidikan masih relatif rendah disebabkan antara lain belum tercapainya target RLS, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai.
- 3) Kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kualitas kesehatan lingkungan yang masih relatif rendah.
- 4) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP.
- 5) Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif.
- 6) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai.
- 7) Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti terminal, pasar dan sistem transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas.
- 8) Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh



rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

- 9) Rendahnya kinerja pembangunan desa disebabkan kualitas SDM, sarana infrastruktur pedesaan, pemanfaatan ruang kawasan pedesaan, lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2005-2010, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2011-2015, maka dapat digambarkan perumusan isu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Identifikasi Isu Strategis RPJMD

No	Urusan	Permasalahan	Isu
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan • Kependudukan dan Catatan Sipil • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan belum optimalnya, karena masih dalam penyesuaian dengan peraturan perencanaan baru. • Masih rendahnya tingkat tertib administrasi kepemilikan KTP, KK, Akte Nikah, terutama pada kepemilikan KK • Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah • Masih belum optimalnya pelaksanaan PPTSP. • Masih tingginya biaya ekonomi dalam berusaha (high cost economy) 	Pelayanan publik
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pendidikan • Pendidikan • Kesehatan • Ketenagakerjaan • Pendidikan • Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan. • Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan • Belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan. • Rasio jumlah dokter dibanding jumlah penduduk sebesar 9.359 (Jumlah dan persebaran tenaga medis/dokter belum merata) • Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan • Rendahnya minat siswa SLTP untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SLTA) • Masih rendahnya strata kependidikan tenaga pengajar Sekolah dasar atau guru yang memiliki gelar S1 dibawah 50 %) • Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan Penanaman Modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri • Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja 	Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, Kesehatan, dan kesalehan sosial)



No	Urusan	Permasalahan	Isu
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi sehingga daya saing tenaga kerja rendah 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Ketahanan pangan • Ketahanan pangan • Pertanian • Komunikasi dan Informatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya koperasi aktif • Koperasi masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam (peran koperasi sebagai lembaga pendukung perekonomian belum optimal) • Belum tersedianya regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tata laksana Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di daerah • Masih belum meratanya distribusi serta kemampuan dalam konsumsi bahan pangan • Masih rendahnya pendapatan petani (lebih banyak petani gurem/petani penggarap) • Masih banyak penduduk yang belum teraliri listrik, terutama di daerah perbatasan dan perkebunan 	Pembangunan Perdesaan dan ketahanan pangan
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya jumlah Polisi Pamong praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 0,30) • Masih rendahnya Jumlah Linmas untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis (untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 tersedia jumlah Linmas sebanyak 22-23 orang) 	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



No	Urusan	Permasalahan	Isu
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum • Pekerjaan Umum • Penataan Ruang • Perhubungan • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya kerusakan jaringan jalan (kondisi jalan rusak berat meningkat hingga 18,47 % pada tahun 2009) • Masih kurangnya rumah tinggal dengan sanitasi baik • Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau • Kurangnya jumlah fasilitas rambu-rambu lalu lintas • Belum memadainya jumlah layanan mobilitas pelayanan bencana kebakaran • Belum terpenuhinya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya 	Infrastruktur wilayah dan tata ruang
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian • Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti • Masih tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan (pertanian dan perkebunan) 	Kemiskinan
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Hidup • Lingkungan Hidup • Lingkungan Hidup • Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya daya tampung TPSS • Masih rendahnya sarana dan prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah • Masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama swasta dalam pengelolaan sampah • Keterbatasan lahan dan resistensi masyarakat terhadap TPA 	Lingkungan hidup dan bencana

Berdasarkan permasalahan per urusan di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yaitu:

1. Pelayanan publik
2. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, Kesehatan, dan kesalehan sosial)
3. Pembangunan Perdesaan dan ketahanan pangan
4. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Infrastruktur wilayah dan tata ruang
6. Kemiskinan
7. Lingkungan hidup dan bencana



Dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Dalam arti luas pelayanan publik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi pemerintahan (birokrasi) yang meliputi pelayanan dasar (substansif) dan pelayanan administrasi. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Pemerintahan, terutama pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga publik perlu terus diperbaiki.
- 2) Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Beberapa peningkatan dan akselerasi program diperlukan dalam mengatasi belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan, belum memadainya jumlah guru tetap dan jumlah guru yang berpendidikan keguruan, masih kurang baiknya distribusi tenaga pengajar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berbicara mengenai kesehatan yang secara kontinyu diintervensi melalui program/kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif. Akselerasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam mengantisipasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai serta kurang dan belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga medis.
- 3) Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bandung merupakan strategi yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat lebih dari 96 % dari total wilayah merupakan wilayah pedesaan. Kesenjangan dalam segi ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan aspek penting dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bandung perlu menetapkan core bisnisnya “Sektor Pertanian”, karena potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung dalam memenuhi surplus pangan terutama padi, tetapi Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dalam mempertahankan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan nilai investasi serta memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan peran UKM yang menunjang usaha pertanian dan peternakan. Selain itu, perkembangan ekonomi pedesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi pertanian, sangat berhubungan dengan sektor pariwisata, produksi kewaspadaan serta keamanan pangan dan bahan baku sektor lainnya.
- 4) Keamanan dan ketertiban masyarakat diharapkan tetap terjaga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kinerja pembangunan secara umum. Prioritas ini selaras dengan prioritas dalam RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum, juga selaras dengan RPJMN yaitu bidang polhukam.
- 5) Infrastruktur merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor prioritas bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sektor infrastruktur terdiri atas : prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman, yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat antar-wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian. Keterpaduan pembangunan dan saling keterkaitan antar wilayah yang terangkum dalam dokumen ketataruangan masih perlu ditingkatkan efektivitas dan pelaksanaannya, begitu pun dengan pengendaliannya. Beberapa masalah yang masih perlu langkah penangan lanjutan, di antaranya ialah perlu adanya perda tentang RDTR sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen RDTR Baleendah-Dayeuhkolt, Soreang, Kutawaringin dan Tegalluar. Hal ini menyebabkan terhambatnya rencana dan pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat umum, karena beberapa dokumen harus mengacu terhadap RDTR dan Peraturan Zonasinya.
- 6) Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan standar terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Berbagai program dari beberapa sektor yang telah dilaksanakan belum mampu/tidak signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung. Hal tersebut, terutama karena belum terpadunya berbagai program penanggulangan kemiskinan (ego sektor) serta belum terukur secara jelas mengenai upaya pengurangan kemiskinan pada setiap program, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman data jumlah keluarga miskin sehingga target yang ingin dicapai setiap sektor belum jelas.
- 7) Berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana, dalam penanganan banjir dan genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan



perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4.
Keterkaitan Hubungan Isu Strategis

No	ISU STRATEGIS DAERAH		
	RPJMN 2010-2014	RPJMD JAWA BARAT 2008-2013	RPJMD KAB. BANDUNG 2010-2015
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat.	Pelayanan Publik
2	Pendidikan	Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan	Kualitas sumber daya manusia (pendidikan, Kesehatan dan kesalehan social)
3	Kesehatan	Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat	
4	Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Kemiskinan
	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska konflik		Pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan
5	Ketahanan Pangan		
6	Iklim Investasi dan Usaha		
7	Infrastruktur	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Infrastruktur wilayah dan tata ruang
8	Energi		
9	Lingkungan Hidup dan Bencana	Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup dan Bencana
10	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	Apresiasi dan pengembangan budaya daerah	
11	Bidang Polhukam	-	Keamanan dan ketertiban masyarakat
12	Bidang Perekonomian	-	-
13	Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-

4.4 Penelaahan RPJPD

RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah. Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung adalah ditetapkannya visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah serta terwujudnya perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung.

Kerangka Pikir dari penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025, yaitu didasari pada:

- a) Penetapan Visi: adanya survey Persepsi dan Harapan Masyarakat Kab Bandung; Visi RPJP Nasional dan Visi RPJPD Prov Jabar
- b) Penetapan Misi: Menetapkan Misi RPJPD Kab Bandung yang disinergikan dengan Misi RPJP Nasional dan Misi RPJPD Prov Jabar.
- c) Identifikasi Problem Statement: berlandaskan pada RTRW Kab Bandung dan Fungsi Wilayah Pembangunan (WP)
- d) Penetapan Tujuan, Strategi dan Kebijakan menggunakan Analisis SWOT
- e) Penetapan Tema dan Prioritas Tahapan Pembangunan Lima Tahunan (RPJMD) dilakukan dengan FGD.

RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 yang mempunyai Visi "Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja Tahun 2025", akan dilaksanakan melalui Misi:

- a) Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib
- b) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- c) Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
- d) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- e) Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
- f) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Berdasarkan tujuan penyusunan RPJPD serta kerangka pikir yang diterapkan dalam penyusunannya, maka dapat dipastikan RPJPD serta dokumen yang mengacu padanya merupakan perencanaan yang bersinergi dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional dan provinsi. Pada dokumen RPJPD yang telah disusun, ditentukan Arah Pembangunan pada tiap Misi Pembangunan, seperti berikut ini:

- a) Arah Pembangunan Misi 1 (3 buah): Mewujudkan Lingkungan yang Aman; Mewujudkan Budaya yang Tertib; Mewujudkan Kepastian Hukum
- b) Arah Pembangunan Misi 2 (4 buah): Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien serta Akuntabel; Mewujudkan Sistem Birokrasi yang Handal dan Bertanggung Jawab; Mewujudkan Sistem Kepegawaian yang Mengarah pada Profesionalitas Pengelolaan Pemerintahan; Mewujudkan Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima serta Mengikuti Dinamika Pelayanan Aparatur Pemerintahan yang Transparan.
- c) Arah Pembangunan Misi 3 (5 buah): Mengurangi Luas Lahan Kritis; Mewujudkan Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkesinambungan (Sustainable Resources Management); Mengurangi Tingkat Pencemaran; Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan Permukiman
- d) Arah Pembangunan Misi 4 (1 buah): Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang Memiliki Intelktualitas dan Kemampuan yang Memadai dalam Menghadapi Tuntutan Perkembangan Globalisasi.
- e) Arah Pembangunan Misi 5 (4 buah): Membangun Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal; Membangun Pusat-Pusat Perdagangan Produk Unggulan Lokal; Menciptakan Produk Pertanian yang Berdaya Saing; Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata; Mewujudkan Pelayanan Investasi yang Mudah, Murah, Cepat dan Pasti; Menyediakan Infrastruktur Wilayah, baik Kuantitas maupun Kualitas secara Memadai
- f) Arah Pembangunan Misi 6 (6 buah): Membangun Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal; Membangun Pusat - Pusat Perdagangan Produk Unggulan Lokal; Menciptakan Produk Pertanian yang Berdaya Saing; Meningkatkan Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata; Mewujudkan Pelayanan Investasi yang Mudah, Murah, Cepat dan Pasti; Menyediakan Infrastruktur Wilayah, baik Kuantitas maupun Kualitas secara Memadai.



Tabel 4.5.
Hasil Telaahan RPJPD

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya angka kejahatan/ kriminalitas. - Berkurangnya kerusuhan/huru-hara di lingkungan masyarakat. -Berkurangnya gangguan terhadap hak individu, kelompok masyarakat dan institusi. - Meningkatkan daya dukung, sarana dan kualitas pembinaan dan pelayanan aparat pelindung masyarakat (linmas). 	Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat. 2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keamanan
2.	Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mematuhi norma budaya dan kearifan lokal, yaitu <i>silih asah, silih asih dan silih asuh</i>. - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bandung. -Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	Mulai luntarnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial.	Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, kepedulian dalam masyarakat serta budaya gotong royong di masyarakat.
3.	Terwujudnya Kepastian Hukum dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan produk-produk hukum yang dihasilkan. - Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menjunjung tinggi peraturan/hukum yang berlaku - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum . -Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan berpolitik. 	Belum utuhnya pemahaman masyarakat tentang HAM, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi, toleransi, keterbukaan dan kekeluargaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendidikan politik dan HAM hingga tingkat Desa dan Kelurahan. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan politik yang demokratis. 3. Meningkatkan kesadaran akan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima serta Mengikuti Dinamika Pelayanan Aparatur Pemerintahan yang Transparan.	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang mengedepankan minim struktur kaya fungsi - Terciptanya keseimbangan formasi antara jabatan struktural dan fungsional di setiap SOPD. - Terciptanya sistem karir yang berbasis pada kompetensi, kinerja, profesionalisme dan kehandalan. - Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah melalui penerapan sistem <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman). - Terwujudnya sistem kepegawaian yang mengarah pada profesionalitas pengelolaan pemerintahan - Meningkatnya akses masyarakat kepada dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kabupaten Bandung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sesuai penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas. 2. Belum efektif dan efisien sistem organisasi dan tata kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas. 2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam kinerja birokrasi yang ramping struktural.
5.	Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas publik sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. -Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 	Belum terpenuhinya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.	Terciptanya sistem birokrasi yang efektif dan efisien.
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 	Rendahnya peran masyarakat dalam pesta demokrasi.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pesta demokrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
		- Meningkatnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi		
7.	Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. - Kualitas kawasan permukiman meningkat (ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan ketentuan/standar yang ada) - Berkurangnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang - Berkurangnya perubahan guna lahan terutama pada kawasan lindung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya data spasial yang lengkap untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan. 2. Belum tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi. 3. Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> . Meningkatnya ketersediaan data spasial untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan. 2. Meningkatnya jumlah dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi. 3. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.
8.	Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> -Berkurangnya tingkat pencemaran -Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah terpadu -Termanfaatkannya sampah/limbah sebagai sumber pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah industri lainnya. 2.masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah dan limbah. 2.meingkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sampah/limbah menjadi sumber penghasilan
9.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya luas lahan kritis. - Menurunnya tingkat bahaya erosi (TBE). - Menurunnya laju sedimentasi di daerah tangkapan air. - Meningkatnya kesuburan tanah. - Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih luasnya lahan kritis. 2. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana (banjir, gerakan tanah, letusan gunung api dan gempa. 	<ol style="list-style-type: none"> .1. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis dan partisipasi aktif masyarakat terhadap penanganan terhadap lahan kritis. 2.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (banjir, gerakan tanah, letusan gunung api dan gempa)



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
10.	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (<i>Sustainable Resources Management</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penambangan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang. - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan. - Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan 2. Memantapkan kepranataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan 4. Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung. 5. Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan (terkait pengelolaan lingkungan hidup) yang baik secara adil dan konsistensi.
11.	Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pembinaan rohani bagi pemerintahan dan masyarakat. - Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. - Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai budaya Sunda. 2. Perlunya peningkatan jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas cagar budaya dan aset-aset kekayaan budaya 2. Meningkatkan promosi, inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya
12.	Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya wajar dikdas. -Berkurangnya masyarakat keluarga miskin yang tidak memperoleh hak pendidikan wajar dikdas -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah tertinggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya angka pastiripasi murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. 2. Belum optimalnya pendidikan anak usia dini. 3. Belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin 4. Masih lemahnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan APM pada setiap jenjang pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. 3. Meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan. 4. Meningkatkan sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pasar, berbasis potensi wilayah dan life skills yang memiliki daya saing internasional.
13.	Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka melek huruf. berkurang - Angka putus sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya mutu pendidikan masyarakat. 2. Masih rendahnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. 2. Meningkatkan daya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
		berkurang. - Kualitas dan kuantitas sarana pendidikan meningkat. - Kualitas dan kuantitas guru meningkat.	daya saing masyarakat di bidang pendidikan dan keahlian lainnya.	saing masyarakat Kabupaten Bandung terhadap masyarakat di luar Kabupaten Bandung.
14.	Meningkatnya pola hidup sehat dan Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	- Menurunnya angka kesakitan. - Menurunnya penyakit menular -Menurunnya AKI dan AKB - Meningkatnya pembinaan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat - Meningkatnya akses terhadap sarana kesehatan lingkungan	1. Masih terbatasnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 2. Memadainya jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
15.	Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga	-Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau secara geografis maupun biaya -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai peraturan yang berlaku -Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga yang terpadu	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam kemajuan pendidikan, kesehatan dan olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan olahraga yang dapat menunjang pembangunan sumberdaya manusia yang baik.
16.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hierarki dan kebutuhan masyarakat.	- Meningkatnya sarana dan prasarana publik di setiap WP yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan penduduk. - Meningkatnya peran dan fungsi wilayah sesuai dengan arahan RTRW.	1. Belum terpadu dan terintegrasinya pengelolaan transportasi.. 2. Belum tercapainya kondisi infrastruktur wilayah (transportasi, pengairan, air baku dan drainase) yang memadai 3. Belum tercapainya ketersediaan angkutan publik massal dan fasilitas pendukungnya (terminal dan halte) yang memadai.	1. Meningkatnya pengelolaan transportasi yang terpadu dan terintegrasi. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi. 3. Meningkatnya ketersediaan angkutan publik massal dan fasilitas pendukung yang efisien dan ekonomis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
17.	Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan-kawasan strategis -Meningkatkan aksesibilitas terwujudnya kawasan pesisir 	Masih adanya daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi dan belum tersentuh pembangunan	Pemerataan pembangunan serta memaksimalkan potensi sumber daya alam daerah.
18.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.	Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
19.	Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis potensi local	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri unggulan - Meningkatkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di industri lokal. - Meningkatkan jumlah lembaga ekonomi dan UMKM yang sehat. - Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan. - Pengembangan kemitraan usaha hulu hilir secara terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya manajemen dan kualitas produk UMKM. 2. Masih rendahnya penggunaan teknologi ramah lingkungan di UMKM. 3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan permodalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas produk UMKM. 2. Terserapnya produk UMKM di pasar regional, nasional bahkan internasional. 3. Terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing serta mampu menggunakan teknologi ramah lingkungan
20.	Tercapainya produk pertanian yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya alih fungsi lahan pertanian. - Berkembangnya agribisnis pertanian. - Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian di tingkat petani - Belum optimalnya sinergitas para pelaku usaha agribisnis dalam jaringan usaha bersama. - Belum teridentifikasinya produk-produk unggulan pertanian 	1. Terwujudnya kawasan agropolitan ' <i>one village one product</i> ' berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang mandiri, berteknologi dan berdaya saing.
21.	Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pariwisata di Kabupaten Bandung. - Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata. - Meningkatnya keanekaragaman objek wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fasilitas pelayanan di sektor pariwisata 2. Belum optimalnya promosi pariwisata di dalam dan luar negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya fasilitas pelayanan di kawasan pariwisata. 2. Meningkatnya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Bandung - Meningkatnya pola kerja sama, kemitraan dan promosi wisata daerah. - Terciptanya wisata desa yang berbudaya sunda, religius dan berwawasan lingkungan -Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan daerah -Terwujudnya wisata pesisir 		
22.	Terlaksananya pembangunan Pusat - Pusat Perdagangan Produk Unggulan Lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang informal (PKL) - Meningkatnya Pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek wisata. - Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan. - Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan - Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan -Meningkatnya ketersediaan pasar tradisional yang ramah lingkungan 	Masih terbatasnya sarana dan parasarana pusat-pusat perdagangan.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan parasarana pusat-pusat perdagangan yang berkualitas.
23.	Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku UMKM. - Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu. - Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti. - Meningkatnya infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum kondusifnya iklim investasi. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi investor 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target RPJP	Realisasi Kinerja s.d Periode Tahun 2005-2010	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2005 - 2010
24.	Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional) yang mandiri dan maju	-Meningkatnya jumlah koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional	Masih lemahnya lembaga – lembaga ekonomi di masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi produktif yang dapat menunjang perekonomian rakyat.



BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tahap kedua 2011-2015 Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini perlu perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal, dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi Kabupaten Bandung antara lain : keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan keshalehan sosial), pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan, infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015, yang hendak dicapai adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2011-2015

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.	Maju	Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.



Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Berdaya Saing	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional, yang mencakup berbagai aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Bandung.
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terpadu dan bertanggung jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, responsif, serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
	Pemantapan Pembangunan Perdesaan	Kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh–sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
	Religius	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
	Kultural	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial.



Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.
	Berwawasan Lingkungan	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2010-2015, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing.

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan mampu bersaing tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2010 – 2015, sebagai berikut :

Misi Pertama : **“Meningkatkan profesionalisme birokrasi”**.

Peningkatan profesionalisme birokrasi adalah salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata bergantung kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Secara garis besar terdapat 4 (empat) karakter kepemimpinan Rasulullah SAW yang harus kita teladani dalam berbagai lingkup kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dalam pemerintahan, yaitu :

- Karakter kepemimpinan pertama : **“siddiq”** (benar) yaitu komitmen terhadap kebenaran. Segala langkah yang ditempuh seorang pemimpin harus berpijak pada kebenaran, berada dalam kebenaran dan menuju kebenaran. Kebenaran inilah yang harus menjadi landasan strategi kebijakan serta acuan utama seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan.
- Karakter kepemimpinan kedua : **“tabligh”** (menyampaikan). Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan berbagai programnya dengan baik kepada masyarakat serta mampu mendengar,



memperhatikan dan menyikapi dengan segera apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya, agar kebijakannya senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.

- Karakter kepemimpinan ketiga : **"amanah"** (jujur). Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan adil disertai dengan keikhlasan dan ketawakalan dalam mengemban amanah kepemimpinannya. Sekecil apapun yang menjadi hak rakyat, harus mampu dipenuhinya sebagaimana seharusnya, serta apa yang diucapkannya harus dapat dibuktikan dengan perbuatan yang nyata.
- Karakter kepemimpinan keempat : **"fathonah"** (cerdas). Seorang pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual yang tinggi serta memiliki semangat untuk menjadikan berbagai fenomena kehidupan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Kepemimpinan bukan semata-mata kekuasaan tetapi merupakan kapasitas intelektual yang dikonsepsikan dan di praktekan dalam berbagai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya.

Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsif, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya sebagai berikut : Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya; Penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan; Meningkatkan kesejahteraan aparatur; Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi; Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima; Tercapainya lokasi transmigrasi; Peningkatan disiplin kerja aparatur; Terjalinnnya komunikasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan Masyarakat; Fasilitasi Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah; Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah; Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman stabilitas kehidupan masyarakat; Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public di Kabupaten Bandung; Terciptanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menganalisa penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung; Meningkatkan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial; Meningkatkan pengawasan internal.

Misi Kedua: **"Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda"**.

SDM berkualitas yang berlandaskan Iman dan takwa merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung yang **"Maju, Mandiri dan Berdaya Saing"**. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama.

Kesalehan sosial sebagai perwujudan sifat masyarakat bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari pengetahuan, sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketakwaan yang terefleksikan dalam kesalehan sosial, yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, yang berlandaskan iman dan taqwa.

Budaya sunda merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Budaya sunda sangat kaya akan nilai-nilai, hal ini merupakan falsafah hidup yang sangat menentukan bagi sikap dan karakter masyarakat Sunda dalam mengambil peran sentral dalam pembangunan. Oleh karenanya



perlu digali dan dikembangkan nilai-nilai budaya sunda yang baik untuk memotivasi potensi masyarakat. Masyarakat Sunda harus mempunyai kepercayaan diri dan kemandirian untuk berperan maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, karakter *masyarakat Sunda anu boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana* harus dikembangkan sebagai bagian dari jati diri kesundaan. Dalam budaya sunda dikenal istilah “**Sabilulungan**”, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampag gawe babarengan yang mengandung arti *silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi*. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “**Sabilulungan**” yang identik dengan *nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola* dan sikap yang *luhur, luhung, parigel, gesit binangkit*.

Peningkatan kualitas SDM yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional); Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun; Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat; Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun; Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; Ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah; Menyelenggarakan pendidikan usia dini; Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; Meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal; Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi; Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan; Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas KIA; Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes; Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu; Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan; Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular dan cara menghindari terjadinya kasus lebih banyak; Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular; Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin; Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah); Meningkatkan pelaksanaan JAMKESMAS dan JAMKESDA melalui prinsip-prinsip Asuransi; Meningkatkan advokasi ke sector swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan; Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen MDG's; Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat; Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga; Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak; Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana (Dasipena); Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Poskesdes serta Puskesmas di seluruh wilayah; Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan; Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial; Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah sosial, anak terlantar dan jompo; Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba, trafficking dan HIV/AIDS; Pengendalian jumlah penduduk; Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; Peningkatan dan peran serta kesetaraan gender; Peningkatan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat ; Peningkatan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam;



Peningkatan penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti optimalisasi ZIS; Peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan; Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini; Peningkatan pemasyarakatan penggunaan Bahasa dan nilai-nilai budaya Sunda dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan; Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan Sunda Pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; serta Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya

Upaya-upaya yang dilakukan harus konsisten dan berkesinambungan, dalam rangka menghadapi persaingan pada era globalisasi. Era globalisasi ini memerlukan SDM berkualitas yang mampu mengembangkan karir secara mandiri dan memenuhi pasar kerja sesuai keahlian yang dibutuhkan di berbagai bidang, seperti : industri, pertanian, perdagangan/jasa dan sebagainya, tanpa harus meninggalkan jati diri sebagai orang sunda.

Misi Ketiga: **“Memantapkan pembangunan perdesaan”**.

Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan. Upaya dalam mewujudkan pembangunan perdesaan yang mantap, menuju Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”** adalah melalui peningkatan infrastruktur perdesaan; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa; peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa; peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa; peningkatan pendapatan asli daerah desa; peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan; serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

Perwujudan tersebut akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan.

Misi Keempat : **“Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”**.

Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Bandung yang ditandai oleh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan ataupun kerusakan, serta adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini menjadi landasan bagi kelangsungan kehidupan yang tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan sesuai harapan dan cita-cita bersama. Dinamika pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat akan bergerak selaras dengan tuntutan perubahan, serta kehendak dan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas demokrasi yang bertanggung jawab, disertai dengan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat.

Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila : terjadinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum; terdapat peningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa; terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; adanya peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog; adanya peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat serta adanya peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.

Misi Kelima: **“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”**.

Ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.



Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, harus bertumpu pada pengembangan kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan); serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah; Pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat; Peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah; Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai kebutuhan; Peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat; Penataan areal pemakaman; Peningkatan pelayanan air bersih; Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan; Penyediaan sarana, prasarana serta utilitas perumahan; Peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni; Peningkatan kualitas SDM perhubungan; serta Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;

Misi Keenam: **“Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”**.

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar.

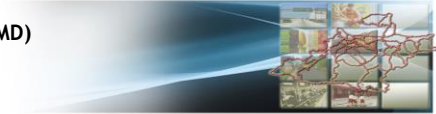
Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan promosi dan kerja sama pengembangan potensi investasi; peningkatan keterampilan kewirausahaan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah; pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan; mempermudah akses permodalan; pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui *One Village One Product (OVOP)*; pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima dan asongan.

Misi Ketujuh: **“Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”**.

Rusaknya lingkungan akibat bencana alam merupakan polemik yang tidak bisa dihindari. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola berpikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya mengandalkan pada mekanisme kinerja pemerintahan, tetapi harus mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat melalui penegakan hukum.

Sebagai wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa, perlu dilakukan penyusunan prosedur, tahapan mitigasi serta penanganan bencana yang sederhana dan mudah diterapkan, sesuai dengan pengalaman selama ini. Upaya menghindari bencana lebih mudah dilakukan dan lebih murah dibandingkan setelah terjadi bencana. Pemulihan keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang **“Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**.

Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi kerusakan dan memulihkan keseimbangan lingkungan serta penerapan pembangunan berkelanjutan, yaitu : Peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan; Peningkatan penegakan hukum lingkungan; Peningkatan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan



lingkungan; Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; Pengembangan produksi ramah lingkungan; Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan; Pengendalian kerusakan hutan dan lahan; Pengembangan sistem informasi lingkungan; Optimalisasi pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi; Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang dengan luas kawasan perkotaan; Reboisasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain); Pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau; Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana; Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berbasis Pengurangan Resiko; serta Pemetaan dan deliniasi kawasan rawan bencana.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2015

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pematapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi kesatu : "Meningkatkan profesionalisme birokrasi".	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan. 2. Terlaksananya pengiriman CPNS peserta diklat prajabatan, peserta diklatpim, diklat teknis dan bintek. 3. Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah. 4. Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil kepala daerah 5. Tersedianya SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan profesional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah 6. Mengembangkan sistem perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 7. Terwujudnya pelayanan Prima melalui transparansi pengaduan masyarakat 8. Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 9. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah. 10. Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam penyebaran informasi pembangunan



Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi kedua : “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”.	Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka melek huruf. 2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS). 3. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat. 4. Meningkatkan kuantitas siswa untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan. 5. Meningkatkan jumlah PAUD. 6. Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan. 7. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. 8. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan. 9. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat 10. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 11. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 12. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga 13. Responsif terhadap krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa 14. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan 15. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial. 16. Pengendalian Jumlah penduduk 17. Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak. 18. Meningkatkan kesalehan sosial. 19. Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda.
Misi ketiga : “Memantapkan Pembangunan Perdesaan”.	Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan desa 2. Meningkatkan peran serta masyarakat desa 3. Meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah desa 4. Meningkatkan desa mandiri pangan.
Misi keempat : “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya produk hukum yang implementatif. 2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 3. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum. 4. Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
Misi kelima : “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”.	Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar wilayah. 2. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah. 3. Tertatanya areal permukiman 4. Terlayaninya penduduk oleh pelayanan air bersih. 5. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni 6. Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu.



Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pematapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi keenam : “Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”.	Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing. 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 3. Berkembangnya Kawasan pertanian berbasis ekonomi lokal dan mampu berdaya saing. 4. Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal.
Misi ketujuh : “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”.	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap lingkungan. 2. Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan terkendalinya polusi 3. Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam` 4. Terwujudnya sistem informasi lingkungan 5. Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. 6. Terwujudnya kawasan perkotaan yang hijau dan ramah lingkungan 7. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau. 8. Berkurangnya luas lahan kritis. 9. Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran.



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, strategi dan arah pembangunan jangka menengah yang akan diterapkan secara berkesinambungan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke depan.

Salah satu falsafah yang masih hidup dan dianut oleh masyarakat Kabupaten Bandung adalah falsafah Sabilulungan yaitu falsafah saling membantu bahu membahu, *nulung kanu butuh, nalang kanu susah* yang menjadi energi kolektif luar biasa yang secara kontekstual terwujud dalam bentuk kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

6.1 Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats)

Untuk menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran, terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*).

Tabel. 6.1.
Identifikasi SWOT

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Jumlah aparatur yang sudah memadai 2. Adanya Sistem dan prosedur Perijinan Satu Pintu	(+) Peluang 1. Rasio jumlah pegawai terhadap pelayan publik cukup memadai 2. Budaya Good Governance dan Clean Governance. 3. Adanya ruang partisipasi publik
(-) Kelemahan 1. Rendahnya kualitas SDM 2. Rendahnya kinerja aparatur	(-) Ancaman 1. Belum optimalnya implementasi hasil partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Belum jelasnya pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan

2. Meningkatnya Kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda serta berlandaskan iman dan taqwa

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 2. Tersedianya SDM bidang pendidikan 3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 4. Tersedianya SDM bidang kesehatan 5. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 6. Terdapat sarana dan prasarana sosial keagamaan 7. Adanya kebijakan/aturan tentang 8. Kualitas pelayanan kehidupan beragama 9. Kebijakan pendukung budaya sunda 10. Berkembangnya paguyuban budaya sunda 11. Beranekaragamnya kesenian sunda	(+) Peluang 1. Dukungan Anggaran yang memadai 2. Adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggaraan pendidikan 3. Kebijakan pemerintah untuk sektor pendidikan 4. Adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat 5. Minat swasta untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan cukup tinggi 6. Banyaknya organisasi/lembaga keagamaan 7. Adanya pemahaman terhadap agama di



Internal	Eksternal
	lingkungan masyarakat 8. Minat orang lain/asling terhadap budaya Sunda cukup tinggi
(-) Kelemahan 1. Masih rendahnya APS SMA/MA/SMK 2. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah 3. Masih rendahnya rasio guru terhadap murid 4. Rendah kualitas pendidikan guru 5. Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata untuk seluruh wilayah 6. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan 7. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk 8. Keterbatasan kewenangan dalam kebijakan keagamaan. 9. Pemahaman aparat terhadap ilmu keagamaan masih rendah 10. Rendahnya pengetahuan aparat tentang budaya sunda	(-) Ancaman 1. Rendahnya pemahaman orangtua akan pentingnya pendidikan 2. Rendahnya minat melanjutkan sekolah karena tuntutan ekonomi 3. Minat tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas di wilayah perdesaan masih rendah 4. Aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan masih rendah 5. Heterogennya masyarakat berdasarkan SARA 6. Tekanan budaya global 7. Kurangnya pemahaman dan kecintaan terhadap budaya sunda

3. Meningkatkan Pembangunan Desa Menuju Desa yang Mandiri

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Adanya lembaga masyarakat desa 2. Adanya sarana dan prasarana pendukung pembangunan perdesaan 3. Adanya badan yang menangani pemberdayaan masyarakat desa 4. Jumlah dan kualitas produk pertanian meningkat setiap tahunnya 5. Adanya diversifikasi pangan	(+) Peluang 1. Adanya pembagian kewenangan terhadap pemerintahan desa 2. Adanya anggaran untuk pembangunan desa yang memadai 3. Kebutuhan akan pangan semakin meningkat 4. Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian
(-) Kelemahan 1. Tingkat pengatahuan SDM masih lemah 2. Lemahnya pengelolaan lembaga desa 3. Kesenjangan infrastruktur 4. Rendahnya budaya gotongroyong di masyarakat 5. Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah 6. Lemahnya kontrol kualitas terhadap produksi pangan 7. Pengolahan masih lemah	(-) Ancaman 1. Seringnya kejadian bencana alam 2. Terjadinya berbagai konflik kepentingan pengelolaan infrastruktur 3. Minat bekerja dalam sektor pertanian semakin berkurang 4. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

4. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Suasana yang kondusif 2. Kerjasama berbagai elemen baik masyarakat maupun pemerintah untuk menjaga keamanan	(+) Peluang 1. Tingkat partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban cukup tinggi 2. Penegakan hukum melalui pendekatan persuasif 3.



Internal	Eksternal
(-) Kelemahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kebebasan individu yang menyebabkan konflik 2. Terjadinya polarisasi sosial 3. Belum optimalnya Implementasi penegakan hukum 	(-) Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya baik kuantitas maupun kualitas kejadian perkara pidana dan perdata 2. Terjadinya migrasi dari luar daerah 3. Terjadinya berbagai konflik kepentingan

5. Terwujudnya keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jaringan jalan kabupaten yang relatif baik 2. Tersedianya sumber air bersih 3. Tersedianya Sarana transportasi yang memadai 4. Nilai ekonomi lahan yang cenderung semakin meningkat 5. Pola penggunaan lahan berkembang pesat 6. Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Kabupaten Bandung 	(+) Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya minat swasta untuk membangun sarana dan prasarana 2. Perkembangan wilayah yang cukup pesat 3. Pengembangan jaringan listrik dan energi alternatif terbarukan 4. Minat investasi terhadap lahan yang cukup tinggi 5. Tingginya tingkat investasi
(-) Kelemahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya penyebaran infrastruktur di wilayah 2. Belum efisiennya pembangunan sarana dan prasarana 3. Sarana dan prasarana pendukung wiayah kurang memadai 4. Administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah 5. Tidak ada batas yang jelas antara kawasan perkotaan dan perdesaan 6. Masih rendahnya pengembangan wilayah di wilayah perdesaan 7. Masih kurangnya peta yang memadai 	(-) Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Topografi wilayah merupakan daerah pegunungan yang rentan terjadinya gerakan tanah/longsor 2. Curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun 3. Pola dan penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan 4. Tingginya tingkat alih fungsi lahan 5. Terjadinya pembangunan yang tidak memiliki ijin

6. Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan <ol style="list-style-type: none"> 1. LPE masih cukup tinggi 2. Industri pengolahan masih dominan 3. Sektor pertanian masih cukup luas dan menjadi basis 4. Banyaknya kegiatan ekonomi (UKM) berbasis masyarakat 5. Prosedur untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan cukup sederhana 6. Adanya konsep pengembangan OVOP 7. Sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku 8. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan 	(+) Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam masih banyak tersedia 2. Sektor usaha kepariwisataan cenderung meningkat 3. Meningkatnya arus investasi pada beberapa sektor unggulan 4. Adanya pola kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan industri besar 5. pasar yang masih terbuka luas 6. minat swasta dalam berinvestasi di bidang agropolitan cukup tinggi
(-) Kelemahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya disparitas pembangunan antar daerah 2. PDRB belum merata untuk seluruh sektor 3. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja 	(-) Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 2. pekerjaan (urbanisasi)



Internal	Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> 4. Lemahnya SDM untuk meningkatkan produktifitas 5. Aksesibilitas terhadap modal dan pasar masih rendah 6. Kurangnya data potensi dan kondisi ekonomi pedesaan 7. Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah 8. Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perilaku masyarakat yang semakin permisif 4. Masih dominannya industri besar dalam perekonomian daerah 5. Produk sejenis dari wilayah lain 6. Ketatnya standar terhadap produk hasil pertanian

7. **Menciptakan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan**

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi wilayah yang cukup luas 2. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang memadai 3. Adanya penegakan hukum lingkungan 4. Kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lingkungan 5. Adanya lembaga penanggulangan bencana 6. Sinergitas antar tingkatan pemerintahan 7. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai 	<p>(+) Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 2. Adanya tradisi dan budaya peduli lingkungan 3. Adanya ketentuan dan peraturan pengelolaan lingkungan 4. Aturan mengenai penanggulangan bencana 5. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
<p>(-) Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (pengelolaan sampah) 2. Masih rendahnya pengawasan terhadap kerusakan lingkungan 3. Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi daerah bencana 4. Belum terpetakannya daerah rawan bencana 	<p>(-) Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim <i>global warming</i> (pemanasan global) 2. Semakin meningkatnya luas lahan kritis 3. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang tinggi 4. Tingginya tingkat pencemaran dari kegiatan industri 5. Curah hujan yang tinggi 6. Kondisi topografi berupa dataran tinggi 7. Sulitnya aksesibilitas menuju daerah rawan bencana 8. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana alam

6.2 **Strategi**

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima**

Strategi:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
- 2) Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan aparatur.
- 4) Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima.
- 6) Tercapainya lokasi transmigrasi.
- 7) Peningkatan disiplin kerja aparatur.
- 8) Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan Masyarakat.
- 9) Fasilitasi Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah
- 10) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah



- 11) Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman stabilitas kehidupan masyarakat
- 12) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bandung.
- 13) Terciptanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 14) Menganalisa penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung.
- 15) Meningkatkan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial
- 16) Meningkatkan pengawasan internal

2. Meningkatnya kualitas SDM yang handal berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.

Strategi:

- 1) Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional)
- 2) Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
- 3) Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun.
- 4) Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat
- 5) Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah
- 6) Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun.
- 7) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan
- 8) Ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan.
- 9) Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah.
- 10) Menyelenggarakan pendidikan usia dini
- 11) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
- 12) Meyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
- 13) Meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal.
- 14) Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.
- 15) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
- 16) Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
- 17) Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas KIA
- 18) Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes
- 19) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
- 20) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan
- 21) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan system kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular dan cara menghindari terjadinya kasus lebih banyak
- 22) Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular
- 23) Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan
- 24) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin
- 25) Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah)
- 26) Meningkatkan pelaksanaan JAMKESMAS dan JAMKESDA melalui prinsip-prinsip Asuransi
- 27) Meningkatkan advokasi ke sector swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan
- 28) Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen MDG's
- 29) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat
- 30) Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga
- 31) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan system kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak
- 32) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana (Dasipena)



- 33) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Poskesdes serta Puskesmas di seluruh wilayah
- 34) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
- 35) Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial
- 36) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah sosial, anak terlantar dan jompo
- 37) Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba, trafiking dan HIV/AIDS.
- 38) Pengendalian jumlah penduduk
- 39) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.
- 40) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
- 41) Peningkatan dan peran serta kesetaraan gender.
- 42) Peningkatan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat
- 43) Peningkatan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam
- 44) Peningkatan penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti optimalisasi ZIS.
- 45) Peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan.
- 46) Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini
- 47) Peningkatan pemasyarakatan penggunaan Bahasa dan nilai-nilai budaya Sunda dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan
- 48) Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan Sunda Pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat
- 49) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya

3. Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

Strategi:

- 1) Peningkatan infrastruktur perdesaan
- 2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintahan desa
- 3) Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- 5) Memperkuat lembaga-lembaga usaha tingkat desa di desa
- 6) Meningkatkan pendapatan asli daerah desa.
- 7) Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kesetabilan harga dan akses pangan.
- 8) Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.

4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Strategi:

- 1) Peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum.
- 2) Peningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- 3) Pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa.
- 4) Terlaksananya Penegakan hukum
- 5) Terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum.
- 6) Peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog.
- 7) Peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat.
- 8) Peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.

5. Keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

Strategi:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah;
- 2) Pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat;
- 3) Peningkatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah;
- 4) Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai kebutuhan;
- 5) Peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat;
- 6) Penataan areal pemakaman;
- 7) Peningkatan pelayanan air bersih;
- 8) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;



- 9) Penyediaan sarana, prasarana serta utilitas perumahan;
- 10) Peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni;
- 11) Peningkatan kualitas SDM perhubungan;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;

6. Meningkatkan Kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah

Strategi:

- 1) Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Mengembangkan industri produktif berbasis UMKM.
- 3) Meningkatkan keterampilan kewirausahaan.
- 4) Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal.
- 5) Mengembangkan model kemitraan usaha hulu-hilir.
- 6) Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM.
- 7) Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan potensi investasi Kabupaten Bandung
- 8) Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah.
- 9) Peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan
- 10) Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
- 11) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- 12) Pengembangan potensi agribisnis
- 13) Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan.
- 14) Mempermudah akses permodalan
- 15) Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan.
- 16) Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP)
- 17) Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan.
- 18) Pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu.
- 19) Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata.
- 20) Penataan pedagang kakilima dan asongan

7. Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana

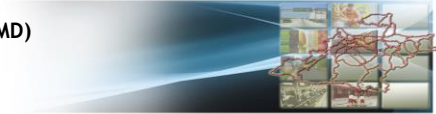
Strategi:

- 1) Peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan.
- 2) Peningkatan penegakan hukum lingkungan
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan
- 4) Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- 5) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- 6) Pengembangan produksi ramah lingkungan
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan
- 9) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
- 10) Pengembangan sistem informasi lingkungan
- 11) Optimalisasi pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi.
- 12) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang dengan luas kawasan perkotaan
- 13) Reboisasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain).
- 14) Pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau.
- 15) Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
- 16) Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana.
- 17) Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berbasis Pengurangan Resiko.
- 18) Pemetaan dan deliniasi kawasan rawan bencana.



6.3 Arah Kebijakan

Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah adalah arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tahap kedua tahun 2010-2015 yaitu :Menciptakan kondisi keamanan, ketertiban dilingkungan masyarakat; Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif; Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas; Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat; Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat; Menerapkan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perda, melalui penguatan jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi mendukung tegaknya Perda; Meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya; Meningkatkan Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan melibatkan masyarakat melalui ruang-ruang publik; Menciptakan kondisi kehidupan polotik yang demokratis; Meningkatkan sistem pelayanan publik/perijinan ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya; Mewujudkan pengembangan *outlet-outlet* pelayanan publik yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat; Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien; Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya ; Meningkatkan kualitas para aparat pemerintah; Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja; Meningkatkan disiplin pegawai; Meningkatkan pelaksanaan sisdur *reward & punishment* pegawai; Mempermudah akses masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan; Menerapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan luas lahan dan kritis; Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana; Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis; Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana; Membentuk badan penanggulangan bencana daerah; Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan; Meningkatkan sistem informasi dan sumber daya lingkungan; Optimalisasi penggunaan teknologi ramah lingkungan; Menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung; Menguatkan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsistensi; Menguatkan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (terkait pengelolaan lingkungan hidup) secara adil dan konsistensi; Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengendalian tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan; Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis; Mencanangkan usaha ekonomi produktif (pertanian dan perkebunan) dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan; Meningkatkan upaya penegakkan hukum di bidang pertambangan mineral dan air tanah; Meningkatkan kapasitas SDM pengelola bidang pertambangan; Optimalisasi potensi di bidang pertambangan mineral dan air tanah; Meningkatkan upaya konservasi lingkungan; Optimalisasi potensi di bidang kegeologian; Meningkatkan potensi dan penanggulangan kebencanaan geologi; Meningkatkan pemanfaatan energi: panas bumi, mikrohidro, biogas, surya, dan bahan bakar nabati; Meningkatkan ketersediaan data spasial; Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang; Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan; Mengoptimalkan pemanfaatan ruang; Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu; Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tataruang Disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya; Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan; Penerapan Teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah dan limbah; Rintisn pembentukan lembaga pengelolaan sampah dan limbah; Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan; Mewujudkan wajar dikdas 9 Tahun; Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini; Mencanangkan wajar dikdas 12 Tahun; Mengembangkan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar; Mengembangkan sekolah berbasis internasional; Meningkatkan beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi; Melibatkan peran pihak swasta dalam bidang pendidikan; Optimalisasi Implementasi dari Perda dan Perbup Dinnyah; Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin; Memperkenalkan bahasa dan budaya Sunda serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar; Melaksanakan pendataan dan pengelolaan peninggalan budaya local; Meningkatkan penanaman toleransi dan sikap saling menghargai antar umat beragama sejak di Sekolah Dasar; Meningkatkan rasa cinta terhadap seni dan budaya tradisional Sunda semenjak usia sekolah; Mencanangkan musyawarah pada tingkat desa untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama; Memperkenalkan bahasa dan budaya Sunda dan budaya religius serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar; Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa;



Membuat Rintisan Islamik Center sebagai salah pusat pengembangan budaya religius islami; Mewujudkan masyarakat yang mampu membaca dan menulis; Menanamkan Program Gemar Membaca Bagi anak usia sekolah; Meningkatkan kualitas guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; Meningkatkan ketertarikan siswa/I SMP/MTs untuk melanjutkan sekolah ke SMK yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat; Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat; Meningkatkan penyuluhan tentang gizi dan program imunisasi kepada bayi yang baru lahir; Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan hingga menjangkau desa-desa; Menyediakan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah; Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan; Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi; Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi; Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga masyarakat umum; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; Terciptanya transparansi dalam proses pembangunan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan; Meningkatnya bangunan turap/talud/bronjong secara bertahap pada daerah rawan longsor dan bencana; Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan perkotaan dan pemukiman; Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan (penerangan jalan umum); Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan; Percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal; Percepatan terhadap pembangunan kawasan strategis; Mengelompokkan dan mengembangkan kawasan menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif; Menyiapkan infrastruktur, berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung kegiatan jasa perdagangan; Menetapkan AMDAL bagi kawasan yang akan dikembangkan menjadi UMKM, industri kreatif serta pusat perdagangan; Meningkatkan kondisi iklim investasi yang menarik dan memudahkan bagi investor baik dalam maupun luar negeri; Menumbuhkembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan wilayah sentra produksi; Mengelola dan melaksanakan intensifikasi lahan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan ; Mendorong masyarakat untuk terlibat pada sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan; Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam rangka peningkatan kualitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan; Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan industri pengolahan; Mewujudkan program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan; Mencanangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengembangan agribisnis kepewilayahan; Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin ; Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi; Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi; Meningkatkan mutu dan Keamanan Pangan Daerah; Pengembangan sistem distribusi pangan yang efektif; Pengembangan kegiatan pariwisata dan Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata; Meningkatkan investasi usaha pariwisata dan Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisata; Meningkatkan jumlah dan keragaman daerah tujuan wisata dan merintis regulasi pariwisata; Mendorong terciptanya hubungan yang baik dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor, serta antara investor terhadap pemerintah dan masyarakat; Menerapkan sistem insentif bagi para investor yang hendak berinvestasi di Kabupaten Bandung; Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial berkembang serta membutuhkan investasi; Pengembangan kegiatan pariwisata; Meningkatkan jumlah sentra industri manufaktur; Meningkatkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk local; Mempermudah akses pembentukan lembaga ekonomi produktif; Meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga ekonomi produktif; Meningkatkan jumlah lembaga ekonomi produktif

Arah kebijakan dimaksudkan untuk peningkatan pemantapan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah serta meningkatkan profesionalisme birokrasi, peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), dan perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, irigasi) dalam rangka memantapkan pembangunan perdesaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kota serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

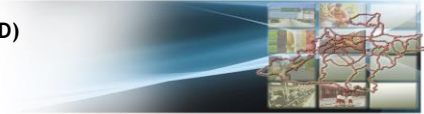


Tabel 6.2
Perumusan Sasaran dan Strategi Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya. • Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan. • Meningkatkan kesejahteraan aparatur. • Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi. • Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima • Tercapainya lokasi transmigrasi
		2. Terlaksananya pengiriman CPNS peserta diklat prajabatan, peserta diklatpim, diklat teknis dan bintek.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan disiplin kerja aparatur.
		3. Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan Masyarakat
		4. Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala daerah/ Wakil kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah
		5. Tersedianya SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan professional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatn maupun belanja daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah
		6. Mengembangkan system perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman stabilitas kehidupan masyarakat
		7. Terwujudnya pelayanan Prima melalui tansparansi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bandung.
		8. Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
		9. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung.
		10. Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial • Meningkatnya pengawasan internal secara



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			berkala.
2.	Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya angka melek huruf 2. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat 4. Meningkatnya kuantitas siswa untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan. 5. Meningkatkan jumlah PAUD 6. Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan 7. Meningkatkan manajemen pendidikan 8. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan 9. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 10. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional) • Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan • Pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun. • Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat • Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah • Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun. • Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan • Ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan. • Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah. • Menyelenggarakan pendidikan usia dini • Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. • Meyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. • Meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal. • Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. • Meningkatkan sarana dan prasaran olahraga. • Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan • Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas KIA • Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONEC serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes • Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu • Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan • Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan system kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular dan cara menghindari terjadinya kasus lebih banyak • Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular • Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan
		11. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin • Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah) • Meningkatkan pelaksanaan JAMKESMAS dan JAMKESDA melalui prinsip-prinsip Asuransi • Meningkatkan advokasi ke sector swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan • Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen MDG's
		12. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat • Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga
		13. Responsif terhadap krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan system kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak • Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana (Dasipena)
		14. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Poskesdes serta Puskesmas di seluruh wilayah • Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
		15. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial • Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyandang sosial, anak terlantar dan jompo • Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba, trafficking dan HIV/AIDS
		16. Pengendalian Jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk melalui pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu iud, mop, mow dan implant, kesehatan reproduksi melalui menurunnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun, penyediaan data keluarga dan tertib Administasi kependudukan
		17. Kesetaraan gender dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
		anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. • Peningkatan dan peran serta kesetaraan gender.
		18. Meningkatnya kesalehan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat • Peningkatan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam • Peningkatan penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti optimalisasi ZIS. • Peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan.
		19. Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini • Peningkatan pemasyarakatan penggunaan Bahasa dan nilai-nilai budaya Sunda dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan • Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan Sunda Pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat • Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya
3.	Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.	1. Meningkatnya infrastruktur dan kapasitas kelembagaan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur perdesaan • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa
		2. Meningkatnya peranserta masyarakat perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa • Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat
		3. Meningkatnya kapasitas fiskal perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat lembaga-lembaga keuangan mikro di desa • Meningkatkan pendapatan asli daerah desa.
		4. Meningkatnya desa mandiri pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kesetabilan harga dan akses pangan. • Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras.
4.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tersedianya produk hukum yang implementatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum.
		2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum. • Pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa. • Terlaksananya Penegakan hukum
		3. Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum. • Peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog.
		4. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat. • Peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
		masyarakat.	
5	Terwujudnya keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah. 2. Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah. 3. Tertatanya areal permukiman 4. Terlayannya seluruh penduduk oleh pelayanan air bersih 5. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni 6. Terwujudnya system transportasi yang terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah • Pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat • Peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan. • Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan. • Peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat • Penataan areal pemukiman • Peningkatan pelayanan air bersih • Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan • Penyediaan sarana, prasarana serta utilitas perumahan • Peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni • Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan. • Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
6.	Meningkatkan Kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. • Mengembangkan industri produktif berbasis UMKM. • Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal. • Meningkatkan keterampilan kewirausahaan. • Mengembangkan model kemitraan usaha hulu-hilir. • Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM. • Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan potensi investasi Kabupaten Bandung • Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan • Peningkatan kualitas SDM pencari kerja. • Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Berkembangnya kawasan pertanian berbasis ekonomi local dan mampu berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi agribisnis • Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan. • Mempermudah akses permodalan • Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP) • Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan.
		4. Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi local	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu. • Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata. • Penataan pedagang kakilima dan asongan
7.	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana	<p>1. Terkendalinya dampak pembangunan terhadap lingkungan.</p> <p>2. Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan bebas polusi</p> <p>3. Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>4. Terwujudnya sistem informasi lingkungan</p> <p>5. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan</p> <p>6. Terwujudnya kawasan perkotaan yang hijau dan ramah lingkungan</p> <p>7. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau.</p> <p>8. Berkurangnya luas lahan kritis.</p> <p>9. Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan. • Peningkatan penegakan hukum lingkungan • Peningkatan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan • Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup • Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup • Pengembangan produksi ramah lingkungan • Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan • Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan • Pengendalian kerusakan hutan dan lahan • Pengembangan sistem informasi lingkungan • Optimalisasi pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi. • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang dengan luas kawasan perkotaan • Reboisasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain). • Pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau. • Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis. • Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana. • Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berbasis Pengurangan Resiko. • Pemetaan dan deliniasi kawasan rawan bencana.



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan SKPDnya. Untuk mendapatkan program pembangunan yang inheren di setiap strategi, maka dibutuhkan kebijakan umum. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunannya.

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

A. Misi 1: Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

Tujuan : Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan	Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.	Meningkatnya kapasitas SDM CPNS, kinerja PNS dan profesionalisme Aparatur	Kenaikan pangkat periode april 1481 orang dan periode oktober 1450 orang, kenaikan gaji berkala 2109 orang Pensiun 448 orang	Kenaikan pangkat dan gaji berkala sebanyak 8000, Pensiun 3210	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKPP
		Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan.	Terciptanya Pejabat struktural sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD, terpenuhinya pengisian formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, meningkatnya disiplin dan mental pegawai kualitas pelayanan aparatur, serta terdapatnya akurasisdata pegawai kabupaten bandung	9399 orang	Terpenuhinya formasi pegawai 11262 orang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKPP/ Setda
		Meningkatnya kuantitas SDM CPNS, kinerja PNS dan	Meningkatnya kuantitas SDM CPNS, kinerja PNS dan	Pelamar umum 9000 Honorer 3562 orang,	2400 orang	Program peningkatan kapasitas sumberdaya	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	BKPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			profesionalisme Aparatur	Penetapan NIP. 833		aparatur	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
		Meningkatkan kesejahteraan aparatur.	Meningkatnya kesejahteraan aparatur	Pemberian satya lencana 126, kasus-kasus 18, pemberian penghargaan lain-lain berupa uang bagi PNS yang akan purna bakti.	Pemberian satya lencana 1360, kasus-kasus 100 orang, penghargaan lain-lain berupa uang bagi 5020,	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKPP
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pola pendekatan pelayanan prima	Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001:2008: Awarness 20 orang. Internal Audit 5 orang Penyusunan Dokumen ISO 25 orang.	Tersertifikasinya dokumen RKPD ISO 9001:2008	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Dokumen Hasil inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah sebanyak 243.	Dokumen Hasil kajian sebagai bahan perencanaan 2011-2015	Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Tersusunnya bahan/ dokumen perencanaan transportasi Tersusunnya bahan/ dokumen perencanaan penanggulangan bencana Tersusunnya bahan/ dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tersedianya Dokumen perencanaan Transportasi, Penanggulangan Bencana dan Dokumen Perencanaan Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Raperda RPJP 2005-2025 Rancangan Awal RPJMD 2010-2015 Perbub RKPDP Tahun 2011	Perda RPJPD 2005-2025 Perda RPJMD 2010-2015 Perbub RKPDP Tahun 2012-2015	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda/ Setda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				KUA/PPAS Tahun 2011 KUA/PPAS Perubahan Tahun 2010 LKPJ Tahun 2010 Laporan Monitoring Tahun 2010	KUA/PPAS Tahun 2012-2015 KUA/PPAS Perubahan Tahun 2011-2015 LKPJ Tahun 2011-2015 Laporan Monitoring 2011-2015			
				Dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan Dokumen Pendampingan Program OVOP Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Tersedianya Basis Data Perekonomian Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang meliputi ketahanan pangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan dan industry.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Terlaksananya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung Dokumen Kajian Rintisan Inovasi Pengembangan Model Pendidikan Universal Berbasis Potensi Unggulan Masyarakat	Dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan, review dokumen pronangkis, penyusunan perencanaan indikator SKPD kewilayahan.	Program perencanaan sosial budaya	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
				Dokumen laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman	Dokumen hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup,	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan kebersihan Tahun 2010 Dokumen rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan	permukiman dan kebersihan Tahun 2011-2015 Dokumen rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan			
		Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.	Ketersediaan Dokumen Statistik: PDRB Kab dan Kecamatan IPM SUSEDA KBDA Indeks Gini Rasio Input Output IKM IHK	Ketersediaan Dokumen Statistik: PDRB Kab dan Kecamatan 2010 IPM 2010 SUSEDA 2010 KBDA 2010 Indeks Gini Rasio 2008 Input Output 2008 IKM 2010	Ketersediaan Dokumen Statistik: PDRB Kab dan Kecamatan 2011-2015 IPM 2011-215 SUSEDA 2011-2015 KBDA 2011-2015 IKM 2011-2015 IHK 2011-2015	Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	Statistik	Bappeda
			Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	69	70	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Bapapsi
			Jumlah SKPD yang dibina daam pengelolaan kearsipan	69	70	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Bapapsi
			Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	100	100	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Bapapsi
			Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Diperlukan	69	70	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Bapapsi
			Jumlah SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	60	70	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Bapapsi
			Persentase SDM Pengelola Arsip yang telah	75,95	100	Program peningkatan kualitas	Kearsipan	Bapapsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Melakukan Pelatihan			pelayanan informasi		
		Tercapainya lokasi transmigrasi	Tertempatkannya transmigran	165 KK	369 KK	Program Transmigrasi Regional	Ketransmigrasi an	Disnaker
2.	Terlaksananya pengiriman CPNS peserta diklat prajabatan, peserta diklatpim, diklat teknis dan bintek.	Peningkatan disiplin kerja aparatur.	Meningkatnya disiplin kerja aparatur	Prajabatan, 496, diklat pim IV 242 orang, Pim II 3 Diklatpim III 3 orang, teknis tugas dan fungsi 430 orang	Prajabatan 2497 Diklat pim 887 orang, teknis tugas dan fungsi 2136 orang	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKPP
3	Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah.	Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan Masyarakat	Terselenggarakannya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.	15 Raperda	75 Raperda	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setwan
4	Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil kepala daerah	Fasilitasi Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah	7 Lembaga (Bupati, Ketua DPRD Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Dan LANUD Sulaiman)	7 Lembaga (Bupati, Ketua DPRD Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Dan LANUD Sulaiman)	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda
5	Tersedianya SDM aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan professional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatn maupun belanja daerah	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah	Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan professional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah.	69 SKPD	70 SKPD	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPK dan Setda
6	Mengembangkan system perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman stabilitas kehidupan masyarakat	Sinkronisasi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan	0%	100%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	Setda, Inspektora t, Kec dan Kel

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kemasyarakatan			kebijakan KDH	Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
7	Terwujudnya pelayanan Prima melalui transparansi pengaduan masyarakat	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public di Kabupaten Bandung.	Tertanganinya pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat baik melalui Media cetak dan media elektronik, serta kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi.	94 kasus	470 kasus	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektora t
8	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terciptanya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan	0%	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda dan Setwan
9	Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah.	Menganalisa penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung.	Teranalisisnya penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung	215 titik pilar	293 titik pilar	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda
10	Terciptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam penyebaran informasi pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial	Surat kabar terbitan nasional	1	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Bapapsi
			Surat kabar terbitan lokal	4	4			
			Total Surat kabar (1+2)	5	5			
			Jumlah penyiaran radio nasional	1	1			
			Jumlah penyiaran TV lokal	6	6			
			Jumlah penyiaran TV nasional	10	10			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sudah memiliki KTP Belum memiliki KTP	2.269.054	2.895.952	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinsosdukc asip /Disdukcas ip
			Sudah memiliki KK Belum memiliki KK	742.536	387.763			
			Sudah memiliki akte kelahiran	558.689	899.775			
			Belum memiliki akte kelahiran	371.268	66.268			
			Sudah memiliki akte nikah non muslim	649.228	1.045.588			
			Belum memiliki akte nikah non muslim	2.705.375	2.275.375			
				5.597	7.143			
				441	201			
		Meningkatnya pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan secara berkala pada 69 SKPD di Kabupaten Bandung.	0 SKPD	69 SKPD	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektora t,

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Penerapan Agenda reformasi birokrasi.

Kebijakan ini diindikasikan dengan:

- Meningkatkan kualitas SDM aparatur sesuai dengan peran dan fungsinya
- Terwujudnya sistem reward and punishment yang jelas dan tegas, dalam rangka menunjang disiplin kerja yang optimal dan pengawasan internal bagi aparatur
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.

B. Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Taqwa serta melestarikan budaya sunda

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

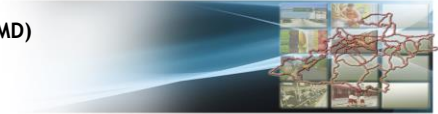
No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya angka melek huruf	Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan	2.177.908 jiwa	2,660,706 Jiwa	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dikbud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			menulis					
			Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	2.213.351 jiwa	2,687,244 jiwa			
			Angka Melek Huruf	98.41	99.01			
			Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI (Rasio)	285	274,5			
			Jumlah seluruh Siswa SD/MI	403.173	462.031			
			Angka Putus Sekolah (Persentase) SD/MI	0,07	0,065			
			Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	844	475			
			Jumlah seluruh Siswa SMP/MTs	192.851	194.779			
			Angka Putus Sekolah (Persentase) SMP/MTs	0.59	0.02			
			Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/MA/SMK	391	371			
			Jumlah seluruh Siswa SMA/MA/SMK	67.476	88.489			
			Angka Putus Sekolah (Persentase) SMA/MA/SMK	0,58	1,23			
		Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Bapapsi
			Jumlah Perpustakaan milik non pemda	1	1			
			Total Perpustakaan (1+2)	2	2			
			Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	9.405	19.461			
			Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	9.405	19.461			
2	Meningkatkannya angka rata-rata	Pencanangan dan penerapan wajib	jumlah murid usia 7-12 thn	400.917	405.983	Program Wajib	Pendidikan	Dikbud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lana sekolah (RLS)	belajar 12 tahun	SD/MI			Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
			jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	402.631	506.949			
			APS SD/MI	890,41	1.034.47			
			jumlah murid usia 13-15 thn SMP/MTs	154.751	156.299			
			jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	190.535	217.153			
			APS SMP/MTs	516,26	602,66			
			Angka Partisipasi Murni SD	99,57	97,625			
			Angka Partisipasi Murni SMP	81,22	91,01			
			Rata-Rata Lama Sekolah	9,02	11,74			
			Jumlah sekolah SD/MI	1.553	1.589			
			Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	402.631	458.880			
			Rasio SD/MI	38,78	27,37			
			Jumlah sekolah SMP/MTs	411	570			
			jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	190.535	217.153			
			Rasio SMP/MTs	19,9	20,575			
			Jumlah Guru SD/MI	14.363	22.715			
			Jumlah Kelas SD/MI	11.474	11.853			
			Jumlah Guru per Kelas SD/MI	1,39	1,93			
			Jumlah Murid SD/MI	419.990	462.031			
			Rasio SD/MI	6,85	6,87			
			Jumlah Guru SMP/MTs	10.003	12.752			
			Jumlah Kelas SMP/MTs	3.763	5.183			
			Jumlah Guru per Kelas SMP/MTs	2,82	2,92			
			Jumlah Murid	192.851	61.687			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SMP/MTs					
			Rasio SMP/MTs	0,019	0,0265			
3	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/K/MA/Sederajat	Fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat	Jumlah siswa baru SMA/SMK dari keluarga kurang mampu	7.065	9.891	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dikbud
			Peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK	250			
			jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun SMA/MA/SMK	171.552	195.518			
			Rasio SMA/MA/SMK	14,03	16,47			
			Jumlah Guru SMA/MA	6.970	10.508			
			Jumlah Kelas SMA/MA	2.093	4.024			
			Jumlah Guru per Kelas SMA/MA	3.33	6.38			
			Jumlah Murid SMA/MA	92.017	95.698			
			Rasio SMA/MA	1,963	1,965			
			Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun.	Angka Partisipasi Kasar SMA	54,04	54,04	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni SMA	41,50		43,50				
4	Meningkatnya kuantitas siswa untuk jenjang pendidikan menengah kejuruan	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan		67	80			
		Ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan.	Jumlah penyelenggara	14	15			
		Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah		17	17			
5	Meningkatkan jumlah PAUD	Menyelenggarakan pendidikan usia dini	Jumlah siswa pada jenjang Tk / Ra /penitipan anak	43.816	79.328	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikbud
			Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	213.578	226.650			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Paud (TK/RA/Penitipan anak)	20.52%	25,34%			
6	Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan	Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.	Jumlah guru yang bersertifikasi	10.051	23.024	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dikbud
			Jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi	60,33%	100%			
			Jumlah KKG,	235	200			
		Meyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh unit sistem pendidikan	1	2			
			Jumlah guru yang mendapat beasiswa	185	4.352			
7	Meningkatkan manajemen pendidikan	Meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal	Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun Formal seluruh jenjang	Ada	Ada	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dikbud
			Jumlah Dewan Pendidikan	1	1			
			Jumlah Komite sekolah	2.229	2.319			
			Jumlah forum komunikasi dewan pendidikan	31	31			
8	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	3,96	16,02	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispopar
			Jumlah Organisasi Olahraga	42	46			
		Meningkatkan sarana dan prasaran olahraga.	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	1,2	1,6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispopar
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Organisasi Pemuda	67	105	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dispopar
9	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	88.4%	100%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bayi melalui peningkatan kualitas KIA				Melahirkan dan Anak		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	52.7%	95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82.10%	90%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan pelayanan nifas	67.5%	90%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Ibu hamil KEK (kurang energy kronis) mendapat PMT (pemberian makanan tambahan)	Belum ada data prevalensi Bumil KEK	50%	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe	74.70%	90%	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan Ibu nifas mengkonsumsi vit. A	60%	90%	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	13.3%	95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan kunjungan bayi	92.44%	95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan desa/kelurahan UCI (universal child immunisation)	73.91%	90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Prevalensi anak gizi buruk	0.06	0.04	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan pelayanan anak balita	48.7%	90 %	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan	100%	100%	Program	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin			Prbaikan Gizi Masyarakat		
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan distribusi vitamin A	94.5%	98%	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	19.21%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan peserta KB aktif	81%	85%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik	83.3%	90%	Program Prbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal lengkap	70%	90%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinkes
			Tersedianya puskesmas dan petugas santun lansia	8 puskesmas	12 puskesmas	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinkes
			Terlaksananya kegiatan sanitasi di lingkungan pemukiman dan institusi	100%	100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
		Meningkatkan pembangunan puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes	Jumlah puskesmas yang mampu PONED	4	12	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah poskesdes yang dibangun	102	112	Program Pengadaan, Peningkatan dan	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
			Jumlah puskesmas yang dibangun/direhab sesuai standar tata ruang	26	36	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun/direhab sesuai standar tata ruang	78	83	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinkes
			Terpeliharanya puskesmas	80 %	100%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	kesehatan	Dinkes
			Terpeliharanya puskesmas keliling	60%	80%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		
		Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu	Jumlah dokter umum	88	139	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes, RSD soreang, RSD Majalaya dan RSUD cicalengka
			Jumlah dokter	29	62	Program	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gigi			Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
			Jumlah perawat umum	276	459	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah perawat gigi	31	62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah bidan	338	472	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Sanitarian	47	62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah nutrisionis	42	62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah asisten apoteker	39	62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Analisis kesehatan	22	62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah dokter yang terampil dalam kegawatdaruratan	22	50	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Perawat yang terampil dalam kegawatdaruratan	28	70	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Bidan yang terampil dalam kegawatdaruratan obstetric neonatal	30	90	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Bidan yang terampil dalam menangani persalinan normal (APN)	236	286	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah perawat	81	124	Program	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PHN terlatih			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan	Kebutuhan obat perkapita penduduk dengan nilai Rp 11.000,-	4761	11.000	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Distribusi obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Terselenggara nya pengelolaan obat yang baik dan benar di Puskesmas	100%	100%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Terselenggara nya pengelolaan obat yang baik dan benar di Toko Obat	70%	100%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Terselenggara nya pengelolaan obat yang baik dan benar di Apotek	50%	100%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
			Pengawasan peredaran obat berbahaya di sarana kesehatan	23,35%	100%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
			Tersosialisasikannya obat teurapetik, obat tradisional, kosmetik, dan makanan minuman yang memenuhi syarat	48,39%	100%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
			Terwujudnya sarana (Apotek, pedagang eceran obat, dan klinik kecantikan) yang berizin	100%	100%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
			Terbinanya industri rumah tangga pangan yang berizin	11,32%	80%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
			Pengawasan peredaran makanan minuman yang beredar di masyarakat	100%	100%	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
			Terwujudnya industri rumah tangga pangan	1148 IRTP	1748 IRTP	Program Pengawasan Obat dan	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang berizin Terwujudnya tenaga kesehatan yang berkompentensi dalam melakukan pengawasan obat teurapetik, obat tradisional, kosmetik, dan makanan minuman	25,41%	100%	Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
10	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan system kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular dan cara menghindari terjadinya kasus lebih banyak	Cakupan desa/kelurahan mengalami wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
		Meningkatkan kegiatan surveilans dan monitoring penyakit menular	AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun	7	3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Penemuan penderita pneumonia balita	79.3%	90 %	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Penemuan pasien TB BTA positif	73.9%	90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Penemuan kasus Kusta	< 1/10000 penduduk	< 1/10000 penduduk	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Tersedianya bahan dan alat fogging	68%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulan	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						gan Penyakit Menular		
			Penemuan penderita diare	8.9%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Penjangkauan penderita HIV / AIDS	80%	85%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan desa/ Kelurahan UCI (universal child imunisasi)	73.91%	90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
			Pelayanan pengendalian vector : Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes	93,87%	95%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Tempat – Tempat Umum Sehat	70.05%	82%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Pelayanan Kesehatan Lingkungan : Institusi yang dibina	-	100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Persentase air minum yang memenuhi syarat	-	100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah DAMIU yang diawasi	175	220	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah titik sample yang diawasi kualitas air minum	-	50	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
		Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan	Cakupan pengobatan masal Filariasis	74.3%	Tahun 2013 = 85%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
11	Meningkatnya	Meningkatkan akses	Cakupan	48.7%	100%	Progam	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin	dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin	pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
			Pelayanan kunjungan rumah bagi penderita penyakit kronis dan risiko tinggi	2196 KK	2196 KK	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	7.8%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	kesehatan	Dinkes, RSUD soreang, RSUD majalaya dan RSUD cicalengka
		Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah)	Tersusunnya dokumen Sistem Kesehatan Daerah (SKD)	0	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	kesehatan	Dinkes
		Meningkatkan pelaksanaan JAMKESMAS dan JAMKESDA melalui prinsip-prinsip Asuransi	Terlaksananya klaim jamkesmas dan jamkesda bagi penduduk miskin	80%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	kesehatan	RSUD soreang, RSUD majalaya dan RSUD cicalengka
		Meningkatkan advokasi ke sector swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan	Pembangunan/rehabilitasi puskesmas	3	7	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan	Kesehatan	Dinkes
			Pembangunan/rehabilitasi pukesmas pembantu			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pembangunan/rehabilitasi poskesdes	1%	25%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinkes
		Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen MDG's	Tersedianya biaya operasional UPTD dan puskesmas	61 Puskesmas	62 Puskesmas	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
12	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga	Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sector dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	40%	70%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Terbinanya UKBM, Saka Bakti Husada dalam promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat	25.8%	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Persentase keluarga yang menggunakan Sarana Air Bersih	71,67%	85%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Persentase keluarga yang menggunakan jamban keluarga sehat	63,74%	78%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Persentase keluarga yang menggunakan Sarana Pembuangan Air Limbah Memenuhi Syarat	36,26%	50%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Rumah Sehat	50,1%	80%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Desa yang menyelenggarakan CLTS	3	7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Desa yang mendeklarasikan STOP BABS	0	12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3	25	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
		Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga	Cakupan Desa Siaga Aktif	38%	70%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
		Terbinanya desa siaga		100%	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
		Terbinanya desa pratama		169 desa	0 desa	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
		Terbinanya desa mandiri/paripurna		0	155	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
13	Responsif terhadap krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan system kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Poskes yang ditangani kader bencana	20	30	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KESEHATAN	Dinkes
		Meningkatkan kualitas SDM	Terlaksananya posko rawan	100%	100%	Program Upaya	Kesehatan	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana (Dasipena)	bencana dan terlayannya pasien pasien korban bencana dan terlaksananya posko hari-hari besar			Kesehatan Masyarakat		
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Poskesdes serta Puskel di seluruh wilayah	Terlayannya kesehatan calon jemaah haji	90.33%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
			Terpeliharanya vaksin dan cold chain	70%	95%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			Tersedianya dokumen Perda tentang Sistem kesehatan Daerah	0	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kesehatan	0	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
			Jumlah Puskesmas yang memiliki Water test kit	0	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
			Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan	Termonitor dan terevaluasinya kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	20%	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan
		Terlaksananya evaluasi kinerja puskesmas	70%	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes	
		Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data	100%	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes	
15	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial	Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Pkeluarga Harapan,	KFM= 40 WRSE= 40 PKH= 8,276	KFM= 200 WRSE= 200 PKH= 41.380	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	Sosial	Dinsosdukca sip

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
			TKSK, PSM, KT, TMP, PKRI, DUNIA USAHA, KELEMBAGAAN SOSIAL, TAGANA	TKSK=29 PSM= 93 KT= 93 TMP= 3 PKRI= 42 DUNIA USAHA= 45 KELEMBAGAA N SOSIAL= 180 TAGANA= 40	TKSK=31 PSM= 93 KT= 93 TMP= 3 PKRI= 42 DUNIA USAHA= 45 KELEMBAGAA N SOSIAL= 180 TAGANA= 40	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosdukca sip/Dinsos
		Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyandang sosial, anak terlantar dan jompo	KTK, KBA&KBS LU Terlantar Jamin LU Kel Migran Rentan	KTK= 50 KBA&KBS=40 LU Terlantar=90 Jamin LU=117 Kel Migran=20 Rentan	KTK= 45 KBA&KBS=40 LU Terlantar=100 Jamin LU=117 Kel Migran=20 Rentan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosdukca sip/Dinsos
			Anak terlantar dan Anak jalanan	Anak terlantar=30 Anak jalanan= 40	Anak terlantar=30 Anak jalanan= 40	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinsosdukca sip/Dinsos
			Penyandang cacat, bantuan untuk cacat berat, anak cacat dan anak cacat (PKS-ADK)	Penyandang cacat=26 bantuan untuk cacat berat=55 anak cacat=60 anak cacat (PKS-ADK)=224	Penyandang cacat=26 bantuan untuk cacat berat=55 anak cacat=60 anak cacat (PKS-ADK)=224	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinsosdukca sip/Dinsos
			Panti dan Orsos	Panti= 25 Orsos= 35	Panti= 25 Orsos= 35	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Dinsosdukca sip/Dinsos
		Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba, trafficking dan HIV/AIDS	Anak nakal, WTS, Gepeng, HIV/AIDS BWBLK, NAPZA	Anak nakal=30 WTS= 50 Gepeng HIV/AIDS BWBLK=20 NAPZA=40	Anak nakal=30 WTS= 50 Gepeng HIV/AIDS BWBLK=20 NAPZA=40	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Dinsosdukca sip/Dinsos
16	Pengendalian jumlah penduduk	Pengendalian penduduk melalui pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yaitu iud, mop, mow dan implant, kesehatan	Tercapainya pelayanan keluarga berencana melalui : Pelayanan KB, MOP, dan MOW	IUD=10.248 orang, MOW=953 orang, MOP=1084 orang, Implant=4212 orang,	IUD=50.010 orang, MOW=4774 ,53orang, MOP=5582,6 orang, Implant=3559 1,4 orang,	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		reproduksi melalui menurunnya usia kawin pertama menjadi 21 tahun, penyediaan data keluarga dan tertib Administrasi kependudukan	kesepakatan pelayanan dengan medis pelayanan KB paska pelayanan	Suntik=56893 orang, PIL=15871 orang, Kondom=5223 orang	Suntik=36496 86 orang, PIL=3229799, 4 orang, Kondom=512 60,49 orang			
			Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: lokakarya remaja pembentukan kelompok PKIR pertemuan PKIR percontohan	200 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok	250 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP
			Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa	300 Orang pos KB desa, 930 Orang sub pos KB desa	300 Orang pos KB desa, 930 Orang sub pos KB desa	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP
			Perubahan sikap dan perilaku masyarakat tentang bahaya Narkoba, PMS dan penyakit HIV/AIDS melalui peringatan hari AIDS sedunia	250 Orang	100 Orang	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP
			Tersedianya data potensi tentang pengasuhan anak meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu tumbuh kembang anak	31 buku 1 paket	31 buku 1 paket	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP
			Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UUPKS di tingkat Kecamatan	409 orang 150 Orang 150 Orang 350 Orang	700 Orang 350 Orang 350 Orang 575 Orang	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BKBPP
17	Kesetaraan gender dan perlindungan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Menurunnya jumlah trafikings dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA,	Korban Trafiking=15 orang Korban KDRT=17 orang	Korban Trafiking=17 orang Korban KDRT=25 orang	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	BKBPP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			dan terbentuknya P2TP2A tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kota Layak Anak (KLA)	Organisasi PPA= 1 Kelompok Organisasi P2TP2= 1 Kelompok	Organisasi PPA= 1 Kelompok Organisasi P2TP2= 1 Kelompok	maan Gender dan Anak	Anak				
			Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Jumlah KDRT	15	9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BKBPP		
				Jumlah Rumah Tangga	885.674	1.124.766					
			Peningkatan dan peran serta kesetaraan gender		Tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	11.053	11.385	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BKBPP
						Jumlah total pekerja perempuan	601.445	636.995			
						Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,84	1,87			
						II.1.11.2 Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Swasta					
						Jumlah pekerja perempuan di lembaga Swasta	11.053	11.903			
						Jumlah total pekerja perempuan	601.445	636.995			
						Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	1,84	1,87			
18	Meningkatnya kesalehan sosial	Peningkatan implemetasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat									
		Peningkatan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam									
		Peningkatan penggalan dan pengelolaan potensi									

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		umat, seperti optimalisasi ZIS.						
		Peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan.						
19	Terwujudnya rasa memiliki atas budaya sunda	Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap Budaya Sunda sejak usia dini	Jumlah nilai budaya sunda yang dapat dikenalkan	3	3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dikbud
		Peningkatan pemasyarakatan penggunaan Bahasa dan nilai-nilai budaya Sunda dalam aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan	Penggunaan bahasa dan nilai-nilai budaya sunda	3	3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dikbud
		Peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan Sunda Pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat	Jumlah seniman dan budayawan serta lembaga adat tradisi masyarakat kebudayaan	60	65	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dikbud
		Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	16	20	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dikbud
			Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	57	80	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dikbud
			Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	198	198	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dikbud
			Jumlah jenis Kesenian	554	600	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dikbud

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Perluasan kesempatan bagi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mendorong penerapan norma agama dan nilai luhur budaya sunda dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan ini diindikasikan oleh :

- Meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah dalam rangka penyelenggaraan wajar dikdas 9 tahun
- Terwujudnya rintisan Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun
- Membaiknya kualitas gedung sekolah sebagai hasil dari peningkatan prasarana pendidikan pada pembangunan lima tahun pertama perlu dilanjutkan dengan peningkatan sarana pendidikan demi menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung.



- Pemenuhan guru yang berkualitas perlu diupayakan melalui peningkatan rasio guru-murid yang seimbang, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Pemenuhan kualifikasi guru sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara nasional perlu diupayakan demi menunjang peningkatan kualitas anak didik. Untuk memelihara kinerja dan motivasi para pengajar, kesejahteraan guru terutama bagi sekolah di daerah terpencil (dacil) perlu diupayakan melalui sistem insentif yang adil dan layak.
- Pengembangan pembiayaan sekolah yang mengarah kepada pemenuhan hak seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak perlu diupayakan baik melalui pembiayaan silang (*cross subsidy*) maupun pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi perlu terus diupayakan demi meningkatkan motivasi belajar penduduk usia sekolah.
- Perintisan pelaksanaan gagasan peningkatan rasio sekolah kejuruan terhadap sekolah umum menuju 60:40 perlu diupayakan sejalan dengan arah bidang pengembangan industri pengolahan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung.
- Indeks Kesehatan sebesar 86,51 terdiri dari komponen AHH sebesar 76,90 terdiri dari prosentase Angka Kematian Bayi terhadap jumlah balita sebesar 2,13%.
- Beroperasinya secara penuh sistem Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) pada RSD Soreang dan RSD Majalaya.
- Beroperasinya Rumah Sakit Cicalengka secara penuh.
- Pemenuhan sarana dan tenaga kesehatan untuk Puskesmas di masing-masing kecamatan, sesuai level puskesmasnya.
- Terpenuhinya kebutuhan armada kesehatan keliling terutama di wilayah terpencil.
- Adanya perintisan sistem pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin
- Memfasilitasi pembangunan *Islamic Center* di Kabupaten Bandung.

C. Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Perdesaan

Tujuan : Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya infrastruktur dan kapasitas kelembagaan desa.	Peningkatan infrastruktur perdesaan	II.1.4.3 Jumlah Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih					
			Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	832.806	1.088.131	Program lingkungan sehat perumahan	Perumahan Rakyat	Dispertasih
			Jumlah penduduk sasaran	885.674	1.124.766			
			Persentase penduduk berakses air bersih	94,03	99,025			
		Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa	Jumlah LPM	276	276	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Jumlah Kelompok Binaan LPM	276	276			BPMPD
			Rata-rata kelompok Binaan LPM	1	1			BPMPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya peranserta masyarakat perdesaan	Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan desa, aparatur Pemerintahan desa	0%	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan desa	0%	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
3	Meningkatnya kapasitas fiskal perdesaan	Memperkuat lembaga-lembaga keuangan mikro di desa	Tersedianya dana penunjang untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	0%	100%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		Meningkatkan pendapatan asli daerah desa	Meningkatnya PAD desa	0%	100%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
4	Meningkatnya desa mandiri pangan	Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kesetabilan harga dan akses pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	318.299,32	348.625,55	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
			Jumlah Komsumsi Pangan Utama	304.751	435.965	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
			Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	89,6	90	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
			Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :	Tdk ada	Ada	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
			Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :	Ada	Ada	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
		Pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras	Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	65,32	74,35	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3
		Jumlah kelompok pengolah pangan non beras	7	67	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	BKP3	



Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Memantapkan pembangunan daerah dan wilayah perdesaan.

Kebijakan ini diindikasikan oleh :

- Bertambahnya penduduk yang mendapatkan sarana air bersih.
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- Tersedianya dana penunjang untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
- Ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan utama
- Regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Perda.
- Jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama.

D. Misi 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Tujuan : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 7.4
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

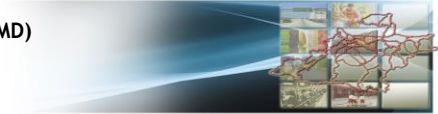
No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya produk hukum yang implementatif.	Peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pemahaman produk hukum.	Jumlah Perda Pajak dan Retribusi	1	40			SKPD Pemasok Pendapatan
			Jumlah Perda dari aspirasi DPRD	15	75			Setwan
			Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha	5	11			BPMP/ Dishub/ Disnaker
			Jumlah Perda terkait perijinan	0	6			BPMP
			Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	4	6			Dishub
			Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	1	2			Disnaker
2	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.	Peningkatan kepatuhan /ketaatan masyarakat terhadap hukum.	Angka kriminalitas	32	16	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			Jumlah kasus Narkoba	91	60	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
			Jumlah kasus Pembunuhan	6	0	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
			Jumlah Kejahatan Seksual	4	2	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa.	Jumlah kasus Penganiayaan	3	1	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			Jumlah kasus Pencurian	8	6	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			Jumlah kasus Penipuan	7	4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Satpol PP
			Jumlah kasus Pemalsuan uang	2	0	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
			Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	153	89	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
		Jumlah Penduduk	3.215.548	3.664.771	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP		
		Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,02	0	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbanglinmas dan Satpol PP		
		Jumlah Pos Siskamling	4,476	4,476	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan	1:21	1:21					
		Jumlah hansip/linmas	5.520 Orang	5.520 Orang	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,30	0,30	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbangpolinmas dan Satpol PP		
		Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	22,80	31,07	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP		
		Jumlah Pelanggaran Perda	82	92	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbangpolinmas dan Satpol PP		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						lingkungan		
			Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	82	92	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100	100	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			Jumlah Pelanggaran K3	12	9	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	12	9	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100	100	Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
3	Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum	Terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum. Peningkatan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,30	0,30	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbanglinmas dan Satpol PP
			Jumlah Demonstrasi Bidang Politik	24	9	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
			Jumlah Demonstrasi Ekonomi	31,5	13			
			Jumlah Demonstrasi Kasus pemogokan kerja	21	18			
			Jumlah Demonstrasi /Unjuk Rasa	79	40			
4	Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat.	Peningkatan pembinaan politik bagi masyarakat.	Jumlah LSM terdaftar	139	264	Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbanglinmas
			Jumlah LSM tidak aktif	12	29			
			Jumlah LSM aktif (1-2)	127	235			
			Jumlah Ormas	221	221			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah parpol	37	37			
		Peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.	Jumlah Tokoh agama	307	307	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbanglinmas
			Jumlah tokoh masyarakat	276	276			

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu meningkatkan Keamanan dan Ketertiban secara terpadu dan menyeluruh.

Adapun hasil capaian kebijakan ini diindikasikan dengan:

- Menurunnya angka kriminalitas
- Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku
- Meningkatnya profesionalitas aparat penegak hukum
- Meningkatnya aktivitas dan perilaku masyarakat dalam kehidupan kebangsaan
- Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan hidup beragama bagi masyarakat

- E. **Misi 5: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah**
Tujuan :Terwujudnya keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

Tabel 7.5
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan dan jembatan (pembangunan jalan lingkar Banjaran, Jl Lingkar Majaya, Jl Lingkar Katapang baleendah, Jl Lingkar Baleendah-Majalaya), Jl Ibum-Monteng), lingkar cileunyi, lingkar rancaekek	tersedianya jalan kabupaten sepanjang 1.155,35 km dan jembatan sebanyak 782 lokasi	Pembebasan lahan untuk jalan baru seluas 28,84 ha, Terbangunnya 8 jembatan baru	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Meningkatnya panjang jalan dengan tersedianya Jalan Tol Soroja dan Tol Gedebage-Majalaya	Tersedianya dokumen FS, DED, pembebasan lahan 5,7 % Tol Soroja	Terbangunnya Jalan Tol Soroja 10,5 Km dan akses Jalan Tol Soroja Sepanjang 4,5 Km, tersedianya dokumen FS, DED Tol Gedebage-Majalaya	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Meningkatnya	tersedianya	Tersedianya	Program	Pekerjaan	Bina Marga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kualitas dan kuantitas saluran drainase/gorong serta berkurangnya tingkat genangan pada jalan	sarana drainase sepanjang 51.613 m	sarana drainase jalan di 286 lokasi	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Umum	
			Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan	tersedianya TPT Jalan dengan volume 1.500 m3	Terbangunnya TPT Jalan di 155 lokasi	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan	kondisi jalan baik 355,57 km, rusak sedang 235,190 km, rusak berat 319,01 km, rusak berat 245,58 . Kondisi Jembatan baik 603 lokasi, rusak sedang 126 lokasi, rusak 53 lokasi	terpeliharanya jalan dan jembatan dengan melaksanakan Peningkatan Jalan 322,4 Km, Pemel. Periodik Jalan 138,05 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan 908 km Pemeliharaan Jembatan 307 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 607 Lokasi	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan serta tersedianya informasi rencana penanganan jalan dan jembatan	Inspeksi dan pengawasan jalan di 31 kecamatan	terlaksananya dan tersedianya informasi Inspeksi Jalan sepanjang 1.500 Km	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			tersedianya informasi jalan dan jembatan terkini	tersedianya informasi jalan dan jembatan di 31 kecamatan	tersedianya informasi Jalan terkini di 31 Kecamatan	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Meningkatnya kemampuan penunjang kegiatan kebinamargaan	tersedianya sarana dan prasarana penunjang kebinamargaan 50%	tersedianya sarana dan prasarana penunjang kebinamargaan 80%	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur di Kawasan Cileunyi Terpadu	Terbangunnya infrastruktur di 40 Lokasi (Berfungsinya Jalan Strategis Desa sebesar 15%)	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum	Bina Marga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas penunjang perhubungan	Tersedianya sarana penerangan jalan umum 4.400 TC	terbangunnya sarana penerangan jalan umum 1.746 TC terpeliharanya sarana penerangan jalan umum 9.775 TC	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pekerjaan Umum	Bina Marga
			Rasio elektrifikasi (jumlah rumah tangga disbanding RT yg sdh berlistrik)	57,76%	80%	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Regulasi ketenagalistrikan	Tidak	Ada	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Pengeneragaman energy listrik terbarukan berupa Mikrohidro, PLTS dan Biogas (MW)	0	25	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Meningkatnya kemampuan Jaringan Irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air	sarana dan prasarana Irigasi kewenangan Kabupaten areal < 1000 ha yang berlokasi di Kabupaten Bandung Total Panjang saluran : 1.044,808 Km; Saluran Induk = 77,764 Km (47,281 Km (60,8%) Kondisi baik, 15,553 Km (20%) kondisi rusak berat 14,931 Km (19,20%), kondisi rusak ringan; Saluran sekunder 136 KM (81,60 Km (60%) Kondisi baik , 34 Km (25%) Kondisi rusak berat , 20,40 Km (15%) Kondisi rusak	rehabilitasi Saluran Induk kondisi rusak berat 11,15 km, kondisi rusak ringan 12,9 km; rehabilitasi Saluran sekunder Kondisi rusak berat 26 km, Kondisi rusak ringan 15 km; rehabilitasi bangunan utama Kondisi rusak berat 92 km, Kondisi rusak ringan 92 km, Bangunan Bagi Sadap kondisi rusak berat 40 km, kondisi rusak ringan 67 km Bangunan Pelengkap	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	SDAPE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ringan), Saluran Tersier 831,044 Km, Jumlah Bangunan Air 933 buah; Bangunan Utama 440 buah (140 buah (31,80 %) Kondisi baik, 180 buah (40,10 %) Kondisi rusak berat, 120 buah (28,10%) Kondisi rusak ringan); Bangunan Bagi Sadap = 273 buah (116 buah (42,49 %) Kondisi baik, 58 buah (21,20 %) kondisi rusak berat, 99 buah (36,30 %) kondisi rusak ringan; Bangunan Pelengkap = 220 Buah (176 buah (80%) Kondisi baik, 14 Buah (6,36%) Kondisi rusak berat, 30 buah (13,64%) kondisi rusak ringan)	Kondisi rusak berat 12 km, kondisi rusak ringan 23 km			
			Mengurangi lamanya genangan/pembuatan trase dan tanggul saluran drainase serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya air/adanya dokumen rencana induk irigasi dan drainase	Saluran pembuang ; 74.850 m' (34.800 m' dalam kondisi rusak ringan dan 40.050 m' kondisi rusak berat)	Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 25 %	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pekerjaan Umum	SDAPE
			Berkurangnya Luas genangan di Kecamatan Cileunyi, Margaasih, Margahayu, Katapang, Soreang	Luas Genangan di Kecamatan Cileunyi, Margaasih, Margahayu, Katapang, Soreang 4.098,1 ha	berkurangnya luas genangan di Kecamatan Cileunyi, Margaasih, Margahayu, Katapang, Soreang seluas 1639,24 Ha	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum	SDAPE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah.	Pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat.	Tersedianya informasi mengenai data spasial untuk perencanaan ruang	Ketersediaan informasi mengenai RTRW Kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 27,87%	Ketersediaan informasi mengenai RTRW Kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 51,93 %	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dispertasih
		Peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang emenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang emenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang emenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dispertasih
		Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya informasi dan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kab. Bandung serta tersedia RDTR dan dok. Lainnya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%	Tersedianya foto udara skala 1 : 1000 dan peta garis digitas seluas +/- 26.500 Ha dari luas Kab. Bandung +/- 213.817 Ha	Ketersediaan informasi mengenai RTRW Kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 51,93 %	Program Pemanfaatan Ruang		Dispertasih dan Bappeda
		Peningkatan pelayanan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 100%	Pelayanan IMB sebesar 25%	Terlayani masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 40%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	BPMP dan kecamatan
		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dispertasih	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100%	penataan ruang sebesar 100%	penataan ruang sebesar 100%			
3	Tertatanya areal permukiman	Penataan areal pemukiman	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebesar 0,8%	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebesar 16,5 %	Program pengelolaan areal pemukiman	Perumahan	Dispartasih
4	Terlayannya seluruh penduduk oleh pelayanan air bersih	Peningkatan pelayanan air bersih	Tersediaanya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari sebesar 60%	Ketersediaan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan terindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 22% (kota + desa), pedesaan 10 %	Tersediaanya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 70%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispartasih
		Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan	Meningkatnya kemampuan 176 Pengelola Air Minum Pedesaan dan 14 Pengelola Sanitasi yang berkonsekwen si terhadap kontribusi peningkatan cakupan pelayanan Air Minum Pedesaan dan kemudahan Akses sanitasi	Pembinaan sampai tahun 2010 telah dilaksanakan terhadap 176 Pengelola Air Bersih Desa dan 14 Pengelola Sanitasi	Meningkatnya kemampuan 282 Pengelola Air Minum Pedesaan dan 122 Pengelola Sanitasi yang berkonsekwen si terhadap kontribusi peningkatan cakupan pelayanan Air Minum Pedesaan dan kemudahan Akses sanitasi	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispartasih
5	Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni	Penyediaan sarana, prasarana serta utilitas perumahan	Tersediaanya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,32%	Ketersediaan Sistem air limbah setempat sebesar 51%	Tersediaanya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,32%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispartasih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan /kota sebesar 1,8%	Ketersedian sistem air limbah skala komunitas/ kawasan /kota sebesar 0,8%	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan /kota sebesar 1,8%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispertasih
			Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10%	Luasan permukiman kumuh seluas 1347,34 ha (4,66%)	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 1,85%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispertasih
			Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispertasih
		Peningkatan pembangunan perumahan yang layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 50%	Jumlah rumah layak huni sebanyak 51429 unit (7,3%)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 32,3%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispertasih
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 35%	Pelayanan terhadap rumah layak huni yang terjangkau mencapai 30858 unit (4,4%)	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 19,9%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dispertasih
6	Terwujudnya system transportasi	Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan.						
		Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.	Meningkatnya keselamatan lalin	masih banyak kecelakaan lalin	berkurangnya kecelakaan lalu lintas	Program pengendalian dan pengamanan lalin	Perhubungan	Dishub
			Meningkatnya kapasitas dan pelayanan terminal	sewa 10 lokasi terminal , terminal existing	tersedianya terminal stock file, terminal transit alam endah, terminal pangalengan, terminal soreang	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dishub
			Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	terpeliharanya 1 terminal dan peralatan PK	terpeliharanya 5 terminal dan alat PKB	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dishub
			Meningkatnya pelayanan angkutan			Program peningkatan pelayanan umum	Perhubungan	Dishub
			Terpenuhinya parasarana dan fasilitas	terminal tipe C 5,	tersedianya terminal type C sebanyak 10,	Program Pembangunan Prasarana	Perhubungan	Dishub



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			perhubungannya		terminal Type B sebanyak 3	dan Fasilitas Perhubungan		
			Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan pelayanan angkutan	Tersedianya trayek ...trayek angkutan dengan kondisi awal 50 baik	Tersedianya trayek ...trayek angkutan dengan kondisi awal 80 baik	Program peningkatan pelayanan umum	Perhubungan	Dishub
			Meningkatnya kapasitas dan pelayanan terminal			Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dishub
			Terselenggaranya lalin yang aman dan terkendali	penurunan Jumlah kecelakaan 50 %	Penurunan jumlah kecelakaan 80 %	Program pengendalian dan pengamanan lalin	Perhubungan	Dishub
			Meningkatnya kendaraan bermotor yang layak	kendaraan bermotoryang layak 50 %	kendaraan bermotor yang layak 80 %	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dishub
			Terselenggaranya sistem komunikasi, informasi dan media massa	masyarakat yang memanfaatkan media komunikasi dan informasi 50 %	masyarakat yang memanfaatkan media komunikasi dan informasi 80 %	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Perhubungan	Dishub

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan, yaitu: Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar wilayah dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang.

Kebijakan ini diindikasikan dengan :

- Dimulainya rintisan pelaksanaan konstruksi koridor Jalan Soreang-Pasirkoja
- Penuntasan pembebasan lahan untuk rencana ruas jalan Baleendah-Katapang, Lingkar Tengah Soreang, dan Tol Gedebage-Majalaya. Lingkar Cileunyi dan Lingkar Rancaekek
- Rintisan pelaksanaan Tata Transportasi Lokal (Tatralok) dengan merintis penataan angkutan publik ke arah angkutan massal yang lebih efisien dan ekonomis, serta penataan terminal untuk menunjang peningkatan pelayanan transportasi publik.
- Perintisan pengembangan Terminal A di Soreang untuk mengantisipasi dan menangkap peluang pembukaan jalan jalur selatan Jawa Barat.
- Perintisan pengembangan rumah-rumah vertikal seperti rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) di wilayah-wilayah perkotaan seperti di wilayah Cileunyi, Majalaya, Baleendah, dan Margahayu.
- Pengembangan cakupan pelayanan PDAM di wilayah perkotaan dan cakupan pelayanan air bersih di Perdesaan
- Pengembangan pengelolaan bidang keirigasian untuk menunjang keberlangsungan sistem ketahanan pangan, disesuaikan dengan arah rencana pengembangan pertanian lahan basah, diindikasikan oleh meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan berfungsinya kelembagaan pengelola irigasi (KPI).
- Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi.



F. Misi 6 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing

Tujuan : Meningkatkan Kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 7.6

**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung**

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya Pelaku KUMKM yang berbasis potensi lokal dan mampu bersaing.	Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.	Jumlah BPR dan LKM (Syariah/Konvensional)	78	174	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag		
			Jumlah koperasi aktif	782	982	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag
			Jumlah koperasi	1.489	1.853					
			Persentase koperasi aktif	50,17	50,20					
			Jumlah UMKM	5.492	6.262	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag		
		Mengembangkan industri produktif berbasis UMKM	Jumlah PIRT Sertifikasi halal	131 57	331 257	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag		
		Meningkatkan keterampilan kewirausahaan.	KUD/Koperasi Usaha Mikro dan embrio mikro	40 235	400 985	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag		
		Mengembangkan model kemitraan usaha hulu-hilir	Intermediasi usaha Pola Kemitraan	60 120	435 620					
		Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal.	PMDN PMA	5 25	12 53	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BPMP		
				Total	30				65	
Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan potensi investasi Kabupaten Bandung	Jumlah Persetujuan Proyek Nilai Persetujuan Investasi Jumlah Realisasi Proyek	28 21.9 T 21.9 T	65 26.15 T 30.5 T	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPMP				
	Potensi investasi	11	35				Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Penanaman Modal	BPMP	
Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-unggulan daerah hasil KUMKM.	Fasilitasi KUKM	14	150	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag				
Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan	Rumah Kemasan	2	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag				
	Bintek Kemasan Kelompok Usaha	3	18							

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		daerah.	(UMKM)	103	200	Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
			Konsep Pasar Terpadu Jumlah Promosi Pameran Jumlah UMKM peserta pameran Pemantauan harga SEMBAKO Bintek peningkatan kualitas produk kerajinan Pengrajin yg dibina melalui kemitraan	3 pasar 6 kali 113 UKM	11 Pasar 30 kali 779 UKM	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Perdagangan	Diskoperinda g
			Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah alat UTPP yang diukur ulang Jumlah LPKSM terdaftar yg dibina Jumlah Kasus sengketa konsumen	10 komoditi 1500 unit 3 LPKSM 59 Kasus	18 komoditi 3000 unit 4 LPKSM 35 Kasus	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Diskoperinda g
2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.	Peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	201,646	151,5165	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Disnaker
			Jumlah seluruh PMA/PMDN	528	654,833333			
			Rasio daya serap tenaga kerja	15,8	426:01:00			
		Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.	Pembangunan BLK	Terlaksananya DED kontruksi BLK	Sarana Prasarana	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disnaker
			Terlaksananya PBM	0	2136 orang			
			Terlaksananya PBK	0	1424 orang			
			Uji Kompetensi dan sertifikasi	Terlaksananya pelatihan menjahit dan tata boga sebanyak 40 orang dan seleksi calon peserta UJK sebanyak 60 orang	160 orang			
			Akreditasi LPK	0	10 orang			
			Bintek pengelola LPK	0	50 orang			
			Magang	0	120 orang			
			Terbentuknya lembaga Bursa kerja khusus (BKK)	0	100	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Disnaker

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terselenggaranya penyuluhan dan bimbingan jabatan	0	2.000			
			Terselenggaranya penempatan TK sektor formal	Terselenggaranya penempatan diluar hubungan kerja sebanyak 200 orang	4.246			
			Antar kerja local (AKL)	0	4.246			
			Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	0	100			
			Terselenggaranya penempatan TK Sektor informal	Terciptanya kelompok usaha barusebanyak k 40 kelompok	1.840			
			Pembentukan kelompok usaha	0	250			
			Penerapan teknologi tepat guna (TTG)	0	630			
			Wira usaha produktif	0	300			
			Padat Karya Produktif	0	300			
			Padat karya infrastruktur	0	360			
3	Berkembangnya kawasan pertanian berbasis ekonomi local dan mampu berdaya saing.	Pengembangan potensi agribisnis	Jumlah kelompok agribisnis : 1.padi 2.Jagung	32 2	57 24	Program ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan pangan	Distanbunhut
			Luas areal pengembangan SRI (Ha)	650	1.490	Program ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan pangan	Distanbunhut
			Jumlah Unit Pengolahan Pupuk organic (UPPO)	64	96	Program ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan pangan	Distanbunhut
			Luas areal pengembangan hortikultura aman konsumsi (Ha)	40	48	Program ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Ketahanan pangan	Distanbunhut
			Jumlah kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1.Sayuran 2.Tan. Hias 3.Buah-buahan	1 0 0	13 6 5	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Distanbunhut
			Jumlah kelompok agribisnis tanaman perkebunan: 1.Kopi 2.Teh 3.Cengkeh 4.Tembakau	3 2 1	8 7 6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5	30			
			Produksi padi(ton)	472.564	536.347	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi jagung (ton)	51.000	53.386	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi Sayuran (ton)	1.039.220	1.091.181	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi buah-buahan (ton)	560.823	594.472	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi Tan Hias (ton)	382.253	397.543	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Tanaman Obat-obatan	836.410	894.958	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi Kopi (ton)	3.875,00	4.407,29	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi teh (ton)	3.133,00	3.495,03	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Produksi Cengkeh (ton)	111,00	124,28	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Jumlah kelompok UPJA (unit pengelola jasa alsintan)	10	33	Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Luas pemanfaatan Jitit/Jides, embung, sumur pantek dan sumur resepan	480 Ha	1.810 Ha	Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Jumlah penggunaan biogas (unit)	796	1.046	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Disnakan
			Jumlah penggunaan	114	294	Program	Pertanian	Disnakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kompos (unit)			peningkatan penerapan teknologi peternakan		
			Jumlah RPH yang bersertifikasi	0	1	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Disnakan
			Jumlah Gapoktan pelaku agribisnis peternakan	96	221	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	BKP3
			Jumlah sasaran petani peternakan	250	1500	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	BKP3
			Target Produksi Ikan konsumsi (ton)	8.122	11.505	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Target produksi benih ikan (ekor)	1.088.942.812	1.537.801.903	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Unit budidaya ikan yang bersertifikasi	0	10	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	20,26	27,57	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Produksi hasil olahan ikan (Kg)	10.738.324	14.370.300	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Jumlah kelompok sasaran penyuluh	96	480	Program Pengembangan sistim Penyuluhan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	BKP3
			Jumlah kawasan budidaya ikan yang berwawasan lingkungan	7	12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Produksi Daging (ton)	45.183	73.193	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakan
			Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	10.50	16.55	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakan
			Produksi Telur(ton)	8.323	16.720	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakan
			Konsumsi Telur(kg/kapita/th)	2,08	4,89	Program peningkatan	Pertanian	Disnakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						produksi hasil peternakan		
			Produksi Susu (ton)	62.876	65.652	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakan
			Konsumsi Susu(kg/kapita/th)	8.84	9.18	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Disnakan
			Jumlah usaha pangan asal hewan yang berstandar dan bersertifikasi	0	4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Disnakan
			Jenis penyakit yang ditanggulangi	4	5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Disnakan
			Jumlah unit pos kesehatan hewan	2	7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Disnakan
		Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan.	Jumlah kelompok yang bermitra	11	22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Jumlah kelompok usaha rumah kemas	3	5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut
			Jumlah grup pasca panen	0	8	Program Peningkatan ketahanan Pangan	Pertanian	Distanbunhut
			Jumlah Demplot pertanian	135	675	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	BKP3
			Jumlah pasar hewan	2	3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Disnakan
			Jumlah sistem penyuluhan	1	5	Program Pengembangan sistim Penyuluhan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	BKP3
			Penerapan GMP pada produk ikan (jenis pengolahan)	0	6	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian	2.465.321,21	2.465.321,22	Program peningkatan	Pertanian	Distanbunhut dan BKP3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Memper mudah akses permodalan	ADH Berlaku			pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		
			Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian ADH Konstan	1.371.807,74	1.371.807,75	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanbunhut dan BKP3
		Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan.	Jumlah kawasan minapolitan	0	1	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Jumlah kelompok budidaya ikan	8	40	Program Pengembangan sistim Penyuluhan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	BKP3
			Jumlah lokasi pelestarian perairan umum	1	5	Program Pengembangan kawasan Budidaya air laut/air payau/air tawar	Kelautan dan Perikanan	Disnakan
			Jumlah kelompok pembibitan sapi potong	2	6	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Disnakan
			Jumlah lokasi penataan unggas di permukiman	1	4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Disnakan
		Penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui <i>One Village One Product</i> (OVOP)	Jumlah Industri Kecil yang melaksanakan standarisasi produksi dan kemasan	240	2.265	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	Diskoperindag
			Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil (jumlah IK)	530	930	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	Diskoperindag
			Basis data informasi potensi wilayah	4 Kecamatan	11 Kecamatan	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Industri	Diskoperindag
		Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan.	Jumlah eksportir/calon eksportir	40 pelaku	200 pelaku	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Diskoperindag
			Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	1 kali	4 kali event			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelaku pelatihan produksi dan ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi	35 pelaku	125 pelaku ekspor			
			Nilai Ekspor	678.528.611	2.890.458.924	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	Diskoperinda g
4.	Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan intergrasi ekonomi local.	Pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu.	Pengembangan industri hulu hilir melalui adopsi teknologi	22 pelaku industri kecil	150 pelaku industri kecil	Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Diskoperinda g Diskoperinda g
		Penataan pedagang kakilima dan asongan	Pasar	11 Pasar	11 Pasar	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Diskoperinda g
		Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata.	Jumlah kunjungan wisata	3.340.876	18.909.943 (3.781.989 /tahun)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dispopar
			Rata-rata kunjungan per obyek wisata	150,51	231,73	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dispopar
			Kualitas sarana dan Prasarana	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung objek wisata	Terpenuhi nya kebutuhan sarana prasarana pendukung objek wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dispopar
			Potensi Wisata Desa Unggulan SDM Wisata	10 5	20 15	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dispopar

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu Kebijakan umum pembangunan : Meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat.

Kebijakan ini diindikasikan dengan :

- Pengembangan pertanian dengan tujuan peningkatan pendapatan di sektor pertanian dititikberatkan pada pengembangan pertanian ramah lingkungan tanaman pangan/padi dan komoditas hortikultura (sayuran dan buah-buahan) serta pengembangan pertanian terpadu yang bersinergi antara peternakan dan pertanian yang ramah lingkungan sehingga diharapkan dapat mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan.
- Pengembangan konsep *one village one product* (OVOP) sebagai konsep penggalian potensi ekonomi local akan terus dilakukan seiring dengan implementasi konsep agropolitan sebagai pendukung pengembangan potensi ekonomi local melalui perbaikan mutu dan kemasan, promosi dan pemasaran menuju peningkatan nilai tambah dan daya saing.



- Pada sektor Koperasi dan UKM, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk UKM diwujudkan dalam program/kegiatan pe,ngangunan jiwa kewirausahaan, pelatihan dan pembinaan serta perluasan akses permodalan
- Pengembangan pertanian dengan tujuan peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang dititikberatkan pada pengembangan agribisnis pertanian ramah lingkungan untuk komoditas padi, hortikultura dan perkebunan kopi, pengembangan agribisnis unggulan lokal (palawija, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan serta pengembangan pertanian terpadu
- Pada sector perdagangan, pembangunan pasar terpadu mengacu pada rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK) direncanakan akan dibangun di beberapa wilayah, di antaranya Banjaran, Cicalengka dan Soreang.
- Pada sector pariwisata, perbaikan dan peningkatan penatakelolaan objek wisata serta kemitraan akan menjadi sentral pengembangan sector ini disamping promosi pariwisata.

Target pencapaian indeks daya beli pada tahun 2015 sebesar 65,97 dengan komponen daya beli sebesar Rp.585.485. Pembangunan pariwisata pada lima tahun kedua diarahkan pada pengembangan penataan dan pengelolaan potensi lokasi-lokasi wisata yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung melalui peningkatan/pembaharuan kerja sama dengan lembaga pemilik lokasi wisata seperti PT. Perhutani, PT. Indonesia Power, maupun PT. Perkebunan yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung menuju kerja sama yang saling menguntungkan.

G. Misi 7: Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan terdiri dari :

- Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana

Tabel 7.7
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penang-gung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terkendalinya dampak pembangunan terhadap lingkungan.	Peningkatan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam manajemen pengelolaan lingkungan	Jumlah pembinaan kepada pengusaha pertambangan	18	18	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Jumlah regulasi pertambangan	2	8	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Jumlah potensi pertambangan galian C (Kec)	31	31	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Total luas penambangan tanpa izin (ha)	21,75	23,75	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Jumlah pengambil dan pemanfaat air tanah (perusahaan)	217	217	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						yang berpotensi merusak lingkungan		
			Jumlah peta daerah rawan bencana alam geologi	3	15	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
		Peningkatan penegakan hukum lingkungan	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	80,73	80,73	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Perolehan DBH Panas Bumi	Ada	Ada	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
			Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (ha)	24.915	41.235	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan Sumberdaya Mineral	SDAPE
2	Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan terkendalinya polusi	Peningkatan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kebersihan dan penghijauan lingkungan	Terbatasnya lingkungan yang bersih, hijau dan bebas polusi	Meningkatnya luas lingkungan yang bersih, hijau dan bebas polusi	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BPLH
			Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada masyarakat	Masih rendahnya pengelolaan lingkungan masyarakat	Meningkatnya pengelolaan lingkungan oleh masyarakat	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BPLH
			Meningkatnya pengetahuan dan pengelolaan pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha	Masih tingginya tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha	Berkurangnya tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BPLH
		Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan sesuai dengan SPM pada kegiatan industri, jasa.	Terbatasnya cakupan pemantauan lingkungan (60%)	Meningkatnya cakupan pemantauan lingkungan menjadi sebesar 100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BPLH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tersedianya kebijakan bidang lingkungan dan dokumen lingkungan	Belu adanya KLHS, kajian instalasi pengontrol air limbah dan kajian studi aspek manajemen IPAL terpadu cisirung	Tersusunnya Perda dan Perbup bidang lingkungan, KLHS, FS dan DED kajian Instalasi pengontrol air limbah dan kajian studi aspek manajemen IPAL terpadu cisirung	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BPLH
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang wajib AMDAL dan UPL-UKL	Cakupan kegiatan monitoring evaluasi sebesar 15%	Meningkatnya cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi 90%	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BPLH
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terevaluasinya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan kebijakan lingkungan hidup	Terlaksananya dan meningkatnya pengawasan kebijakan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BPLH
			Meningkatnya pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat apabila adanya dugaan dan/atau kerusakan lingkungan sesuai dengan SPM	Terlayannya kasus pengaduan masyarakat seluas 70%	Meningkatnya penanganan kasus pengaduan masyarakat sebesar 90%	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BPLH
		Pengembangan produksi ramah lingkungan	Terlatihnya para pelaku usaha dan aparat pemerintah dalam pengembangan produksi ramah lingkungan	Belum terlatihnya pelaku usaha jasa dan industri serta aparat dala mengimplementasikan GHK dan EoCM	Meningkatnya pelaku usaha jasa dan industri serta aparat yang dapat mengimplementasikan GHK dan EoCM	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BPLH
			Tersedianya produksi ramah lingkungan dan produk bersih	Belum adanya Juklak Juknis kegiatan produksi bersih di Kabupaten Bandung	Tersusunnya Juklak Juknis kegiatan produksi bersih di Kabupaten Bandung	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BPLH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan	Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana, 20% dari standar	Tersedianya prasarana laboratorial sesuai standar 75%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BPLH
			Terselenggaranya green laboratorium	Penerapan manajemen lingkungan menuju green laboratorium sesuai dengan standar sebesar 20%	Penerapan manajemen lingkungan menuju green laboratorium sesuai dengan standar sebesar 75%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BPLH
		Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan	Belum tersedianya IPAL, RPH, pilot project IPAL domestik serta pembangunan instalasi pengontrol air limbah	tersedianya IPAL, RPH, pilot project IPAL domestik serta pembangunan instalasi pengontrol air limbah	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BPLH
3	Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Terkendalnya kerusakan tanah akibat produksi biomassa sesuai dengan SPM	Terjadinya kerusakan tanah dan cakupan pengendalian kerusakan lahan sebesar 60%	Terkendalnya kerusakan tanah sebesar 70%	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BPLH
			Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Masih kurangnya daerah konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air	Bertambahnya luas daerah konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BPLH
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Masih rendahnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem oleh masyarakat	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem oleh masyarakat	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BPLH
4	Terwujudnya sistem informasi lingkungan	Pengembangan sistem informasi lingkungan	Tersedianya pengembangan data dan informasi lingkungan	Masih rendahnya data dan informasi lingkungan	Bertambahnya data dan informasi lingkungan	Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BPLH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terpetakannya kerentanan lingkungan akibat perubahan iklim	Tidak ada data-data peta	-Adanya SOP adaptasi dan mitigasi akibat perubahan iklim - Adanya data kerentanan	Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BPLH
5	Berkurangnya tingkat pencemaran kerusakan lingkungan	Optimalisasi pengelolaan limbah, melalui pengelolaan daur ulang, komposting, dan konversi energi	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20%	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 0,6%	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 15,2%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dispertasih
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang hijau dan ramah lingkungan	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang dengan luas kawasan perkotaan	Tersedianya RTH publik di kawasan perkotaan	Belum terkelolanya RTH di kawasan perkotaan	Tertatanya RTH di kawasan perkotaan	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dispertasih
7	Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau.	Reboisasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan perkantoran dan lain-lain).				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	BPLH
			Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Ketersediaan luasan RTH publik seluas 0,1%	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dispertasih
			Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha)	59.969,39	37.892,71	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Distanbunhut dan BKP3
			Jumlah kecamatan yang dikendalikan dari gangguan kerusakan hutan	0	25	Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	Kehutanan	Distanbunhut dan BKP3
			Jumlah kelompok yang mengembangkan aneka usaha kehutanan	30	80	Program Pemanfaatan Potensi sumber Daya Hutan	Kehutanan	Distanbunhut
			Pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau.			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	BPLH
	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	46187,94	46.187,94	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dispertasih dan Distanbunhut		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Luas hutan kota (Ha)	0,5	2,0	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Distanbunhut
8	Berkurangnya luas lahan kritis	Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis	Luas hutan rakyat dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	4.415,32 ha	22.076,60 ha	Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan	Kehutanan	Distanbunhut
9.	Berkurangnya tingkat resiko akibat bencana/kebakaran	Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana	Tersedianya data dan informasi kebencanaan	tersedianya peta bencana	tersedianya peta bencana 7 kecamatan	Program Pengembangan data/informasi	Pekerjaan Umum	BPBD
			Berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana	berkurangnya jumlah korban bencana 50%	berkurangnya jumlah korban bencana 80%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Pekerjaan Umum	BPBD
			Berkurangnya korban bencana	berkurangnya jumlah korban bencana 50% dengan melibatkan partisipasi masyarakat	berkurangnya jumlah korban bencana 80% dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pekerjaan Umum	BPBD
			Berkurangnya dampak bencana akibat banjir	Tersedianya alat peringatan dini 0	Tersedianya alat peringatan dini 5 titik	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	BPBD
			Terbangunnya folder cieunteung dan leuwi bandung	0	20 Ha	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	SDAPE
			Terselenggaranya penanganan darurat pasca bencana	Tersedianya kebutuhan penanggulangan darurat bencana	Tersedianya kebutuhan penanggulangan darurat bencana 30 paket dan 250 jiwa	Program Penanggulangan Kedaruratan	Pekerjaan Umum	BPBD
			Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana	Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana 50%	Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana 80%	Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Desa	Pekerjaan Umum	BPBD
			Berkurangnya dampak kerusakan lingkungan dan rumah akibat bencana	Berkurangnya jumlah kerusakan lingkungan dan rumah akibat bencana	Berkurangnya dampak kerusakan lingkungan (16 paket) dan rumah (400 KK) akibat bencana	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Pekerjaan Umum	BPBD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B. Pemetaan dan deliniasi kawasan rawan bencana	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam mengurangi dampak bencana	5.520	5.640	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP
		C.1. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berbasis Pengurangan Resiko.	<p>-Meningkatnya tingkat cakupan pelayanan kebakaran dengan penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) sesuai dengan Permendagri No 62. Th. 2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) lingkup pemerintah dalam negeri dan mengacu pada Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri No. 100/676/SJ tanggal : 7 Maret 2011 tentang percepatan penerapan SPM di daerah.</p> <p>-meningkatnya tingkat capaian respon time (waktu tanggap) serta pencapaian Standar Respon Time yaitu 15 menit menuju ke lokasi kebakaran dari pos pemadam , sesuai dengan Permendagri No 62. Th. 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup Pemerintah Dalam Negeri dan mengacu pada Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri no. 100/676/SJ tanggal: 7 Maret 2011 tentang percepatan penerapan SPM di daerah.</p>	Tingkat cakupan pelayanan kebakaran saat ini sebesar 30 %	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 40%	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan	Dispartasih
				Tingkat capaian respon time saat ini sebesar 31 %	Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 75%			

Berdasarkan sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan yaitu mengendalikan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan, penataan ruang, serta penanggulangan bencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



Kebijakan ini diindikasikan dengan :

- Menurunnya lahan kritis, sisa lahan kritis pada tahun 2015 sebesar 37.892,71 hektar dari tahun 2010 sebesar 59.969,39 hektar
- Menurunnya luas wilayah bencana banjir di sungai citarum dan anak sungainya
- Menurunnya kandungan pencemaran limbah sungai
- Terfasilitasinya bantuan dan penanganan korban akibat bencana secara cepat dan tepat sasaran.
- Menurunnya resiko bencana pada lokasi potensi dan rawan bencana
- Penambahan WMK (Wilayah manajemen kebakaran) di Kabupaten Bandung berupa penambahan Pos Damkar yang diikuti dengan penambahan Mobil Pemadam Kebakaran guna mencapai SPM (Standard Pelayanan Minimal) mengacu pada radius layanan per 1 WMK melayani radius 7,5 km².
- Tercapainya Respon Time 15 menit terhadap pelayanan kebakaran pada setiap kejadian kebakaran di Wilayah manajemen Kebakaran di Kabupaten Bandung.
- Meningkatnya cakupan pelayanan/pengelolaan persampahan.

8.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, Berdasarkan Misi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme birokrasi																
1	06	15	Program Pengembangan data/informasi	Termanfaatkannya Data penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen Hasil kajian sebagai bahan perencanaan 2011-2015	1 dok	400.000.000	1 dok	300.000.000	1 dok	325.000.000	1 dok	325.000.000	1 dok	340.000.000	Bappeda
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Sertifikasi ISO 9001-2008 untuk Dokumen Perencanaan	Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001:2008: - Awarness 20 orang, - Internal Audit 5 orang - Penyusunan Dokumen ISO 25 orang.	1 dok	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
1	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	- Tersusnya bahan/ dokumen perencanaan transportasi - Tersusnya bahan/ dokumen perencanaan penanggulangan bencana - Tersusnya bahan/ dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tersedianya Dokumen perencanaan Transportasi, Penanggulangan Bendana dan Dokumen Perencanaan Air Bersih, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.	3 Dok	400.000.000	3 Dok	290.000.000	3 Dok	329.000.000	3 Dok	340.000.000	3 Dok	350.000.000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah	- Perda RPJPD 2010-2015 - Perda RPJMD 2010-2015 - Perbub RKPDP Tahun 2012-2015 - KUA/PPAS Tahun 2012-2015 - KUA/PPAS Perubahan Tahun 2011-2015 - LKPJ Tahun 2011-2015 - Laporan Monitoring 2011-2015 - Rac. RPJMD 2015-2020	-5	-6	7 Dok	1.550.000.000	9 Dok	1.044.441.642	9 Dok	1.139.916.502	9 Dok	1.175.291.715	10 Dok	1.364.924.315	Bappeda/ Setda
1	06	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	- Dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan - Dokumen Pendampingan Program OVOP - Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - Tersedianya Basis Data Perencanaan Daerah	-4	4 dokumen	4 dokumen	600.000.000	2 dok	575.000.000	2 dok	613.000.000	2 dok	650.000.000	2 dok	688.000.000	Bappeda
1	06	23	Program perencanaan sosial budaya	- Terlaksananya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung - Dokumen Kajian Rintisan Inovasi Pengembangan Model Pendidikan Universal Berbasis Potensi Unggulan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	600.000.000	2 dokumen	325.000.000	2 dokumen	335.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	Bappeda
1	06	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	- Dok. Penataan tataruang, pertanian, lingkungan hidup, pemukiman dan kebersihan tahun 2010	2 dokumen (1 Dokumen penataan ruang dan pertanian dan 1 dokumen urusan lingkungan hidup	2	200.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	Bappeda	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
		- Dokumen rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan													Bappeda	
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Catataqn Sipil	Sudah memiliki KTP = 2269054	Sudah memiliki KTP = 2382506	3.675.000.000	Sudah memiliki KTP = 2501632	1.660.000.000	Sudah memiliki KTP = 2626713	1.860.000.000	Sudah memiliki KTP = 2758049	1.958.469.534	Sudah memiliki KTP = 2895952	2.058.469.534	Dinsosdukasi p/Disdukcasip)
1	20	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terselenggarakannya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.	0 paket	1 paket	12.092.258.700	1 paket	11.650.000.000	1 paket	13.650.000.000	1 paket	14.150.000.000	1 paket	14.650.000.000	Setwan
1	09	16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-Meningkatnya pemahaman dan penguasaan hukum pertanahan - Percepatan penerbitan Kep. Bup mengenai persetujuan penlok				82 sk	322.426.235	82 sk	322.426.235					setda
1	20	28	Program Dst... Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran	- tersusunya data informasi perubahan status desa menjadi kelurahan.				3 kecamatan	400.000.000	3 kecamatan	400.000.000					setda
1	20	25	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	terselenggaranya penyebarluasan informasi pada publiik				100 org	462.274.350	100 org	462.274.350					setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	20	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terfasilitasinya Pelayanan Kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pelaksanaan dinas dalam dan luar daerah	7 Lembaga	7 Lembaga	1.433.450.000	7 Lembaga	1.503.567.560	7 Lembaga	1.503.567.560	7 Lembaga	1.224.591.000	7 Lembaga	1.334.020.000	Setda
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan professional secara paripurna baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah.	69 SKPD	69 SKPD		70 SKPD	6.745.710.429	70 SKPD	4.970.281.472	70 SKPD	5.242.309.619	70 SKPD	5.316.540.581	DPPK
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan professional di 10 Bagian	10 bagian	10 bagian		10 bagian	1.575.000.000	10 bagian	1.975.000.000	10 bagian	3.104.393.000	10 bagian	3.524.961.000	Setda
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan sesuai SAP dan meningkatkan pemahaman aparat terhadap ketentuan penatausahaan keuangan daerah.	69 SKPD	69 SKPD	6.391.327.000									DPPK dan Setda
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kepala daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor	0%			40%	2.725.000.000	60%	2.875.000.000	80%	3.304.523.000	100%	3.257.810.000	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat (25 bidang/614 rician kewenangan)	0%	20%		40%	4.030.000.000	60%	4.278.000.000	80%	4.402.000.000	100%	4.650.000.000	Kecamatan
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada lurah	0%	20%	40%	3.446.025.385	60%	3.687.247.162	80%	3.871.609.520	100%	4.065.189.996	Kelurahan	
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Sinkronisasi kewibawaan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	0%	20%	16.316.853.040								Setda, Inspektorat, Kec dan Kel	
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan secara berkala pada 70 SKPD di kabupaten bandung	0%		40%	1.242.039.641	60%	1.327.630.025	80%	1.363.733.575	100%	1.448.748.500	Inspektorat	
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersusunnya SOP dan POP Bagi Aparat pengawas pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	0%		60%	29.800.000	80%	32.780.000	100%	36.058.000	100%	39.663.800	Inspektorat	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	20	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Tertanganinya pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat, mas Media, SMS dan kasus Pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi.	94 kasus	20%	100.000.000								Inspektorat	
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan	0%	20%		40%	2.849.740.000	60%	3.047.530.423	80%	2.663.606.846	100%	2.832.238.377	Setda
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya peraturan perundang-undangan daerah yang aplikatif.	0%	20%		40%	350.000.000	60%	350.000.000	80%	350.000.000	100%	350.000.000	Setwan
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan	0%	20%	3.086.751.300	40%								Setda dan Setwan
1	20	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Teranalisisnya penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung	215 titik pilar	237 titik pilar	1.485.000.000	237 titik pilar	700.000.000	259 titik pilar	700.000.000	271 titik pilar	921.850.000	293 titik pilar	980.205.000	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	20	30	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM CPNS, kinerja PNS dan profesionalisme Aparatur	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	BKPP
					Prajabatan 224, diklat pim IV 242 orang, Pim II 3 Diklatpim III 3 orang, teknis tugas dan fungsi 430 orang	Prajabatan 224, diklat pim 42 orang, diklat teknis tugas dan fungsi 275	4.760.000.000	Terlaksananya pengiriman peserta prajabatan gol I, II dan III sebanyak 340 orang dan adanya penambahan kuota dari gol II sebanyak 80 orang dan gol III sebanyak 120 orang, pengiriman peserta diklat pim 80 orang dan 280 teknis tugas dan fungsi	2.684.235.000	Terlaksananya pengiriman peserta prajabatan gol I, II dan III sebanyak 813 orang, diklat pim 120 orang, teknis tugas dan fungsi 300 orang	2.443.885.000	Terlaksananya pengiriman peserta prajabatan gol I, II dan III sebanyak 300 orang, diklat pim 160 orang, teknis tugas dan fungsi 350 orang	2.750.000.000	Terlaksananya pengiriman peserta prajabatan gol I, II dan III sebanyak 300 orang, diklat pim 240 orang, teknis tugas dan fungsi 400 orang	2.750.000.000		
1	20	31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Terciptanya Pejabat struktural sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh SKPD, terpenuhinya pengisian formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.	9399 orang	Terlaksananya sidang baperjakat sebanyak 24 kali	2.425.000.000	Terselenggaranya sidang baper jakat sebanyak 12 kali	1.313.337.000	Terselenggaranya sidang baper jakat sebanyak 24 kali	1.159.274.083	Terselenggaranya sidang baper jakat sebanyak 24 kali	957.464.393	Terselenggaranya sidang baper jakat sebanyak 24 kali	1.200.000.000		BKPP
				- meningkatnya disiplin dan mental pegawai kualitas pelayanan aparatur, serta terdapatnya akurasisdata pegawai kabupaten bandung													BKPP
1	20	31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan analisis jabatan								1 dok	229.418.000	1 dok	243.943.000		Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 23 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan Dokumen Statistik: - PDRB Kab dan Kecamatan - IPM - SUSEDA - KBDA - Indeks Gini Rasio - Input Output - IKM - IHK	Ketersediaan Dokumen Statistik: - PDRB Kab dan Kecamatan - IPM - SUSEDA - KBDA - Indeks Gini Rasio - Input Output - IKM - IHK	8 dok	1.150.000.000	6 dok	825.000.000	6 dok	865.000.000	6 dok	880.000.000	6 dok	880.000.000	Bappeda
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya pemutakhiran data yang sudah ada dari kegiatan serupa sebelumnya	Belum ada hasil wawancara terhadap mantan Bupati, Tokoh Budaya, dan Tokoh Sejarah secara komprehensif	30 Narasumber	75.000.000	30 Narasumber	57.928.000	30 Narasumber	95.628.653	30 Narasumber	69.185.350	30 Narasumber	90.542.500	Bapapsi
1 24 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	- Jumlah SKPD yang dibina dalam pengelolaan kearsipan	69 SKPD	20%	400.000.000	20%	131.500.000	20%	209.399.360	20%	142.086.400	20%	155.900.250	Bapapsi
1 24 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	20%	20%	117.460.000	20%	96.125.000	20%	160.960.350	20%	98.529.000	20%	109.500.000	Bapapsi
1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kpd pimpinan & masyarakat serta memperbaiki kinerja dalam menjalankan proses pemerintahan	Infrastruktur SIMDA ke tingkat kecamatan, belum memadai	20%		20%	1.845.700.000	20%	1.019.502.025	20%	648.423.500	20%	677.422.000	Bapapsi
1 25 18	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kpd pimpinan & masyarakat serta memperbaiki kinerja dalam menjalankan proses pemerintahan	Infrastruktur SIMDA ke tingkat kecamatan, belum memadai	20%	1.415.480.000									Dishub, Bapapsi
1 25 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas aparaturnya dalam bidang TIK dan menciptakan masyarakat yang faham teknologi dan mampu mengantisipasi perubahan global	- Belum optimalnya pelatihan teknis bidang TIK bagi aparaturnya dan masyarakat.	20%	136.950.000	20%	65.100.000	20%	103.617.875	20%	94.803.100	20%	107.425.618	Bapapsi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	25	18	Program kerjasama informasi dan media massa	Terlaksananya penyebar luasan informasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung	0%	20%	322.650.000	40%	-	60%	-	80%	-	100%	-	Bapapsi
1	25	18	Program kerjasama informasi dan media massa	Terlaksananya penyebar luasan informasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung	-	-	-	-	-	1 paket	369.911.000	1 paket	393.331.000	Setda		
1	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Meningkatnya layanan informasi bahan pustaka terhadap pengguna secara kontinue	Pengadaan koleksi buku	20%	895.500.000	20%	437.948.249	20%	697.452.115	20%	525.570.092	20%	537.748.000	Bapapsi
2	08	17	Program Transmigrasi Regional	Terdaftarnya Calon Transmigran (KK)	Terwujudnya kesiapan calon transmigran	50 orang	200.000.000	50 orang	220.000.000	50 orang	230.000.000	50 orang	240.000.000	50 orang	197.000.200	Disnaker
				Terlatihnya Calon Transmigran (KK)	Terwujudnya keterampilan calon transmigran	35 orang	-	40 orang	-	45 orang	-	50 orang	-	55 orang	-	Disnaker
				Terjajaginya daerah Penerima Transmigrasi (Daerah)	Terlaksananya penjajagan daerah penerima transmigran	3 prov	-	3 prov	-	3 prov	-	3 prov	-	3 prov	-	Disnaker
				Terwujudnya kerjasama antar Daerah (KSAD)	Terlaksananya kerjasama antar	3 prov	-	3 prov	-	3 prov	-	3 prov	-	3 prov	-	Disnaker
				Tertempatkannya Transmigran (KK)	Tertempatkannya calon transmigran	35 orang	-	40 orang	-	40 orang	-	40 orang	-	40 orang	-	40 orang
Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda																
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- Jumlah siswa pada jenjang Tk / Ra /penitipan anak - Jumlah anak usia 4 – 8 tahun - Jumlah Paud (TK/RA/Penitipan anak)	43816 213.578 20.52%	50918 216.192 21.32%	1.859.506.000	58021 218.807 22.33%	2.038.900.367	65123 221.421 23.33%	2.538.900.367	72226 224036 24.34%	3.038.900.367	79328 226650 25.34%	3.538.900.367	Dikbud
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	jumlah murid usia 7-12 thn SD/MI	400,917	401.930	92.230.130.000	402.943	43.712.339.693	403.957	45.003.127.512	404.970	43.446.275.751	405.983	44.659.088.003	Dikbud
				jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	402,631	423.495		444.358		465.222		486.085		506.949		Dikbud
				APS SD/MI	890,41	919		948		977		1.006		1,034,47		Dikbud
				jumlah murid usia 13-15 thn SMP/MTs	154,751	155.061		155.370		155.680		155.989		156.299		Dikbud
				jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	190,535	208.411		226.287		244.164		262.040		279.916		Dikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
		APS SMP/MTs	516,26	534		551		568		585		602		Dikbud		
		Angka Partisipasi Murni SD	99,57	99,18		98,79		98,40		98,01		97,62		Dikbud		
		Angka Partisipasi Murni SMP	81,22	83,18		85,14		87,09		89,05		91,01		Dikbud		
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,02	10		10		11		11		12		Dikbud		
		Jumlah sekolah SD/MI	1553	1.560		1.567		1.575		1.582		1.589		Dikbud		
		Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	402.631	423.495		444.358		465.222		486.085		506.949		Dikbud		
		Rasio SD/MI	38,78	37		34		32		30		27		Dikbud		
		Jumlah sekolah SMP/MTs	411	443		475		506		538		570		Dikbud		
		jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	190.535	208.411		226		244		262		279.916		Dikbud		
		Rasio SMP/MTs	19,9	20		20		21		20		21		Dikbud		
		Jumlah Guru SD/MI	15.936	17.292		18.648		20.003		21.358		22.715		Dikbud		
		Jumlah Kelas SD/MI	11.474	11.550		11.626		11.701		11.777		11.853		Dikbud		
		Jumlah Guru per Kelas SD/MI	1,39	1,50		1,61		1,71		1,82		1,93		Dikbud		
		Jumlah Murid SD/MI	419,99	428.326		436.752		445.179		453.605		462.031		Dikbud		
		Rasio SD/MI	6,85	6,85		6,85		6,85		6,86		6,86		Dikbud		
		Jumlah Guru SMP/MTs	10.003	10.553		11.103		11.652		12.202		12.752		Dikbud		
		Jumlah Kelas SMP/MTs	3763	4.047		4.331		4.615		4.899		5.183		Dikbud		
		Jumlah Guru per Kelas SMP/MTs	2,817	2,839		2,861		2,882		2,904		2,926		Dikbud		
		Jumlah Murid SMP/MTs	192.851	166.618		140.385		114.153		87.920		61.687		Dikbud		
		Rasio SMP/MTs	0,019	0,02		0,022		0,023		0,025		0,026		Dikbud		
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK	250	268	27.162.491.000	286	17.749.338.050	304	20.866.025.400	322	23.786.025.400	340	26.066.025.400	Dikbud
				jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun SMA/MA/SMK	171.552	180.193		188.835		197.476		206.118		214.759		Dikbud
				Rasio SMA/MA/SMK	14,03	14,52		15,01		15,49		15,98		16,47		Dikbud
				Jumlah Guru SMA/MA	6970	7.678		8.385		9.093		9.800		10.508		Dikbud
				Jumlah Kelas SMA/MA	2093	2.479		2.865		3.252		3.638		4.024		Dikbud
				Jumlah Guru per Kelas SMA/MA	3,33	3,94		4,55		5,16		5,77		6,38		Dikbud
				Jumlah Murid SMA/MA	92.017	159.397		141.670		123.943		106.216		88.489		Dikbud
				Rasio SMA/MA	1,963	0,045		0,042		0,04		0,037		0,034		Dikbud
				Angka Partisipasi Kasar SMA	54,04	54,04		54,04		54,04		54,04		54,04		Dikbud
				Angka Partisipasi Murni SMA	41,50	41,50		41,50		41,50		41,50		41,50		Dikbud
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	2.177.908	2.274.467	2.710.518.000	2.371.027	1.585.000.000	2.467.586	3.544.020.000	2.564.146	3.824.020.000	2.660.706	4.794.020.000	Dikbud
				Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	2.213.351	2.308.129		2.402.908		2.497.687		2.592.465		2.687.244		Dikbud
				Angka Melek Huruf	98,41	98,53		98,65		98,77		98,89		99,01		Dikbud
				Jumlah Siswa Pulus Sekolah SD/MI	285	283		280		278		276		274		Dikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
		Jumlah seluruh Siswa SD/MI	403,173	414.944		426.716		438.487		450.259		462.031		475	Dikbud	
		Angka Putus Sekolah (Persentase) SD/MI	0,07	0,069		0,068		0,067		0,066		0,065			Dikbud	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	844	770		696		622		548		475			Dikbud	
		Jumlah seluruh Siswa SMP/MTs	192.851	193.236		193.622		194.007		194.393		194.779			Dikbud	
		Angka Putus Sekolah (Persentase) SMP/MTs	0,59	0,47		0,36		0,24		0,13		0,02			Dikbud	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/MA	391	387		383		379		375		371			Dikbud	
		Jumlah seluruh Siswa SMA/MA	67.476	71.679		75.881		80.083		84.286		88.489			Dikbud	
		Angka Putus Sekolah (Persentase) SMA/MA	0,58	0,71		0,84		0,97		1,10		1,20			Dikbud	
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang bersertifikasi	10.051	12.645	6.200.795.000	15.240	1.457.000.000	17.834	1.565.485.000	20.429	1.765.485.000	23.024	2.075.485.000	Dikbud
			Jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi (%)	60	68		76		84		92		100		Dikbud	
			Jumlah KKG,	235	228		221		214		207		200		Dikbud	
			Jumlah guru yang mendapat beasiswa	185											Dikbud	
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Data Based Bidang Pendidikan Formal maupun Formal seluruh jenjang	ada	ada	1.528.870.000	ada	1.210.000.000	ada	1.314.973.525	ada	1.314.973.525	ada	1.314.973.525	Dikbud
			Jumlah Dewan sekolah	1	1		1		1		1		1		Dikbud	
			Jumlah Komite sekolah	2229	2.247		2.265		2.283		2.301		2.319		Dikbud	
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obat perkapita penduduk dengan nilai 2 \$	Perkapita Rp 3 518	5.000	16.215.000.000	5.000	14.843.919.751	7.000	15.674.558.262	9.000	16.043.889.753	11.000	16.875.000.469	Dinkes
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & setingkat : 41%	53%	13.914.410.000	65%	3.000.000.000	77%	3.000.000.000	77%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	Dinkes
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & setingkat : 41%	53%		65%	14.864.224.860	77%	15.899.363.300	77%	16.359.622.749	100%	17.395.349.650	RSD Majalaya
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & setingkat : 41%	53%		65%	18.077.053.448	77%	19.335.931.936	77%	19.895.674.185	100%	21.155.268.326	RSD Soreang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan masyarakat disarana pelayanan maupun di luar sarana pelayanan kesehatan	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD & setingkat : 41%	53%		65%	5.924.913.326	77%	6.337.521.827	77%	6.520.982.274	100%	6.933.825.337	RSUD Cicalengka
1 02 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya pengendalian dan pembinaan serta pengawasan farmasi dan makanan minuman	Cakupan Pembinaan terhadap toko obat & apotik : 56 %	60%	312.770.000	70%	171.950.000	80%	181.580.000	90%	185.900.000	100%	161.700.000	Dinkes
1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya upaya promosi kesehatan melalui berbagai media dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga : 25%	34%	1.110.000.000	43%	463.349.400	52%	489.277.600	61%	500.806.180	70%	526.749.100	Dinkes
1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya upaya promosi kesehatan melalui berbagai media dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga : 25%	34%										Dinkes, RSD Soreang dan RSUD Cicalengka
1 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Tertanggulangnya masalah gizi buruk balita di masyarakat	Cakupan balita gizi beuruk mendapat penanganan : 100%	100%	2.591.840.000	100%	778.580.907	100%	822.148.865	100%	841.520.733	100%	885.113.460	Dinkes
1 02 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan	Cakupan Hygiene sanitasi TTU yang memenuhi syarat : 63%	65%	1.100.000.000	70%	499.733.210	80%	527.697.370	90%	540.131.230	100%	568.111.300	Dinkes
1 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penanganan penyakit endemik/epidemi k : 73%	73%	6.106.457.500	76%	3.481.881.557	79%	3.732.679.424	83%	3.844.193.097	86%	4.095.133.539	Dinkes
1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya regulasi tentang upaya pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung	Dokumen 2 Peraturan	3	691.230.000	3	574.532.180	4	606.681.950	4	620.976.800	4	653.144.900	Dinkes
1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya regulasi tentang upaya pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung	Dokumen 2 Peraturan	3										Dinkes dan RSUD Cicalengka
1 02 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui sistem kapitasi	Cakupan Gakin yang mendapat klaim : 100%	100%	26.700.000.000	100%	23.438.049.315	100%	24.749.591.508	100%	25.333.111.931	100%	26.678.835.110	Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab									
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5											
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang representatif di sarana pelayanan kesehatan dasar	Puskesmas yang representatif : 15% dari 61 Puskesmas	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	Dinkes
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSD Majalaya
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSD Soreang
1	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,002	-	9.683.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka
1	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSD Majalaya
1	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSD Soreang
1	02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,002	-	1.576.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSD Soreang, RSD Majalaya dan RSUD Cicalengka

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1 02 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya kemampuan tenaga dokter dan paramedis dalam penanganan kegawat daruratan	Cakupan tenaga dokter & paramedis dalam PPGD : 25%	30%		40%	375.423.176	50%	396.431.168	60%	405.772.071	70%	426.792.006	Dinkes
1 02 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya kemampuan tenaga dokter dan paramedis dalam penanganan kegawat daruratan	Cakupan tenaga dokter & paramedis dalam PPGD : 25%	30%		40%	-	50%	-	60%	-	70%	-	RSD Majalaya
1 02 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya kemampuan tenaga dokter dan paramedis dalam penanganan kegawat daruratan	Cakupan tenaga dokter & paramedis dalam PPGD : 25%											RSD Soreang
1 02 28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tersedianya kemampuan tenaga dokter dan paramedis dalam penanganan kegawat daruratan	Cakupan tenaga dokter & paramedis dalam PPGD : 25%	30%	1.960.000.000									Dinkes, RSD Soreang dan RSUD Cicalengka
1 02 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Terlaksananya penyelenggaraannya perawatani kesehatan bagi lansia	Cakupan pobisindu : 25%	30%	244.500.000	40%	76.472.900	50%	80.752.200	60%	82.654.900	70%	86.935.600	Dinkes
1 02 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 : 89%	90%	1.095.520.000	91%	1.154.836.858	92%	1.219.459.409	94%	1.248.192.899	95%	1.312.852.188	Dinkes
1 11 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbentuknya P2TP2 tingkat Kabupaten	Korban trafficking 1	30	358.750.000	25	368.077.667	23	300.000.000	20	200.000.000	17	200.000.000	BKBPP
1 11 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga	Kader Posyandu, Pos KB, PKK 245)rang	248 Orang	132.890.000	250 Orang	120.627.833	253 Orang	130.000.000	255 Orang	140.000.000	20 Orang	150.000.000	BKBPP
1 11 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin	Keluarga miskin150 KK	100 KK	91.530.000	90 KK	119.891.000	95 KK	161.172.260	97 KK	150.000.000	105 KK	150.000.000	BKBPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab			
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	12	15	Program Keluarga Berencana	tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan, Menurunnya LPP (laju pertumbuhan penduduk) melalui pengaturan kelahiran. Cakupan PUS dibawah 20 tahun Cakupan PUS menjadi peserta KB (CPR) Cakupan kontrasepsi MKJP Cakupan unmet need, Penyediaan informasi data mikro keluarga	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	BKBPP
						984.150.000	- akseptor MO 450 - para medis (dokter, bidan) 16 org - akseptor KB 1200 org 31 kec - kelompok GSI 31 Kel - keluarga pra sejahtera dan KSI 276 desa	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000					
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PIKR Pertemuan PIKR Percontohan pembinaan Remaja Di pesantren Pembinaan Remaja di Sekolah Pembentukan desa model PUP Pengembangan Kelompok PIKR	200 peserta 31 kelompok 5 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	150 peserta 31 kelompok 5 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	231.490.000	125 peserta 31 kelompok 5 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	155.359.600	100 peserta 31 kelompok 5 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	240.000.000	75 peserta 31 kelompok 5 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	300.000.000	50 peserta 31 kelompok 5 potren 5 SLTA 10 desa 31 Kecamatan	400.000.000		BKBPP
1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa	300 Orang 930 Orang	300 Orang 930 Orang	418.160.000	300 Orang 930 Orang	351.634.080	300 Orang 930 Orang	350.000.000	300 Orang 930 Orang	400.000.000	300 Orang 930 Orang	400.000.000		BKBPP
1	12	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Menurunkan kasus penularan Penyakit HIV/IADs	250 Orang	200 Orang	22.310.000	175 Orang	86.452.416	150 Orang	75.000.000	125 Orang	74.864.377	100 Orang	90.682.118		BKBPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
1	12	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatkan pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak	31 Buku 1 Paket	31 Buku 1 Paket	43.290.000	31 Buku 1 Paket	37.700.000	31 Buku 1 Paket	50.000.000	31 Buku 1 Paket	40.000.000	31 Buku 1 Paket	-	BKBPP
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan	409 Orang 150 Orang 350 Orang BKB (36%) UPPKS (42%)	504 Orang 155 Orang 372 Orang BKB (38%) UPPKS (48%)	141.370.000	550 Orang 200 Orang 200 Orang 425 Orang BKB (40%) UPPKS (52%)	140.655.000	600 Orang 250 Orang 475 Orang BKB (50%) UPPKS (60%)	150.000.000	650 Orang 300 Orang 525 Orang BKB (60%) UPPKS (75%)	185.000.000	700 Orang 350 Orang 575 Orang BKB (70%) UPPKS (80%)	175.000.000	BKBPP
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatkan Kemampuan Fm dan PMKS dalam memenuhi Kebutuhan dasar	KPM = 40 PKH = 8276	KPM = 40 PKH = 8276	923.908.500	KPM = 40 PKH = 8276	1.027.000.000	KPM = 40 PKH = 8276	1.127.000.000	KPM = 40 PKH = 8276	1.177.000.000	KPM = 40 PKH = 8276	1.277.000.000	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	meningkatkan rasa Kepercayaan diri, kemauan dan kemandirian PMKS	KTK = 50	KTK = 45	1.030.000.000	KTK = 45	821.900.000	KTK = 45	868.264.424	KTK = 45	868.264.424	KTK = 45	918.264.424	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	13	17	Program pembinaan anak terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan dasar Anak	Anak Terlantar = 30	Anak Terlantar = 30	185.000.000	Anak Terlantar = 30	240.000.000	Anak Terlantar = 30	300.000.000	Anak Terlantar = 30	320.000.000	Anak Terlantar = 30	370.000.000	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	meningkatkan rasa Kepercayaan diri, Kemauan dan Kemandirian Penyandang Cacat	PENY CACAT = 26	PENY CACAT = 26	350.500.000	PENY CACAT = 26	641.500.000	PENY CACAT = 26	641.500.000	PENY CACAT = 26	671.500.000	PENY CACAT = 26	721.500.000	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	13	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Panti Asuhan/Jompo bagi Pengurus	PANTI = 25	PANTI = 25	185.000.000	PANTI = 25	278.000.000	PANTI = 25	278.000.000	PANTI = 25	278.000.000	PANTI = 25	304.618.175	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	meningkatkan rasa Kepercayaan diri, Kemauan dan Kemandirian penyandang eks. Penyakit Sosial	ANK NAKAL = 20	ANK NAKAL = 50	185.000.000	ANK NAKAL = 50	275.000.000	ANK NAKAL = 50	315.000.000	ANK NAKAL = 50	315.000.000	ANK NAKAL = 50	335.000.000	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kinerja lembaga Kesejahteraan Sosial masyarakat dalam UKS	TKSK = 29	TKSK = 29	1.275.591.500	TKSK = 29	1.466.236.535	TKSK = 29	1.466.236.535	TKSK = 29	1.466.236.535	TKSK = 29	1.466.236.535	Dinsosdukasi p/Dinsos
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	1	14.221.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	Dikbud
				Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya												Dikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	46	270.000.000	46	750.000.000	46	789.000.000	46	789.000.000	46	789.000.000	Dikbud
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis Kesenian	8	190.000.000	8	170.137.255	8	321.000.000	8	321.000.000	8	321.000.000	Dikbud
1	18	15	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Tersusunnya data potensi kepemudaan			0,50	41.625.000	0,60	44.525.000	0,70	45.810.000	0,80	48.710.000	Dispopar
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marching band		240.000.000	0,80	124.875.000		133.575.000		137.430.000		146.130.000	Dispopar
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya peran serta kepemudaan di Kab. Bdg.			0,60	33.300.000	0,70	35.620.000	0,75	36.648.000	0,80	38.968.000	Dispopar
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda			0,60	41.625.000	0,70	44.525.000	0,75	45.810.000	0,80	48.710.000	Dispopar
1	18	19	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Organisasi dan tenaga keolahragaan			0,74	62.437.500	0,71	66.787.500	0,76	68.715.000	0,80	73.065.000	Dispopar
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya kompetensi olahraga pelajar Tk Kab. Bdg		600.000.000	0,80	124.875.000	0,80	133.575.000	0,80	137.430.000	0,80	146.130.000	Dispopar
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terlaksananya pembinaan atlet berbakat dan berpotensi			0,60	208.125.000	0,70	222.625.000	0,75	229.050.000	0,80	243.550.000	Dispopar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1 18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (PNS, OKP dan masyarakat)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (PNS, OKP dan masyarakat)			0,60	83.250.000	0,70	89.050.000	0,75	91.620.000	0,80	97.420.000	Dispopar	
1 18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (PNS, OKP dan masyarakat)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (PNS, OKP dan masyarakat)			0,60	83.250.000	0,70	89.050.000	0,75	91.620.000	0,80	97.420.000	Dispopar	
1 18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terciptanya olahragwan berbakat dan berprestasi			0,74	83.250.000	0,71	89.050.000	0,76	91.620.000	0,80	97.420.000	Dispopar		
1 18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya informasi yang cepat dan online	Tersusunnya data-data yang akuntabel		0,71	41.625.000	0,71	44.525.000	0,67	45.810.000	0,80	48.710.000	Dispopar		
1 18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga			3.800.000.000	0,50	749.250.000	0,60	801.450.000	0,70	824.508.000	0,80	876.780.000	Dispopar
Misi 3 : Memantapkan pembangunan perdesaan																
2 01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1 Sayuran 2. Tan Hias 3 Buah-buahan				1.581.700.000			861.000.000		918.600.900		946.159.000	1.005.766.939	BKP3
				1 0 0	2 1 1	2 1 1			2 1 1	3 1 1		3 1 1				
2 01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1.Sayuran 2.Tan. Hias 3.Buah-buahan						281.000.000		527.000.000		532.270.000		537.592.000	Distanbunhut
				1 0 0	2 1 1	2 1 1			2 1 1	3 1 1		3 2 1				
2 01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terlaksananya verifikasi pemantauan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok penerima LDPM usaha ekonomi produktif dan alat pengolahan pupuk organik	4 kecamatan		4 kecamatan	110.000.000	4 kecamatan	117.359.000	4 kecamatan	119.588.821	4 kecamatan	127.122.917		BKP3	
1 21	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	- Persentase jumlah konsumsi pangan utama pertanian/perkebunan terhadap ketersediaan pangan utama (ton) -Skor PPH (Pola pangan harapan)	65,32			4.103.000.000	1,81	555.000.000	1,81	599.400.000	1,81	624.275.100	1,81	665.477.257	BKP3
					4 4										168	
				89,6				0,08		0,08		0,08		0,08		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab				
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	21	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok agribisnis : 1.padi 2.Jagung Luas areal pengembangan SRI (Ha) Jumlah Unit Pengolahan Pupuk organik (UPPO) Luas areal pengembangan hortikultura aman konsumsi (Ha)	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	Distanbunhut
				32 2 650 64 40 40	6 1	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5	
				650	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
				64	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
				40	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
2	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	- jumlah kelompok yang bermitra - Jumlah kelompok usaha Rumah kemasan	11 3	2 3	775.000.000	2 3	884.300.000	2 3	940.143.000	2 4	996.044.000	2 5	1.052.004.000		Distanbunhut	
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tercapainya pemantapan pembangunan pedesaan	50%	2.817.000.000	60%	1.851.000.000	70%	1.976.000.000	80%	2.051.000.000	100%	2.106.000.000		BPMPD		
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Terbinanya pengelolaan pasar desa	50%	50.000.000	60%	67.500.000	70%	70.000.000	80%	70.000.000	100%	70.000.000		BPMPD		
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya kemanunggalan TNI & Masyarakat	50%	1.153.000.000	60%	1.535.250.000	70%	1.555.250.000	80%	1.665.250.000	100%	1.730.250.000		BPMPD		
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan kepala desa dan sekretaris desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa	50%	225.000.000	60%	950.000.000	70%	1.075.000.000	80%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000		BPMPD		
Misi 4: Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah																		
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.	0,30	50 kali di 31 Kecamatan	6.923.584.000	- 50 kali di 31 Kecamatan	578.781.014	50 kali di 31 Kecamatan	626.915.428	62 kali di 31 Kecamatan	543.879.952	62 kali di 31 Kecamatan	582.061.626		Satpol PP	
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk.	22,80	- 400 org - 5520 linmas	4.027.400.000	- 400 org - 5520 linmas	4.027.400.000	- 400 org - 5520 linmas	4.027.400.000	- 400 org - 5520 linmas	4.027.400.000	- 400 org - 5520 linmas	4.027.400.000		Kesbanglinmas	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab				
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	- Jumlah Demonstrasi Bidang Politik - Jumlah Demonstrasi Ekonomi - Jumlah Demonstrasi Kasus	-6	9	65 kali di 31 Kec	885.600.000	65 kali di 31 Kec	565.000.000	65 kali di 31 Kec	590.000.000	65 kali di 31 Kec	710.000.000	65 kali di 31 Kec	750.000.000	Satpol PP	
						13												
						18												
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	- Jumlah Demonstrasi Bidang Politik - Jumlah Demonstrasi Ekonomi - Jumlah Demonstrasi Kasus		9	365 kali		430 org 31 kec	250.000.000	430 org 31 kec	250.000.000	430 org 31 kec	300.000.000	430 org 31 kec	350.000.000	Kesbanglinmas	
						13												
						18												
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan					250.000.000	550 org	301.933.407	620 Org	370.180.448	620 Org	389.452.644	670 org	382.852.180	Kesbanglinmas	
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	forum komunikasi ulama umaro			5 kali		12 kali	200.000.000	12 kali	200.000.000					setda	
1	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Pelaksanaan penyuluhan miras dan narkoba bagi siswa SMA dan SMK				2 SMA dan SMK di Kecamatan Soreang	100.000.000	1 SMA dan SMK di Kecamatan margahayu	50.000.000	1 SMA dan SMK di Kecamatan katapang	60.000.000	1 SMA dan SMK di Kecamatan Banjaran	60.000.000	1 SMA dan SMK di Kecamatan Margaasih	65.000.000	Satpol PP
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat		70%	100 Orang	150.000.000	400 org	200.000.000	450 org	250.000.000	500 org	250.000.000	550 org	275.000.000	Kesbanglinmas	
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pengetahuan dalam penanganan bencana		50%			250 org	50.000.000	250 org	50.000.000	250 org	50.000.000	250 org	50.000.000	Kesbanglinmas	
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pengetahuan dalam penanganan bencana		50%	60 Orang	1.100.000.000									Kesbanglinmas, BPBD, Setda	
Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah																		
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan dan jembatan (pembangunan jalan lingkaran Banjaran, Jl Lingkar Majalaya, Jl Lingkar Katapang baleendah, Jl Lingkar Baleendah-Majalaya), Jl Ibum-Monteng, Jl lingkaran Cileunyi	tersedianya jalan kabupaten sepanjang 1.155,35 km dan jembatan sebanyak 782 lokasi		Pembebasan lahan 3,19 Ha	43.000.000.000	DED pemb. Jln dan jembatan dan dok. Amdal serta pembebasan lahan	20.500.000.000	DED pemb. Jln dan jembatan dan dok. Amdal serta pembebasan lahan	30.500.000.000	DED pemb. Jln dan jembatan dan dok. Amdal serta pembebasan lahan	40.500.000.000	DED pemb. Jln dan jembatan dan dok. Amdal serta pembebasan lahan	40.299.999.400	Bina Marga	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase/gorong-gorong serta berkurangnya tingkat genangan	tersedianya sarana drainase sepanjang 51.613 m	Pemb. Draenase di 51 Lokasi	6.912.000.000	Pemb. Draenase di 58 Lokasi	5.750.000.000	Pemb. Draenase di 59 Lokasi	6.500.000.000	Pemb. Draenase di 59 Lokasi	6.600.000.000	Pemb. Draenase di 59 Lokasi	7.000.000.000	Bina Marga
1 03 17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Meningkatnya kualitas jalan serta berkurangnya resiko pengguna jalan	tersedianya TPT Jalan dengan volume 1.500 m3	Pemb. TPT di 54 Lokasi	5.939.500.000	Pemb. TPT di 25 Lokasi	4.000.000.000	Pemb. TPT di 26 Lokasi	4.250.000.000	Pemb. TPT di 25 Lokasi	4.500.000.000	Pemb. TPT di 25 Lokasi	7.000.000.000	Bina Marga
1 03 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan serta percepatan kondisi jalan mantap	kondisi jalan baik 355,57 km, rusak sedang 235,190 km, rusak 319,01 km, rusak berat 245,58 . Kondisi Jembatan baik 603 lokasi, rusak sedang 126 lokasi, rusak 53 lokasi	Peningkatan Jalan 65 Km, Pemel. Periodik 30 Km, Pemel. Rutin 147 Km, Pemeliharaan Jembatan 44 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 106 Lokasi	79.974.460.000	Peningkatan jalan 60 Km, Pemel. Periodik 30 Km, Pemel. Rutin 147 Km, Pemeliharaan Jembatan 67 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 124 Lokasi	82.883.861.523	Peningkatan jalan 65 Km, Pemel. Periodik 38 Km, Pemel. Rutin 153 Km, Pemel Rutin 147 km Pemeliharaan Jembatan 67 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 124 Lokasi	87.640.442.420	Peningkatan jalan 52 Km, Pemel. Periodik 29,75 Km, Pemel. Rutin 341 km, Pemeliharaan Jembatan 62 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 126 Lokasi	90.146.066.370	Peningkatan jalan 60 Km, Pemel. Periodik 40 Km, Pemel. Rutin 117 km, Pemeliharaan Jembatan 56 Lokasi, Pemeliharaan Rutin Jembatan 124 Lokasi	95.849.232.288	Bina Marga
1 03 20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan serta tersedianya informasi rencana penanganan jalan dan jembatan	Inspeksi dan pengawasan jalan di 31 kecamatan	Dokumen Inspeksi Jalan sepanjang 300 Km	1.000.000.000	Dokumen Inspeksi Jalan sepanjang 300 Km	1.000.000.000	Dokumen Inspeksi Jalan sepanjang 300 Km	1.574.614.000	Dokumen Inspeksi Jalan sepanjang 300 Km	1.806.301.750	Dokumen Inspeksi Jalan sepanjang 300 Km	2.037.989.500	Bina Marga
1 03 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	tersedianya informasi jalan dan jembatan terkini	tersedianya informasi jalan dan jembatan di 31 kecamatan	Dokumen Data Base Jalan di 8 Kecamatan	250.000.000	Dokumen Data Base Jalan di 8 Kecamatan	340.006.000	Dokumen Data Base Jalan di 8 Kecamatan	430.012.000	Dokumen Data Base Jalan di 7 Kecamatan	520.018.000	Dokumen Data Base Jembatan di 15 Kecamatan	610.024.000	Bina Marga
1 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya kemampuan penunjang kegiatan kebinamargaan	tersedianya sarana dan prasarana penunjang kebinamargaan 50%	Pembangunan Lab, Pengadaan Back Hoe, Pemeliharaan Bangkel dan Alat Berat	3.600.000.000	Pembangunan Lab Tahap II , DED dan Pembebasan lahan untuk AMP , Pengadaan Alat Berat Buldozer dan sukucadang alat berat	4.200.000.000	Pembangunan AMP, Rehabilitasi Gedung UPTD Pengadaan Alat Lab dan sukucadang alat berat	3.000.000.000	Pengadaan Alat Lab dan sukucadang alat berat dan AMP	2.000.000.000	Pengadaan Alat Lab dan sukucadang alat berat dan AMP	1.800.000.000	Bina Marga
1 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya kemampuan penunjang kegiatan kebinamargaan	tersedianya sarana dan prasarana penunjang kebinamargaan 50%											RSD Soreang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya kemampuan Jaringan Irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air	Total Panjang saluran : 1.044,808 Km, sarana dan prasarana Irigasi kewenangan Kabupaten areal < 1000 ha yang berlokasi di Kabupaten Bandung		13.185.492.500		6.433.653.482		6.505.184.345		6.323.367.164		6.337.720.125	SDAPE
					Saluran Induk = 77,764 Km											SDAPE
					- 47,281 Km (60,8%) Kondisi baik											SDAPE
					-15,553 Km (20%) kondisi rusak berat	1,46 Km		0,99 km		0,93 Km		0,84 Km		0,76 Km		SDAPE
					- 14,931 Km (19,20%) kondisi rusak ringan	1,83 Km		1,13 km		0,99 Km		1,10 Km		0,80 Km		SDAPE
					Saluran sekunder 136 KM											SDAPE
					- 81,60 Km (60%) Kondisi baik											SDAPE
					- 34 Km (25%) Kondisi rusak berat	3,66 Km		2,71 km		2,07 Km		1,47 Km		1,91 Km		SDAPE
					- 20,40 Km (15%) Kondisi rusak ringan	2,19 Km		1,5 km		0,83 Km		1,47 Km		0,96 Km		SDAPE
					Saluran Tersier 831,044 Km											SDAPE
					Jumlah Bangunan Air 933 buah											SDAPE
					Bangunan Utama 440 buah											SDAPE
					- 140 buah (31,80 %) Kondisi baik											SDAPE
					- 180 buah (40,10 %) Kondisi rusak berat	10 Buah		9 Buah		7 Buah		7 Buah		6 Buah		SDAPE
					- 120 buah (28,10%) Kondisi rusak ringan	16 Buah		6 Buah		8 Buah		6 Buah		5 Buah		SDAPE

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
			Bangunan Bagi Sadap = 273 buah - 116 buah (42,49 %) Kondisi baik												SDAPE	
			- 58 buah (21,20 %) kondisi rusak berat	2 buah		3 Buah		4 Buah		2 Buah		3 Buah		SDAPE		
			- 99 buah (36,30 %) kondisi rusak ringan	5 Buah		4 Buah		6 Buah		5 Buah		5 Buah		SDAPE		
			Bangunan Pelengkap = 220 Buah											SDAPE		
			- 176 buah (80%) Kondisi baik											SDAPE		
			- 14 Buah (6,36%) Kondisi rusak berat	2 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah		SDAPE		
			- 30 buah (13,64%) kondisi rusak ringan	6 Buah		6 Buah		2 Buah		2 Buah		1 Buah		SDAPE		
1	03	29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur di Kawasan Cileunyi Terpadu	4 Buah Dokumen Perencanaan pembangunan infrastruktur	2.700.000.000	Pembangunan infrastruktur di 9 Lokasi	1.000.000.000	Pembangunan infrastruktur di 9 Lokasi	1.500.000.000	Pembangunan infrastruktur di 9 Lokasi	1.700.000.000	Pembangunan infrastruktur di 9 Lokasi	1.400.000.000	Bina Marga
1	03	31	Program Pembangunan Pasar Pedesaan				5.000.000.000									Diskoperindag
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,32%	Ketersediaan Sistem air limbah setempat sebesar 51%	a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,01%	10.842.598.000	a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,08%	17.718.550.000	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,16%	25.020.159.272	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,23%	5.125.000.000	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,32%	4.285.000.000	Dispartasih

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	Dispartasih
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 1,8%	Ketersedian sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 0,8%	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 1%		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 1,5%		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 1,6%		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 1,7%		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan /kota sebesar 1,8%			Dispartasih
		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10%	Luasan permukiman kumuh seluas 1347,34 ha (4,66%)	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 0.37%		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 0.74%		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 1,11%		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 1,48%		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 1,85%			Dispartasih
		Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%	Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%		Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%		Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%		Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%		Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%			Dispartasih
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 50%	Jumlah rumah layak huni sebanyak 51429 unit (7,3%)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 12,3%		Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 17,3%		Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 22,3%		Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 27,3%		Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 32,3%			Dispartasih

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 35%	Pelayanan terhadap rumah layak huni yang terjangkau mencapai 30858 unit (4,4%)	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 7,5%		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 10,6%		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 13,7%		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 16,8%		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 19,9%		Dispertasih	
1 04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 60%	Ketersediaan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 22% (kota + desa), pedesaan 10 %	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 31%	11.300.000.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 29 % (kota + desa), pedesaan 11 %	2.941.450.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 49%	2.298.523.788	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 58%	2.400.000.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 70%	3.300.000.000	Dispertasih
1 04	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 60%		Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 31%	800.000.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 40%	250.000.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 49%	250.000.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 58%	250.000.000	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / orang / hari sebesar 70%	250.000.000	Dispertasih

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
1 04 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 13,5%	Penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 0,8%	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 11%	150.000.000	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 11%	150.000.000	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 11%	70.000.000	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 16,5%	70.000.000	Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat PERMENDAGRI NO. 9 Thn. 2009 tentang Tata Cara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mencapai 16,5%	70.000.000	Dispartasih
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perencanaan ruang	Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 27,87%	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 31,27%	2.400.000.000	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 35,25%	800.000.000	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 40,07%	500.000.000	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 45,63%	800.000.000	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 51,93%	800.000.000	Dispartasih
		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yg dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan prog pemanfaatan ruang.		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yg dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.		Dispartasih

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab						
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5								
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17						
1 05 16	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%	Ketersedian informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 27,87%			Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 35,25%	300.000.000			Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 40,07%	300.000.000			Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 45,63%	300.000.000			Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 51,93%	500.000.000	Dispertasih
1 05 16	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Foto Udara seluar 6.250 ha dan Peta Garis seluas 16.250 ha dengan Skala 1 : 5000 untuk keperluan penataan ruang	1 Dok pemetaan	900.000.000	1 Dok Dokumen fakta dan analisa	500.000.000	1 Dokumen Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027	525.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang	525.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang	540.000.000	Bappeda						
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 100%	Pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan IMB mencapai 25%	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 30%	300.000.000	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 32%	250.000.000	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 35%	250.000.000	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 37%	250.000.000	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 40%	250.000.000	Dispertasih						
		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%		Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang sebesar 100%		Dispertasih						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab							
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5									
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1 07 16	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasana dan fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi terminal dengan status aset Pemda dan Alat PKB	Rejabilitasi terminal Cicalengka Kalibrasi 12 item alat PKB	292.500.000	-7	-8	-9	375.000.000	-10	-11	484.000.000	-12	-13	150.000.000	-14	-15	284.422.182	-16	-17	Dishub
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan secara memadai	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan : Sosialisasi Ke Siswa Sekolah	1) Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di lokasi TMMD dan TMMS; 2)Evaluasi Kinerja Trayek; 3) PAM Lalin 4) Pengadaan Alat Perbengkelan	897.500.000	1. Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di TMMD dan TMSS 2. Updating kinerja trayek	885.000.000	1. Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di TMMD dan TMSS 2. Updating kinerja trayek	945.023.510	1. Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di TMMD dan TMSS 2. Updating kinerja trayek 3. PAM Lalin 4. Pengadaan alat pebengkelan	965.000.000	1. Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di TMMD dan TMSS 2. Updating kinerja trayek 3. PAM Lalin 4. Pengadaan alat pebengkelan	990.000.000	1. Penyuluhan ke anak sekolah dan masyarakat di TMMD dan TMSS 2. Updating kinerja trayek 3. PAM Lalin 4. Pengadaan alat pebengkelan	990.000.000	Dishub					
1 07 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	1. Pembangunan Terminal Penumpang : a. Tipe A Cileunyi b. Tipe B Soreang c. Transit Alam Endah ; 2. Pembangunan Terminal Barang (Stock Pile) di Cicalengka	1 paket	5.100.000.000	1 paket	5.500.000.000	1 paket	6.150.000.000												Dishub
1 07 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pemasangan fasilitas lalu lintas, pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan: 1. Rambu lalu lintas 2. Rambu Proteble 3. RPPJ 4. GUARD Rail 5. Trafic Light 6. Warning Light 7. Cermin Tikungan 8. Marka Jalan		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 30%	491.000.000	1. Pengadaan rambu: 100 rambu, 4 RPPJ, Pemel Rambu 2. Pengadaan 500 m2 marka	225.000.000	1. Pengadaan rambu: 120 rambu, 6 RPPJ, Pemel Rambu 2. Pengadaan 700 m2 marka	285.000.000	1. Pengadaan rambu: 120 rambu, 6 RPPJ, Pemel Rambu 2. Pengadaan 700 m2 marka	305.000.000	1. Pengadaan rambu: 120 rambu, 6 RPPJ, Pemel Rambu 2. Pengadaan 750 m2 marka	325.000.000	1. Pengadaan rambu: 120 rambu, 6 RPPJ, Pemel Rambu 2. Pengadaan 750 m2 marka	325.000.000	Dishub					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab					
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1 07 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya dan lancarnya lalu lintas yang aman serta tertib	Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas : Rambu : 30 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan : 1. Rambu Lalu Lintas 2. Rambu Portable 3. RPPJ 4. Guard Rail 5. Traffic Light 6. Warning Light 7. Cermin Tikungan, 8 Marka Jalan 9. Jembatan Penyeberangan 10. Halte Pemberhentian	-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	Bina Marga
				5.519.960.000	Pemb. 980 TC Pemel 200 TC	3.250.000.000	Pemb. 178 TC Pemel 1796 TC	4.000.000.000	Pemb. 183 TC Pemel 1952 TC	4.500.000.000	Pemb. 216 TC Pemel 2025 TC	4.750.000.000							
1 07 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya sewa terminal, kegiatan sosialisasi kebijakan, kegiatan rakonas, rakonis WTN	1. Sewa 10 lokasi terminal 2. Sosialisasi kpd juru parkir 3. Rakornas, Rakornis dan WTN 4. data angkutan barang 5. Pengadaan Tanah dan Pemb Terminal Soreang Type B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Dishub
				1.681.581.660	1. Sewa 10 lokasi terminal 2. Sosialisasi kpd juru parkir 3. Rakornas, Rakornis dan WTN 4. data angkutan barang 5. Pengadaan Tanah dan Pemb Terminal Soreang Type B	1.966.000.000	1. Sewa 10 lokasi terminal 2. Sosialisasi kpd juru parkir 3. Rakornas, Rakornis dan WTN 4. Pengadaan Tanah dan Pemb Terminal Soreang Type B	1.966.000.000	1. Sewa 10 lokasi terminal 2. Sosialisasi kpd juru parkir 3. Rakornas, Rakornis dan WTN 4. Perenc Angkutan masal 5. Pengadaan Tanah dan Pemb Terminal Soreang Type B	10.495.910.157	1. Sewa 10 lokasi terminal 2. Sosialisasi kpd juru parkir 3. Rakornas, Rakornis dan WTN 3. Pengadaan Tanah dan Pemb Terminal Soreang Type B	475.000.000							
Misi 6 : Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing																			
2 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah demplot pertanian	135			135	348.750.000		135	372.081.375		135	379.523.000		135	403.432.952			BKP3
2 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok UPJA - Luas pemanfaatan jitu jides	10 480 Ha			5 332,5 Ha	1.195.900.000		5 332,5 Ha	1.207.859.000		5 332,5 Ha	1.219.937.000		6 332,5 Ha	1.232.136.000			Distanbunhut
2 01 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah kelompok sasaran penyuluh	233		8	360.000.000		8	215.000.000		8	229.383.500		9	233.971.170		9	248.945.325	BKP3
2 05 22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Jumlah sistem penyuluhan	1		1	164.000.000													BKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
2	01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	- Jenis penyakit ternak yang ditanggulangi - Jumlah usaha pangan asal hewan yang berstandar dan bersertifikasi - Jumlah unit pos kesehatan hewan	4 0 2	4 4 4	596.500.000	610.000.000	625.000.000	650.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Disnakan
2	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	-Produksi Daging (ton) -Produksi Telur (Ton) -Produksi Susu (Ton)	45.183 8.323 62.876	5.602 1679,4 555,2	2.182.370.000	2.585.000.000	2.222.000.000	2.250.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	Disnakan
2	01	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah pasar hewan	2	0,20	486.500.000	405.000.000	250.000.000	275.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	Disnakan
2	01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah penggunaan biogas (unit) Kompos (Unit)	796 114	50 36	3.492.320.000	1.657.395.000	2.071.407.000	2.107.828.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	Disnakan
2	01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	pelatihan penerapan teknologi peternakan	1		60.000.000		64.014.000	65.294.280	69.864.880	69.864.880	69.864.880	69.864.880	69.864.880	BKP3
2	05	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Target produksi benih ikan (ekor)	1.088.942.812	89.771.818	1.140.000.000	89.771.818	825.000.000	850.000.000	934.083.000	934.083.000	934.083.000	934.083.000	934.083.000	Disnakan
2	05	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan budidaya ikan yang berwawasan lingkungan	7	1	533.000.000	160.000.000	200.000.000	225.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	Disnakan
2	05	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (dst...)	Penerapan GMP pada produk ikan (jenis pengolahan)	0	1	283.000.000	335.000.000	350.000.000	375.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	Disnakan
1	15	15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	- PIRT - Sertifikasi halal - Jumlah UMKM	31 57 5.492 UMKM	12	125.000.000	150.000.000	175.000.000	165.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	Diskoperindag
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- KUD/Koperasi - Usaha Mikro dan embrio mikro - Intermediasi usaha - Pola Kemitraan	40 235 60 120	15	900.000.000	890.000.000	815.000.000	740.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	Diskoperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab														
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5																
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp															
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- Jumlah BPR dan LKM (Syariah/konvensional) - Jumlah UMKM - Rumah Kemasan - Bintek Kemasan - Kelompok Usaha (UMKM) - Fasilitasi usaha KUKM	78 5.492 2 3 103 14	-6	-7	16	565.000.000	-8	-9	15	100.000.000	-10	-11	19	275.000.000	-12	-13	23	295.000.000	-14	-15	27	315.000.000	-16	-17	Diskoperindag
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Jumlah koperasi aktif - Jumlah koperasi - Persentase koperasi aktif	782 1.489 50,17	-6	-7	13	645.000.000	-8	-9	15	305.000.000	-10	-11	20	274.000.000	-12	-13	24	284.000.000	-14	-15	28	305.000.000	-16	-17	Diskoperindag
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - Alat UTTP yang diukur ulang - Jumlah LPKSM - Jumlah Kasus sengketa konsumen - pelaku usaha - konsumen dan para pelaku usaha (BPSK) - lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) - UPPT (Komoditinya)	10 komoditi 105 unit 3 LPKSM 59	-6	-7	15	260.000.000	-8	-9	16	170.000.000	-10	-11	20	155.000.000	-12	-13	23	155.000.000	-14	-15	26	165.000.000	-16	-17	Diskoperindag
2	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	- Jumlah eksportir/calon eksportir - Promosi LN - Pelaku pelatihan ekspor - Nilai ekspor - meningkatnya pemahaman tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor bagi eksportir dan calon importir - meningkatnya akses pemasaran produk unggulan ke pasar luar negeri	40 pelaku 1 kali 40	-6	-7	11	150.000.000	-8	-9	15	180.000.000	-10	-11	20	245.000.000	-12	-13	25	235.000.000	-14	-15	30	249.000.000	-16	-17	Diskoperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Konsep Pasar Terpadu - Jumlah Promosi Pameran - Jumlah UMKM peserta pameran - Pemantauan harga SEMBAKO - Bintek peningkatan kualitas produk kerajinan - Pengrajin yg dibina melalui kemitraan Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha dengan mitra kerja lembaga Tertatanya pengelolaan dan pengembangan pasar di Kabupaten Bandung Meningkatnya pengawasan terhadap harga bahan pokok dan distribusi barang penunjang pertanian	Ded 3 pasar 6 kali 113 UMKM 9 UPTD 5 Kali 0	8	1.000.000.000	19	9.963.650.000	22	16.025.000.000	24	16.125.000.000	27	1.685.000.000	Diskoperindag
2 07 15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	- Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil (jumlah IK)	530	16	360.000.000	18	530.000.000	20	1.020.000.000	22	680.000.000	24	750.000.000	Diskoperindag
2 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-Pengembang-an kelompok industri hulu hilir	96 kelompok IKM (2.180 org)	20	600.000.000	17	515.000.000	19	430.000.000	21	434.000.000	23	450.000.000	Diskoperindag
2 07 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-Jumlah Industri Kecil yang melaksanakan standarisasi produksi dan kemasan	240 IKM	11	800.000.000	15	915.000.000	20	540.000.000	25	880.000.000	30	910.000.000	Diskoperindag
2 07 18	Program Penataan Struktur Industri	- Pengembang-an kelompok industri hulu hilir	96 kelompok IKM (2.180 org)	21	150.000.000	-	-	20	-	19	75.000.000	19	75.000.000	Diskoperindag
2 06 19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Penataan Pedagang kaki lima di 11 pasar tradisional	11 pasar	-	-	18	250.000.000	20	275.000.000	22	295.000.000	24	305.000.000	Diskoperindag
2 07 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	-Basis data informasi potensi wilayah (sentra industri) - pendataan kondisi IK unggulan	Sentra industri di 4 Kecamatan	16	70.000.000	18	115.000.000	20	270.000.000	22	310.000.000	24	375.000.000	Diskoperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
2	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Luas pemanfaatan Jituk/Jides, embung, sumur pantek dan sumur resepan	480 Ha	26	3.207.000.000							BKP3 dan Distanbunhut		
2	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan Produksi (ton) :			2.203.500.000			200.000.000			217.647.600	231.577.046	BKP3	
			1.Padi		472.564	12756,6			12756,6			12756,6		12756,6		
			2.Jagung		51.000	477,2			477,2			477,2		477,2		
			3.Sayuran		1.039.220	10392,2			10392,2			10392,2		10392,2		
			4.Buah-buahan		560.823	6729,8			6729,8			6729,8		6729,8		
			5.Tan. Hias		382.253	3058			3058			3058		3058		
			6.Tan. Obat-obatan		836.410	11709,6			11709,6			11709,6		11709,6		
			7.Kopi		3.875,00	106,4			106,4			106,4		106,4		
			8.Teh		3.133,00	72,4			72,4			72,4		72,4		
			9.Cengkeh		111,00	2,6			2,6			2,6		2,6		
2	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan Produksi (ton) :				1.817.800.000			1.878.978.000			1.940.267.000	2.309.639.893	Distanbunhut
			1.Padi		472.564	12756,6			12756,6			12756,6		12756,6		
			2.Jagung		51.000	477,2			477,2			477,2		477,2		
			3.Sayuran		1.039.220	10392,2			10392,2			10392,2		10392,2		
			4.Buah-buahan		560.823	6729,8			6729,8			6729,8		6729,8		
			5.Tan. Hias		382.253	3058			3058			3058		3058		
			6.Tan. Obat-obatan		836.410	11709,6			11709,6			11709,6		11709,6		
			7.Kopi		3.875,00	106,4			106,4			106,4		106,4		
			8.Teh		3.133,00	72,4			72,4			72,4		72,4		
			9.Cengkeh		111,00	2,6			2,6			2,6		2,6		
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Jumlah kunjungan wisata - Rata-Rata kunjungan per obyek wisata - pamoja bagi pelajar SMU dan perguruan tinggi Se Kab Bandung	334.0876 150,51	16	160.000.000	18	150.000.000	20	170.000.000	22	175.000.000	24	225.000.000	Dispopar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab													
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5															
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Kualitas dan kauntitas sarana dan Prasarana wisata - pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) khususnya untuk desa wisata -objek dan daya tarik wisata (ODTW), Kompepar, Pamoja, Hotel, Restoran dan jasa usaha pariwisata - penyusunan legalisasi RIPDA dan formulir kebijakan standar pariwisata - pelaksanaan Gebyar wisata Kab Bandung - Promosi objek dan daya tarik Wisata unggulan (ODTW) Pariwisata	-6	-7	16	1.050.000.000	-8	-9	18	920.000.000	-10	-11	20	1.040.000.000	-12	-13	22	680.000.000	-14	-15	24	775.000.000	-16	-17	Dispopar
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan	- Potensi Wisata Desa Unggulan - SDM Wisata - kompepar, pamoja, PHRI, 10 desa wisata dan jasa usaha pariwisata - pelatihan pemandu dan pengelolaan desa wisata	10	16	16	300.000.000	5	18	225.000.000	20	232.000.000	22	370.000.000	24	290.000.000	Dispopar									
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Jumlah Persetujuan Proyek - Nilai Persetujuan Investasi - Jumlah Realisasi Proyek	28	13	13	1.570.000.000	21.882.376.687,70	18	1.240.000.000	20	1.250.000.000	23	1.332.500.000	25	1.447.500.000	BPMP									
1	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Jumlah PMDN - Jumlah PMA - Total PMA PMDN	5	17	17	405.000.000	25	19	450.000.000	20	480.000.000	22	485.000.000	22	500.000.000	BPMP									
1	16	17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Potensi investasi	11 bidang usaha	-	-	-	25	225.000.000	23	265.000.000	27	270.000.000	25	274.700.000	BPMP										
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlatihnya angkatan kerja di kabupaten Bandung	1000 orang	540 org	540 org	8.537.180.000	640 org	25	5.107.158.800	720 org	12.317.874.680	800 org	12.329.464.053	880 org	12.341.111.373	Disnaker									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terserapnya pengangguran	1.208.920 Orang	1.213.115 Org	2.858.500.000	1.213.507 org	1.641.756.000	1.213.945 org	1.753.828.685	1.214.415 org	1.799.227.747	1.214.970,76 org	1.979.150.522	Disnaker
1	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya lembaga P2K3	16%	50 %	700.000.000	60%	809.812.245	70 %	809.812.245	80 %	890.793.469	90 %	1.022.201.124	Disnaker
				Terdaftaranya Calon Transmigran (KK)	Terwujudnya kesiapan calon transmigran			50 orang	-	50 orang		50 orang		50 orang	Disnaker	
				Terlatihnya Calon Transmigran (KK)	Terwujudnya keterampilan calon transmigran			40 orang		45 orang		50 orang		55 orang	Disnaker	
				Terjajaginya daerah Penerima Transmigrasi (Daerah)	Terlaksananya penajagan daerah penerima transmigran			3 prov		3 prov		3 prov		3 prov	Disnaker	
				Terwujudnya kerjasama antar Daerah (KSAD)	Terlaksananya kerjasama antar daerah			3 prov		3 prov		3 prov		3 prov	Disnaker	
															Disnaker	
				Tertempatkannya Transmigran (KK)	Tertempatkannya calon transmigran			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang	Disnaker	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
Misi 7 : Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan																
2	02	17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Jumlah kecamatan yang dikendalikan dari gangguan hutan	0 kec	5	425.000.000	5	181.000.000	5	192.946.000	5	197.094.339	5	209.722.173	BKP3
2	02	17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Jumlah kecamatan yang dikendalikan dari gangguan hutan				5	64.616.349	5	143.100.000	5	144.531.000	5	345.976.000	Distanbunhut
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah kelompok yang mengembangkan aneka usaha kehutanan	30			12	300.000.000	12	476.000.000	13	528.260.000	13	580.260.000	Distanbunhut
2	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	59.969 Ha	4.415,4	1.826.300.000	4.415,4	1.570.600.000	4.415,4	1.629.360.000	4.415,4	1.688.099.000	4.415,4	1.746.980.000	Distanbunhut
2	03	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah regulasi pertambangan	2	1	1.025.000.000	1	516.466.910	2	602.227.908	2	649.722.707	2	705.404.816	SDAPE
2	03	16	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Total luas penambangan tanpa izin (Ha)	21,75	0,40	1.000.000.000	0,40	511.786.708	0,40	582.540.352	0,40	618.428.115	0,40	664.550.703	SDAPE
2	03	17	Program Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	57,76	4.45	3.615.000.000	4.45	1.568.703.556	4.45	1.738.146.055	4.45	1.811.750.335	4.45	1.918.842.746	SDAPE
1	03	28	Program Pengendalian Banjir	-Berkurangnya Luas genangan di Kecamatan Cileunyi , Margaasih, Margahayu, Katapang, Soreang - pembebasan lahan untuk folder 14 waduk (salah satunya folder cieunteung)	Luas genangan di Kecamatan Cileunyi , Margaasih, Margahayu, Katapang, Soreang 4.098,1 ha	327,848 ha	6.085.507.500	327,848 ha	13.433.994.327	327,848 ha	3.929.251.295	327,848 ha	4.361.326.362	327,848 ha	5.029.035.768	SDAPE
1	03	26	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Berkurangnya lama genangan/pembuatan trase dan tanggul saluran drainase serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya air/adanya dokumen rencana induk irigasi dan drainase	Saluran pembuang ; 74.850 m' (34.800 m' dalam kondisi rusak ringan dan 40.050 m' kondisi rusak berat)		800.000.000	Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 3%	397.260.541	Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 4%	400.260.542	Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 5%	390.714.733	Terlaksananya rehabilitasi dan normalisasi saluran 6%	396.468.418	SDAPE
1	06	15	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dat data dan informasi kebencanaan	tersedianya peta bencana			5 Kec	160.000.000	2 Kec	160.000.000	2 Kec	160.000.000	2 Kec	160.000.000	BPBD
1	06	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Berkurangnya korban bencana di daerah rawan bencana	berkurangnya jumlah korban bencana 50%			5 Kec	240.000.000	3 Kec	240.000.000	3 Kec	240.000.000	3 Kec	240.000.000	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	19	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Berkurangnya korban bencana	berkurangnya jumlah korban bencana 50% dengan melibatkan partyisipasi masyarakat	1 Tim	100.000.000	1 Tim	100.000.000	1 Tim	100.000.000	1 Tim	100.000.000	BPBD		
1	19	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terselenggaranya penanganan darurat pasca bencana	Tersedianya kebutuhan penanggulangan darurat bencana	50 Jiwa	100.000.000	50 Jiwa	100.000.000	50 Jiwa	100.000.000	50 Jiwa	100.000.000	BPBD		
1	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Desa	Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana	Berkurangnya dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana 50 %	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	BPBD		
1	04	18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Berkurangnya dampak kerusakan lingkungan dan rumah akibat bencana	Berkurangnya jumlah kerusakan lingkungan dan rumah akibat bencana	4 Paket	52.989.334	1 paket	133.283.032	3 paket	168.984.472	5 paket	249.323.816	BPBD		
1	04	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 25%	Tingkat cakupan pelayanan kebakaran saat ini sebesar 30 %	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 30%	4.280.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 30%	1.300.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 35 %	1.334.615.370	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 40%	1.350.000.000	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 40%	1.350.000.000	Dispertasih
				Meningkatnya Capaian Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 75%	Tingkat capaian respon time saat ini sebesar 31 %	Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40%		Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40%		Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 50%		Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 70%		Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 75%		Dispertasih
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20% (19 kecamatan)	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 0,6 %	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 0,6%	12.437.152.000	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 2,2%	9.525.000.000	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 5,9%	9.596.701.570	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 8,6%	9.665.000.000	a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 10,2%	10.725.000.000	Dispertasih
				b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 22 %	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 10,46 %	b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 11,36 %		b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 13,26 %		b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 15,16 %		b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 19,06 %		b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 22 %		Dispertasih

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1 08 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Ketersediaan luasan RTH publik seluas 0,1%	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,1% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan sebesar	1.050.000.000	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	725.000.000	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	650.000.000	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	650.000.000	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	650.000.000	Dispersasi
1 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terkendalinya kerusakan tanah akibat produksi bioassa sesuai dengan SPM	Belum dilaksanakannya SPM	60%	425.000.000	80%	352.000.000	100%	445.000.000		455.000.000		480.000.000	BPLH
		Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumberair	Masih kurangnya daera konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air	Meningkatnya jml penerapan teknologi lubang reaspan biopori										BPLH
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Masih rendahnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem oleh masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data keanekaragaman hayati										BPLH
1 08 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya pengembangan data dan informasi lingkungan	Masih rendahnya data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2011	200.000.000	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2012	110.000.000	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2013	110.000.000	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2014	110.000.000	Tersedianya buku SLHD dan basis data tahun 2015	115.000.000	BPLH
1 08 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya pengetahuan dan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan oleh pelaku kegiatan usaha	Masih tingginya tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	1.600.000.000	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	436.000.000	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	470.000.000	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	485.000.000	6 kali pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi	503.000.000	BPLH
		Meningkatnya kapasitas laboratorium pengujian kualitas udara dan air	Masih rendahnya ketersediaan data hasil pengujian kualitas udara dan air	40%		50%		60%		70%		100%		BPLH
		Penerapan manajemen lingkungan menuju green laboratorium dan GLP sesuai dengan standar	Penerapan manajemen lingkungan menuju green laboratorium dan GLP sesuai dengan standar	20%		40%		60%		80%		100%		BPLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Belum tersedianya IPAL, RPH, pilot project IPAL domestik serta pembangunan instalasi pengontrol air limbah	tersedianya IPAL, RPH, pilot project IPAL domestik serta pembangunan instalasi pengontrol air limbah			Pembangunan IPAL RPH		Pembangunan Pilot Projek IPAL Domestik		Pembebasan lahan untuk pemb. Instalasi pengontrol ari limbah		Pengembangan instalasi pengontrol air limbah		BPLH
1 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Meningkatnya kebersihan dan penghijauan lingkungan	Terbatasnya lingkungan yang bersih, hijau dan bebas polusi	Menaikan nilai dan/atau Adipura	1.700.000.000	Menaikkan nilai dan atau Adipura	863.000.000	Menaikkan nilai dan atau Adipura	751.000.000	Menaikkan nilai dan atau Adipura	778.000.000	Menaikkan nilai dan atau Adipura	848.000.000	BPLH
		Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada masyarakat	Masih rendahnya pengelolaan lingkungan masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat		Meningkatnya peran serta masyarakat		Meningkatnya peran serta masyarakat		Meningkatnya peran serta masyarakat		Meningkatnya peran serta masyarakat		BPLH
		Meningkatnya kualitas lingkungan sesuai dengan SPM pada kegiatan industri, jasa dan pertanian	Terbatasnya cakupan pemantauan lingkungan (60%)											BPLH
		Tersedianya kebijakan bidang lingkungan dan dokumen lingkungan	Belu adanya KLHS, kajian instalasi pengontrol air limbah dan kajian studi aspek manajemen IPAL terpadu cisirung	1 Dok KLHS		- 1 Dok Pra PS intalasi pengontrol air limbah - 1 dok kajian aspek manajemen IPAL terpadu Cisirung		1 do FS dan DED instalasi pengontrol air limbah						BPLH
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang wajib AMDAL dan UPL-UKL	Cakupan kegiatan monitoring evaluasi sebesar 15%	60 keg dgn 20%		100 keg dgn 23%		100 keg dgn 29%		100 keg dgn 29%		100 keg dgn 30%		BPLH
		Terevaluasinya pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan kebijakan lingkungan hidup											BPLH
TOTAL						602.434.634.040		480.374.571.981		525.258.121.004		528.675.452.180		531.630.528.572



BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung, berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

8.1. Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015

Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi;
2. Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional;
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
4. Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial;
5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;
7. Pengembangan produk unggulan;
8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan;
9. Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan;
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
11. Pemantapan kemandirian pangan.

Rencana program prioritas kepala daerah periode tahun 2010 – 2015 yang merupakan program prioritas kepala daerah terpilih, sudah menjadi bagian dari rencana program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung, berikut Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahun 2010-2015 yaitu :

1. Strategi peningkatan pendapatan pertanian melalui : Produk pertanian organik, Konservasi berbasis ekonomi, Rumah kemasan, Pengembangan agribisnis potensi lokal, Pembenahan bumdes pertanian, Restoran organik.
2. Pengembangan pasar tradisional melalui : pembenahan tempat dan kelengkapan jenis jualan.
3. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui : relokasi, penetapan waktu jual dan penataan kios.
4. Pengelolaan sampah melalui : pembenahan TPS, penyiapan TPA alternatif dan pengolahan sampah (organik dan anorganik)
5. Pembuatan air minum mineral
6. Penanggulangan akibat banjir melalui Peninggian bangunan rumah, pembuatan danau dan sumur resapan, dan pembentukan tim siaga bencana.
7. Perbaikan infra struktur jalan melalui penutupan dengan sirtu, perbaikan permanen Apbd/Apbn dan pembangunan tol seroja.
8. Peningkatan derajat kesehatan melalui Revitalisasi posyandu, perbaikan fasilitas puskesmas setara RS dan penerapan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
9. Penataan taman kota/kecamatan/desa/kelurahan
10. Pemberdayaan aparatur pejabat tiap tingkatan
11. Wisata terpadu
12. Perbaikan rumah kumuh



8.2 Rencana Program Urusan Setiap SKPD

Bahwa dalam rangka menunjang program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015, yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, maka pelaksanaan program tersebut, harus ditunjang oleh anggaran program operasional dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Program urusan SKPD.

Pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, alokasi anggaran program urusan setiap SKPD dari Tahun 2011-2015 sebesar Rp 502.098.831.548, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BL Urusan SKPD	105,659,429,708	99,109,850,460.00	99,109,850,460.00	99,109,850,460.00	99,109,850,460.00

Sedangkan untuk indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 berdasarkan Misi, dapat di lihat pada tabel berikut:



BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH

Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraannya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Dari aspek tersebut diperoleh data primer dari kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah serta hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya. Dengan hal tersebut maka untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 dapat dicapai, sebagaimana disajikan pada tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Daerah Tahun
2011 – 2015

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)					
	1.1.1.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung					
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	3.993.539,25*	4.573.849,43*	5.075.522,04 - 5.339.605,61*	5.840.402,92 - 6.293.537,06*	6.524.852,94 - 7.212.049,89*
2	Pertambangan dan Pengalihan/ <i>Mining and Quarrying</i>	631.369,32*	693.007,49*	730.472,15 - 768.335,03*	736.769,33 - 872.300,10*	730.472,15 - 977.633,43*
3	Industry Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	30.156.867,71*	33.934.266,70*	36.196.154,68 - 38.048.725,32*	35.238.984,27 - 41.884.822,84*	34.590.375,38 - 41.625.295,53*
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Supply</i>	811.027,25*	877.809,49*	968.489,53 - 1.064.222,36*	1.009.272,84 - 1.108.302,58*	987.645,56 - 1.089.411,06*
5	Bangunan/Konstruksi/ <i>Construction</i>	862.358,09*	964.435,42 *	1.064.222,36 - 1.116.991,26*	1.108.302,58 - 1.319.263,78*	1.089.411,06 - 1.319.263,78*
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and Restaurant</i>	8.993.162,93*	10.158.334,77*	11.158.591,87 11.731.636,50*	11.681.257,30 13.884.710,63*	11.952.035,77 12.880.910,74*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport and Communication</i>	2.109.697,47 *	2.292.699,78 *	2.380.331,68 - 2.505.159,58*	2.197.713,64 - 2.609.691,20*	2.134.741,90 - 2.573.645,74*
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	990.685,19*	949.620,52*	1.120.896,93 - 1.181.557,23*	1.039.033,67 - 1.232.754,68*	1.001.250,63 - 1.203.918,32*
9	Jasa-jasa/ <i>Services</i>	2.787.264,54*	3.187.834,45*	3.532.714,47 - 3.712.543,20*	3.646.063,60 - 4.332.664,12*	3.683.846,64 - 4.433.591,40*
10	Total	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44 - 64.565.968,64*	69.445.932,42 - 72.090.917,10*	76.224.917,51 - 80.133.887,64*
	1.1.1.3 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 sampai dengan 2010 atas Dasar Harga Berlaku (HB) Kabupaten Bandung					
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	7,78*	7,92*	8,06 – 8,27*	8,41-8,73*	8,56 – 9,00*
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,23*	1,20*	1,16 – 1,19*	1,17 – 1,21*	1,16 – 1,22*
3	Industry Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	58,75*	58,76*	57,48 – 58,93*	55,96 – 58,10*	54,93 – 57,74*
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Supply</i>	1,58*	1,52*	1,46 – 1,50*	1,35 – 1,40*	1,31 – 1,37*
5	Bangunan/Konstruksi/ <i>Construction</i>	1,68*	1,67*	1,69 – 1,73*	1,76 – 1,83*	1,73 – 1,83*
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and Restaurant</i>	17,52*	17,59*	17,72 – 18,17*	18,55 – 19,26*	18,98 – 19,95*
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ <i>Transport and Communication</i>	4,11*	3,97*	3,78 – 3,88*	3,49 – 3,62*	3,39 – 3,57*
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	1,93*	1,85*	1,78 – 1,83*	1,65 – 1,71*	1,59 – 1,67*
9	Jasa-jasa/ <i>Services</i>	5,43*	5,52*	5,61 – 5,75*	5,79 – 6,01*	5,85 – 6,15*
10	Total	100	100	100 - 100	100 - 100	100 -100
	1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Inflasi					
1	Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	17.691.973	20.203.549	22.715.126	25.226.703	27.738.280
2	Laju Inflasi	6,19%*	6,01%*	DTT	DTT	DTT
	1.1.3 Indikator Makro					
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988*	3.387.035*	3.476.781,82*	3.569.327,00*	3.664.771,42*
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,63%*	2,64%	2,62% - 2,68%*	2,61% - 2,71%*	2,61% - 2,74%*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,91% *	5,50% *	4,65 - 5,70% *	5,32 - 6,65% *	5,11 - 6,43% *
4	Inflasi PDRB	6,19	6,01	DTT	DTT	DTT
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	51.330.838 *	57.750.624 *	62.971.737 - 64.565.968 *	69.445.932 - 72.090.917 *	76.224.917 - 80.133.887 *
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah)	22.996.750,31*	24.253.225,98*	24.021.908	24.894.885	20.843.252
7	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	184.638	184.212	183.786	183.360	183.260
8	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	7,43%*	7,55%*	8,46% - 9,55%*	10,93% - 12,33%*	8,01% - 9,37%*
9	Pendapatan Perkapita pertahun (Rp)	17.691.973	20.203.549	22.715.126	25.226.703	27.738.280
10	PM	75,03 *	75,66 *	76,42 *	75,45 - 78,34 *	77,23 *
11	Indeks Pendidikan	86,01 *	86,23 *	85,35 - 87,51 *	85,00 - 88,25 *	84,64 - 88,98 *
12	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	9,15 *	9,21 *	9,15 - 9,38 *	9,14 - 9,49 *	9,13 - 9,60 *
13	Angka Melek Huruf (%)	98,53% *	98,65% *	97,53% - 100%*	97,03% - 100%*	96,53 - 100%*
14	Angka Harapan Hidup (thn)	70,06 *	70,27 *	69,58 - 71,34 *	69,31 - 71,96 *	69,02 - 72,56 *
15	Indeks AHH	75,11 *	75,45 *	74,82 - 76,71 *	74,63 - 77,48 *	74,41 - 78,23 *
16	Indeks Daya Beli	63,97 *	65,30 *	65,82 - 67,48 *	66,73 - 69,28 *	67,65 - 71,12 *
17	Daya Beli (ribuan rupiah)	576,80 *	582,57 *	581,05 - 595,76 *	583,15 - 605,43 *	585,23 - 615,24*
	I.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat					
	I.2.1 Perkembangan Angka Melek Huruf					
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	2.274.467	2.371.027	2.467.586	2.564.146	2.660.706
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	2.308.129	2.478.174	2.547.864	2.617.554	2.687.244
3	Angka Melek Huruf (%)	98,53% *	98,65% *	97,53% - 100%*	97,03% - 100%*	96,53 - 100%*
4	Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	9,15 *	9,21 *	9,15 - 9,38 *	9,14 - 9,49*	9,13 - 9,60 *
5	Angka Partisipasi Murni SD	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
6	Angka Partisipasi Murni SMP	81,42	81,71	82,08	82,53	83,06
7	Angka Partisipasi Murni SMA	41,60	41,75	41,94	42,25	42,65
8	Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi	8,12	9,08	10,04	11	11,96
9	Angka Partisipasi Kasar SD	104,35	104,37	104,42	104,49	104,58

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Angka Partisipasi Kasar SMP	91,57	91,58	91,59	91,60	91,61
11	Angka Partisipasi Kasar SMA	54,15	54,36	54,69	55,13	55,68
12	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	9,16	9,17	9,17	9,17	9,18
1.2.2 Kondisi Ketenagakerjaan						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	53,05	53,58	54,11	54,65	55,20
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki	77,85	78,63	79,42	80,21	81,02
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	28,01	28,29	28,57	28,86	29,15
4	Kesempatan Kerja	89,25	90,14	91,04	91,95	92,87
5	Kesempatan Kerja laki-laki	91,19	92,10	93,02	93,95	94,89
6	Kesempatan Kerja Perempuan	83,79	84,63	85,48	86,33	87,19
7	Pengangguran (jiwa)	133.796 *	137.241 *	139.030 s/d 142.550 *	141.738 s/d 147.154 *	144.508 s/d 151.918 *
8	Pengangguran laki-laki	10,50	10,39	10,28	10,17	10,06
9	Pengangguran Perempuan	17,68	17,5	17,32	17,14	16,96
1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
1.3.1 Perkembangan Seni, budaya dan olah raga						
1	Jumlah grup Kesenian	1.193	1.388	1.583	1.778	1.973
2	Jumlah gedung Kesenian	1	2	2	2	3
3	Jumlah klub Olah raga per 10.000 penduduk	7,98	9,99	12	14,01	16,02
4	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	1,342	1,413	1,484	1,555	1,626
B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
II.1 Fokus Layanan Urusan Wajib						
II.1.1 Pendidikan						
II.1.1.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
1	Jumlah murid usia 7-12 thn SD/MI	402.671	402.792	402.993	403.276	403.639

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	423.495	444.358	465.222	486.085	506.949
3	APS SD/MI (%)	99,67	99,77	99,87	99,97	99,98
4	jumlah murid usia 13-15 thn SMP/MTs	155.215	155.836	156.459	157.085	157.714
5	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	208.411	226	244	262	279.916
6	APS SMP/MTs	92,13	93,05	93,98	94,92	95,87
7	jumlah murid usia 16-18 thn SMA/MA/SMK	72.610	74.788	77.032	79.343	80.929
8	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun SMA/MA/SMK	180.193	188.835	197.476	206.118	214.759
9	APS SMA/MA/SMK (%)	43,5	45,6	48,0	50,6	53,4
II.1.1.2 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah						
1	Jumlah sekolah SD/MI	1.551	1.554	1.557	1.563	1.569
2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun SD/MI	423.495	444.358	465.222	486.085	506.949
3	Rasio SD/MI	1 : 273	1 : 286	1 : 298	1 : 311	1 : 323
4	Jumlah sekolah SMP/MTs	473	475	506	538	570
5	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun SMP/MTs	208.411	226.000	244.000	262.000	279.916
6	Rasio SMP/MTs	1 : 440	1 : 476	1 : 482	1 : 487	1 : 491
7	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK	268	286	304	322	340
8	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun SMA/MA/SMK	180.193	188.835	197.476	206.118	214.759
9	Rasio SMA/MA/SMK	1 : 672	1 : 660	1 : 650	1 : 640	1 : 632
II.1.1.3 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan jenjang Pendidikan						
1	Jumlah Guru (SD/MI)	17.292	18.648	20.003	21.358	22.715
2	Jumlah Murid (SD/MI)	428.326	436.752	445.179	453.605	462.031
3	Rasio (SD/MI)	1:25	1:23	1:22	1:21	1:20
4	Jumlah Guru (SMP/MTs)	10.553	11.103	11.652	12.202	12.752
5	Jumlah Murid (SMP/MTs)	212.136	233.349	256.683	282.352	310.587

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Rasio (SMP/MTs)	1:20	1:21	1:22	1:23	1:24
7	Jumlah Guru (SMA/MA)	7.678	8.385	9.093	9.800	10.508
8	Jumlah Murid (SMA/MA)	111.485	125.859	140.851	156.604	173.067
9	Rasio (SMA/MA)	1:14,52	1:15,01	1:15,49	1:15,98	1:16,47
	II.1.1.4 Rasio guru per kelas rata-rata					
1	Jumlah Guru SD/MI	17.292	17.803	18.473	19.143	22.715
2	Jumlah Kelas SD/MI	11.549	11.625	11.700	11.775	11.853
3	Jumlah Guru per Kelas SD/MI	1:1,5	1:1,6	1:1,7	1:1,8	1:1,9
4	Jumlah Murid SD/MI	428.326	436.752	445.179	453.605	462.031
5	Rasio SD/MI	1:37	1:38	1:38	1:39	1:39
6	Jumlah Guru SMP/MTs	10.553	11.103	11.652	12.202	12.752
7	Jumlah Kelas SMP/MTs	4.047	4.331	4.615	4.899	5.183
8	Jumlah Guru per Kelas SMP/MTs	1 : 2,6	1 : 2,6	1 : 2,5	1 : 2,5	1 : 2,5
9	Jumlah Murid SMP/MTs	212.136	233.349	256.683	282.352	310.581
10	Rasio SMP/MTs	1 : 52	1 : 54	1 : 56	1 : 58	1 : 60
11	Jumlah Guru SMA/MA	7.678	8.385	9.093	9.800	10.508
12	Jumlah Kelas SMA/MA	2.479	2.865	3.252	3.638	4.024
13	Jumlah Guru per Kelas SMA/MA	1 : 3,1	1 : 2,9	1 : 2,8	1 : 2,7	1 : 2,6
14	Jumlah Murid SMA/MA	111.485	125.859	140.851	156.604	173.067
15	Rasio SMA/MA	1:45	1:44	1:43	1:43	1:43
	II.1.1.5 Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan					
1	Jumlah ruang kelas kondisi baik SD/MI	5.697	5.889	6.080	6.272	6.464
2	Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI	9.478	9.511	9.543	9.576	9.608
3	Persentase SD/MI	60,11	61,91	63,71	65,50	67,28
4	Jumlah ruang kelas kondisi baik SMP/MTs	3.474	3.816	4.158	4.500	4.842
5	Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs	4.783	5.226	5.669	6.111	6.554
6	Persentase SMP/MTs	73,247	74,114	74,981	75,848	76,715
7	Jumlah ruang kelas kondisi baik SMA/MA	1.512	1.570	1.627,4	1.685	1.743
8	Jumlah seluruh ruang kelas SMA/MA	2.137	2.259	2.382	2.505	2.628
9	Persentase SMA/MA (%)	69,696	67,677	65,658	63,639	61,62

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.1.6 Persentase Siswa Jenjang					
1	Jumlah Siswa TK/RA	50.918	58.021	65.123	72.226	79.328
2	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	216.192	218.807	221.421	224.036	226.650
3	Persentase (%)	21,32	22,33	23,33	24,34	25,34
	II.1.1.7 Jumlah Siswa Putus Sekolah					
1	Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	283	280	278	276	274
2	Jumlah seluruh Siswa SD/MI	428.326	436.752	445.179	453.605	462.031
3	Angka Putus Sekolah (Persentase) SD/MI	0,066	0,064	0,062	0,061	0,059
4	Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	770	696	622	548	475
5	Jumlah seluruh Siswa SMP/MTs	212.136	233.349	256.683	282.352	310.581
6	Angka Putus Sekolah (Persentase) SMP/MTs	0,36	0,30	0,24	0,19	0,15
7	Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/MA	387	383	379	375	371
8	Jumlah seluruh Siswa SMA/MA	111.485	125.859	140.851	156.604	173.067
9	Angka Putus Sekolah (Persentase) SMA/MA	0,35	0,30	0,27	0,24	0,21
	II.1.1.8 Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan					
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah SD/MI	56.286	56.680	57.075	57.469	57.863
2	Jumlah seluruh Siswa Kelas VI SD/MI	57.577	57.913	58.249	58.585	58.921
3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase) SD/MI	97,76	97,87	97,98	98,10	98,20
4	Jumlah Siswa Lulus Sekolah SMP/MTs	49.525	53.198	56.871	60.544	64.218
5	Jumlah seluruh Siswa Kelas III SMP/MTs	51.345	54.640	57.936	61.231	64.526
6	Angka Kelulusan Siswa (Persentase) SMP/MTs	96,45	97,36	98,16	98,88	99,52
7	Jumlah Siswa Lulus Sekolah SMA/MA	19.869	21.326	22.521	24.867	21.933
8	Jumlah seluruh Siswa Kelas III SMA/MA	22.792	24.083	25.374	26.665	27.957
9	Angka Kelulusan Siswa (Persentase) SMA/MA	87,17	88,55	88,75	93,25	78,45

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.1.9 Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan					
1	Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan Sekolah ke SMP/MTs.	53.867	54.333	54.799	55.265	55.731
2	Jumlah Siswa SD/MI Lulus Sekolah	56.286	56.680	57.075	57.469	57.863
3	Persentase	95,807	96,009	96,211	96,413	96,615
4	Jumlah Siswa SMP/MTs Melanjutkan Sekolah ke SMA/SMK/MA	31.702	35.121	36.861	39.440	42.020
5	Jumlah Siswa SMP/MTs Lulus Sekolah	49.525	54.232	56.871	60.544	64.218
6	Persentase	64,01	64,76	64,81	65,14	65,43
	II.1.1.10 Jumlah Guru Berpendidikan >= S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan					
1	Jumlah Guru SD/MI Berpendidikan >= S1 berdasarkan Jenjang Pendidikan	8.776	10.024	11.272	12.520	13.768
2	Jumlah total guru SD/MI	17.292	18.648	20.003	21.358	22.715
3	Persentase	50,75	53,75	56,35	58,62	60,61
4	Jumlah Guru SMP/MTs Berpendidikan >= S1	8.968	9.621	10.274	10.927	11.581
5	Jumlah total guru SMP/MTs	10.553	11.103	11.652	12.202	12.752
6	Persentase	84,98	86,65	88,17	89,55	90,82
7	Jumlah Guru SMA/MA Berpendidikan >= S1	7.198	7.778	8.359	8.939	9.519
8	Jumlah total guru SMA/MA	7.678	8.385	9.093	9.800	10.508
9	Persentase	93,75	92,76	91,93	91,21	90,59
	II.1.2 Kesehatan					
	II.1.2.1 Jumlah Posyandu dan Balita					
1.	Jumlah posyandu	4.187	4.324	4.461	4.598	4.736
2.	Jumlah balita	283.372	283.121	282.870	282.619	282.368
3.	Rasio	1 : 68	1 : 66	1 : 63	1 : 62	1 : 60
	II.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu					
1	Jumlah Puskesmas	63	64	65	66	67
2	Jumlah Poliklinik	329	335	340	345	350

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Jumlah Pustu	70	71	71	72	73
4	Jumlah 1 s/d 3	462	469	476	483	490
5	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
6	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 52.380	1 : 52.922	1 : 53.488	1 : 54.080	1 : 54.698
7	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	1 : 10.030	1 : 10.110	1 : 10.225	1 : 10.345	1 : 73.295
8	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 47.142	1 : 47.704	1 : 48.968	1 : 49.573	1 : 50.202
9	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
10	Jumlah Desa/kelurahan	276	276	276	276	276
11	Rasio Puskesmas per Kecamatan	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
II.1.2.3 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk						
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	3	4	4	4	4
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	5	5	5	5	5
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	9	10	10	10	10
5.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
6.	Rasio	1 : 366.655	1 : 338.703	1 : 347.678	1 : 356.933	1 : 366.477
II.1.2.4 Jumlah Dokter						
1.	Jumlah Dokter	393	442	490	539	587
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
3.	Rasio	1 : 8.397	1 : 7.663	1 : 7.095	1 : 6.222	1 : 6.243
II.1.2.5 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan						
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	57.807	60.852	63.896	66.940	69.985
2.	Jumlah Total Ibu Bersalin	69.977	73.162	76.346	79.531	82.716
3.	Persentase	82,61	83,18	83,70	84,17	84,61
II.1.2.6 Persentase Balita Gizi Baik						
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	248.689	252.016	255.343	258.670	261.997
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	1.715	1.569	1.424	1.278	1133
3.	Jumlah Balita seluruhnya	250.403	253.585	256.767	259.948	263.130

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Persentase Gizi Baik	99,32	99,38	99,45	99,51	99,57
5	Persentase Gizi Buruk	0,69	0,62	0,56	0,50	0,43
II.1.3 Pekerjaan Umum						
II.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan						
1	Kondisi Baik	424,891	494,212	563,533	632,854	702,175
2	Kondisi Sedang Rusak	217,86	200,530	183,199	165,869	148,539
3	Kondisi Rusak	290,121	261,238	232,354	203,470	174,586
4	Kondisi Rusak Berat	222,473	199,366	176,259	153,152	130,045
5	Jalan secara keseluruhan	1.155,35	1.155,35	1.155,35	1.155,35	1.155,35
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	34,78	42,78	48,78	54,78	60,78
7	Proporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	18,86	17,36	15,86	14,36	12,86
8	Proporsi Kondisi Rusak (%)	25,11	22,61	20,11	17,61	15,11
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	19,26	17,26	15,26	13,26	11,26
II.1.3.1 Rasio Jaringan Irigasi						
1.	Jaringan primer	77,76	77,76	77,76	77,76	77,76
2.	Jaringan Sekunder	136	136	136	136	136
3.	Jaringan Tersier	831,04	831,04	831,04	831,04	831,04
4.	Total Jaringan Irigasi	1.044,81	1.044,81	1.044,81	1.044,81	1.044,81
5.	Luas lahan budidaya	41.102,79	42.972,67	44.842,54	46.712,42	48.582,29
6.	Rasio	1:39	1:41	1:43	1:45	1:47
II.1.4. Perumahan Rakyat						
II.1.4.1 Persentase Luas Permukiman yang Tertata						
1.	Luas area permukiman tertata	12.813,96	12.813,96	12.813,96	12.813,96	12.813,96
2.	Total luas area permukiman	14.297,3	14.297,3	14.297,3	14.297,3	14.297,3
3.	Persentase luas permukiman yang tertata	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63
II.1.4.2 Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni						
1.	Luas permukiman layak huni	70,718	70,718	70,718	71,718	72,718

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Luas wilayah permukiman	1.4297,33	1.4297,34	1.4297,35	1.4297,36	1.4597,37
3.	Rasio permukiman layak huni	1 : 0,49	1 : 0,50	1 : 0,50	1 : 0,50	1 : 0,50
4.	Jumlah rumah layak huni	707.351,00	707.351,01	707.351,02	707.351,03	707.351,04
5.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
6.	Rasio rumah layak huni	1 : 21,4350	1 : 20,8841	1 : 20,3450	1 : 19,8175	1 : 19,3014
	II.1.4.3 Jumlah Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih					
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	893.616	942.244	990.873	1.039.502	1.088.131
2.	Jumlah penduduk sasaran	957.188	999.082	1.040.977	1.082.871	1.124.766
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	93,753	95,071	96,389	97,707	99,025
	II.1.4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar)					
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	960.191	1.010.452	1.060.713	1.110.974	1.161.235
2.	Jumlah rumah tinggal	957.188	999.082	1.040.977	1.082.871	1.124.766
3.	Persentase	100,804	101,983	103,162	104,341	105,52
	II.1.4.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum					
1	Jumlah Tempat pemakaman umum (TPU)	128	138	148	158	168
2	Luas Tempat pemakaman umum (TPU)	291.310	291.309	311.309	321.309	331.309
3	Daya Tampung Tempat pemakaman umum (TPU)	50.549	50.550	54.447	56.196	57.945
4	Jumlah Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	9	9	9	9	9
5	Luas Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	328.627	328.627	328.627	328.627	328.627
6	Daya Tampung Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	57.509,73	57.509,73	57.509,73	57.509,73	57.509,73
7	Jumlah Tempat Pemakaman	217	267	317	367	417
8	Jumlah Luas Tempat Pemakaman	707.839	762.658	817.477	872.296	927.115

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman	123.871,84	133.465,17	143.058,50	152.651,83	162.245,16
10	Jumlah penduduk (jiwa)	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
11	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	21.47	23.67	25.87	28.07	30.27
	II.1.4.6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran					
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	7	10	12	14	16
2.	Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
3.	Luas Wilayah Kab. Bandung	1762.39 km ²	1762.39 km ²	1762.39 km ²	1762.39 km ²	1762.39 km ²
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran	165	165	155	155	150
5	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran	30,06%	40,09%	50,11%	60,13%	70,15%
6	Rasio mobil damkar thd luas kab bandung (km2)	1 : 25,177	1 : 22,030	1 : 19,582	1 : 17,624	1 : 16,022
7	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wil. Manajemen Kebakaran	37%	45%	50%	60%	70%
	II.1.5. Penataan Ruang					
	II.1.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah					
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	46.187,94	46.187,94	46.187,94	46.187,94	46.187,94
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB					
3.	Luas wilayah	176.793,46	176.793,46	176.793,46	176.793,46	176.793,46
	II.1.5.2 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan					
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
2.	Jumlah Bangunan	1.351.009	1.594.191	1.881.145	2.219.751	2.619.306
3.	Persentase bangunan ber-IMB	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15
	II.1.6. Perencanaan Pembangunan					
	II.1.6.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan					
1.	Keberadaan Dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	√	√	√	√	√
2.	Keberadaan Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	√	√	√	√	√

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Keberadaan Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	√	√	√	√	√
	II.1.7. Perhubungan					
	II.1.7.1 Rasio Ijin Trayek					
1.	Izin Trayek perkotaan	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
2.	Izin Trayek perdesaan	260	260	260	260	260
3.	Jumlah Izin Trayek	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
4.	Jumlah penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
5.	Rasio Izin Trayek	1 : 1.374	1 : 1.411	1 : 1.448	1 : 1.487	1 : 1.526
	II.1.7.2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum diKabupaten Bandung					
1	Jml Mobil penumpang umum	5.937	6.430	6.923	7.416	7.909
2	Jml KIR Mobil penumpang umum	2.000	2.500	3.000	3.500	4.486
3	% Mobil penumpang umum	33,69	38,88	43,33	47,19	56,72
4	Jml Mobil bus	414	495	576	657	738
5	Jml KIR Mobil bus	140	149	158	167	176
6	% Mobil bus	38,82	30,10	27,43	25,42	23,85
7	Jml Mobil barang	16.605	18.205	19.805	21.405	23.005
8	Jml KIR Mobil barang	15.511	17.031	18.552	20.073	21.594
9	% Mobil barang	93,41	93,55	93,67	93,78	93,87
10	Jml Kereta gandengan	13	15	16	18	19
11	Jml KIR Kereta gandengan	0	0	0	0	0
12	% Kereta gandengan	0	0	0	0	0
13	Jml Kereta tempelan	27	32	37	43	48
14	Jml KIR Kereta tempelan	27	32	37	43	48
15	% Kereta tempelan	100	100	100	100	100
16	Jumlah	22.996	25.177	27.357	29.539	31.719
17	Jumlah KIR	17.678	19.712	21.747	23.783	26.304
18	%	76,87	78,29	79,49	80,51	82,93
	II.1.7.3 Persentase Pemasangan Rambu- rambu Lalu Lintas					
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	168	176	184	192	200

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3.	Persentase	1,35	1,42	1,48	1,55	1,61
II.1.8. Lingkungan Hidup						
II.1.8.1 Persentase Volume Sampah Yang Tertangani						
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani	637	714	791	868	945
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan	5.459	4.871	4.282	3.693	3.105
3.	Persentase	11,67	14,66	18,47	23,50	30,44
II.1.8.2 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk						
1.	Jumlah TPSS (*)	42	43	44	45	46
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	246	246	246	250	250
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0040	0,0043	0,0045	0,0048	0,0050
II.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil						
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,63 *`	2,64 *	2,62 - 2,68 *	2,61 - 2,71 *	2,61 - 2,74 *
II.1.10.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur						
1	Laki-laki :					
2	Muda (0-14)	470.683	473.611	476.539	479.467	482.395
3	Produktif (15-64)	1.120.748	1.151.057	1.181.366	1.211.676	1.241.985
4	Tua (65+)	79.203	82.066	84.930	87.793	90.657
5	Perempuan :					
6	Muda (0-14)	473.305	481.386	489.467	497.548	505.629
7	Produktif (15-64)	1.133.026	1.167.507	1.201.988	1.236.469	1.270.951
8	Tua (65+)	64.011	62.547	61.082	59.618	58.153
9	Jumlah	3.340.975	3.418.174	3.495.372	3.572.571	3.649.769
II.1.10.2 Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki)						

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laki-laki:					
a.	Tdk/blm punya Ijazah	215.804	232.688	249.572	266.456	283.340
b.	SD / setara SD	467.374	479.624	491.873	504.123	516.372
c.	SLTP / setara SLTP	227.502	178.740	129.978	81.216	32.454
d.	SLTA / setara SLTA	312.336	319.677	327.017	334.358	341.698
e.	Perguruan tinggi	47.314	40.258	33.201	26.145	19.088
2.	Perempuan:					
a.	Tdk/blm punya Ijazah	238.432	250.905	263.377	275.850	288.322
b.	SD / setara SD	498.831	507.131	515.431	523.731	532.031
c.	SLTP / setara SLTP	346.254	354.811	363.367	371.924	380.480
d.	SLTA / setara SLTA	238.953	247.031	255.108	263.186	271.263
e.	Perguruan tinggi	51.250	51.590	51.930	52.270	52.610
3	Jumlah penduduk 1 dan 2	2.644.050	2.662.452	2.680.854	2.699.256	2.717.658
	II.1.10.3 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah					
1	Sudah Memiliki KTP	2.382.506	2.501.632	2.626.713	2.758.049	2.895.952
2	Belum Memiliki KTP	200.000	162.053	124.105	86.158	48.210
3	Sudah Memiliki KK	710.000	725.962	741.924	757.886	773.848
4	Belum Memiliki KK	200.000	178.835	157.670	136.505	115.340
5	Sudah Memiliki Akte Kelahiran	2.673.623	2.735.697	2.797.772	2.859.846	2.921.921
6	Belum Memiliki Akte Kelahiran	620.000	587.113	554.226	521.339	488.452
	II.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	II.1.11.1 Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah					
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	11.223	11.393	11.563	11.733	11.385
2.	Jumlah total pekerja perempuan	608.555	615.665	622.775	629.885	636.995
3.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,844	1,851	1,857	1,863	1,787
	II.1.11.2 Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Swasta					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Swasta	11.223	11.393	11.563	11.733	11.903
2.	Jumlah total pekerja perempuan	608.555	615.665	622.775	629.885	636.995
3.	Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	1,844	1,851	1,857	1,863	1,869
II.1.11.3 Rasio KDRT						
	sudah memiliki akte nikah non muslim	6.504	6.896	7.288	7.680	8.072
	Belum Memiliki Akte Nikah non muslim	360	340	320	300	280
	keluarga fakir miskin	40	40	40	40	40
	wanita rawan sosial ekonomi	40	40	40	40	40
	lanjut usia terlantar	90	90	90	90	90
	anak terlantar	40	40	40	40	40
	anak nakal	30	30	30	30	30
	korban penyalahgunaan NAPZA	49	55	61	67	73
	wanita tunasusila	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	KDRT	70	70	70	70	70
	PSM	93	93	93	93	93
	KT	93	93	93	93	93
	Orsos	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
	Panti	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
1.	Jumlah KDRT	28,5	33	37,5	42	46,5
2.	Jumlah Rumah Tangga	957.188	999.082	1.040.977	1.082.871	1.124.766
3.	Rasio KDRT	0,002857	0,003474	0,004091	0,004708	0,005325
II.1.12. keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
II.1.12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga						
1	Jumlah anak	2.012.493	2.069.297	2.149.954	2.212.782	2.012.494
2	Jumlah keluarga	957,1875	999,082	1040,9765	1082,871	1124,7655
II.1.12.2 Rasio akseptor KB						
1	Jumlah PUS	669,016	751,992	796,696	813,124	814,406

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	527,578	594,770	635,325	652,575	659,651
3	Jumlah Tidak Ber-KB	141,438	157,222	161,371	160,549	154,755
4	Rasio Akseptor KB	78,86	79,09	79,74	80,26	81,00
II.1.13. Sosial						
1	Mesjid	6.084	6.911	7.738	8.565	9.392
2	Jumlah pemeluk Islam	2.818.811	2.818.812	2.818.812	2.818.813	2.818.813
3	Rasio	1 : 463	1 : 408	1 : 364	1 : 329	1 : 300
4	Gereja	38	47	56	65	74
5	Jumlah pemeluk Kristen	37,248		37,248		37,248
6	Rasio	1 : 980		1 : 665		1 : 503
7	Pura	1	-	1	-	1
8	Jumlah pemeluk Hindu	2,472		2,472		2,472
9	Rasio	1 : 2.472		1 : 2.472		1 : 2.472
10	Vihara	1	1	1	1	1
11	Jumlah pemeluk Budha	1,483		1,483		1,483
12	Rasio	1 : 1.483		1 : 1.483		1 : 1.483
II.1.14. Ketenagakerjaan						
II.1.14.1 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja						
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	181.424	173.947	166.470	158.993	151.517
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	566	596	625	574	655
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1 : 321	1 : 292	1 : 266	1 : 277	1 : 231
II.1.14.2 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Laki-laki						
1	Angkatan Kerja Bekerja	703.620	745.849	788.078	830.307	872.536
2	Angkatan Kerja Pengangguran	81.985	69.170	56.355	43.540	30.725
3	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	785.605	815.019	844.433	873.847	903.261
4	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah)	126.556	134.834	143.112	151.390	159.668
5	Bukan Angkatan Kerja (Mengurus RT)	101.842	107.199	112.556	117.913	123.270
6	Bukan Angkatan Kerja Lainnya	237.347	223.935	210.523	197.111	183.699

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	74.450	82.642	90.835	99.027	107.220
8	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	860.055	897.661	935.268	972.874	1.010.481
9	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	60,7	60,86	61,02	61,18	61,34
10	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	11,15	9,11	7,07	5,03	2,99
	II.1.14.3. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Perempuan					
1	Angkatan Kerja Bekerja	652.738	684.254	715.770	747.286	778.802
2	Angkatan Kerja Pengangguran	81.699	71.588	61.477	51.366	41.255
3	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	734.437	755.842	777.247	798.652	820.057
5	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah)	128.933	139.256	149.579	159.902	170.225
6	Bukan Angkatan Kerja (Mengurus RT)	133.275	105.435	77.595	49.755	21.915
7	Bukan Angkatan Kerja Lainnya	229.626	216.927	204.228	191529	178830
8	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	491.834	461.618	431.402	401.186	370.970
9	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	1.226.271	1.217.460	1.208.649	1.199.838	1.191.027
10	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	55,18	55,74	56,3	56,86	57,42
11	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	14,56	13,84	13,12	12,4	11,68
	II.1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
	Persentase koperasi aktif					
1	Jumlah koperasi aktif	813	832	871	906	940
2	Jumlah koperasi	1.621	1.679	1.737	1.795	1.853
3	Persentase koperasi aktif	50,18	49,61	50,19	50,45	50,75
	II.1.15.1 Jumlah UKM non BPR/LKM/UKM					
1	Jumlah seluruh UKM	6.982	7.545	8.109	8.672	9.236
2	Jumlah BPR	121	139	157	175	193
3	Jumlah LKM	21	19	17	15	13
4	Jumlah UKM non BPR/LKM	6,3005	6,7975	7,2945	7,7915	8,2885

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.15.2 Jumlah BPR/LKM					
1	Jumlah BPR	121	139	157	175	193
2	Jumlah LKM	23	21	19	17	15
3	Jumlah BPR dan LKM	144	160	176	192	208
	II.1.16 Penanaman Modal					
	II.1.16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
1	PMDN	10	12	15	16	17
2	PMA	33	38	43	48	53
3	Total	43	50	58	64	70
	II.1.16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)					
	Jumlah Persetujuan Proyek	19	16	13	10	7
	Nilai Persetujuan Investasi	877.033.717	682.269.595	1.151.199.751	877.033.718	682.269.596
	Jumlah Realisasi Proyek	28.397.192,13	28.397.192,13	28.397.192,13	28.397.192,13	28.397.192,13
	II.1.17. Kebudayaan					
	II.1.17.1 Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya					
1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	37	37	37	37	37
2	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	27	31	35	39	43
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	62	62	62	62	62
4	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	343	398	452	507	561
	II.1.17.2 Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					
		70	70	70	75	85
	II.1.18. Kepemudaan dan Olahraga					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.1.18.1 Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga					
1	Jumlah Organisasi Pemuda	79	85,5	92	98,5	105
2	Jumlah Organisasi Olahraga	43,6	44,2	44,8	45,4	46
	II.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
	II.1.19.1 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk					
1	Jumlah Pol PP	130	142	155	167	180
2	Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1 : 25.385	1 : 23.852	1 : 22.431	1 : 21.373	1 : 20.360
	II.1.19.2 Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk					
1	Jumlah Linmas	5.520	8.280	8.280	8.280	8.280
2	Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	1 : 598	1 : 409	1 : 419	1 : 431	1 : 442
	II.1.19.3 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan					
1	Jumlah Pos Siskamling	4048	8096	8096	8096	8096
2	Jumlah Desa dan kelurahan	267	268	268	269	269
3	Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan	1:15	1:30	1:30	1:30	1:30
	II.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.					
	II.1.20.1 Persentase Penduduk Miskin					
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	652.031 *	668.716 *	677.255 - 694.400 *	690.189 - 716.566 *	703.342 - 739.410 *
2	Total Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Angka Kemiskinan (%)	19,76*	19,74*	19,48 - 19,97*	19,34 - 20,08*	19,19 - 20,18*
4	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)	80,24 *	80,26 *	80,52 - 80,02*	80,66 - 79,92*	80,81 - 79,82 *
	II.1.20.2 Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA					
1	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	87	88	90	91	93
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	87	88	90	91	93
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100	100	100	100	100
2	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	11	10	10	9	8
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	11	10	10	9	8
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100	100	100	100	100
	II.1.20.3 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik					
1	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik					
2	Total Jumlah Kantor Desa	267	268	268	269	269
	II.1.20.4 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					
1.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat :	v	v	v	v	v
	II.1.21. Ketahanan Pangan					
	II.1.21.1 Ketersediaan Pangan Utama					
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	498,0367	519,7314	541,4261	563,1208	584,8155
2	Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *
3	Jumlah Komsumsi Pangan Utama	206,6611	170,8597	135,0583	99,2569	63,4555

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	67,13	68,94	70,75	72,55	74,35
II.1.21.2 Regulasi Ketahanan Pangan						
1	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :	√	√	√	√	√
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :	√	√	√	√	√
II.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Kelompok Binaan LPM						
1	Jumlah LPM	276	289	304	319	335
2	Jumlah Kelompok Binaan LPM	276	289	304	319	335
3	Rata-rata kelompok Binaan LPM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II.1.22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK						
1	Jumlah PKK	104.055	100.624	97.192	93.760	90.329
2	Jumlah PKK Aktif	104.055	100.624	97.192	93.760	90.329
3	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kelompok Binaan PKK	5.455	5.736	6.018	6.299	6.581
5	Rata-rata kelompok Binaan PKK	0,05	0,08	0,06	0,07	0,07
II.1.22.2 Jumlah LSM yang aktif						
7	Jumlah LSM terdaftar	171	194	217	240	264
8	Jumlah LSM tidak aktif	17	20	23	26	29
9	Jumlah LSM aktif (1-2)	154	174	194	214	235
II.1.23. Statistik						
Ketersediaan Dokumen Statistik						
1	PDRB					
-	Kabupaten	√	√	√	√	√
-	Kecamatan	√	√	√	√	√
2	IPM	√	√	√	√	√



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Suseda	√	√	√	√	√
4	KBDA	√	√	√	√	√
5	Indeks Gini Ratio	x	x	x	x	X
6	Input Output	x	x	x	x	X
7	IKM	√	√	√	√	√
8	IHK	√	√	√	√	√
II.1.24. Kearsipan						
II.1.24.1 Pengelolaan Arsip secara Baku						
1	Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	79	79	79	79	79
2	Jumlah SKPD	79	79	79	79	79
3	Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	100	100	100	100	100
II.1.24.2 Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu						
1	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Diperlukan	79	79	79	79	79
2	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	60	65	70	75	79
3	Persentase SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	75,95	82,28	88,61	94,94	100
II.1.25. Komunikasi dan Informatika						
Jumlah Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informasi						
	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	46.1	47.9	49.7	51.5	53.3
	Jumlah sistem informasi yang ada	50	50	52	55	60
	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi penda	9	11	12	15	20

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	7	8	9	10	12
	Jumlah radio komunikasi yang aktif	7	7	8	9	11
	II.1.25.1 Jumlah surat kabar nasional/lokal					
1	Surat kabar terbitan nasional	1	1	1	1	1
2	Surat kabar terbitan lokal	4	4	4	4	4
	Total Surat kabar (1+2)	5	5	5	5	5
	II.1.25.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal					
1	Jumlah penyiaran radio lokal	10	7	4	1	-2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	6	6	6	6	6
4	Jumlah penyiaran TV nasional	10	10	10	10	10
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	27	24	21	18	15
	II.1.26. Perpustakaan					
	II.1.26.1 Jumlah perpustakaan					
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	138	140	141	142	144
3	Total Perpustakaan (1+2)	139	139	140	140	143
	II.1.26.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	13.076	14.673	16.269	17.865	19.462
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	29.460	29.500	29.600	29.650	29.750

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	42.536	44.173	45.869	47.515	49.212
	II.1.26.3 Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan					
1	Jumlah Judul Buku	1,704	1683	1661.4	1,640	1,619
2	Total Jumlah Buku	5,564	5,860	6,155	6,451	6,746
3	Rata-rata Jumlah Judul Buku	4	5	5	6	6
	Jumlah Kendaraan Perpustakaan	3	4	5	5	6
	Jumlah mobil unit perpustakaan keliling	1	2	2	3	3
	Jumlah mobil layanan internet	1	2	2	3	3
	Jumlah motor pintar	3	4	5	5	6
	II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan					
	II.2.1. Pertanian					
	II.2.1.1 Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan					
1	Luas Tanam (ha) Padi	12756,6	12756,6	12756,6	12756,6	12756,6
2	Luas Panen (ha) Padi	73.903	75.730	77.204	78.245	79.614
3	Produksi (ton) Padi	451.127	470.750	491.447	513.287	536.347
4	Produktivitas (ton/ha) Padi	61.04	62.16	63.66	65.60	67.37
5	Luas Tanam (ha) Palawija	23.533	23.731	24.256	24.476	24.703
6	Luas Panen (ha) Palawija	17.142	17.428	17.541	17.602	17.690
7	Produksi (ton) Palawija	136.233	138.630	140.848	142.010	143.867
8	Produktivitas (ton/ha) Palawija	79.47	79.54	80.30	80.68	81.33
9	Luas Tanam (ha) Sayuran	10392,2	10392,2	10392,2	10392,2	10392,2
10	Luas Panen (ha) Sayuran	37.432	38.305	39.178	40.052	40.925
11	Produksi (ton) Sayuran	850.927	870.927	875.927	890.927	895.927
12	Produktivitas (ton/ha) Sayuran	21,789	21.981	22.073	22.565	23.157
13	Luas Tanam (pohon) Buah-buahan	483.932	544.707	605.482	666.257	727.032

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



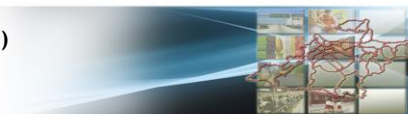
No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Luas Panen (pohon yg menghasilkan) Buah- buahan	6729,8	6729,8	6729,8	6729,8	6729,8
15	Produksi (kw) Buah- buahan	351.761	373.091	394.421	415.751	437.081
16	Produktivitas (kw/ha) Buah- buahan	1	2	2	2	2
17	Luas Tanam (M ²) Tanaman Hias	3058	3058	3058	3058	3058
18	Luas Panen (M ²) Tanaman Hias	237.320	274.775	312.231	349.686	387.142
19	Produksi (tangkai) Tanaman Hias	823.965	939.796	1.055.627	1.171.459	1.287.290
20	Produktivitas (tangkai/M ²)	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
21	Produksi (ton) perkebunan	9.362.90	8.582.63	8.815.11	9.065.74	9.330.82
22	Produktivitas (ton/ha) perkebunan	0.922	1.003	1.01	1.20	1.28
II.2.1.2 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB						
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian :					
	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian ADH Berlaku	3.993.539,25*	4.573.849,43*	5.075.522,038– 5.339.605,607*	5.840.402,916 – 6.293.537,063*	6.524.852,939– 7.212.049,888*
	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian ADH Konstan	1.371.807,74	1.426.244,51	1.502.003,50	1.338.248,73	1.371.807,75
2	Jumlah PDRB :					
	Jumlah PDRB : ADH Berlaku (juta rupiah)	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44 – 64.565.968,64*	69.445.932,42 – 72.090.917,10*	76.224.917,51 – 80.133.887,64*
	Jumlah PDRB : ADH Konstan	18.683.930,05	19.674.494,55	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
3	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB :					
	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB : ADH Berlaku	7,78*	7,92*	8,06 - 8,27*	8,41 - 8,73*	8,56 - 9,00*
	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB : ADH Konstan	7.057	6.967	6.877	6.786	6.696
II.2.1.3 Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu						
1	Produksi Daging(ton)	5602	5602	5602	5602	5602
2	Konsumsi Daging (kg/kapita/th)	11.16	13.34	14.85	16.55	18.21

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Produksi Telur(ton)	1679,4	1679,4	1679,4	1679,4	1679,4
4	Konsumsi Telur(kg/kapita/th)	3.12	3.63	4.23	4.89	5.54
5	Produksi Susu (ton)	555,2	555,2	555,2	555,2	555,2
6	Konsumsi Susu(kg/kapita/th)	8.53	9.05	9.1	9.14	9.19
II.2.2. Kehutanan						
II.2.2.1 Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi						
1	Luas hutan rakyat dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	4415.4	4415.4	4415.4	4415.4	4415.4
2	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Rusak	7.41	7.99	8.69	9.52	10.52
II.2.2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB						
1	Kontribusi Sektor Kehutanan :					
2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADH Berlaku	11.329,45	12.573,70	13.865,100	10.221,72	11.329,46
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADH Konstan	6.599,08	6.813,64	7.072,12	6.196,42	6.599,09
4	Jumlah PDRB :					
5	Jumlah PDRB ADH Berlaku	33.319.630,77	38.289.735,13	40.941.217,99	29.431.046,08	33.319.630,78
6	Jumlah PDRB ADH Konstan	18.683.930,05	19.673.732,62	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
8	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB ADH Berlaku	0,034	0,033	0,034	0,035	0,034
9	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB ADH Konstan	0,035	0,035	0,034	0,035	0,035
II.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral						
II.2.3.1 Persentase Pertambangan Tanpa Izin						
1	Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (Ha)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	Total luas penambangan tanpa izin (Ha)	21,35	20,95	20,55	20,15	19,75

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	1,874	1,909	1,946	1,985	2,025
II.2.3.2 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB						
1	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian : ADH Berlaku	631.369,32*	693.007,49*	730.472,15 - 768.335,03*	736.769,33 - 872.300,10*	730.472,15 - 977.633,43*
2	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian : ADH Konstan	208.909,20	255.888,74	269.782,13	234.570,66	208.909,21
3	Jumlah PDRB : ADH Berlaku (jutaan rupiah)	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44 – 64.565.968,64*	69.445.932,42 – 72.090.917,10*	76.224.917,51 – 80.133.887,64*
4	Jumlah PDRB : ADH Konstan	18.683.930,05	19.674.494,55	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
5	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB ADH Berlaku	1,23*	1,20*	1,16 – 1,19*	1,17 – 1,21*	1,16 – 1,22*
6	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB ADH Konstan	1.313	1.327	1.340	1.354	1.367
II.2.4. Pariwisata						
II.2.4.1 Kunjungan wisata						
1	Jumlah obyek wisata	53	53	53	53	53
2	Jumlah kunjungan wisata	6.076.492	7.344.142	8.078.550	8.888.412	9.775.053
3	Rata-rata kunjungan per obyek wisata	150,5071	170,8137	191,1203	211,4269	231,7335
II.2.5. Kelautan dan Perikanan						
II.2.5.1 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan						
1	Target Produksi Ikan (ton)	8.777	9.391	10.049	10.752	11.505
2	Realisasi Produksi Ikan (ton)	-	-	-	-	-
3	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	21.1	22.58	24.14	25.8	27.6
4	Persentase Konsumsi Ikan terhadap Realisasi Produksi	-	-	-	-	-
II.2.5.2 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB						
1	Kontribusi Sektor Perikanan :					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kontribusi Sektor Perikanan : ADH Berlaku	73.860,49	80.476,18	85.747,05	64.870,71	73.860,50
3	Kontribusi Sektor Perikanan : ADH Konstan	33.834,20	34.838,22	36.003,63	32.459,60	33.834,21
4	Jumlah PDRB :					
5	Jumlah PDRB : ADH Berlaku (jutaan rupiah)	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44 – 64.565.968,64*	69.445.932,42 – 72.090.917,10*	76.224.917,51 – 80.133.887,64*
6	Jumlah PDRB : ADH Konstan	18.683.930,05	19.673.732,62	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
8	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thd PDRB ADH Berlaku	0,222	0,210	0,209	0,220	0,222
9	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thd PDRB ADH Konstan	0,181	0,177	0,175	0,184	0,181
II.2.6. Perdagangan						
II.2.6.1 Ekspor Bersih Perdagangan						
1	Nilai Ekspor	678,528,610,68	507,346,266,82	406,188,974,52	619,866,460,88	678,528,610,69
2	Nilai Impor	0	0	0	0	0
3	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	678,528,610,68	507,346,266,82	406,188,974,52	619,866,460,88	678,528,610,69
II.2.6.2 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB						
1	Kontribusi Sektor Perdagangan :					
2	Kontribusi Sektor Perdagangan : ADH Berlaku	5.112.043,55	6.005.197,93	6.780.385,11	4.432.799,60	5.112.043,56
3	Kontribusi Sektor Perdagangan : ADH Konstan	2.819.715,78	2.994.763,37	3.211.263,100	2.625.092,41	2.819.715,79
4	Jumlah PDRB :					
5	Jumlah PDRB : ADH Berlaku (jutaan rupiah)	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44 – 64.565.968,64*	69.445.932,42 – 72.090.917,10*	76.224.917,51 – 80.133.887,64*
6	Jumlah PDRB : ADH Konstan	18.683.930,05	19.673.732,62	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
8	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan thd PDRB ADH Berlaku	17.356	17.840	18.324	18.808	19.292
9	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan thd PDRB ADH Konstan	16.054	16.295	16.536	16.778	17.019
II.2.7. Perindustrian						

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	II.2.7.1 Pertumbuhan Industri					
1	Jumlah Industri :	100	122	144	166	188
2	Jumlah Industri : Besar	25	27	29	31	33
3	Jumlah Industri : Menengah	30	35	40	45	50
4	Jumlah Industri : Kecil	45	60	75	90	105
5	Pertumbuhan Industri					
6	Pertumbuhan Industri Besar	53	62	71	80	89
7	Pertumbuhan Industri Menengah	44	47	50	53	56
8	Pertumbuhan Industri Kecil	102	142	182	222	262
	II.2.7.2 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB					
1	Kontribusi Sektor Perindustrian : ADH Berlaku	20.154.147,71	23.275.745,50	24.565.562,90	17.876.119,13	20.154.147,72
2	Kontribusi Sektor Perindustrian : ADH Konstan	11.478.643,52	12.110.396,66	12.519.327,65	10.838.753,41	11.478.643,53
3	Jumlah PDRB : ADH Berlaku	33.319.630,77	38.289.735,13	40.941.217,99	29.431.046,08	33.319.630,78
4	Jumlah PDRB : ADH Konstan	18.683.930,05	19.673.732,62	20.529.643,25	17.640.170,11	18.683.930,06
5	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian thd PDRB ADH Berlaku	59.836	59.645	59.454	59.263	59.072
6	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian thd PDRB ADH Konstan	60.911	60.785	60.658	60.532	60.405
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	III.1 Kemampuan Ekonomi Daerah					
	III.1.4. Produktivitas total daerah					
1	PDRB	51.330.838,66*	57.750.624,07*	62.971.737,44 - 64.565.968,64*	69.445.932,42 - 72.090.917,10*	76.224.917,51 - 80.133.887,64*
2	Pertanian	3.993.539,25*	4.573.849,43*	5.075.522,04 - 5.339.605,61*	5.840.402,92 - 6.293.537,06*	6.524.852,94 - 7.212.049,89*
3	Pertambangan & Pengalihan	631.369,32*	693.007,49*	730.472,15 - 768.335,03*	736.769,33 - 872.300,10*	730.472,15 - 977.633,43*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Industri Pengolahan	30.156.867,71*	33.934.266,70*	36.196.154,68 - 38.048.725,32*	35.238.984,27 - 41.884.822,84*	34.590.375,38 - 41.625.295,53*
5	Listrik,Gas & Air bersih	811.027,25*	877.809,49*	968.489,53 - 1.064.222,36*	1.009.272,84 - 1.108.302,58*	987.645,56 - 1.089.411,06*
6	Konstruksi	862.358,09*	964.435,42 *	1.064.222,36 - 1.116.991,26*	1.108.302,58 - 1.319.263,78*	1.089.411,06 - 1.319.263,78*
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	8.993.162,93*	10.158.334,77*	11.158.591,87 11.731.636,50*	11.681.257,30 13.884.710,63*	11.952.035,77 12.880.910,74*
8	Pengangkutan & Komunikasi	2.109.697,47 *	2.292.699,78 *	2.380.331,68 - 2.505.159,58*	2.197.713,64 - 2.609.691,20*	2.134.741,90 - 2.573.645,74*
9	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	990.685,19*	949.620,52*	1.120.896,93 - 1.181.557,23*	1.039.033,67 - 1.232.754,68*	1.001.250,63 - 1.203.918,32*
10	Jasa-jasa	2.787.264,54*	3.187.834,45*	3.532.714,47 - 3.712.543,20*	3.646.063,60 - 4.332.664,12*	3.683.846,64 - 4.433.591,40*
	III.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	III.2.1 Aksesibilitas daerah					
	III.2.1.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
	III.2.1.2 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan					
1	Panjang Jalan (km)	1.155,35	1.155,35	1.155,35	1.155,35	1.155,35
2	Jumlah Kendaraan : Roda 4	28.496	28.525	28.553	28.582	28.610
3	Jumlah Kendaraan : Roda 2	281.760	315.145	348.530	381.915	415.300
4	Total Jumlah Kendaraan :	310.256	343.670	377.083	410.497	443.910
5	Rasio Jumlah Kendaraan	1 : 269	1 : 298	1 : 326	1 : 355	1 : 384
	III.2.4 Ketersediaan air bersih					
1	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	893.615	942.244	990.873	1.039.502	1.088.131
2	Jumlah Rumah Tangga	957.188	999.082	1.040.977	1.082.871	1.124.766
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	93,36	94,31	95,19	95,99	96,74
	III.2.5 Fasilitas listrik dan telepon					
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik					
1	RT dengan daya 450 watt	215.294	215,656	216,017	216,379	216,740

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	RT dengan daya 900 watt	126.750	127,016	127,281	127,547	127,812
3	RT dengan daya 1.300 watt	88.994	89,180	89,367	90,553	99,739
4	RT dengan daya 2.200 watt	59.164	69.753	70.406	75.477	76.169
5	RT dengan daya > 2.200 watt	48.542	48,644	48,746	48,847	48,949
6	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	538.686	550.249	551.817	558,803	569.409
III.2.6 Ketersediaan restoran						
Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas)						
1	Jenis Usaha Restoran	67,2	77,4	87,6	97,8	108
2	Jenis Usaha Rumah Makan	538,2	564,9	591,6	618,3	645
III.2.7. Ketersediaan penginapan						
1	Hotel Bintang 5					
2	Hotel Bintang 4	1	1	1	1	1
3	Hotel Bintang 3	3	3	3	3	3
6	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	27	27	27	27	27
7	Total Jumlah penginapan/Hotel	31	31	31	31	31
III.3 Iklim Berinvestasi						
III.3.1. Angka kriminalitas						
1	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	0
2	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	0	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	0	0
4	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	0	0	0
5	Jumlah kasus Pencurian	0	0	0	0	0
6	Jumlah kasus Penipuan	0	0	0	0	0
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	0	0	0	0	0
9	Jumlah Penduduk	3.299.988 *	3.387.034 *	3.476.781 *	3.569.327 *	3.664.771 *

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0	0	0	0	0
	III.3.2. Jumlah Demonstrasi					
1	Bidang Politik	14,14285714	16,78571429	19,42857143	22,07142857	24,71428571
2	Ekonomi	18,7	21,9	25,1	28,3	31,5
3	Kasus pemogokan kerja	21,4	21,3	21,2	21,1	21
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	54,6	60,7	66,8	72,9	79
	III.3.3. Kemudahan perijinan					
1	Lama mengurus (hari) SIUP	5	5	5	5	5
2	Jumlah persyaratan (dokumen) SIUP	6	6	6	6	6
3	Biaya resmi (rata-rata maks Rph) SIUP	30	30	30	30	30
4	Lama mengurus (hari) SITU	5	5	5	5	5
5	Jumlah persyaratan (dokumen) SITU	6	6	6	6	6
6	Biaya resmi (rata-rata maks Rph) SITU	400	400	400	400	400
7	Lama mengurus (hari) TDP	5	5	5	5	5
8	Jumlah persyaratan (dokumen) TDP	5	5	5	5	5
9	Biaya resmi (rata-rata maks Rph) TDP	20	20	20	20	20
10	Lama mengurus (hari) IUI	14	14	14	14	14
11	Jumlah persyaratan (dokumen) IUI	10	10	10	10	10
12	IUI	75	75	75	75	75
13	Lama mengurus (hari) TDI	14	14	14	14	14
14	Jumlah persyaratan (dokumen) TDI	5	5	5	5	5
15	TDI	30	30	30	30	30
16	Lama mengurus (hari) IMB	60	60	60	60	60
17	Jumlah persyaratan (dokumen) IMB	12	12	12	12	12
18	IMB	8	8	8	8	8
19	Lama mengurus (hari) HO	5	5	5	5	5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Jumlah persyaratan (dokumen) HO	11	11	11	11	11
21	HO	300	300	300	300	300
22	Lama mengurus (hari) IPT	30	30	30	30	30
23	Jumlah persyaratan (dokumen) IPT	4	4	4	4	4
24	IPT	150	150	150	150	150
25	Lama mengurus (hari) Reklame	14	14	14	14	14
26	Jumlah persyaratan (dokumen) Lama mengurus (hari) Reklame	6	6	6	6	6
27	Lama mengurus (hari) Reklame	-	-	-	-	-
28	Lama mengurus (hari) IPLC	14	14	14	14	14
29	Jumlah persyaratan (dokumen) Lama mengurus (hari) IPLC	13	13	13	13	13
30	Lama mengurus (hari) IPLC	6.400.002	6.400.003	6.400.004	6.400.005	6.400.006
31	Lama mengurus (hari) Jasa Konstruksi	5	5	5	5	5
32	Jumlah persyaratan (dokumen) Jasa Konstruksi	11	11	11	11	11
33	Lama mengurus (hari) Jasa Konstruksi	100	100	100	100	100
III.3.4. Pengean Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)						
1	Jumlah Pajak Daerah	54.391.453.80	51.654.333.70	47.951.110.528,01	57.334.770.199,53	54.391.453.802,22
2	Pajak Hotel	2.013.001.546	521.130.207	481.269.352,01	1.630.296.849,98	2.013.001.546,92
3	Pajak Restoran	2.807.585.410	2.022.405.964	2.486.992.882,01	2.935.352.381,32	2.807.585.410,92
4	Pajak Hiburan	1.454.863.194	1.822.568.665	2.146.174.144,01	1.321.309.950,02	1.454.863.194,92
5	Pajak Reklame	1.745.262.742	1.818.712.879	1.599.992.419,01	1.948.182.431,27	1.745.262.742,52
6	Pajak Penerangan Jalan	41.035.282.80	41.035.282.80	41.035.282.809,04	41.035.282.809,05	41.035.282.809,06
7	Pajak Pengam-bilan dan Pengolahan Bahan Galian C	64.681.980,02	64.681.980,03	64.681.980,04	64.681.980,05	64.681.980,06
8	Pajak Parkir	32.774.500,01	76.224.400,01	136.716.942,01	34.097.900,02	32.774.500,02

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Retribusi	44.750.349,78	6.067.479.245	40.870.885.107,01	40.907.499.229,34	44.750.349.784,99
10	Jumlah Retribusi Jasa Umum	33.210.256,24	29.122.980,49	32.380.883.654,01	30.401.111.973,02	33.210.256.240,02
11	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1.609.269.878	1.840.236.134	324.125.975,02	1.609.269.878,02	1.840.236.134,02
12	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	9.215.967.569	5.335.228.868	6.649.765.319,01	8.235.804.618,34	9.215.967.569,99
	III.3.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha					
1	Jumlah Perda terkait perijinan	2	3	4	5	6
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	4	4	4	4	4
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	1	1	1	1	1
	III.3.6. Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)					
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	97	97	97	97	97
2	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	104	104	104	104	104
3	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	75	75	75	75	75
4	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	276	276	276	276	276
5	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	27,17	27,17	27,17	27,17	27,17
	III.4 Sumber Daya Manusia					
	III.4.2 Tingkat ketergantungan					
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	943,9882	954,9969	966,0056	977,0143	988,023
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	143,2136	144,6127	146,0118	147,4109	148,81
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	1.052.064	1.072.288	1.042.684	1.008.067	1.052.065
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.986.021	2.054.722	2.130.178	1.937.111	1.986.022
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	52,97	52,19	48,96	52,04	52,97

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	III.5. Peningkatan Aksesibilitas melalui Pendidikan formal dan non formal					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD	104,35	104,37	104,42	104,49	104,58
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP	91,57	91,58	91,59	91,60	91,61
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP	81,42	81,71	82,08	82,53	83,06
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/PAKET C/PPS setara SMA	54,15	54,36	54,69	55,13	55,68
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SMLB/PAKET C/PPS setara SMA	41,60	41,75	41,94	42,25	42,65
7	Angka Melek Huruf (AMH)	98,53% *	98,65% *	97,53% – 100%*	97,03% – 100%*	96,53 – 100%*
8	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,15 *	9,21 *	9,15 – 9,38 *	9,14 – 9,49*	9,13 – 9,60 *
9	Indeks Pendidikan	86,01 *	86,23 *	85,35 - 87,51 *	85,00 - 88,25 *	84,64 - 88,98 *
10	IPM	75,03 *	75,66 *	75,33 - 77,24 *	75,45 - 78,34 *	75,57 - 79,44 *
11	APK SMA/SMLB/SMK	50,13	50,33	50,63	51,04	51,55
12	Persentase SMA/SMLB Yang Memiliki Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi	5	10	15	20	25
13	Persentase SMA/SMLB Yang Memiliki Laboratorium Multimedia	73,6644	75,1088	76,5532	77,9976	79,442
14	Persentase SMA SBI/RSBI	12,2808	12,5216	12,7624	13,0032	13,244
15	Persentase KAB/KOTA Memiliki SMA Berbasis Keunggulan Lokal	1	1	1	1	1
16	Persentase SMA/SMLB Berwawasan PUP3B	1	2	3	4	5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Persentase SMA/SMLB Menerapkan KTSP Dengan Baik	1	2	3	4	5
18	Jumlah SMA/SMLB Bersertifikat ISO9001:2008	1	1	2	2	2
19	Persentase SMK Memiliki Perpustakaan Yang Berbasis Multimedia	15	17	20	25	35
20	Persentase SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana Prasarana SMK	70,7166	72,1032	73,4898	74,8764	76,263
21	Persentase SMK Memiliki Laboratorium Sains Yang Relevan Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK	2	2	5	5	10
22	Persentase SMK Memiliki Laboratorium Bahasa Sesuai Standard Sarana Prasarana	25	25	30	35	40
23	Persentase SMK Memiliki Laboratorium Multimedia Sesuai Standard Sarana Prasarana SMK	15,33	17,33	19,33	21,33	23,33
24	Persentase Memiliki SMK RSBI/SBI	1	1	2	2	2
25	Persentase E KAB/KOTA Dengan SMK Berbasis Keunggulan Lokal	0	1	1	3	3
26	Persentase SMK Berwawasan PUP3B	0	1	1	2	2
27	Persentase SMK Menerapkan KTSP Dengan Baik	40	50	70	80	90
28	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2000/9001:2008	1	1	2	2	2
29	Persentase SMK Berkemitraan Dengan Industri Kreatif	25	30	35	40	50
30	APK PAUD Non Formal	13,46	13,56	13,66	13,76	13,86
31	Persentase Satuan PAUD Nonformal Berakreditasi	0	2,5	5	7,5	10
32	APK Paket A	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	APK Paket B	3,75	3,75	3,73	3,74	3,75
34	APK Paket C	1,99	2,05	2,11	2,17	2,22
35	Persentase Buta Aksara > 15 Tahun	1,1	1,1	1,05	1,05	1
36	Persentase Kecamatan Yang Telah Memiliki PKBM	52	54	58	60	65
37	Persentase Kecamatan Yang Telah TBM	15	15	20	20	25
38	Persentase Remaja 16-35 Tak Sekolah Mengikuti PKH	0	0	0	0	0
39	Persentase KAB/KOTA Yang Telah Menyediakan Layanan Fasilitas Homeschooling	0%	0%	0%	2%	2%
III.6. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
1	Persentase GURU TK/TKLB Berkualifikasi Akademik S1/D.4	14,45	17,34	20,81	24,97	29,96
2	Persentase Pendidik PAUD NON Formal Berkualifikasi Akademik S.1/D.4	8,50	10,20	12,23	14,68	17,62
3	Persentase Guru TK/TKLB Formal Bersertifikat Pendidik	6,83	8,20	9,84	11,80	14,17
4	Persentase Guru TK/TKLB Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
5	Persentase Tutor PAUD Nonformal Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
6	Persentase TK/TKLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	2	5	8	10	12
7	Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi Akademik S-1/D.4	41,065	41,08	41,095	41,11	41,125
8	Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat Pendidik	30,712	48,034	65,356	82,678	100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Persentase Guru SD/SDLB Mengikuti PPB	5	10	15	20	25
10	Persentase SD/SDLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	10	15	20	25	30
11	Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/D4	60,33	66,46	70,45	74,67	80,65
12	Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat Pendidik	79,104	84,328	89,552	94,776	100
13	Persentase Guru SMP/SMPLB Mengikuti PPB	10	15	20	25	30
14	Persentase Tutor Paket B Mengikuti PPB	10	15	20	25	30
15	Persentase SMP/SMPLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	25	35	50	75	85
16	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi Akademik S.1/D-4	86,16	89,62	93,08	96,54	100
17	Persentase Guru SMA/SMLB Bersertifikat Pendidik	39,648	54,736	69,824	84,912	100
18	Persentase Guru SMA/SMLB Yang Mengikuti PPB	10	15	20	25	30
19	Persentase Tutor Paket C Yang Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
20	Persentase SMA/SMLB Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	12,5	20	40	65	85
21	Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S.1/D4	77,824	83,368	88,912	94,456	100
22	Persentase Guru SMK Bersertifikat Pendidik	28,368	46,276	64,184	82,092	100
23	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	40	50	60	70	80



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Persentase Guru SMK Yang Mengikuti PPB	5	10	15	20	25
25	Persentase Tutor Paket C Kejuruan Yang Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
26	Persentase SMK Yang Telah Dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	10	10	15	25	35
27	Persentase Tutor Pendidikan Keaksaraan Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
28	Persentase Pendidik Kursus Mengikuti Diklat Kompetensi	2	4	6	8	10
29	Persentase Pamong Belajar Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
30	Persentase Penilik Yang Mengikuti PPB	0	5	10	15	20
31	Persentase Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal Yang Mengikuti Diklat Kompetensi	0	2	6	8	10
32	Persentase Pendidikan Yang Memperoleh Kesejahteraan	0	0	0	0	0
	III.7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
1	Skor Lakip Disdikbud	76	77	77	78	79
2	Laporan Keuangan Unit- Unit Utama Terintegrasi/Terkonsolidasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan	100	100	100	100	100
3	Persentase Satuan Kerja Yang Tingkat Kehadiran Pagarainya Tidak Kurang Dari 99% (Basis:Oh)	95	98	99	100	100
4	Persentase Bidang Uptd Dan Satuan Pendidikan Terkoneksi Secara Daring (Online)	25	35	50	50	75
5	Tingkat Penerapan E- Administrasi Di Lingkungan Disdikbud (Persen)	25	25	50	50	75

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja Diterapkan Di Lingkungan Disdikbud	0	0	100	100	100
7	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disahkan Oleh Bupati Pada Bulan Pertama Setiap Tahunnya (Tanpa Blokir)	25	50	50	55	65
8	Persentase Pengolahan Database, Informasi, Dan Evaluasi Pelaporan Yang Berbasis TIK	60	64	68	75	80
9	Persentase Evaluasi 8 Standar Pendidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan	20	25	30	35	40
1.	Bencana Banjir					
	frekuensi kejadian (kali)	23	25	30	34	32
	korban manusia	1	2	1	2	1
	a. Meninggal dunia	1	1	1	1	1
	b. Hilang	4	7	6	8	3
	c. Luka-luka					
	Korban Penderita :					
	a. KK	8.500	7.400	6.900	6.200	5.800
	b. Jiwa	27.567	26.435	23.762	22.345	21.735
	kerusakan rumah :					
	a. Hancur	200	192	185	178	174
	b. Rusak berat	345	313	297	266	247
	rusak ringan	835	795	768	746	728
	Terancam	427	384	233	217	205
	terendam	8.735	7.944	6.867	6.209	6.105
	taksiran kerugian (Rp)	4.680.000.000	3.490.840.000	3.208.168.000	3.107.236.000	2.875.600.000
2	Bencana tanah longsor					
	frekuensi kejadian (kali)	34	32	29	27	25
	korban manusia :					
	a. Meninggal dunia	38	36	34	32	30
	b. Luka-luka					
	korban penderita:					
	a. KK	70	68	54	51	44

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Jiwa	154	148	143	142	139
	Kerusakan Rumah:					
	a. Hancur	32	30	27	26	22
	b. Rusak berat	18	15	13	11	9
	c. Rusak ringan	385	382	377	356	342
	Taksiran Kerugian (Rp)	771.450.000	768.800.000	754.650.000	746.725.000	740.338.000
3	Bencana angin topan/putingbeliung					
	frekuensi kejadian (kali)	23	18	17	15	14
	korban manusia:					
	a. Meninggal dunia	1	1	1	1	1
	b. Luka-luka	1	1	1	1	1
	korban penderita:					
	a. KK	786	767	734	711	701
	b. Jiwa	322	316	302	294	291
	Kerusakan Rumah:					
	a. Hancur	28	24	18	15	12
	b. Rusak berat	70	67	63	58	53
	c. Rusak ringan	1.542	1.536	1.494	1.344	1.247
	Taksiran Kerugian (Rp)	7.022.000.000	7.005.300.000			
4	Bencana Kebakaran					
	frekuensi kejadian (kali)	56	52	50	49	47
	korban manusia:					
	a. Meninggal dunia	1	1	-	-	1
	b. Luka-luka	-	1	1	1	1
	korban penderita:					
	a. KK	276	274	271	269	266
	b. Jiwa	1.338	1.332	1.245	1.225	1.220
	Kerusakan Rumah:					
	a. Hancur	205	201	197	193	185
	b. Rusak berat	38	34	33	29	28

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Proyeksi Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Rusak ringan	10	8	7	6	4
	Taksiran Kerugian (Rp)	5.402.840.00	5.308.000.00	5.209.000.00	5.115.600.00	4.508.000.00

Keterangan (*) : Angka proyeksi yang bersumber dari BPS Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 kecuali Nilai IPM Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebesar 76,42 dan Tahun 2015 sebesar 77,23 adalah angka proyeksi IPM Kabupaten Bandung yang merupakan hasil rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

DTT : Data Tidak Tersedia



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 50 bahwa penyusunan RPJMD memuat:

- a. Visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;
- d. Kebijakan umum;
- e. Program SKPD;
- f. Program lintas SKPD;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015.

RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJM Daerah 2010-2015 dengan sebaik-baiknya;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Bupati Bandung, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Badan-Badan, Kantor-Kantor, dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Bandung, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015 dengan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2005-2015, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Bandung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung, dan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bandung;
3. Bupati Bandung berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015 ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010-2015 yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program-program kepala daerah.

RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Bandung dan setiap tahunnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung. Disamping itu, mengingat masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bandung Periode 2010-2015 akan berakhir pada tahun 2015 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada dipandang perlu untuk mencantumkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah ini berakhir. Selanjutnya, terkait dengan itu semua perlu untuk menetapkan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Program Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Bandung untuk masa bakti 2010-2015, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pembangunan, baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya selama 1 (satu) tahun. Beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, mengurangi jumlah pengangguran dan pembangunan infrastruktur utama sudah barang tentu membutuhkan dukungan dana besar sehingga harus dilakukan secara bertahap, selain itu pendekatan pembangunan yang berubah dari top-down ke pendekatan partisipatif, berdampak pada proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Sehubungan dengan hal tersebut program-program yang termasuk dalam program transisi memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan dampak yang ditimbulkan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program antar SKPD diperlukan koordinasi agar terciptanya efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan, maupun waktu pelaksanaan program-program tersebut. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program, selain itu kaidah pelaksanaan dapat diterapkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Bandung dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Bandung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung agar melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.
5. Penjabaran lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten.
7. RKPD Kabupaten Bandung harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Bandung merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015



9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
10. Agar RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 ini, disamping harus pula ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Instansi terkait maupun masyarakat luas.
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD.
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Bandung 2010 – 2015 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bandung, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Kabupaten Bandung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

- **Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD**

Dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan renstra SKPD artinya bahwa aktualisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, perlu dijabarkan oleh SKPD dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Untuk menciptakan kinerja yang baik efektif dan efisien maka semua SKPD diharapkan kerjasama dengan satuan kerja lain dengan mengacu pada RPJMD secara berkelanjutan dengan tujuan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan.

- **Pedoman dalam Penyusunan RKPD**

Seperti telah dijelaskan bahwa RPJMD juga sebagai pedoman dalam penyusunan program-program dan kegiatan tahunan, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang diusulkan di RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER